EKONOMI PEMBANGUNAN

Teori dan Kajian Empirik Pembangunan Pedesaan

Edisi Revisi

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP

UR Press

EKONOMI PEMBANGUNAN

Teori dan Kajian Empirik Pembangunan Pedesaan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta

PASAL 2

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 72

(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah), atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

EKONOMI PEMBANGUNAN

Teori dan Kajian Empirik Pembangunan Pedesaan

Edisi Revisi

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP
email: almasdi.syahza@lecturer.unri.ac.id
website: http://almasdi.staff.unri.ac.id

Penerbit
UR PRESS Pekanbaru
2017

Judul : EKONOMI PEMBANGUNAN
Teori Dan Kajian Empirik Pembangunan Pedesaan
(Edisi Revisi)
Penulis : Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP

Sampul dan Tata Letak : Almasdi Syahza
Diterbitkan Oleh **UR PRESS,** Desember 2017

Alamat Penerbit
Badan Penerbit Universitas Riau
UR PRESS Jl. Pattimura No. 9, Gobah Pekanbaru 28132,
Riau, Indonesia
Telp. (0761) 22961, Fax. (0761) 857397
e-mail: unri_press@yahoo.co.id
ANGGOTA IKAPI

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

EKONOMI PEMBANGUNAN, Teori dan Kajian Empirik Pembangunan Pedesaan
Terdaftar sebagai Hak Cipta pada Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia
Republik Indonesia dalam Daftar Umum Ciptaan
Nomor C00201502609 tanggal 31 Agustus 2015
Nomor Pencatatan 075640

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Cetakan Pertama, Januari 2012
Edisi Revisi, November 2015
Edisi Revisi, Desember 2017

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Syahza, Almasdi
Ekonomi Pembangunan, Teori dan Kajian Empirik Pembangunan Desa/ Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP—Pekanbaru : UR Press, 2017
367 + xii hlm. ; 15,5 x 23 cm

ISBN 978-979-792-299-3

I. Judul

PRAKATA

Keberhasilan proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi ditentukan oleh empat komponen utama, yaitu kemampuan dosen menyampaikan materi ajar kepada mahasiswa, bahan ajar yang mudah diperoleh bagi mahasiswa sebagai bahan literatur dan pengkayaan materi ajar, kemampuan mahasiswa untuk menyerap materi yang disampaikan, dan cara belajar peserta didik itu sendiri. Dari sisi bahan ajar sering mahasiswa mengalami kesulitan karena banyaknya buku yang harus dimiliki sementara biaya kuliah yang terbatas. Untuk itu buku Ekonomi Pembangunan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk memperoleh bahan bacaan, karena buku ini diramu dari berbagai literatur yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan dan kajian empirik dari hasil penelitian yang penulis lakukan.

Buku ini memberikan pengetahuan tentang matakuliah Ekonomi Pembangunan yang terbagi menjadi tiga komponen, yaitu bagian pertama tentang **Teori dan Pandangan Tentang Ekonomi Pembangunan**, bagian kedua tentang **Model dan Strategi Pembangunan Ekonomi di Pedesaan**, dan bagian ketiga berkaitan dengan lembaga ekonomi di pedesaan yaitu **Koperasi Perannya dalam Memacu Pembangunan Ekonomi Pedesaan**. Pembahasan ditekankan kepada teori ekonomi pembangunan, gagasan-gagasan dari hasil penelitian dan prinsip dasar pembangunan ekonomi. Penyajian dibagian kedua dan ketiga merupakan kajian empirik dari hasil penelitian yang penulis lakukan, terutama dari penelitian yang dibiayai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DP2M) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional melalui penelitian Fundamental tahun 2007, tahun 2008, dan penelitian Strategis Nasional tahun 2009. Penelitian Hibah Kompetensi tahun 2009, 2010, dan tahun 2011. Penelitian MP3EI tahun 2012-2014 terkait Kelapa Sawit dan MP3EI tahun 2015-2017 tentang karet alam.

Dibandingkan dengan buku sebelumnya, pada buku edisi revisi ini ada perbaikan tata letak setiap materi serta perubahan dan tambahan materi dari hasil penelitian. Perubahan yang dilakukan adalah materi yang sudah

kadaluarsa tidak dipakai lagi dan diganti dengan materi hasil penelitian. Edisi revisi memuat teori pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah pedesaan. Pada buku edisi revisi ini terdapat pembaharuan materi terutama yang terkait dengan pembangunan ekonomi pedesaan yang disajikan pada Bab XI dan XII. Tambahan materi tersebut merupakan hasil penelitian MP3EI tahun 2015-2017 yang didanai oleh Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kemenristekdikti yaitu Model Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Karet Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan.

Untuk penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menggugah keingintahuan anda lebih jauh tentang ekonomi pembangunan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, November 2017
Wassalam,

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA v
DAFTAR ISI vii

BAGIAN PERTAMA:
TEORI DAN PANDANGAN TENTANG EKONOMI PEMBANGUNAN

BAB I PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 3
A Pembangunan Ekonomi 3
1. Munculnya Kebutuhan Akan Pembangunan Ekonomi 4
2. Manfaat Pembangunan Ekonomi 5
3. Hambatan dalam Pembangunan Ekonomi 6

B Pertumbuhan Ekonomi 10
1. Faktor Pertumbuhan Ekonomi 11
2. Ciri-ciri Pertumbuhan Ekonomi 15

C Perhatian Negara Maju pada Negara Berkembang .. 17

BAB II NEGARA BERKEMBANG DAN UPAYA PEMBANGUNANNYA 21
A Ciri Negara Berkembang 21
1. Standar Hidup yang Rendah 21
2. Produktivitas yang rendah 24
3. Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Beban Ketergantungan yang Tnggi 24
4. Tingkat Pengangguran yang Tinggi 25
5. Ketergantungan Sektor Pertanian dan ekspor Barang Primer 25
6. Ketergantungan yang Kuat dalam Hubungan Internasional 26

B Tindakan Dalam Negeri dan Upaya-Upaya Internasional 27
1. Tindakan Dalam Negeri 27
2. Upaya-Upaya Internasional 27

C Kebijaksanaan Pembangunan Ekonomi 40
1. Perencanaan Ekonomi 40
2. Bentuk-bentuk Perencanaan 41
3. Syarat Perencanaan yang Berhasil 42
4. Syarat-syarat Umum Pembangunan Ekonomi ... 43
5. Kesulitan dalam Pembangunan Ekonomi 45
6. Pola Pengembangan Sektor Industri 46

BAB III KEPENDUDUKAN DAN ANGKATAN KERJA 49
A Masalah Kependudukan Dalam Pembangunan Ekonomi 49
1. Masalah Kependudukan 49
2. Kebijaksanaan Kependudukan 50
3. Pertambahan Penduduk dan Lingkungan Pemungkinan 51
4. Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Pendidikan 52
5. Masalah Kemiskinan 53
6. Sebab-sebab Kemiskinan 54

B Kegiatan Ekonomi dan Angkatan Kerja 56
1. Hubungan Kegiatan Ekonomi dengan Pengangguran 57
2. Pengertian Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, dan Bukan Angkatan Kerja 58
3. Jenis-jenis/Jabatan Pekerjaan 59
4. Status/Kedudukan dalam Pekerjaan dari Angkatan Kerja 59
5. Masalah Ketidakseimbangan antara Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja 60

C Urbanisasi, Kemiskinan, dan Kesejahteraan 62
1. Pandangan Umum 62
2. Urbanisasi 67
3. Dampak Urbanisasi 68
4. Kemiskinan 68
5. Kemiskinan dan Dampaknya 70
6. Penanggulangan Kemiskinan 71
7. Kesejahteraan 73

D Investasi Sumberdaya Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi 79
1. Pendidikan dan Pelatihan 81
2. Kesehatan Rakyat dan Pembangunan 82

BAB IV TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI
DAN PENGEMBANGAN DI WILAYAH PEDESAAN 85
A Teori Pembangunan Ekonomi 85
1. Teori Pembangunan Klasik 85
2. Teori Schumpeter 90
3. Teori Keynes 91
4. Tahap-tahap Pertumbuhan Ekonomi Rostov 92
B. Teori Basis Ekonomi (*Economic Base*) 94
C. Pembangunan Sektor Industri di Pedesaan 101
D. Distorsi Harga dan Pemasaran 105
E. Disparitas Pembangunan Wilayah 108
F. Daya Dukung Wilayah Terhadap Industri 114
G. Eskpor dan Pertumbuhan Ekonomi 118
H. Pembangunan Pertanian Berbasis Agribisnis 125
I. Indikator Pembangunan Pedesaan 130
1. Tekanan Penduduk 130
2. Kegiatan Dasar Wilayah 131
3. Tingkat Pendapatan Petani 132
4. Perkembangan Penduduk dan Kesejahteraan ... 132
5. Pusat Pertumbuhan Wilayah 133
6. Kerapatan Tenaga Kerja 133
7. Indek Daya Dukung Lahan 134
8. Peta keadaan Sosial Ekonomi 134

Bagian Kedua:
MODEL DAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DI PEDESAAN

BAB V PEMBANGUNAN PEDESAAN 139
A. Sumberdaya dalam Pengembangan Agribisnis 139
1. Sumberdaya lahan 140
2. Sumberdaya manusia 141
3. Pemanfaatan Teknologi 142
4. Investasi 143
B. Peluang Pengembangan Agribisnis di Pedesaan 143
C. Sasaran Pengembangan Agribisnis 147
1 Menarik pembangunan 147
2 Nilai Tambah 148
3 Lapangan Pekerjaan 148
4 Devisa Negara 149
5 Pembagian Pendapatan 149
6 Pengetahuan 150

BAB VI KENDALA PEMBANGUNAN PEDESAAN 157
A. Kendala dalam Pembangunan Ekonomi di Pedesaan 158
B. Kendala Dalam Pemasaran Produk Pertanian 161
C. Program Pembangunan Daerah Tertinggal 168
1 Peningkatan Ekonomi Rakyat (Mengentaskan Kemiskinan) 168
2 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pengetasan Kebodohan) 169
3 Pembangunan Infrastruktur 169
D. Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal 169

BAB VII MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN BERBASIS AGRIBISNIS 171
A. Potensi Ekonomi Pedesaan 171
B. Kesenjangan Ekonomi Masyarakat 173
C. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 174
D. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis 176

BAB VIII MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI PEDESAAN MELALUI PEMBANGUNAN AGROESTATE KELAPA SAWIT 181
A. Potensi Perkebunan Kelapa Sawit 181
B. Tujuan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit 183
C. Model Pembangunan Agroestate Kelapa Sawit 187
D. Mekanisme Kerja Agroestat Kelapa Sawit 194

BAB IX KELAPA SAWIT, DAMPAKNYA TERHADAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN 197
A. Perkembangan Luas Areal Komoditi Utama Perkebunan 197
B. *Multiplier Effect* Ekonomi 200
C. Indek Kesejahteraan Masyarakat 204
D. Indek Kesenjangan Ekonomi 208
E. Indek Tekanan Penduduk 212
F. Indek Daya Dukung Lahan 217
G. Indek Distribusi Pendapatan 219

BAB X KELAPA SAWIT, DAMPAKNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI PEDESAAN 225
A. Perkembangan Ekonomi Wilayah 225
B. Perkembangan Penduduk, Tenaga Kerja, dan Kerapatan Tenaga Kerja 226
C. Perkembangan Harga dan Kesejahteraan Masyarakat 230
D. Daya Dukung Wilayah (DDW) Terhadap Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit 234

BAB XI MODEL PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI KARET ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN 239
A. Potensi Pengembangan Karet Alam 239
B. Model Pengembangan Karet Alam di Pedesaan 246
C. Aspek-aspek Institusional dalam Pembentukan Perusahaan Patungan 265

Bagian Ketiga:
KOPERASI PERANNYA DALAM MEMACU PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN

BAB XII PEMBERDAYAAN KOPERASI BERBASIS AGRIBISNIS DI PEDESAAN 239
A. Pengertian Koperasi 239
B. Peran Koperasi di Pedesaan 271
C. Permasalahan Koperasi di Pedesaan 274
D. Kebijakan Pembangunan Koperasi dan UKM 275
E. Koperasi dan Usaha Kecil 276
F. Pengembangan Koperasi Melalui Kemitraan 279
G. Strategi Pengembangan Koperasi 281
H. Paradigma Baru Pemasaran Produk UKM melalui Koperasi 282

BAB XIII PENGEMBANGAN KOPERASI BERBASIS AGRIBISNIS DI PEDESAAN 285
A. Profil Koperasi di Pedesaan 285
B. Potensi Pengembangan Koperasi 288
C. Strategi Pengembangan UMKM Melalui Koperasi .. 292

DAFTAR PUSTAKA 295

BAGIAN PERTAMA

TEORI DAN PANDANGAN TENTANG EKONOMI PEMBANGUNAN

BAB I
PEMBANGUNAN EKONOMI, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi pembangunan (*economics of development*) adalah ilmu ekonomi yang mempelajari transformasi struktural dan kelembagaan dari seluruh masyarakat yang pada hakekatnya akan menghasilkan kemajuan ekonomi secara efisien bagi sebagian besar penduduk. Ilmu ekonomi pembangunan mengacu pada masalah-masalah perkembangan ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Hasil ekonomi pembangunan diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.

Adanya pembangunan ekonomi (*economic of development*) akan terjadi pertumbuhan ekonomi yaitu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan menyangkut perkembangan berdimensi tunggal diukur dengan meningkatnya produksi dan pendapatan. Setiap pembangunan ekonomi diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dengan peningkatan pendapatan nasional atau pendapatan per kapita masyarakat.

A. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi (*economic of development*) adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riel per kapita. Tujuan pembangunan ekonomi di samping untuk menaikkan pendapatan nasional riel juga untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan mempunyai arti yang sangat luas, dimana tujuannya adalah peningkatan produksi. Jadi pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan. Pembangunan ekonomi juga merupakan pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Pembangunan ekonomi merupakan peningkatan produksi secara kuantitatif yang prosesnya mencakup perubahan pada komposisi produksi,

perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumberdaya produksi (*productive resources*) diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola pembagian (distribusi) kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan ekonomi merupakan proses jangka panjang yang mencakup sekurang-kurangnya dua generasi dalam kehidupan bangsa (50-60 tahun). Selama proses pembangunan, tata ekonominya mencapai suatu tahap kegiatan yang di dalamnya perkembangan ekonomi dapat berlangsung secara kontiniu ke arah kemajuan berdasarkan kekuatan-kekuatan yang sudah terpupuk dalam masyarakatnya sendiri (Sumitro Djojohadikusumo, 1994).

1. Munculnya Kebutuhan Akan Pembangunan Ekonomi

Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* telah meletakkan dasar-dasar tentang ekonomi, dan kemudian dilanjutkan oleh para pengikutnya mengenai perkembangan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Ada negara-negara yang pesat perkembangan ekonominya, tetapi ada juga yang mengalami kemacetan dalam pembangunan ekonomi.

Jika ditinjau dari sudut ekonomi atau tingkat kehidupan ekonomi, maka secara garis besarnya negara-negara di dunia ini dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu: *Pertama*, negara-negara yang telah maju perekonomiannya, disebut negara-negara yang maju (*developed countries*). *Kedua*, negara-negara yang belum maju atau terbelakang perekonomiaannya, disebut: negara-negara terbelakang atau negara dunia ketiga (*underdeveloped countries*) atau negara-negara yang sedang berkembang (*developing countries*).

Ragnar Nurse, membedakan tiga golongan atau tingkatan ekonomi negara yaitu: 1) Negara yang berpendapatan tinggi (*high income countries*) seperti; Amerika, Canada, Australia, Jepang; 2) Negara yang berpendapatan menengah (*middle income countries*); dan 3) Negara-negara yang berpendapatan rendah (*low income countries*).

Setiap negara di dunia ini selalu mengadakan pembangunan baik pembangunan yang direncanakan maupun pembangunan yang terbentuk karena kebutuhan pasar. Jadi pembangunan ekonomi dilakukan oleh semua negara, baik negara yang relatif sudah maju maupun negara yang belum maju. Ada beberapa alasan mengapa muncul pembangunan ekonomi, antara lain: 1) Adanya kenyataan bahwa suatu negara pendapatan nasionalnya hanya mampu mengimbangi pertambahan penduduk. Dari sisi lain ada negara yang mempunyai sisa pendapatan untuk investasi guna menaikkan standar kehidupan masyarakatnya; 2) Adanya perbedaan tingkat hidup antara negara yang satu dengan negara yang lain, perbedaan ini semakin besar; 3) Adanya kehendak dari negara untuk berkembang yang selama ini disadari tingkat hidupnya yang rendah. Mereka menghendaki tingkat hidup yang lebih tingi melalui peningktan kemakmuran ekonomi atau kesejahteraan.

Untuk membedakan apakah suatu negara itu negara maju atau negara yang sedang berkembang dapat dilakukan melalui tiga pendekatan (*approach*) yaitu: 1) dengan ukuran deskriptif dan kuantitatif; 2) dengan ukuran struktur perekonomian; dan 3) dengan ukuran distribusi pendapatan pemilik faktor produksi.

2. Manfaat Pembangunan Ekonomi

Perkembangan ekonomi dapat menggambarkan faktor-faktor penentu yang mendasari pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu negara akan bertambah. Di samping itu pembangunan ekonomi juga meningkatkan kesejahteraan penduduk karena pembangunan ekonomi tersebut akan menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih baik.

Pembangunan ekonomi juga memberikan suatu kebebasan untuk memelih kesenangan yang lebih luas. Dalam perekonomian primitif orang dipaksa bekerja keras hanya untuk memperoleh makannan guna mempertahankan hidup supaya tidak mati. Dengan pembangunan ekonomi akan tersedia barang lebih banyak untuk pemuas kebutuhan dan juga lebih banyak kesempatan untuk hidup bersenang-senang, juga akan tersedia jasa guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Pembangunan ekonomi juga memungkinkan orang untuk memikirkan lebih banyak sifat-sifat perikemanusiaan, karena semakin banyak sarana yang tersedia. Orang dapat menolong orang lain jika kebutuhan untuk dirinya sendiri sudah terpenuhi. Adanya pembangunan ekonomi akan mengurangi jurang perbedaan antara negara-negara yang sedang berkembang dengan negara yang sudah berkembang. Mengurangi ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lain, baik ketimpangan pembangunan maupun ketimpangan pendapatan per kapita masyarakat.

Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Oleh karena itu pembangunan ekonomi perlu dilaksanakan.

3. Hambatan dalam Pembangunan Ekonomi

Pelaksanakan pembangungan ekonomi tidak berjalan semudah yang dibicarakan dalam ilmu ekonomi pembangunan, sebab dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi ada hambatan-hambatan yang ditemui oleh suatu negara yang sedang membangun. Hambatan itu antara lain adalah:

a. Lingkaran Kemiskinan

Negara terbelakang pada umumnya terjerat ke dalam apa yang disebut lingkaran setan kemiskinan. Nurkse menjelaskan, lingkaran setan kemiskinan mengandung arti deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain beraksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam keadaan melarat.

Lingkaran setan kemiskinan pada pokoknya berasal dari fakta bahwa produktivitas total di negara terbelakang sangat rendah sebagai akibat dari kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna dan keterbelakangan perekonomian. Lingkaran kemiskinan tersebut kalau dilihat dari sudut permintaan dapat dijelaskan sebagai berikut: rendahnya tingkat pendapatan nyata menyebabkan tingkat permintaan rendah, sehingga pada gilirannya tingkat investasi rendah. Tingkat investasi rendah kembali menyebabkan modal kurang dan produktivitas rendah. Sebagai ilustrasi, pada Gambar 1.1 disajikan model terbentuknya lingkaran kemiskinan di dalam masyarakat.

Lingkaran kemiskinan itu juga dapat tercipta karena pendapatan rendah yang menyebabkan rendahnya tabungan masyarakat, akibatnya investasi rendah dan negara kekurangan modal. Karena kekurangan modal akan berdampak kepada rendahnya produktivitas.

Dari sisi lain lingkaran setan kemiskinan menyangkut dengan keterbelakangan manusia dan sumberdaya alam. Pengembangan sumberdaya alam tergantung kepada produktivitas sumberdaya manusianya. Jika penduduk terbelakang dan buta huruf, langka akan keterampilan teknik, pengetahuan dan aktivitas kewiraswastaan, maka sumber-sumber alam akan tetap terbengkalai, kurang atau bahkan salah guna. Pada pihak lain keterbelakangan sumber alam akan menyebabkan keterbelakangan manusia.

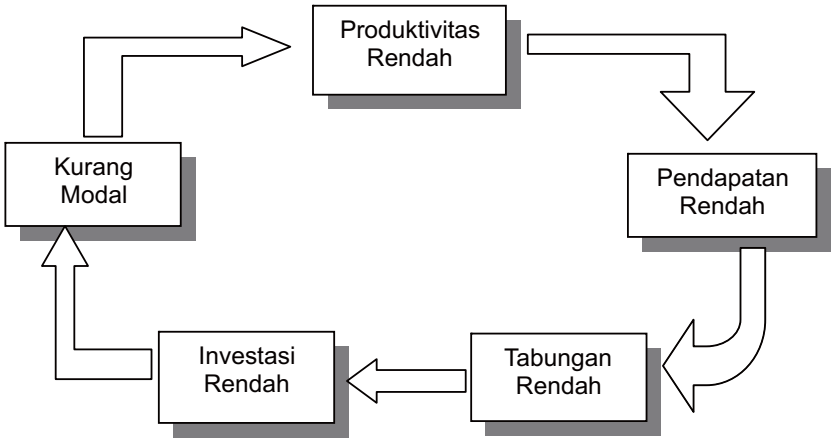

Gambar 1.1. Lingkaran Kemiskinan

Suatu masyarakat dikatakan miskin disebabkan mereka tidak dapat memperoleh pendapatan sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Justru yang terjadi pendapatan mereka berimbang dengan kebutuhan hidup minimum yang seharusnya terpenuhi. Penyebab kekurangan pendapatan ini adalah mereka tidak dapat memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga. Sehingga secara agrigat pendapatan masyarakat (negara) juga rendah. Barang kali mereka

dapat memproduksi barang dan jasa, namun keterbatasan pasar akan membatasi untuk berproduksi. Keterbatasan pasar di suatu daerah juga disebabkan karena ketidaksempurnaan pasar itu sendiri. Sebagai gambaran kaitan ketidaksempurnaan pasar dengan kemiskinan dan keterbelakangan disajikan pada Gambar 1.2.

Kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi merupakan dua istilah yang sinonim. Suatu negara dikatakan miskin karena ia terbelakang. Keterbelakangan ini disebabkan lingkungan masyarakatnya miskin, terbatasnya infrastruktur terutama akses transportasi bagai mereka yang terbelakang, terlambatnya informasi bagi masyrakat tersebut, dan rendahnya tingkat pendidikan. Mereka tetap terbelakang karena tidak mempunyai sumber yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan.

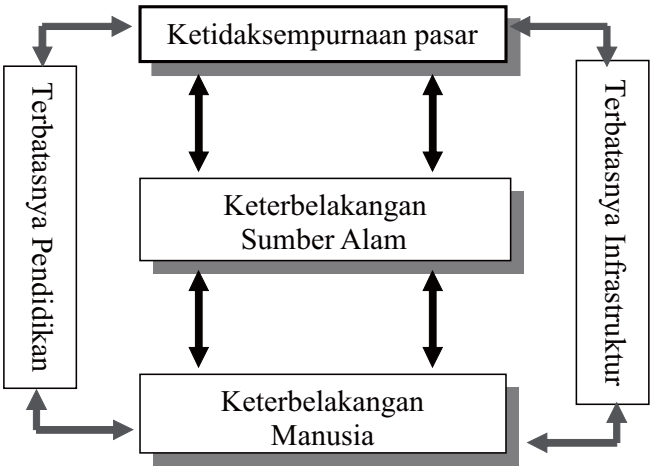

Gambar 1.2. Ketidaksempurnaan Pasar dan Keterbelakangan

b. Tingkat Pembentukan Modal yang Rendah

Hambatan yang paling berat berkaitan dengan perkembangan ekonomi adalah kelangkaan modal. Hal ini bersumber dari lingkaran setan kemiskinan. Masyarakat suatu negara terbelakang tercekam oleh kemiskinan. Kebanyakan dari mereka buta huruf dan tidak terdidik, serta menggunakan peralatan modal yang sederhana dan usang. Lapangan usaha hanya bidang

pertanian pangan dan tidak banyak bersentuhan dengan perekonomian pasar. Dengan demikian produktivitas marginal mereka rendah. Produktivitas rendah menyebabkan pendapatan nyata mereka rendah, lalu tabunganpun rendah, tingkat investasi rendah, sehingga pembentukan modal juga rendah.

Kebanyakan tabungan di dalam masyarakat terbelakang dilakukan oleh kelompok berpendapatan tinggi. Tetapi tabungan itu tidak mengalir ke saluran-saluran produktif, melainkan dihamburkan untuk pembangunan rumah mewah, emas, permata, menimbun barang dagangan, menyimpan mata uang asing dengan maksud untuk dibungakan atau spekulasi. Jadi pengeluaran mereka mengandung nilai-nilai komsumeris dan tahan lama. Akibatnya mereka lebih suka kepada barang impor ketimbang barang yang sama tapi buatan dalam negeri. Itu semua lantaran gensi.

c. Hambatan Sosio-budaya

Pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan kekayaan manusia, sikap sosial kondisi politik, dan latar belakang sejarah. Modal merupakan syarat yang perlu tetapi bukan syarat mutlak bagi kemajuan ekonomi suatu negara.

Sikap sosial terhadap pendidikan adalah halangan lain terhadap kemajuan ekonomi. Pendidikan akademis murni yang menyiapkan orang untuk menjabat posisi di pemerintahan atau pekerjaan lainnya disukai ketimbang pendidikan profesional. Akibatnya ada rasa anti terhadap pendidikan praktis. Hal ini yang menyebabkan terbelakangnya teknologi. Cara pandang dan kebiasaan hidup menyebabkan sosio budaya masyarakat tidak berubah. Nilkai-nilai yang melekat pada budaya timur mengarah kepada stabilitas dan harmoni hidup, sedangkan ciri-ciri budaya barat mendorong kemajuan dan pengembaraan.

d. Dampak Kekuatan Internasional

Menurut para ahli ekonomi; Myint, Singer, Lewis dan Myrdal mengungkapkan, di dalam perekonomian dunia telah bermain kekuatan-kekuatan yang tidak seimbang, akibat keuntungan perdagangan lebih banyak mengalir ke negara-negara maju.

Setelah negara terbelakang membuka diri terhadap pasar dunia, ekspor meningkat secara luar biasa. Tetapi peningkatan ini tidak memberikan

sumbangan besar kepada perkembangan perekonomian lainnya, karena sektor-sektor tersebut berkembang dengan mengabaikan sama sekali sektor perekonomian yang lain.

Hambatan lain yang menghadang negara terbelakang adalah pengaruh investasi asing. Investasi asing terutama ditujukan terhadap produksi barang ekspor. Ini cenderung merugikan perekonomian. Tingkat produktivitas, pendapatan dan tingkat kehidupan di sektor primer tidak mengalami kenaikan. Bahkan di sektor barang eksporpun tingkat upah nyata tenaga tidak terdidik tetap rendah. Pihak asing menguras habis sejumlah besar uang dalam bentuk laba dan upah manajemen. Arus keluar laba dalam bentuk penarikan langsung, bukan dalam bentuk penarikan impor, justru membatasi kemampuan perekonomian tersebut untuk menabung secara riil.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek yakni: proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita, oleh sebab itu ada dua sisi yang harus diperhatikan yakni; sisi output total (GNP) dan sisi jumlah penduduk.

Simon Kuznets mendifinisikan pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukannya (Jhingan, 2007). Definisi ini memiliki tiga komponen yaitu; *Pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; *Kedua,* teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; dan *ketiga,* penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaan di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat.

Teori pertumbuhan ekonomi sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan ouput per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan.

1. Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2000), komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat adalah; *Pertama,* akumulasi modal. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan dengan tujuan memberbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Demikian pula investasi dalam sumberdaya manusia dapat meningkatkan kualitasnya dan dengan demikian akan menghasilkan efek yang sama terhadap produksi, bahkan akan lebih besar lagi bertambahnya jumlah manusia. Pendidikan formal dan informal akan dapat ditingkatkan lebih efektif lagi supaya dapat menghasilkan tenaga terdidik yang dapat mempebesar produktivitas.

Kedua, pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja merupakan faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertambahan penduduk yang lebih besar akan menambah luasnya pasar domestik.

Ketiga, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi bagi para ahli ekonomi merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih penting. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan nilai tambah yang tinggi. Kemajuan teknologi berarti ditemukannya cara berproduksi atau perbaikan produksi.

Menurut Kuznets ada enam karakteristik proses pertumbuhan di hampir semua negara berkembang yaitu:

- Segi ekonomi agregat
  1. Laju pertumbuhan output per kapita dan pertambahan penduduk yang tinggi.
  2. Tingkat kenaikan produktivitas faktor yang tinggi, khususnya produktivitas tenaga kerja.
- Segi Transformasi struktural
  1. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi. Sebagian komponen utama perubahan struktural tersebut mencakup

pergeseran yang berangsur-angsur dari aktivitas pertanian ke non-pertanian.

2. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi struktural ekonomi. Perubahan dalam masyarakat harus dibarengi dengan transformasi sikap, kelembagaan, dan ideologi.

- Segi tingkat penyebaran pertumbuhan internasional
  1. Kecenderungan negara maju perekonomiannya untuk menjangkau bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan bahan baku.
  2. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

Kalau disimak pendapat Jhingan (2007), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yakni faktor ekonomi dan faktor non ekonomi.

a. Faktor Ekonomi

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh atau bangunnya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut, antara lain:

1) Sumberdaya Alam.

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah. Di negara berkembang sumber alam sering terbengkalai dan tidak diolah sama sekali karena kekurangan teknologi dan sumberdaya manusianya. Jadi dalam pertumbuhan ekonomi kekayaan alam yang melimpah saja belumlah cukup. Yang terpenting pemanfaatannya secara tepat dengan teknologi yang baik sehingga efisien dan dapat digunakan dalam angka waktu yang lama.

Kenyataan yang ditemui terutama di negara berkembang, penguasaan sumberdaya alam lebih dominan dikelola oleh pemodal asing, hal tersebut lebih disebabkan karena negara sebagai pemilik sumberdaya alam kekurangan modal dan teknologi. Penguasaan pengelolaan sumberdaya alam oleh bangsa lain, kadang kala menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Konflik ini lebih banyak dipicu karena kecemburuan sosial ekonomi antara masyarakat tempatan dengan pemilik modal.

2) Akumulasi Modal

Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, ini disebut akumulasi atau pembentukan modal. Menurut Nurkse, pembentukan modal adalah masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak, tetapi mengarah sebagian daripadanya untuk pembuatan barang modal, alat-alat dan perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatannya. Untuk itu prosesnya mencakup tiga tahap, yakni: (a) keberadaan tabungan nyata dan kenaikannya; (b) keberadaan lembaga keuangan dan kredit untuk menggalakkan tabungan dan menyalurkannya ke jalur yang dikehendaki; dan (c) mempergunakan tabungan untuk investasi barang modal.

3) Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitas. Dalam pertumbuhan ekonomi modern, para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan mengambil resiko diantara ketidakpastian. Wiraswasta bukanlah manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain.

Menurut Myrdal, negara-negara Asia kekurangan wiraswastawan bukan karena mereka kekurangan modal atau bahan mentah tetapi mereka kekurangan orang yang memiliki pandangan benar terhadap kewiraswastaan. Orang Jepang memiliki hal seperti itu, maka tidak heran kalau negara Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan termasuk ke dalam kelompok negara maju.

4) Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil

dari teknik penelitian baru. Perubahan teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lainnya.

Kuznets mencatat lima pola penting pertumbuhan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi modern, yakni: penemuan ilmiah (penyempurnaan teknologi); invensi; inovasi; penyempurnaan, dan penyebarluasan penemuan. Kuznets mengatakan inovasi terdiri dari dua macam: *Pertama,* penurunan biaya yang tidak menghasilkan perubahan apapun terhadap kualitas produk: *Kedua,* pembaharuan yang dapat menciptakan produk baru dan dapat menciptakan permintaan baru atas produk tersebut.

5) Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas. Keduanya mengarah kepada ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Adam Smith menekankan arti penting pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi. Pembagian kerja memperbaiki kemampuan produksi buruh. Ia mampu menemukan mesin baru dan berbagai proses baru dalam berproduksi. Jika skala produksi luas, spesialisasi dan pembagian kerja akan luas pula. Alhasil jika produksi naik laju pertumbuhan ekonomi akan cepat. Ekonomi ekternal akan semakin banyak tersedia dan manfaat dari investasi minimal akan berkembang. Yang dimaksud dengan investasi minimal adalah sumber tenaga, angkutan, dan sebagainya yang penggunaannya mengarah kepada kemajuan industri.

b. Faktor Non-ekonomi

Faktor non ekonomi bersama-sama dengan faktor ekonomi saling mempengaruhi kemajuan pekonomian. Menurut Nurkse, pembangunan ekonomi berkaitan dengan peranan manusia, pandangan masyarakat, kondisi politik , dan latar belakang historis.

***1)* Faktor Sosial**

Faktor sosial dan budaya ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di negara terbelakang ada tradisi sosial dan budaya yang tidak menunjang perkembangan ekonomi. Kalau perkembangan ekonomi diinginkan berjalan mulus, pandangan, nilai dan lembaga sosial harus diubah. Perubahan hanya

bisa terjadi melalui penyebaran pendidikan dan ilmu pengetahuan. Orang harus menyadari cita-cita dan tujuan di depan hidup mereka dan harus memiliki kemampuan untuk meraihnya.

2) **Faktor Manusia**

Sumberdaya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada sumberdaya manusia saja, tetapi lebih menekankan kepada efisiensi mereka. Peningkatan GNP per kapita yang begitu hebat berkaitan erat dengan pengembangan sumberdaya manusia yang dapat menciptakan efisiensi dan peningkatan produktivitas di kalangan buruh. Pembentukan modal manusia yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seluruh penduduk negara yang bersangkutan.

Penggunaan secara tepat sumberdaya manusia untuk pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan cara berikut: *Pertama*, harus ada pengendalian atas perkembangan penduduk. Sumberdaya manusia dapat dimanfaatkan dengan baik apabila jumlah penduduk dapat dikendalikan dan diturunkan; *Kedua*, harus ada perubahan dalam pandangan tenaga buruh. Perilaku sosial dari tenaga buruh merupakan hal yang penting di dalam proses pembangunan ekonomi. Hanya tenaga buruh yang terlatih dan terdidik dengan efisien tinggi yang akan membawa masyarakat kepada pembangunan ekonomi.

3) **Faktor Politik dan Administratif**

Faktor politik dan administratif juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Struktur politik dan administratif yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang. Administrasi yang kuat, efisien, dan tidak korup, diperlukan dalam pembangunan ekonomi.

2. Ciri-ciri Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi modern merupakan pertanda pentingny di dalam kehidupan perekonomian. Prof. Simon Kuznets menunjukkan enam ciri pertumbuhan ekonomi modern, yaitu: laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita, peningktan produktivitas, laju perubahan struktural yang tinggi, urbanisasi, ekspansi negara maju, arus barang modal dan orang antar bangsa.

a. Laju Pertumbuhan Penduduk dan Produk Per Kapita

Penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi, satu sisi dapat menciptakan permintaan akan barang produksi dan dari sisi lain sebagai penawaran tenaga kerja dalam proses produksi. Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi jika penduduk itu mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil yang dihasilkannya. Apabila laju pertumbuhan penduduk dapat diimbangi oleh laju pertumbuhan produktivitas, maka pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Tetapi apabila pertambahan penduduk lebih cepat dari pertambahan penghasilan akan menyebabkan mundurnya perekonomian, inilah yang diragukan dalam teori Malthus. Seharusnya perkembangan penduduk dapat ditekan, dan kualitas sumberdaya manusianya ditingkatkan melalui pendidikan dan keterampilan.

b. Peningktan Produktivitas

Pertumbuhan ekonomi modern terlihat dari semakin meningkatnya laju produk per kapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit input. Kenaikan efisiensi berarti penggunaan output yang semakin besar setiap unit input. Peningkatan produktivitas mustahil ditingkatkan tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas manusianya sebagai pengelola.

c. Laju Perubahan Struktural yang Tinggi

Kecepatan perubahan struktural di dalam pertumbuhan ekonomi modern dapat juga tergambar dalam perubahan distribusi tenaga kerja diantara tiga sektor utama yakni: pertanian, industri, dan jasa. Perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif, dan peralihan dari perusahaan perorangan menjadi perusahaan berbadan hukum.

d. Urbanisasi

Pertumbuhan ekonomi modern ditandai dengan semakin banyaknya perpindahan penduduk dari desa ke daerah perkotaan. Urbanisasi pada

umumnya merupakan produk industrialisasi. Urbanisasi mempengaruhi tingkat dan struktur pengeluaran konsumen negara melalui tiga cara: *Pertama,* urbanisasi menghasilkan pembagian kerja dan spesialisasi yang semakin meningkat dan perubahan aktivitas dari berbagai usaha keluarga dari tidak berorientasi pasar menjadi usaha yang berorientasi pasar; *Kedua,* urbanisasi membuat biaya pemenuhan sejumlah kebutuhan menjadi semakin mahal. Hal ini disebabkan karena kehidupan kota semakin mahal dibandingkan dengan kehidupan desa. Seperti, perumahan, kebersihan, air, angkutan dalam dan antar kota, dan fasilitas lainnya*; Ketiga, demonstration effect*, kehidupan kota mendorong kelompok urbanis meniru pola konsumsi orang kota sehingga menyebabkan meningkatnya pengeluaran konsumen.

e. Ekspansi Negara Maju

Ekspansi negara-negara maju yang bermula dari bangsa Eropa tidak lain adalah akibat revolusi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi. Hal ini melahirkan dominasi politik terhadap negara jajahan. Dari sisi lain negara sasaran mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap negara lain. Ketergantungan ini lebih banyak disebabkan kurangnya sumberdaya manusia berkualitas sehingga penguasaan teknologi sangat rendah.

f. Arus Barang, Modal, dan Orang antar Bangsa

Arus barang, modal dan orang antar bangsa dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan karena tidak ada suatu negarapun yang bisa memenuhi kebutuhan bangsanya dengan semata-mata hasil produksinya. Arus barang komoditi merupakan unsur yang dominan untuk ekspansi keluar dari negara maju. Begitu juga dengan kekurangan modal suatu negara akan menyebabkan mengalirnya investasi dari negara kaya ke negara berkembang dan diikuti dengan aliran migrasi sebagai pembawa ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Perhatian Negara Maju pada Negara Berkembang

Negara-negara yang relatif sudah maju, disamping mengusahakan dirinya untuk berkembang, juga menaruh perhatian terhadap negara yang sedang berkembang. Ini disebabkan karena adanya ketergantungan suatu negara

ke negara lain. Ketergantungan ini menyangkut dengan ekonomi negara yang bersangkutan, seperti masalah ekonomi secara global. Apabila ekonomi suatu negara dalam keaadaan tidak stabil atau pendapatan per kapitanya rendah, tentu saja akan mempengaruhi pasar produk negara yang sudah maju, dari sisi lain juga akan mempengaruhi ekonomi secara menyeluruh.

Alasan mengapa negara maju memperhatikan pembangunan di negara yang sedang berkembang, antara lain: 1) Bersifat politis, yaitu mencegah masuknya pengaruh dari blok lain; 2) Bersifat ekonomis, yaitu untuk memperluas perdagangan internasional; 3) Bersifat perikemanusiaan.

Suatu negara ikut memperhatikan negara lain (khususnya negara berkembang) disebabkan adanya unsur politis. Memberikan perhatian khusus kepada negara tersebut lebih disebabkan supaya kebijakan dalam negara yang dibantu bisa menjalin hubungan yang baik dengan negara yang membantu. Hal tersebut terkait supaya negara yang bersangkutan juga membantu negara maju dalam pengampilan keputusan, terutama kebijakan internasional. Disamping itu faktor lain juga terkait dengan perdagangan, terutama perdagangan senjata.

Banyak negara maju memberikan bantuan kepada negara berkembang, terutama untuk Indonesia lebih disebabkan adanya unsur ekonomi. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak, dan penduduk ini merupakan potensi ekonomi baik sumberdaya manusianya maupun potensi pasar. Penduduk yang banyak merupakan peluang pasar bagi produk suatu negara. Jika penduduknya sejahtera dengan meningkatnya pendapatan per kapita, maka daya beli meningkat. Hal tersebut akan menimbulkan permintaan terhadap barang. Kondisi ini dimanfaatkan oleh negara maju untuk merebut pasar di negara berkembang.

Terlambatnya pembangunan ekonomi pada suatu negara, menyebabkan negara maju ikut memperhatikan. Hal tersebut bukan saja disebabkan faktor ekonomi dan potensi pasar, tetapi lebih disebabkan karena nilai kemanusiaan. Pertumbuhan ekonomi yang lambat menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi kesehatan yang rendah, tidak memadainya pasar, keterbelangan karena mutu pendidikan yang rendah. Negara maju merasa terpanggil untuk membantu baik jangka panjang maupun jangka pendek. Bantuan jangka panjang berupa pembangunan sumberdaya

manusia melallui biaya siswa dan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan. Bantuan jangka pendek lebih banyak pada kondisi darurat saat terjadinya bencana yang menimbulkan banyak korban.

Dari ketiga alasan memberikan bantuan oleh negara maju, secara sinergi dalam jangka panjang berdampak terhadap ekonomi dunia maupun ekonomi negara donor. Kesejahteraan bagi suatu negara merupakan potensi pasar bagi negara lain. Alasan tersebut disebabkan suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dari produksi dalam negeri saja, ketergantungan terhadap negara lain tidak bisa dihindari.

Dengan demikian pembangunan ekonomi tidak saja merupakan usaha-usaha negara yang belum berkembang saja, melainkan negara majupun juga memperhatikan pembangunan ekonominya.

BAB II
NEGARA BERKEMBANG DAN UPAYA PEMBANGUNANNYA

A. Ciri Negara Berkembang

Paul Hoffman melukiskan dengan jelas gambaran suatu negara yang terbelakang dalam ungkapan berikut: Setiap orang dapat memahami suatu negara terbelakang apabila ia melihatnya. Ia adalah suatu negara yang ditandai dengan kemiskinan, kota yang dipadati oleh pengemis dan penduduk desa yang sudah mencari nafkah di kampung halamannya sendiri. Ia adalah suatu negara yang jarang memiliki industri, seringkali dengan persediaan tenaga dan listrik yang tidak memadai. Negara tersebut tidak memiliki jalan raya dan kereta api yang cukup, pemerintah belum dapat memberikan pelayanan yang memadai, dan komunikasi yang ada biasanya buruk. Rumah sakit dan lembaga pendidikan tinggi sangat sedikit. Sebagian besar penduduk buta huruf.

Untuk lebih jelasnya ciri-ciri negara terbelakang tersebut diklasifikasikan menjadi enam golongan, antara lain: 1) Standar Hidup yang Rendah; 2) Produktivitas yang rendah; 3)Tingkat pertumbuhan penduduk beban ketergantungan yang tinggi; 4) Tingkat pengangguran yang tinggi; 5) Ketergantungan sector pertanian danekspor barang primer; 6) Ketergantungan yang kuat dalam hubungan internasional.

1. Standar Hidup yang Rendah

Majunya suatu golongan masyrakat disebabkan mereka bisa menangkap peluang yang harus diraih untuk memperoleh kehidupan yang baik. Bagi mereka yang hidupnya lebih baik merupakan ukuran standar kehidupan. Di negara berkembang standar hidup sebagian besar penduduknya masih rendah. Standar hidup yang rendah tersebut dimanifestasikan secara kuantitatif dan kualitatif dalam bentuk pendapatan yang rendah (kemiskinan), perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah dan kurang bermutu, angka kematian bayi yang tinggi, harapan hidup yang rendah.

Dari sisi lain untuk negara yang sedang berkembang ada beberapa penyebab, kenapa standar hidup penduduknya rendah, antara lain disebebkan oleh:

a. Pendapatan Nasional Per Kapita

Pendapatan nasional bruto (GNP) per kapita biasanya dipakai sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. GNP itu dipakai sebagai ukuran aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Apabila GNP suatu negara rendah dan pertumbuhan penduduk tinggi, maka pendapatan nasional per kapita turun. Hal ini akan menyebabkan tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk menjadi lebih lamban perkembangannya.

b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah sebagai akibat dari perkembangan GNP lambat, sedangkan dari sisi lain pertumbuhan penduduk lebih laju dari GNP itu sendiri. Maka pendapatan per kapita masyarakat menjadi rendah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah tercermin dari rendahnya pendapatan per kapita dari suatu periode ke periode lain.

Kelemahan negara berkembang selama ini adalah, kebijakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di negara bersangkutan sangat tergantung kepada sumberdaya alam yang dimiliki. Padahal bagaimanapun kayanya sumberdaya alam, jika tidak dikelola oleh sumberdaya manusia akan memberikan montribusi yang kecil. Pengelolaan sumberdaya alam lebih banyak dikuasai oleh negara maju, sehingga kontribusi terhadap negara relatif kecil dan pengembangan sumberdaya manusianya terabaikan.

c. Distribusi Pendapatan Nasional

Semakin melebarnya kesenjangan pendapatan per kapita antara negara kaya dengan negara miskin, bukan satu-satunya menifestasi melebarnya disparitas ekonomi antara negara kaya dan miskin. Tetapi disparitas ekonomi itu sendiri juga tercipta dalam suatu negara miskin, dimana sebagian besar GNP dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan per kapita, harus dilihat bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan kepada penduduk, dalam arti siapa yang menikmati hasil pembangunan tersebut.

d. Tingkat Kemiskinan

Luasnya tingkat kemiskinan pada suatu negara tergantung kepada dua faktor: (1) tingkat pendapatan nasional rata-rata; (2) tingkat pemerataan dalam

distribusi. Dari kedua faktor tersebut merupakan kunci terbentuknya kemiskinan. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan menjadikan kemiskinan semakin melebar. Hal ini akan menciptakan kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut dapat dikurangi melalui pembangunan ekonomi padat karya. Ciri negara berkembang, kualitas sumberdaya manusianya relatif rendah. Untuk itu untuk melibatkan mereka dalam pembangunan dan upaya meningkatkan pendapatan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan mereka melalui kebijakan pembangunan padat karya. Ini berarti bukan mengabaikan pembangunan ekonomi yang padat modal dan teknologi.

e. Tingkat Kesehatan

Di samping penderitaan akibat pendapatan yang rendah, banyak penduduk di negara berkembang yang melawan kekurangan gizi, penyakit, kemudian mereka mati. Oleh sebab itu untuk memajukan suatu penduduk perlu diperbaiki kesehatan dan penyempurnaan gizi. Tanpa perbaikan gizi, mereka akan mudah terserang penyakit, stamina rendah, produktivitas rendah, akibatnya pendapatan riil mereka rendah. Kesehatan merupakan faktor penting untuk memacu produktivitas dalam suatu negara. Kesehatan dimulai dari perbaikan gizi. Gizi yang memadai akan membuat proses berfikir meningkat dan kualitas sumberdaya manusia juga meningkat.

f. Tingkat Pendidikan

Rendahnya kualitas pendidikan di negara berkembang lebih dominan disebabkan terbatasnya sumberdaya pendidikan dan kurang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai. Dalam bidang pendidikan dijumpai fasilitas dan kurikulum pendidikan yang tidak relevan dan kurang memadai, tingkat kegagalan (drop out) tingkat sekolah yang tinggi dan melek huruf yang rendah. Sebagian besar sistem pendidikan di negara berkembang belum mengacu kepada kebutuhan pasar. Begitu juga untuk bidang eksakta belum didukung oleh peralatan labor yang memadai, sehingga peserta didik hanya belajar teori di dalam kelas, sedangkan implementasi dari teori itu tdak dikuasainya. Hal ini menyebabkan setiap peserta didik baik dari perguruan tinggi belum siap memasuki lapangan kerja karena tidak adanya keterampilan.

Jika diamati lebih lanjut, rendahnya kualitas pendidikan di negara berkembang juga disebabkan kualitas pendidik (guru dan dosen) yang relatif

rendah. Penyampaian materi masih bersifat konvensional, belum menerapkan model pembelajaran modern. Dari sisi lain pendidik juga mempunyai kemampuan dan keterampilan yang rendah. Pendidik belum memperlihatkan bahwa dia sebagai seorang yang profesional di bidangnya. Pendidik lebih banyak bersifat menyampaikan materi ke peserta didik. Tidak mempunyai kemampuan mengolah informasi. Akibatnya ukuran keberhasilan masih terbatas pada kognitif saja, belum memperlihatkan keterampilan proses.

2. Produktivitas yang Rendah

Produktivitas yang tinggi lebih disebabkan oleh pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menghasilkan tenaga terampil dan mampu memanfaatkan teknologi. Penduduk negara berkembang sangat lemah dalam penguasaan teknologi. Negara yang sedang berkembang ditandai dengan produktivitas tenaga kerja yang rendah. Konsep fungsi produksi yang menghubungkan output dengan bermacam-macam kombinasi penggunaan faktor input berdasarkan teknologi tertentu seringkali digunakan untuk menjelaskan bagaimana penduduk memenuhi kebutuhannya. Tetapi secara teknis konsep fungsi produksi perlu ditambahkan dengan kemampuan manajerial, motivasi tenaga kerja, dan fleksibelitas kelembagaan yang mendukung.

Berdasarkan argumentasi tingkat produktivitas dapat dinaikkan melalui mobilitas tabungan dalam negeri dan bantuan modal asing guna meningkatkan investasi baru dalam barang-barang modal serta investasi dibidang pendidikan dan pelatihan untuk menambah keterampilan.

3. Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Beban Ketergantungan yang Tinggi

Hampir semua negara terbelakang mempunyai potensi pertumbuhan penduduk yang tinggi serta dibarengi oleh tingkat kematian yang cenderung menurun. Kemajuan ilmu kedokteran telah dapat menurunkan tingkat kematian dan menaikkan tingkat kesuburan. Akibatnya pertumbuhan penduduk dalam suatu negara meninggat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan penghambat dalam pembangunan ekonomi, jika penduduk itu tidak mampu mengembangkan dirinya sebagai masyarakat mandiri.

Implikasi utama tingginya tingkat kelahiran adalah bahwa lebih dari 40 persen penduduknya terdiri dari anak-anak yang berumur kurang dari 15

tahun (kelompok usia muda). Makin banyak keluarga yang ditanggung makin kecil kesempatan bagi keluarga tersebut untuk menabung. Banyaknya usia muda dalam suatu keluarga (negara) akan menyebabkan tingginya beban ketergantungan. Rata-rata rasio beban ketergantungan di negara berkembang 1:4. Artinya setiap kepala keluarga menanggung kehidupan orang lain (istri, anak, dan anggota keluarga lainnya) minimal 4 orang. Tingginya rasio ketergantungan ini menyebabkan kemampuan membangun sumberdaya manusia rendah.

4. Tingkat Pengangguran yang Tinggi

Salah satu menifestasi mendasar dari faktor-faktor yang mengakibatkan rendahnya taraf hidup di negara-negara berkembang adalah kurangnya penggunaan tenaga kerja atau penggunaan tenaga kerja yang tidak efisien dibandingkan dengan negara maju. Penggunaan tenaga kerja di bawah standar dapat disebabkan karena; *Pertama,* keadaan setengah menganggur (*underemployment*) penduduk kota maupun desa yang bekerja di bawah jam kerja normal. Keadaan setengah mengganggur juga meliputi mereka yang bekerja secara normal dengan waktu penuh tetapi produktivitasnya rendah hingga pengurangan jam kerja tidak berpengaruh tehadap total otput; *Kedua,* pengangguran terbuka, yakni penduduk yang mampu dan ingin bekerja tetapi tidak tersedia lapangan pekerjaan.

Di negara terbelakang sering dijumpai pengangguran dan pengangguran tersembunyi dalam jumlah besar. Pengangguran di kota membengkak akibat arus urbanisasi dan meningkatnya pendidikan. Dari sisi lain sektor industri tidak berkembang sejalan dengan pertumbuhan tenaga kerja sehingga memperbesar pengangguran.

5. Ketergantungan Sektor Pertanian dan Ekspor Barang Primer

Di negara berkembang duapertiga atau lebih penduduknya tinggal di pedesaan dan mata pencarian utama adalah pertanian. Alasan utama terkonsentrasinya penduduk dan produksi dalam aktivitas pertanian dan produksi primer lainnya adalah bahwa pada tingkat pendapatan yang rendah perioritas pertama setiap orang adalah pangan, pakaian dan papan. Rendahnya produktivitas pertanian di negara berkembang disebabkan karena besarnya jumlah penduduk dibandingkan dengan lahan pertanian yang tersedia, juga disebabkan karena teknologi yang dipergunakan pada sektor

pertanian masih bersifat primitif, terbatasnya modal fisik dan kemampuan manusianya.

Dari sisi lain negara-negara berkembang pada umumnya lebih banyak berorientasi kepada produksi barang primer (pertanian, bahan bakar, hasil hutan, dan bahan mentah). Barang-barang primer tersebut merupakan ekspor utama ke negara lain. Dari sisi volume ekspor cukup tinggi, tapi nilai ekspornya rendah. Alhasil kontribusi sektor primer terhadap PDB juga rendah.

6. Ketergantungan yang Kuat dalam Hubungan Internasional

Biasanya negara sedang berkembang sangat berorientasi pada perdagangan luar negeri. Orientasi ini terlihat dari ekspor barang primer dan impor barang-barang konsumsi dan mesin. Terlalu tergantung pada ekspor barang primer ini akan menimbulkan dampak negatif pada perekonomian negara tersebut; *Pertama.* Perekonomian hanya terpusat pada produksi barang primer untuk ekspor, akibat sektor ekonomi lainnya terabaikan; *Kedua,* perekonomian menjadi rentan terhadap fluktuasi harga internasional barang-barang ekspor tersebut. Depresi dunia akan menjatuhkan harga dan permintaan. Akibat seluruh perekonomian terkena efek buruk; dan *Ketiga,* karena tergantung pada beberapa mata dagang ekspor, maka perekonomian akan menjadi sangat tergantung pada impor. Impor pada umumnya terdiri dari bahan bakar, bahan pabrik, matadagangan primer, alat-alat transpor dan mesin, dan bahkan makanan. Di samping itu harus diperhatikan juga pengaruh *demonstration effect* yang cenderung meningkatkan impor menjadi semakin besar.

Menurut Nurkse yang dikutip oleh Jhingan (1994), salah satu faktor penting yang memperlambat pembentukan modal di negara terbelakang adalah keinginan untuk meniru standar konsumsi mewah negara maju. Gejala ini terkenal dengan *demonstration effect.*

Akibat *demonstration effect* akan berpengaruh buruk kepada kecenderungan menabung (*propensity to save*). Pengeluaran mereka untuk konsumsi barang mewah meningkat seiring kemauan yang sudah surut untuk menabung. *Demonstration effect* akan mempersulit pemerintah untuk mempergunakan keuangan negara sebagai sarana pembentukan modal. *Demonstration effect* yang menyebabkan meningkatnya permintaan akan barang impor akan melahirkan tekanan inflasioner dan ketidakseimbangan neraca pembayaran.

B. Tindakan Dalam Negeri dan Upaya-Upaya Internasional

1. Tindakan Dalam Negeri

a. Pertumbuhan, Kemiskinan, dan Distribusi Pendapatan

1) Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Laju pertumbuhan ekonomi akan diukur melalui indikator perkembangan PDB atau PNB(=GNP) dari tahun ke tahun.

Cara tahunan:

$$\Delta \text{ PDB} = \frac{PDB_2 - PBB_1}{PDB_1} \times 100\ \%$$

Δ PDB = Laju pertumbuhan ekonomi (Rate of growth)

PDB = Produk Domestik Bruto

Cara Geometri:

$$P_t = P_0 (1 + r)^n$$

P_t = PDB pada tahun ke t

P_0 = PDB pada tahun ke nol

r = pertumbuhan rata-rata per tahun

N = Waktu antara P_0 dan P_t

2) Ukuran Distribusi

Ukuran distribusi adalah ukuran yang umum dipakai oleh para ekonom. Distribusi ini menyangkut dengan segi manusia sebagai perorangan atau rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima. Dalam menghitung distribusi pendapatan masyarakat, terlebih dahulu mengelompokkan individu berdasarkan pendapatan perorangan dan lalu membagikannya dengan jumlah yang berbeda-beda ukurannya. Metode yang lazim dipakai adalah membagi penduduk menjadi 5 atau 10 kelompok (*quintiles*= atau *deciles*) sesuai dengan tingkatan pendapatan mereka, kemudian menetapkan proporsi yang diterimanya oleh masing-masing kelompok dari pendapatan nasional (contoh perhitungan pada Tabel 2.1).

Ketidakmerataan pendapatan dapat diperoleh dari kolom 3, yaitu perbandingan antara pendapatan yang diterima kelompok bawah 40 % dan kelompok atas 20 % dari jumlah penduduk. Dari tabel tersebut terlihat 40 % kelompok miskin (golongan terbawah) menerima pendapatan sebesar 26,3 %, sedangkan 20 % kelompok kaya menikmati pendapatan sebesar 33 % dari total PDB. Sehingga perbandingan pendapatan antara 20 % tertinggi dengan 40 % terendah sebesar 1,26. Rasio ini sering digunakan sebagai ukuran ketidakmerataan antara dua kelompk secara ektrem, yaitu kelompok yang sangat miskin dan kelompok yang sangat kaya.

Tabel 2.1. Contoh Perhitungan Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kelompok Masyarakat di Pedesaan

Kelompok Pendapatan	Pendapatan %	Komulatif
20 % pendapatan terendah	10.40	10.40
20 % pendapatan terendah kedua	15.90	26.30
20 % pendapatan terendah ketiga	17.91	44.21
20 % pendapatan terendah keempat	22.60	66.81
20 % pendapatan tertinggi	33.19	100.00
Jumlah	100,00	
Rasio 20% tertinggi dan 40% terendah	1,26	

3) Kurva Lorenz

Cara lain yang lazim dipakai untuk menganalisis statistik pendapatan perorangan adalah dengan menggunakan Kurva *Lorenz*. Kurva *Lorenz* memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase penerima pendapatan dan persentase total pendapatan yang benar-benar diperoleh selama waktu tertentu (misalnya satu tahun).

Pada Gambar 2.1 dapat dilihat kurva Lorenz tersebut. Semakin jauh jarak garis kurva *Lorenz* dari garis diagonal (kemerataan sempurna) semakin tinggi tingkat ketidakmerataan.

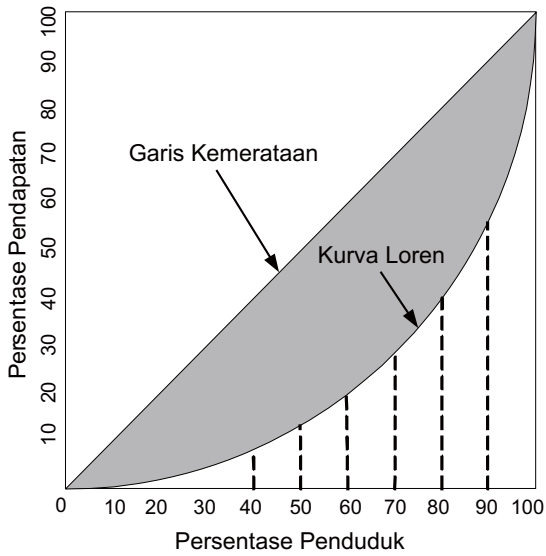

Gambar 2.1. Kurva Lorenz

4) *Ketidak Merataan*

Untuk mengetahui ketidak merataan pendapatan relatif yang sangat sederhana dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diogonal dengan kurva Lorenz dibagi dengan luas separoh bidang dimana kurva terletak. Rasio ini dikenal dengan Rasio Kosentrasi Gini (*Gini Ratio*).

$$GR = 1 - \sum_{i}^{n} . f_i (X_{i+1} - X_i)(Y_{i+1} + Y_i)$$

Atau

$$GR = 1 - \sum_{i}^{n} . f_i (X_{i+1} - X_i)(Y_{i+1} + Y_i)$$

GR = Angka Gini Ratio

X_i = Propori jumlah rumah tangga komulatif dalam kelas ke i

f_I = Prporsi jumlah rumah tangga dalam kelas ke i

Y_i = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga komulatif dalam kelas ke i

Pada Tebl 2.2 disajikan cara perhitungan angka Gini Ratio. Angka Gini Ratio memperlihatkan tingkat ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat itu sendiri. Angka tersebut berkisar antara 0-1, semakin mendekati 1 maka semangkin timpang pendapatan masyrakat dan sebaliknya bila mendekati o maka semakin merata pendapatan masyarakat.

Tabel 2.2 Perhitungan Gini Ratio di Pedesaan Tahun 2009

Persentase Penduduk (fi)	Pendapatan (%)	Komulatif (%)	Y_i+Y_{i-1}	$fi(Y_i+Y_{i-1})$
10 terendah	4.845	4.845	4.845	0.00485
10 kedua	6.425	11.270	16.115	0.01612
10 ketiga	7.403	18.673	29.944	0.02994
10 keempat	8.071	26.744	45.417	0.04542
10 kelima	8.876	35.620	62.364	0.06236
10 keenam	9.532	45.153	80.773	0.08077
10 ketujuh	10.544	55.697	100.850	0.10085
10 kedelapan	11.423	67.120	122.817	0.12282
10 kesembilan	13.606	80.725	147.845	0.14785
10 tertinggi	19.275	100.000	180.725	0.18073
	100.00			0.79170

Sumber: Almasdi Syahza (2009)

5) *Tingkat Kesejahteraan*

Disamping mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi melalui pengukuran ketidak merataan dan kurva Lorenz, dapat juga diukur melalui tingkat kesejahteraan yaitu:

$$G = w_1g_1 + w_2g_2 + w_3g_3 + w_4g_4 + w_5g_5$$

G = Indek pertumbuhan kesejahteraan

w = Bobot kesejahteraan kelompok penghasilan ke i

g_i = Tingkat pertumbuhan penghasilan dari kelompok ke i

Contoh perhitungan indek kesejahteraan masyarakat di sajikan pada Tabel 2.3. Apabila diamati Tabel 2.3 tingkat pertumbuhan indek kesejahteraan masyarakat tahun 1995 sebesar 0,49 yang berarti tingkat pertumbuhan

kesejahteraan meningkat sebesar 49 persen dari periode sebelumnya. Selama periode 1995-2006 indek kesejahteraan meningkat sebesat 0,18 atau peningkatan sebesar 18% dari periode sebelumnya. Perhitungan indek kesejahteraan terkait kuat dengan perhitungan distribusi pendpatan.

Tabel 2.3. Pertumbuhan Indeks Kesejahteraan Masyarakat di Pedesaan

Kelompok Pendapatan	1995		2006	
	w	g	w	G
20 % pendapatan terendah	0.0805	-0.0084	0.1513	-0.0344
20 % pendapatan terendah kedua	0.1267	0.0090	0.1946	-0.0363
20 % pendapatan terendah ketiga	0.1438	-0.0056	0.2152	-0.0321
20 % pendapatan terendah keempat	0.1955	-0.0119	0.2010	0.0097
20 % pendapatan tertinggi	0.4535	0.0167	0.2379	0.0930
Indek Pertumbuhan Kesejahteraan	0.49		0.18	

Sumber: Almasdi Syahza (2008)

b. Peranan Pertanian Dalam Pembangunan

Sumbangan atau jasa sektor pertanian pada pembangunan ekonomi terletak dalam hal; (1) menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat; (2) meningkatkan permintaan akan produk industri, dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tertier; (3) menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang-barang modal bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian terus menerus; (4) meningkatkan pendapatan desa; dan (5) memperbaiki kesejahteraan rakyat pedesaan.

Negara berkembang pada umumnya sumber kehidupan masyarakatnya sangat tergantung kepada sektor primer (perkebunan, peternakan, perikanan, tanaman pangan dan hortikultura, serta kehutanan). Sektor primer memberikan kontribusi yang kecil jika tidak diolah secara modern (pengolahan pascapanen). Apbila ekspor sektor primer meningkat, sngat berdampak pada pendapatan masyarakat pedesaan khususnya yang berusaha di sektor pertanian komoditas ekspor.

c. Peranan Moneter dalam Pembangunan

Kebijaksanaan moneter mengacu kepada kebijaksanaan otorita moneter yang menyangkut masalah-masalah moneter. Kebijaksaan tersebut berkenaan dengan: (1) pengendalian lembaga keuangan; (2) pembelian dan penjualan secara aktif kertas-kertas berharga, yang tujuannya untuk mempengaruhi jumlah uang beredar; dan (3) pembelian secara pasif kertas berharga yang tujuannya untuk mempertahankan struktur tingkat bunga tertentu, stabilitas harga saham.

Ciri-ciri kebijaksanaan moneter adalah; (1) pendirian dan perluasan lembaga keuangan; (2) kebijaksanaan suku bunga yang cocok; (3) manajemen utang; (4) perimbangan antara permintaan dan penawaran uang; (5) pengendalian kredit.

d. Kebijaksanaan Fiskal dalam Pembangunan Ekonomi

Kebijaksanaan fiskal berarti penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilisasi atau pembangunan. Penggunaan kebijaksanaan fiskal untuk menggalakkan pembangunan ekonomi merupakan kebijaksanaan yang baru dalam ilmu ekonomi.

Tujuan kebijaksanan fiskal sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut; (1) Untuk meningkatkan laju investasi; (2) Untuk mendorong investasi optimal secara sosial; (3) Untuk meningkatkan kesempatan kerja; (4) Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan internasional; (5) Untuk menanggulangi inflasi; (6) Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan.

e. Kebijaksanaan Harga dalam Pembangunan Ekonomi

Di dalam perencanaan pembangunan ketidak seimbangan antara permintaan, penawaran barang, dan faktor produksi merupakan hal yang tak terelakkan. Permintaan barang meningkat sebagai akibat meningkatnya investasi dalam skala luas sehingga menambah jumlah uang beredar dalam masyarakat, atau dengan arti kata meningkatnya pendapatan dalam masyarakat. Untuk menghindari terjadinya kenaikan harga sebagai akibat

uang yang dipegang oleh masyarakat meningkat maka pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan harga.

Tujuan kebijaksanaan harga ini tidaklah semata-mata menyangkut upaya menguasai harga atau mempertahankan kestabilan harga pada tingkat tertentu, tetapi juga menyangkut gerakan barang dan jasa baik secara umum maupun secara relatif. Berikut ini adalah tujuan dari kebijaksanaan harga, yaitu: (1) Untuk menjaga keseimbangan antara permintaan barang dan jasa; (2) Untuk menstabilkan harga barang konsumsi; (3) Untuk menciptakan fleksibelitas harga; (4) Kebijaksanaan harga untuk barang pertanian yang tujuannya untuk menambah pendapatan masyarakat pedesaan; (5) Dapat memacu pertumbuhan ekonomi; (6) Mengatur harga barang konsumsi; (7) Mengatur harga bahan baku industri; (8) Mengatur kebijaksanaan harga dengan perusahaan; dan (9) Mengatur kebijaksanaan harga dengan tingkat upah.

f. Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi

Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap perhatian ekonomi telah menarik perhatian para ahli ekonomi sejak Adam Smith menulis bukunya *Wealth of Nations*. Adam Smith menulis buruh tahunan setiap bangsa merupakan kekayaan yang pada mulanya memasok bangsa dengan segala kenyamanan hidup yang diperlukan. Hanya Malthus dan Ricardo yang mencanangkan tanda bahaya mengenai dampak pertumbuhan penduduk pada perekonomian. Akan tetapi kehawatiran mereka tidak terbukti di Erapa Barat, justru pertumbuhan penduduk mempercepat industrialisasi. Berbeda di negara terbelakang, ekonominya miskin, kurang modal, sedangkan buruh melimpah. Karena itu pertumbuhan penduduk benar-benar menghambat pertumbuhan ekonomi.

Tak kalah pentingnya pertumbuhan penduduk menekan pendapatan per kapita, menurunkan standar kehidupan dan menurunkan tingkat pembentukan modal. Pengaruh pertumbuhan penduduk tersebut akan diuraikan secara ringkas berikut ini.

1) Penduduk dan Pendapatan Per Kapita

Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pendapatan per kapita biasanya tidak menguntungkan. Pertumbuhan penduduk cenderung

memperlambat pendapatan per kapita dalam tiga cara: (i) memperberat beban penduduk pada lahan, (ii) menaikkan biaya barang konsumsi karena faktor pendukung untuk menaikkan penawaran mereka, (iii) memerosotkan akumulasi modal, karena dengan tambahnya anggota keluarga biaya meningkat. Setiap kenaikan output nasional diiringi oleh jumlah konsumen yang semakin besar.

2) Penduduk dan Standar Kehidupan

Karena salah satu faktor penting dalam standar kehidupan adalah pendapatan per kapita, maka faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita dalam hubungannya dengan pertumbuhan penduduk sama-sama mempengaruhi standar kehidupan. Penduduk yang meningkat dengan cepat menyebabkan permintaan akan sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Tetapi penawaran barang-barang ini tidak dapat ditingkatkan dalam jangka waktu pendek lantaran kurangnya faktor pendukung seperti bahan mentah, buruh terlatih, modal dan sebagainya.

3) Penduduk dan Pembangunan Pertanian

Di negara terbelakang kebanyakan rakyat tinggal di daerah pedesaan. Pertanian merupakan mata pencarian utama. Oleh karena itu pertambahan penduduk akan mengurangi rasio lahan dengan manusia. Tekanan penduduk pada lahan meningkat karena penawaran lahan tidak elastis. Ini menambah pengangguran tersembunyi dan mengurangi produktivitas per kapita lebih jauh. Produktivitas yang rendah mengurangi kecenderungan untuk menabung dan menginvestasi. Akibatnya pembangunan pertanian hanya terbatas pada perekonomian pangan (subsisten).

4) Penduduk dan Lapangan Kerja

Penduduk yang meningkat denang cepat menjerumuskan perekonomian pada pengangguran dan kekurangan lapangan kerja. Karena penduduk meningkat proporsi pekerja pada penduduk total menjadi naik. Penduduk yang meningkat dengan cepat mengurangi pendapatan, tabungan dan investasi. Karenanya pembentukan modal jadi lambat dan kesempatan kerja kurang sehingga meningkatkan pengangguran.

5) Penduduk dan Overhead Sosial

Penduduk yang berbiak dengan cepat memerlukan investasi besar di bidang overhead sosial dan pengalihan sumber-sumber dari aktiva produktif dengan segera. Karena kurangnya sumber, negara tidak mungkin menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, pengobatan, transportasi dan perumahan kepada seluruh penduduk. Akibatnya kualitas pelayanan menurun. Jumlah penduduk yang semakin besar mengurangi kualitas diri manusia sebagai agen produktif. Kenaikan jumlah penduduk usia sekolah dan jumlah tenaga buruh ikut memperberat beban penyediaan fasilitas pendidikan dan latihan dan memperlambat perbaikan fasilitas pendidikan.

6) Penduduk dan Tenaga Buruh

Tenaga buruh dalam suatu perekonomian adalah rasio antara penduduk yang bekerja dengan penduduk total. Adanya anak-anak dewasa di dalam tenaga buruh mengandung makna bahwa orang yang berpartisipasi pada pekerjaan produktif sebenarnya sedikit. Keadaan ini juga menyebabkan tingginya beban ketergantungan suatu keluarga. Pada umumnya di negara berkembang, penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan usia produkti. Begitu juga usia produktif belum tentu mereka berproduksi, karena keterbatasan kesmpatan kerja yang tersedia. Peluang kerja yang akan diraih mereka sangat kecil. Disamping keterampilan yang rendah, tingkat pendidikan juga rendah, sehingga daya saing untuk meraih pekerjaan sangat kecil. Akibat semuanya ini mereka hanya bisa bekerja di sektor informal atau sebagai tenaga buruh denga gaji yang relatif rendah.

7) Penduduk dan Pembentukan Modal

Pertumbuhan penduduk memperlambat pembentukan modal. Jika penduduk meningkat, pendapatan per kapita yang didapat menurun. Dengan pendapatan yang sama orang terpaksa memberi makan kepada anak-anak yang lebih banyak. Itu berarti sebagian besar pendapatan terpakai untuk pengeluaran konsumsi. Tabungan yang sudah rendah menjadi lebih rendah. Akibatnya tingkat investasi juga semakin rendah.

Kenaikan penduduk juga menyebabkan pengalihan investasi modal dari kegiatan produktif langsung pada modal overhead sosial. Penduduk yang

meningkat dengan cepat memerlukan penyediaan fasilitas dasar yang lebih banyak dalam bentuk sekolah, jalan raya, rumah sakit, air dan sebagainya yang kesemuanya tidak menambah produk nasional secara langsung dan segera, dengan akibat laju pertumbuhan perekonomian tetap rendah.

g. Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi

Penyediaan overhead sosial untuk negara yang sedang berkembang merupakan sebagian besar kegiatan pemerintah. Kebutuhan pelayan dasar seperti jalan kereta api, transportasi, telekomunikasi, gas, listrik, alat irigasi dan sebagainya. Pelayanan tersebut harus disusun oleh pemerintah berdasarkan sistem perioritas. Tetapi pelayanan pemerintah yang paling penting dalam mendukung pembangunan ekonomi adalah : (1) Pendidikan, melalui pendidikan akan tercipta manusia yang berkualitas sebagai motor dalam pembangunan; (2) Kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat maka pemerintah harus menyediakan pelayanan berupa rumahsakit-rumahsakit, pusat kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Dengan demikian akan tercipta manusia yang sehat dan stamina yang baik. Pada hakekatnya akan dapat meningkatkan produktivitas penduduk; (3) Keluarga berencana, yang tujuannya adalah pengurangan angka kelahhiran dan menekan tingkat kematian. Menurut Prof. Lewis, peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi mencakup: penyelenggaraan pelayanan umum, menentukan sikap, membentuk lembaga-lembaga ekonomi, menentukan penggunaan sumberdaya, menentukan distribusi pendapatan, mengendalikan jumlah uang, mengendalikan fluktuasi, menjamin pekerjaan penuh, dan menentukan laju inflasi.

h. Pembangunan Pertanian

Guna meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan peranan pemerintah juga tidak dapat dihindari melalui pembangunan pertanian. Shriman Narayan mengelompokkan unsur-unsur utama dalam rencana produksi pertanian di tingkat desa: (1) pemanfaatan penuh fasilitas irigasi; (2) peningktan daerah yang dapat panen berkali-kali; (3) perbanyak benih unggul dan pendistribusian kepada petani; (4) penyediaan pupuk melalui program pupuk buatan dan pupuk hijau; (5) penerapan praktek pertanian

yang baik serta perlindungan tanaman; (6) program pengenalan alat pertanian; (7) program pembangunan peternakan; (8) program peningkatan sayur dan buah-buahan; (9) program pengembangan padang rumput dan hutan kayu.

i. Kebijaksanaan Pembangunan Indonesia

Dalam perkembangan di masa depan, pembangunan negara-negara berkembang akan semakin tergantung dari kemampuannya untuk memanfaatkan sumber alamnya dalam jangka pendek dan sekaligus untuk memeliharanya dan mengamankannya secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dewasa ini sudah ada kesadaran yang meluas dikalangan masyarakat negara-negara industri maupun negara-negara berkembang bahwa pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup tidak boleh dianggap sebagai suatu dikotomi antara dua sisi kegiatan seolah-olah saling bertentangan, melainkan sebaliknya, pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan dua segi yang harus melengkapi dalam pola kebijaksanaan yang menyangkut kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Bagi Indonesia dalam Pembangunan Jangka Panjang (Indonesia 2020) akan menghadapi tiga kelompok permasalahan mendasar, yaitu:

- Lapangan kerja produktif dan pengangguran. Masalah ini terkait dengan ketimpangan antara produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dan produktivitas di sektor sekunder (industri dan kontruksi).
- Ketimpangan pada perimbangan kekuatan di antara golongan-golongan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa.
- Ketidakseimbangan ekonomi antar daerah.

Ketiga kelompok permasahan tersebut di atas akan dihadapi dan harus ditanggulangi di masa datang, dengan tetap mepertahankan pertumbuhan yang cukup pesat di berbagai bidang kegiatan.

2. Upaya-Upaya Internasional

a. Peranan Perdagangan Luar Negeri

Tidak ada di dunia ini suatu negara dapat memenuhi semua kebutuhan rakyatnya dengan memproduksi barang sendiri. Setiap negara selalu

mengadakan hubungan dengan negara lain baik bersifat bilateral maupun multilateral. Oleh sebab itu peranan perdagangan luar negeri dalam menunjang pembangunan sangat menonjol. Para ahli ekonomi mengungkapkan betapa pentingnya perdagangan international dalam pembangunan suatu negara.

1) Pentingnya Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan Luar negeri mempunyai arti penting bagi negara yang berkembang. Dalam perdagangan akan terjadi proses pembangunan, peningkatan pengetahuan, dan pengalaman dalam pembangunan.

Haberler berpendapat "Perdagangan internasional telah memberikan sumbangan luar biasa bagi pembangunan negara kurang berkembang di abad ke 19 dan 20 dan dapat diharapkan sumbangan tersebut akan sama di masa datang".

2) Manfaat Langsung Perdagangan Luar Negeri

Dari perdagangan luar negeri, negara akan mendapat keuntungan yaitu pendapatan nasional akan naik, yang pada gilirannya akan menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan output yang lebih tinggi lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan sehingga pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan. Perdagangan internasional memperluas pasaran dan merangsang investasi, pendapatan dan tabungan melalui alokasi sumberdaya dengan lebih efisien.

Menurut J.S. Mill, perluasan pasar menghasilkan sejumlah ekonomi internal dan eksternal sehingga mengurangi biaya produksi. Perdagangan luar negeri membantu mengalihkan sektor pangan (subsisten) ke sektor uang karena pasar bagi produk pertanian meningkat dan pendapatan serta standar kehidupan kaum tani meningkat.

3) Manfaat Tidak Langsung Perdagangan Luar Negeri

Manfaat tidak langsung dari perdagangan luar negeri menurut Mill adalah perdagangan internasional mendorong pemakaian mesin, mendorong penemuan dan pembaharuan, meningkatkan produktivitas buruh, menurunkan biaya dan membawa ke arah pembangunan ekonomi. Di samping itu juga mendorong persaingan yang sehat dan dapat mencegah monopoli.

Dari sisi lain perdagangan luar negeri juga dapat memberikan sumbangan berupa: *Pertama*, membantu mempertukarkan barang-barang yang mempunyai kemampuan pertumbuhan rendah dengan barang-barang yang mempunayi pertumbuhan tinggi. Komoditi pertanian ditukarkan dengan mesin-mesin pengolah, barang modal dan produk setengah jadi yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi; *Kedua*, perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh mendidik. Negara yang melakukan perdagangan terutama negera terbelakang akan memperoleh keterampilan dalam meproduksi barang dan meningkatkan efisiensi produksi; *Ketiga*, dapat memberikan pemasukan modal ke dalam negeri yang sedang berkembang; dan *keempat,* perdagangan luar negeri menguntungkan negara terbelakang karena meningkatkan persaingan sehat dan mengendalikan monopoli yang tidak efisien.

b. Peranan Modal Asing

Di negara yang sedang berkembang kendala mereka hadapi adalah kekurangan modal yang disebabkan rendahnya daya tabung masyarakat, sehingga pembentukan modal lambat sekali. Dalam pembangunan ekonomi negara yang sedang berkembang membutuhkan modal dari luar negeri untuk mendorong investasi di dalam negeri. Dengan demikian negara tersebut akan dapat meningkatkan produksinya, sehingga akan menaikan pendapatan nasional.

Rendahnya kemampuan pembentukan modal akan menyebabkan negara-tersebut tidak mampu membangun industri-industri dasar dan industri-industri kunci. Untuk itu peran modal asing cukup membantu dalam pembangunan ekonomi.

Modal asing cenderung menaikkan tingkat produktivitas, pendapatan dan pekerjaan nasional yang pada gilirannya mengarah kepada upah riel buruh yang semakin tinggi serta naiknya standar kehidupan mereka. Bantuan berupa modal asing dapat dibedakan menjadi jua jenis yaitu;

- Investsi langsung, perusahaan dari negara penanam modal secara de facto dan de jure melakukan pengawasan atas asset (aktiva) yang ditanam di negara pengimpor modal dengan cara investasi. Invesatsi ini dpat berupa pembentukan cabang perusahaan di negara pengimpor

modal atau pembentukan perusahaan baru di negara pengimpor modal.

- Investasi tidak langsung, investasi berupa penguasaan saham yang dapat dipindahkan.

Modal asing negara, yang terdiri dari: (1) pinjaman keras bilateral; (2) pinjaman lunak bilateral; (3) pinjaman multilateral.

Dalam pemberian bantuan suatu negara ke negara yang sedang berkembang dapat dilihat dalam bentuk kriteria bantuan bersyarat dan bantuan tidak bersyarat. Bantuan bersyarat disebabkan karena pemanfaatan sumberdaya yang ada baik sumberdaya manusianya maupun sumberdaya alamnya atau bantuan yang menyangkut dengan proyek pembangunan sektor ekonomi. Sedangkan bantuan tidak bersyarat adalah berupa bantuan untuk tujuan umum atau dikenal dengan bantuan program atau nonproyek.

C. Kebijaksanaan Pembangunan Ekonomi

Keberhasilan dalam suatu pembangunan sangat ditentukan oleh kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara dan dukungan dari masyarakatnya. Setiap negara mempunyai bentuk kebijakan yang berbeda untuk memacu pembangunan ekonomi. Pada pokok bahasan ini materi yang dibahas adalah: 1) Perencanaan Ekonomi; 2) Bentuk-bentuk Perencanaan; 3) Syarat Perencanaan yang Berhasil; 4) Syarat-Syarat Umum Pembangunan Ekonomi; 5) Kesulitan dalam Pembangunan Ekonomi; 6) Pola Pengembangan Sektor Industri

1. Perencanaan Ekonomi

Prof. Robbins mendifiniskan perencanaan ekonomi sebagai pengawasan atau pengendalian secara kolektif atas seluruh kegiatan swasta di bidang produksi atau pertukaran. Sedangkan menurut Hayer, perencanaan itu berupa pengaturan kegiatan produktif oleh pemerintah pusat. Dr. Dalton, perencanaan ekonomi itu adalah pengaturan dengan sengaja oleh orang yang berwenang mengenai sumber-sumber kegiatan ekonomi ke arah tujuan yang ditetapkan.

Lewis Lordwin, perencanaan ekonomi sebagai suatu rencana perorganisasian perekonomian dimana pabrik, perusahaan, dan industri yang terpisah-pisah dianggap sebagai unit-unit terpadu dari suatu sistem tunggal dalam rangka memanfaatkan sumber yang tersedia untuk mencapai

kepuasan maksimum kebutuhan rakyat dalam waktu yang telah ditentukan. Menurut Zweig, perencanaan ekonomi mencakup perluasan fungsi penguasa negara sampai ke pengorganisasian dan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi. Perencanaan mengandung arti dan mengarah kepemusatan perekonomian nasional.

Dickison, perencanaan sebagai pengambilan keputusan utama ekonomi tentang apa dan berapa banyak, bagaimana, bila dan dimana akan diproduksi, serta buat siapa akan dialokasikan, oleh badan pengambil keputusan yang berwenang atas dasar pengamatan yang menyeluruh terhadap sistem perekonomian sebagai satu kesatuan.

2. Bentuk-bentuk Perencanaan

Setiap negara melakukan pembangunan ekonomi di negaranya dengan cara yang berbeda. Negara kapitalis melakukan pembangunan tanpa perencanaan, bahkan pembangunan ekonomi dilakukan oleh kekuatan pasar, sedangkan negara hanya sebagai fasilitator dalam pembangunan. Negara sosialis melakukan pembangunan dengan menyusun perencanaan. Untuk negara berkembang, perencanaan sangat mutlak dilakukan karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. Untuk membangun ekonomi dalam suatu negara, bermacam-macam cara melakukan perencanaan, antara lain:

a. Perencanaan dengan komando (*direction*) dan perencanaan dengan ransangan (*inducemnt*).

   Perencanaan dengan komando adalah perencanaan yang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat dan ini merupakan integrasi dari masyarakat sosialis. Kelemahannya adalah: (1) perencanaan ini berkaitan dengan rezim birokrasi dan totaliter. Rakyat tidak dibolehkan berbelanja atau mengkonsumsi sesuai dengan selera. Bahkan hak memilih pekerjaanpun tidak ada; (2) perencanaan ini sering tidak memuaskan karena rumitnya masalah ekonomi; (3) tidak luwes, sekali perencanaan dilakukan tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya; (4) pemenuhan sasaran sesuai dengan perencanaan akan sulit; (5) timbulnya kecenderungan pemaksaan; dan (6) perencanaan yang mahal, karena memerlukan para ahli ekonomi, statistik, tenaga terlatih, dan dana yang banyak.

b. Perencanaan dengan rangsangan. Perencanaan ini merupakan perencanaan demokratis. Perencanaan ini merupakan perencanaan manipulasi pasar. Seandainya ditemukan kelangkaan barang di pasar maka dapat dilakukan pengendalian harga dan penjatahan.
c. Perencanaan Keuangan dan perencanaan fisik. Perencanaan keuangan merupakan kunci pokok perencanaan ekonomi. Jika keuangan tersedia dengan memadai maka sasaran fisik gampang dicapai. Dalam perencanaan keuangan pembiayaan ditetapkan dalam bentuk uang dan perkiraan dibuat atas dasar berbagai hipotesis yang menyangkut pertumbuhan pendapatan nasional, konsumsi, impor. Untuk menutup biaya tersebut melalui perpajakan, tabungan dan peningkatan penguasaan uang kas.
d. Perencanaan fisik adalah suatu usaha untuk menjabarkan usaha pembangunan dalam arti alokasi faktor dan hasil produksi sehingga memaksimalkan pendapatan dan pekerjaan.
e. Perencanaan Perspektif dan perencanaan tahunan. Perencanaan perspektif mengacu pada perencanaa jangka panjang dimana sasarannya ditentukan terlebih dahulu (biasanya jangka waktunya 20 sampai 30 tahun). Penjabaran perencanaan perspektif ini dalam bentuk rencana tahunan (untuk Indonesia Pelita yang dijabarkan dalam bentuk rencana tahunan).
f. Perencanaan Kapitalime. Perencanaan kapitalisme tidak didasarkan pada rencana yang terpusat (*central plan*). Dalam perencanaan ini alat-alat produksi dapat dimiliki secara privat. Produksi dilaksanakan olek perusahaan swasta. Pasar memegang peranan penting, sehingga pemerintah tidak membuat perencanaan.

3. Syarat Perencanaan yang Berhasil

Untuk membuat suatu rencana dalam pembangunan ekonomi perlu diperhatikan syarat-syarat membuat suatu rencana tersebut yang diantaranya adalah:

a. Adanya suatu komisi perencanaan yang diorganisir secara tepat yang dilakukan oleh para ahli ekonomi, statistik, sosial budaya, pendidikan dan bidang lainnya yang mendukung perencanaan.

b. Adanya survey yang menyeluruh terhadap sumber potensial yang akan dikembangkan, dan adanya data statistik yang tepat sebagai pendukung perencanaan.
c. Adanya tujuan yang akan dicapai yaitu; peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita memperluas kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan, pemusatan kekuatan ekonomi, menaikkan produksi pertanian, industrialisasi, mencapai pembangunan wilayah berimbang, mencapai swasembada dan sebagainya.
d. Penetapan sasaran dan prioritas dalam pembangunan ekonomi.
e. Mobilisasi sumberdaya yang ada.
f. Keseimbangan dalam rencana.
g. Adanya sistem administrasi yang efisien dan tidak korup.
h. Adanya kebijaksanaan pembangunan yang tepat. Menurut Prof. Lewis, unsur utama kebijaksanaan pembangunan adalah; (1) penyediaan potensi pembangunan; (2) penyediaan prasarana yang memadai; (3) penyediaan latihan khusus dan pendidikan umum; (4) perbaikan landasan hukum bagai kegiatan perekonomian; (5) bantuan untuk menciptakan pasar yang lebih banyak; (6) menemukan dan membanu pengusaha potensial; (7) peningkatan dan pemanfatan sumber yang lebih baik.
i. Setiap perencanaan harus dibuat dampak ekonomis.
j. Adanya perencanaan yang mengacu pada teori konsumsi.
k. Dalam pembuatan perencanaan harus didukung oleh masyarakat.

4. Syarat-Syarat Umum Pembangunan Ekonomi

Dorongan kuat untuk perkembangan ekonomi adalah kehendak untuk menjadi makmur. Untuk itu dalam perencanaan ekonomi sasaran akhirnya adalah bagaimana suatu negara dapat menciptakan kemakmuran pada masyarakatnya.

Menurut Baldwin dan Meier ada 6 persyaratan yang diperlukan agar pembangunan ekonomi mencapai sasaran yang diinginkan, yaitu:

a. Kekuatan dari dalam (*Indegenous Forces*) untuk berkembang.

Yang dimaksud kekuatan dari dalam adalah kekuatan yang timbul dari masyarakat suatu daerah/negara untuk berkembang. Dengan adanya

keuatan dari masyarakat maka perencanaan yang dibuat dapat dukungan dari masyarakat. Jadi harus ada kehendak dari masyarakat untuk menaikan tingkat hidupnya.

b. Mobilitas faktor-faktor produksi.
Ketidak sempurnaan pasar akan sangat membatasi pergeseran faktor-faktor produksi dari penggunaan yang kurang produktif ke penggunaan yang produktif.

c. Akumulasi Kapital.
Ini merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur banyaknya kapital yang dibutuhkan bagi pembangunan ekonomi perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (1) perkiraan tingkat pertambahan penduduk; (2) target kenaikan pendapatan riel per kapita; dan (3) angka ratio pertambahan investasi dan output (ICOR=Incremental Capital Output Ratio).

$$ICOR = \frac{I/PDB \times 100\ \%}{\Delta\ PDB\ (\%)}$$

Keterangan:

ICOR	=	menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi relatif akibat adanya investasi
I/PDB x 100 %	=	Persentase investasi terhadap PDB
Δ PDB (%)	=	Laju pertumbuhan ekonomi (PDB)

Tingkat investasi dapat dinaikkan dengan beberapa cara, antara lain; (1) menaikkan tingkat tabungan melalui pembatasan konsumsi; (2) pemerintah menjual obligasi; (3) pembatasan impor barang-barang konsumsi; (4) mengadakan inflasi; (5) memindahkan pengangguran tersembunyi; (6) pinjaman dari luar negeri; dan (7) memperluas sektor perdagangan luar negeri.

5. Kesulitan dalam Pembangunan Ekonomi

Dalam pembangunan ekonomi juga ditemukan beberapa hambatan, khususnya untuk negara yang sedang berkembang, antara lain:

a. Dualisme ekonomi

Dualisme ekonomi ini merupakan bentuk ekonomi pedesaan dan perkotaan. Ekonomi pedesaan masih bersifat subsisten, sedangkan perekonomian perkotaan sudah mendekati ekonomi pasar. Dengan adanya perbedaan ini anak-anak muda di desa mencari pekerjaan ke kota, sehingga yang tinggal di desa adalah orang-orang yang produktivitasnya sudah mulai menurun.

b. Iklim Tropis

Pada umumnya negara-negara terbelakang berada pada daerah tropis. Menurut para ahli orang daerah tropis produktivitasnya rendah, hal ini disebabkan karena mereka banyak penyakit dan keadaan pertanian yang tidak menguntungkan.

c. Produktivitas rendah

Produktivitas rendah banyak ditentukan oleh kualitas manusia dan sumberdaya alam sebagai faktor produksi belum banyak diolah.

d. Jumlah kapital sedikit

Dinegara yang sedang berkembang kapital merupakan faktor produksi yang langka. Kelangkaan ini menyangkut dengan investasi yang menguntungkan.

e. Perdagangan luar negeri

Negara yang sedang berkembang menghandalkan perdagangan luar negerinya kepada sektor primer yang memberikan nilai tambah yang relatif kecil.

f. Ketidak sempurnaan pasar

Yang dimaksud ketidak sempurnaan apasar adalah seperengkat masalah yang menyangkut dengan immobilitas fakto-faktor produksi, harga yang

tidak luwes, tidak memperhatikan keadaan pasar, struktur sosial yang tidak mudah berubah dan kurang adanya spesialisasi.

g. Kesenjangan pendapatan
Tujuan pembangunan disamping meningkatkan pendapatan per kapita juga menghilangkan kesenjangan absolut dan kesenjangan relatif.

6. Pola Pengembangan Sektor Industri

Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa suatu Negara yang kaya dengan sumberdaya alam pada umumnya ketergantungan terhadap alam sangat tinggi. Bahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, negara tersebut memanfaatkan sumberdaya alamnya dengan tingkat pengendalian yang lemah. Kondisi ini pada suatu Negara yang sumberdaya alamnya tinggi ada kecenderungan mempercepat ketidak seimbangan lingkungan di negara tersebut. Pemanfaatan sumberdaya alam bisa sangat berlebihan, sehingga dalam waktu yang relatif pendek menyebabkan kelangkaan sumberdaya alam.

Dari sisi lain negara yang miskin terhadap sumberdaya alam justru memanfaatkan sumberdaya manusianya untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya negara yang miskin dengan sumberdaya alam memiliki tingkat perekonomian yang tinggi karena negara tersebut memanfaatkan sumberdaya manusia untuk pengembangan sektor industri dan jasa. Kedua sektor ini memberikan nilai tambah yang tinggi. Potenti ini akan memberikan dampak pada kemajuan suatu negara. Pada Gambar 2.2 disajikan pola pengembangan industri.

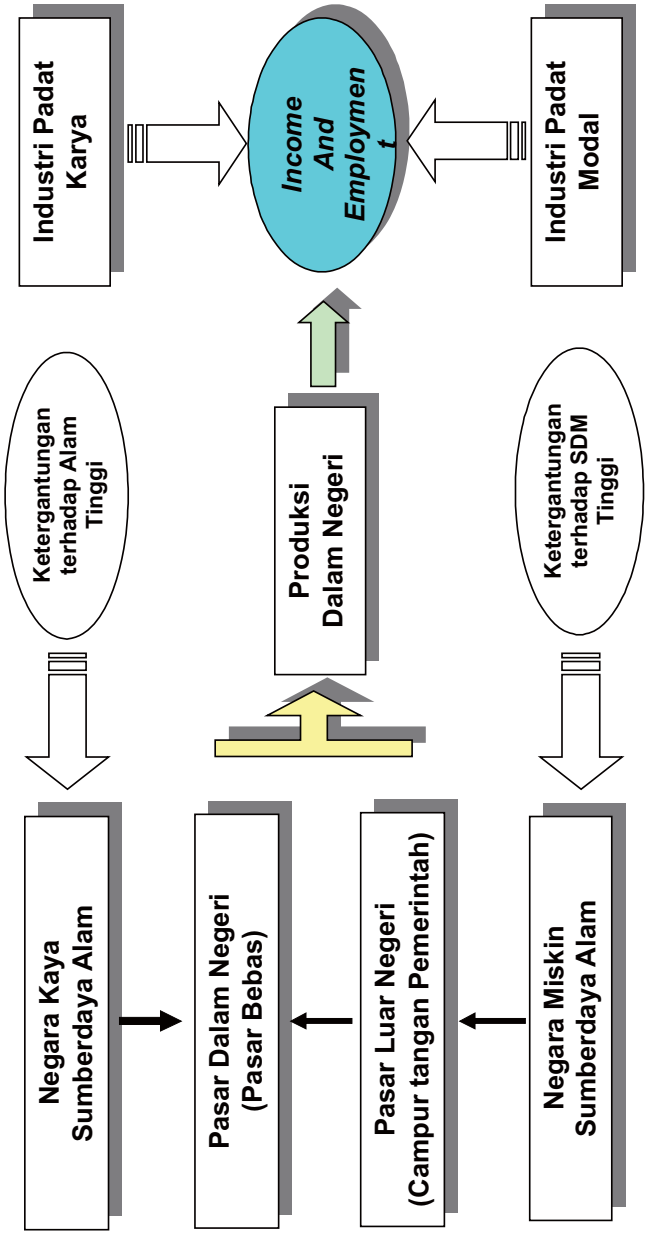

Gambar 2.2. Pola Pengembangan Sektor Industri

BAB III
KEPENDUDUKAN DAN ANGKATAN KERJA

A. Masalah Kependudukan Dalam Pembangunan Ekonomi

Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan, tapi dari sisi lain juga bisa menjadi beban oleh negara untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Robert Malthus yang datang di akhir abad ke 18 dengan teorinya, pada dasarnya menyatakan bahwa penduduk yang banyak merupakan penyebab kemiskinan. Menurut Malthus laju pertumbuhan penduduk yang mengikuti deret ukur tak akan pernah terkejar oleh pertambahan makanan dan pakaian yang hanya bertambah secara deret hitung. Namun pada akhir abad ke XX teori Malthus ini mulai dibantah oleh pakar kependudukan dan pakar ekonomi. Alasan teori ini mulai ketinggalan disebabkan telah berhasilnya beberapa negara mengurangi laju pertumbuhan penduduk, sementara dari sisi produksi telah berhasil ditingkatkan melalui kemajuan terknologi.

Teori Malthus ini pada dasarnya beranjak dari dua gagasan utama: 1) manusia selalu memerlukan sandang pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan 2) nafsu seksual antara dua jenis kelamin akan selalu ada dan tidak akan berubah sifatnya. Pada saat gagasan yang disampaikan Malthus, kondisi pertanian masih bersifat subsisten dan ketergantungan terhadap alam sangat tinggi. Begitu juga teknologi belum mendukung terutama terkait dengan pengaturan kelahiran manusia (di Indonesia dikenal dengan Keluaga Berencana).

1. Masalah Kependudukan

Masalah penduduk dan kependudukan dapat kita soroti dengan pendekatan sistem. Sistem adalah suatu totalitas bagian (satuan komponen) yang terdiri dari berbagai sub komponen yang saling berkaitan, saling tergantung, berinteraksi, saling menentukan sehingga membentuk suatu kesatuan yang terpadu dan harus diperhitungkan dalam setiap mengambil keputusan.

Kebijaksanaan kependudukan nasional pada hakikatnya bertujuan mempengaruhi sistem demografi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem-sistem yang lain dalam makrosistem kependudukan, untuk membawa penduduk kepada suatu keadaan di mana ciri dan perilaku demografinya menguntungkan bagi pembangunan nasional yang pada hakikatnya merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk itu sendiri.

Sebagai fenomena yang sudah menjadi masalah dapat disebut antara lain: 1) tekanan-tekanan pada usaha peningkatan ekonomi karena jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang cepat; 2) tekanan-tekanan pada usaha pembangunan, pendidikan dan tenaga kerja karena komposisi penduduk yang muda dan pertambahan yang cepat dari golongan penduduk usia sekolah dan tenaga kerja; dan 3) masalah-masalah pada usaha keamanan dan pembangunan daerah karena tidak terpenuhinya kesempatan kerja dan kepadatan penduduk yang tinggi yang tidak merata.

Kebijaksanaan dalam bidang-bidang pembangunan yang lain pada hakikatnya tertujuan pada peningkatan kualitas hidup melalui sistem-sistem diluar sistem demografi tersebut dan sebagian dari kebijaksanaan tersebut selain tertuju untuk mengatasi masalah juga dapat secara langsung mempengaruhi sistem demografi.

2. Kebijaksanaan Kependudukan

Kebijaksanaan itu meliputi penyediaan lapangan kerja untuk penduduk yang menghendakinya, memberikan kesempatan pendidikan, meningkatkan kesehatan serta usaha-usaha menambah kesejahteraan penduduk lainnya.

Selanjutnya secara terperinci mengenai kebijaksanaan kependudukan dinyatakan sebagai berikut:

a). Kebijaksanaan kependudukan yang menyeluruh dan terpadu perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan serta diarahkan untuk menunjang peningkatan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan bangsa serta tujuan-tujuan pembangunan lainnya.

b). Pelaksanaan kebijaksanaan dan program-program kependudukan yang meliputi antara lain pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian anak-anak, perpanjangan harapan hidup, penyebaran penduduk dan

tenaga kerja yang lebih serasi dan seimbang.

c). Program keluarga berencana berperan ganda, ialah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujutkan keluarga kecil sejahtera serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.

d). Dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk perlu diambil langkah-langkah untuk mempercepat turunnya tingkat kelahiran.

e). Jumlah peserta keluarga berencana perlu makin ditingkatkan atas dasar kesadaran dan secara sukarela dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

f). Penanganan dan pendidikan mengenai masalah kependudukan bagi seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda, perlu ditingkatkan dan lebih diperluas.

3. Pertambahan Penduduk dan Lingkungan Pemukiman

Dari segi lingkungan, masalah pemukiman adalah masalah penduduk. Ketika manusia berjumlah terbatas dan hidup serba sahaja, maka cara hidup dan bermukin manusia diserasikan dengan lingkungan alam. Waktu itu kita tidak mengenal masalah lingkungan hidup. Tapi manusia bertambah banyak dan akal pikirannya berkembang, sehingga cara hidup dan bermukim tidak lagi diserasikan dengan lingkungan alam. Malah sebaliknya lingkungan yang diubah untuk dicocokkan dengan cara hidup dan bermukim manusia. Ruang dirombak untuk membangun berbagai bentuk perumahan dengan fasilitas pelayanan hidup yang bermacam-macam, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, hiburan atau pasar yang harus ditunjang oleh prasarana jalan, angkutan, listrik, air minum dan sebagainya.

Sebagai suatu rangkaian, jumlah penduduk Indonesia terus bertambah, permukimannya terus berkembang, dan pengaruhnya kepada lingkungan hidup makin besar pula.

Peledakan penduduk menyebabkan pula membesarnya lagi urbanisasi, sehingga tidak ada satu kotapun yang mampu menampung arus penghuni baru yang datang dari daerah pedesaan.

Karena kota tidak mampu menampung arus yang datang akibatnya pengangguran di kota makin lama makin membengkak. Daerah pemukiman bertambah luas, sampah berserakan dimana-mana, persediaan air yang sehat

tidak dapat memenuhi kebutuhan dan akibatnya wabah penyakit menyerang masyarakat.

Proyek seperti perumahan dibangun, pasar diperbaiki, pedagang kakilima dilokalisasi, jalan-jalan diperbesar dan diperbaiki, akan tetapi bersamaan dengan pembangunan tersebut timbul masalah lain, masalah harga tanah yang terus-menerus meningkat yang menimbulkan spekulasi dan masalah penyediaan perumahan bagi golongan yang kurang mampu.

4. Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Pendidikan

Di negara-negara yang anggaran pendidikannya paling rendah, biasanya menunjukkan angka kelahiran yang tinggi. Tidak hanya persediaan dana yang kurang, tetapi komposisi usia secara piramida pada penduduk yang berkembang dengan cepat juga berakibat bahwa rasio antara guru yang terlatih dan jumlah anak usia sekolah akan terus berkurang. Akibatnya, banyak negara yang sebelumnya mengarahkan perhatian terhadap pendidikan universitas, secara diam-diam mengalihkan sasarannya.

Helen Callaway, seorang ahli antropologi Amerika yang mempelajari masayakat buta huruf, menyimpulkan bahwa perkembangan ekonomi dan perluasan pendidikan dasar telah memperluas jurang pemisah antara pria dan wanita. Hampir di mana-mana pria diberikan prioritas untuk pendidikan umum dan latihan-latihan teknis. Mereka adalah orang-orang yang mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam dunia. Sebaliknya pengetahuan dunia ditekan secara tajam pada tingkat yang terbawah.

Pertambahan penduduk yang cepat, lepas daripada pengaruhnya terhadap kualitas dan kuantitas pendidikan, cenderung untuk menghambat perimbangan pendidikan. Kekurangan fasilitas pendidikan menghambat program persamaan/perimbangan antara laki-laki dan wanita, pedesaan dan kota, dan antara bagian masyarakat yang kaya dan miskin.

Pengaruh daripada dinamika penduduk terhadap pendidikan juga dirasakan pada keluarga. Penelitian yang dilakukan pada beberapa negara dengan latar belakang budaya yang berlainan menunjukkan bahwa jika digabungkan dengan kemiskinan, keluarga dengan jumlah anak banyak dan jarak kehamilan yang dekat, menghambat perkembangan berfikir anak-anak, berbicara dan kemauannya, di samping kesehatan dan perkembangan

fisiknya. Kesulitan orang tua dalam membiayai anak-anak yang banyak, lebih mempersulit masalah ini.

Pertambahan penduduk yang cepat menghambat program-program perluasan pendidikan, juga mengarah pada aptisme di dunia yang kesulitan untuk mengatasinya. Tingkat pendidikan adalah sangat menentukan sebagai alat menyampaikan informasi kepada manusia tentang perlunya perubahan dan untuk meransang penerimaan gagasan-gagasan baru.

5. Masalah Kemiskinan

Salah satu wabah penyakit yang menyerang negara-negara sedang berkembang dewasa ini adalah kemiskinan berserta saudara kembarnya keterbelakangan. Karena dalam kenyataannya kedua hal itu melemahkan fisik dan mental manusia yang tentunya mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan.

Pembangunan di negara-negara sedang berkembang bukan hanya meningkatan pendapatan nasional, tidak lagi hanya menambah produksi barang-barang dan jasa-jasa, tetapi pembangunan mengandung pula unsur membangun manusia jasmaniah, rohaniah dan mengubah nasib manusia untuk keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Untuk mengatasi ini pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa upaya diantaranya; BIMAS, BUUD/KUD, Kredit Candak Kulak, SD INPRES, dimasa orde baru dicanangkan 8 jalur pemerataan, dan terakhir ini dicanangkan Inpres Desa Tertinggal (IDT). Pada masa reformasi dikembangkan berbagai jenis kebijakan pembangunan, antara lain: kredit koperasi primer untuk anggota (KKPA) untuk petani di pedesaan, usaha ekonomi desa (UED), kredit usaha rakyat (KUR). Begitu juga untuk memacu kualitas sumberdaya manusia pemerintah mewajibkan setiap penduduk Indonesia minimal pendidikannya setingkat dengan sekolah lanjutan pertama (SLTP) atau dikenal dengan program wajib belajar sembilan tahun (Wajar 9 tahun), bahkan beberapa daerah di Indonesia telah mengembangkan wajib belajar 12 tahun.

6. Sebab-sebab Kemiskinan

Sebab-sebab kemiskinan yang pokok bersumber dari empat hal, yaitu mentalitas si miskin itu sendiri, minimnya keterampilan yang dimiliki,

ketidakmampuannya untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang disediakan, dan peningkatan jumlah penduduk yang berlebihan. Sesungguhnya keempat hal ini dalam kenyataannya kait mengait.

Apabila orang telah terperangkap dalam jurang kemiskinan, dan tidak lagi melihat untuk keluar dari jurang itu, maka ia cenderung mengambil sikap "menerima apa adanya". Sikap ini bukanlah sikap yang seluruhnya irasional. Pada umumnya masyarakat tersebut tidak punya kekuatan untuk membangun ekonomi keluarga, karena mereka tidak punya keterampilan untuk bersaing meraih peluang yang ada. Faktor penyebab lemahnya daya saing meraih peluang yang ada, antara lain: renadahnya mutu pendidikan, kurangnya modal usaha, tidak mempunyai keberanian untuk memulai, dan tidak berani mengambil resiko.

Dari pandangan lain kemiskinan juga identik dengan keterbelakangan. Hal ini akan menyulitkan atau menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi. Keterkaitan ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. Masyarakat yang berpenghasilan rendah kemampuan menabung dan pembentukan investasi baik dari sisi modal maupuan keterampilam sangat kecil. Kondisi ini berdampak terhadap daya saing meraih peluang kerja. Dari sisi lain masyarakat yang berpenghasilan rendah, lebih banyak memanfaatkan tenaganya dibanding pemanfaatan pemikirannya, sehingga berdampak kepada tingkat kesuburannya yang tinggi. Kondisi tersebut akan mempertinggi tingkat reproduksi sehingga tingkat kelahiran juga tinggi dilingkungannya. Faktor penyebab keterbelakangan masyarakat miskin di sebabkan adanya unsur keterbelakangan, antara lain: rendahnya tarah hidup, rendahnya harga diri, dan terbatasnya kebebasan. Taraf hidup yang rendah menyebabkan kemampuan untuk mengembangkan diri terbatas. Keterbatasan yang dimiki tersebut akan menyebabkan munculnya kemiskinan absolut. Secara sinergi akan berdampak kepada kemampuan untuk menjaga kesehatan keluarga dankemampuan mengembangkan pendidikan anak dalam jangka panjang.

Dalam lingkungan kehidupan kelompok miskin juga menyebabkan rendahnya harga diri yang dimulai dari individu masyarakat miskin. Kadang kala justru merekalah yang menyebabkan hargadirinya rendah dan diabaikan oleh orang lain. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat percaya

diri. Dari sisi lain keterbatasan ekonomi menyebabkan terbatasanya kebebasan individu dalam kehidupan mereka terutama yang terkait rasa kesejahteraan keluarga.

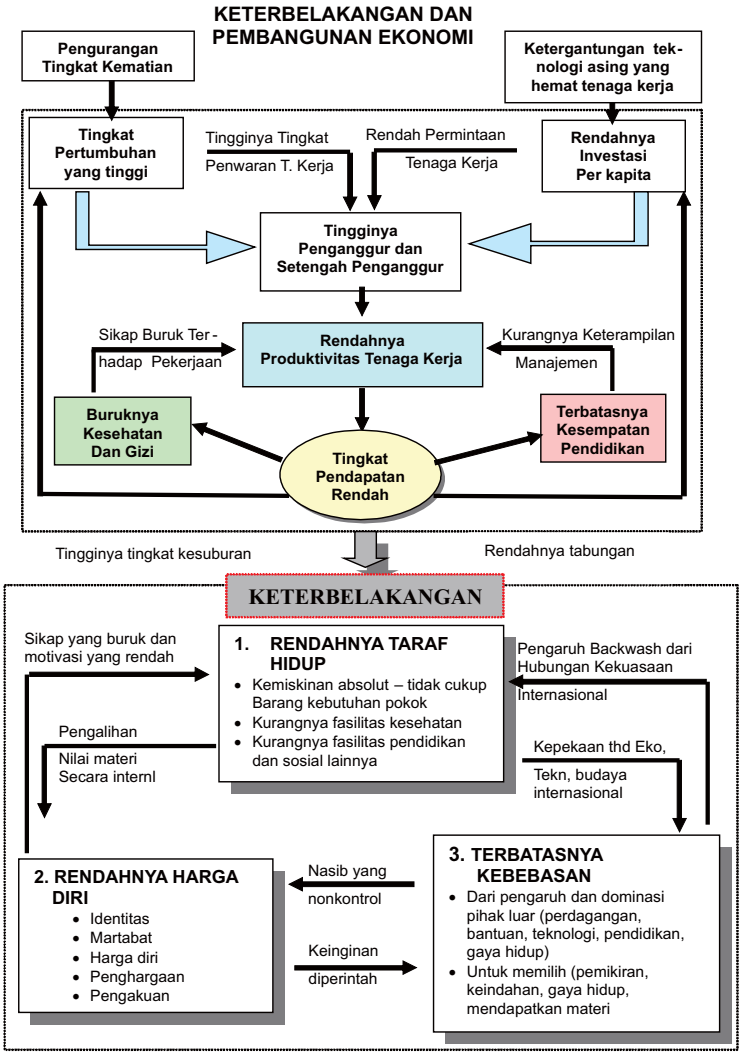

Gambar 3.1. Keterbelakangan dan Pembangunan Ekonomi (Todaro, 2000)

B. Kegiatan Ekonomi dan Angkatan Kerja

Proses pembangunan terkait dengan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dipengruhi oleh faktor produksi (alam, modal, tenaga ahli, dan tenaga kerja). Tenaga ahli dan tenaga kerja merupakan bagian dari angkatan kerja. Semakin berkualitas tenaga kerja, semakin tinggi produktivitasnya, maka proses pembangunan berjalan semakin baik dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan.

Ada hubungan timbal balik antara kekuatan-kekuatan ekonomi dan kekuatan-kekuatan demografi. Ada pandangan yang mengatakan bahwa kejadian demografi adalah sebagian akibat dari kejadian-kejadian ekonomi. Misalnya; pada tingkat perekonomian makmur maka tingkat kelahiran akan berubah, dan tingkat perpindahan penduduk suatu negara cenderung naik pula. Pada waktu depresi, mungkin tingkat kelahiran cenderung menurun. Sebaliknya ada pandangan lain yang mengatakan bahwa kejadian-kejadian ekonomi adalah tergantung dari kejadian-kejadian demografi. Misalnya, besarnya angkatan kerja, jenis kelamin dan lain sebagainya. Dari kedua kutub di atas sulit mengatakan mana yang paling benar. Mungkin yang lebih baik kita mencari jalan tengah, yaitu keduanya mengandung kebenaran dan karena itu saling kait mengkait.

Pertumbuhan angkatan kerja adalah disebabkan oleh trend demografi di masa lalu dan juga sebagai tanggapan (respons) dari suatu keadaan perekonomian. Jadi perubahan karakteristik angkatan kerja adalah karena unsur demografi dan unsur ekonomi secara bersama-sama. Pada wilayah tertentu, semakin membaik perekonomian suatu wilayah akan mempengaruhi perkembangan demografi. Pada wilayah ekonomi yang tumbuh dengan baik ada kecenderungan tinfkat pertumbuhan penduduk juga tinggi. Hal tersebut disebabkan karena sumber dan peluang usaha terbuka, akibatnya muncul migrasi penduduk dari satu wilayah ke wialayah yang lain dalam suatu negara. Migrasi ini lebih banyak disebabkan adanya keinginan untuk merubah nasib di wilayah yang baru dengan harapan pendapatan yang lebih layah. Dampak dari pertumbuhan ekonomi juga meneyebabkan mobilitas penduduk disuatu wilayah juga meningkat. Tentu saja akan mempengaruhi struktur kependudukan di wilayah tersebut.

Penduduk dapat digolongkan dalam: *Economically active population;* dan *Economically inactive population. Economically active population*, terdiri dari para pekerja yang memproduksi barang dan jasa (secara ekonomi) dan mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan. Karena itu disebut *gainfully employed*. Mereka pencari nafkah dan penerima pendapatan serta yang berusaha ke arah itu. Jadi istilah seperti *work-force, gainfully employed*, atau *labor force* dipergunakan untuk menunjukkan *economically actice* dari penduduk suatu negara. *Economically inactive population*, adalah bagi mereka yang bukan pekerja atau sedang tidak mencari pekerjaan, di mana meraka ini hanya mengkonsumsi dan tidak memproduksi sesuatu barang dan jasa dilihat dari pengertian ekonomi.

Seluruh penduduk di suatu negara baik bayi, anak-anak, pemuda, orang dewasa sampai orang tua semuanya mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi kita melihat hanya sebagian dari mereka yang terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa. Kelompok inilah yang disebut penduduk aktif secara ekonomis atau angkatan kerja, dimana angkatan kerja menitik beratkan pada dua kelompok penduduk, yaitu; penduduk yang bekerja dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan (termasuk mereka yang pertamakali mencari pekerjaan).

1. Hubungan Kegiatan Ekonomi dengan Pengangguran

Jumlah penduduk yang makin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang semakin besar pula. Ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Untuk mencari keadaan seimbang maka seyogyanya mereka semua tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan dan keterampilan mereka. Ini membawa konsekwensi bahwa perekonomian seyogyanya harus selalu menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru.

Kegiatan ekonomi harus tumbuh dan berkembang lebih cepat dari pertambahan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Keadaan ini sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran terbuka (*open unemployment*). Jika pertumbuhan perekonomian tidak lancar, maka jumlah orang yang tidak tertampung dalam suatu pekerjaan akan semakin besar.

Sebaliknya bila suatu perekonomian dalam keadaan makmur maka makin kecillah jumlah orang yang menganggur.

Dengan demikian jelaslah bahwa pembangunan ekonomi sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran. Dengan pembangunan perekonomian diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dapat selalu dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk. Melalui pembangunan ekonomi diharapkan kegiatan perekonomian akan menjadi lebih luas sehingga dapat memperkecil jumlah orang yang menganggur. Sebaliknya tanpa adanya pembangunan ekonomi maka kegiatan perekonomian akan makin sempit. Ini berakibat makin kecilnya kesempatan kerja sehingga mempertinggi tingkat pengangguran dalam masayarakat.

2. Pengertian Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, dan Bukan Angkatan Kerja

Tenaga Kerja (*manpower*)

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja. Dalam literatur biasanya adalah penduduk berusia 15-64 tahun. Tetapi kebiasaan yang dipakai di Indonesia adalah seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas (sensus penduduk tahun 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010). Pengertian lain, tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Angkatan Kerja (*labor force*)

Secara demografis besarnya angkatan kerja tergantung dari tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor force participation rate*), yaitu berapa persen dari tenaga kerja yang menjadi angkatan kerja. Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produkstif yaitu memproduksi barang dan jasa.

Bukan Angkatan Kerja (*Not in the Labor Force*)

Adalah bagian dari tenaga kerja (*manpower*) yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan. Jadi mereka ini adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat, atau tidak berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa.

3. Jenis/Jabatan Pekerjaan

Adapun jenis/jabatan pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Tenaga profesional, tehnisi dan tenaga lain.
- Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan.
- Tenaga administrasi, tenaga tata usaha dan tenaga yang berhubungan dengan itu.
- Tenaga penjualan.
- Tenaga Usaha jasa.
- Tenaga uasaha pertanian.
- Tenaga produksi dan sejenisnya, dan operator alat-alat pengangkutan.
- Lain-lainya (termasuk ABRI).

Adapun lapangan pekerjaan/Usaha:

- Pertanian, perburuan, kehutanan dan perikanan.
- Pertambangan dan penggalian.
- Industri pengolahan.
- Listrik, gas dan air.
- Bangunan.
- Perdagangan, rumah makan dan hotel.
- Angkutan, penyimpanan dan komunikasi.
- Keuangan, Asuransi dan perdagangan benda tak bergerak.
- Jasa-jasa kemasyarakatan, sosial dan pribadi.
- Kegiatan yang tidak/belum jelas.

4. Status/Kedudukan dalam Pekerjaan dari Angkatan Kerja

Pengusaha tanpa buruh

Adalah mereka yang melakukan usaha/pekerjaan atas resiko/ tanggungan sendiri dan tidak memakai buruh yang dibayar atau hanya anggota rumahtangganya dengan membayar upah.

Pengusaha pakai buruh

Adalah seseorang yang dalam usahanya dibantu oleh satu atau beberapa buruh yang dibayar.

Buruh atau pekerja

Adalah mereka yang bekerja dengan menerima upah atau gaji baik berupa uang maupun barang.

Pekerja keluarga

Adalah anggota rumah tangga yang membantu usaha yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga tanpa mendapat upah atau gaji.

5. Masalah Ketidakseimbangan antara Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Salah satu masalah yang sering timbul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja (*demand for labor*) dan penawaran tenaga kerja (*supply of labor*), pada suatu tingkat upah tertentu. Ketidakseimbangan ini dapat berupa:

a. Lebih besarnya penawaran dibandingkan permintaan terhadap tenaga kerja (adanya *excess supply of labor*).
b. Lebih besarnya permintaan dibandingkan penawaran tenaga kerja (adanya *excess demand for labor*).

Keadaan yang umum terjadi adalah kelebihan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Meskipun demikian dalam lapangan pekerjaan tertentu terdapat juga kelebihan permintaan tenaga kerja.

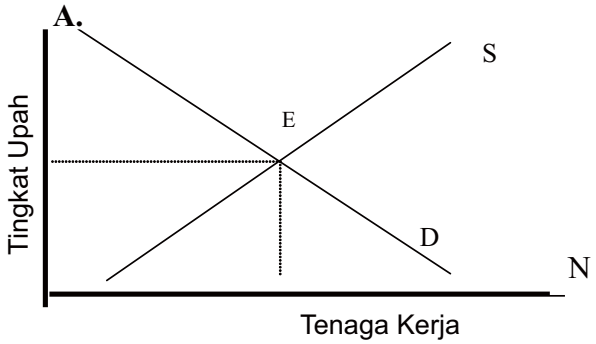

Gambar 3.2. Kurva Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

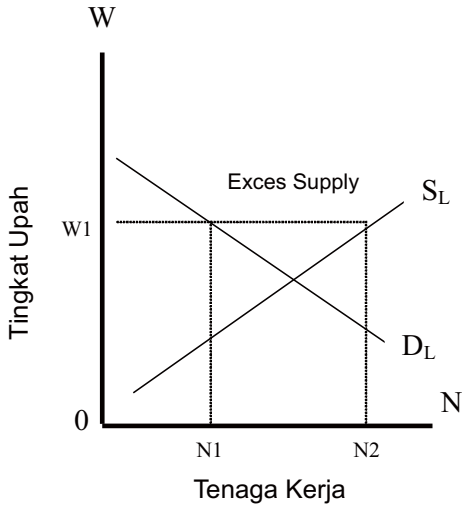

Gambar 3.3. Kurva Exces Supply

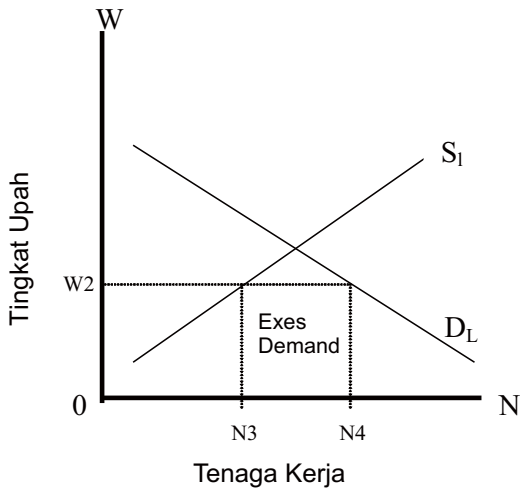

Gambar 3.4. Kurva Exes Demand

Pada Gambar 3.3 dan 3.4 dapat dilihat keterangan lebih lanjut mengenai *excess supply of labor* dan *excess demand for labor*.

Keterangan Gambar:

1. Pada gambar pertama terlihat bahwa jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama dengan jumlah tenaga yang diminta yaitu masing-masing sebesar Ne pada tingkat keseimbangan upah We. Titik keseimbangan terjadi pada titik E.
2. Pada gambar kedua terlihat adanya excess supply of labor sebesar N1 N2.
3. Pada gambar ketiga terjadi excess demand for labor sebesar N3 N4.

Berdasarkan keterangan di atas maka jelaslah bahwa analisis tentang adanya *excess demand* maupun *excess supply for labor* tersebut hanya pada suatu tingkat upah riil tertentu. Jika tingkat upah berubah, maka akan terjadi keseimbangan baru yang merubah keadaan yang dibahas.

C. Urbanisasi, Kemiskinan, dan Kesejahteraan

Mobilitas penduduk merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi. Mobilitas penduduk merupakan meningkatnya aktivitas ekonomi baik antar daerah, antar wilayah maupun antar negara. Namun urbanisasi yang disebabkan karena rendahnya kualitas sumberdaya manusia seperti penduduk yang mencoba merubah nasibnya di perkotaan tanpa didukung oleh keahlian yang tinggi akan mejadi beban bagi suatu daerah atau negara.

1. Pandangan Umum

Sebagaimana di banyak negara berkembang, urbanisasi di Indonesia telah meningkat pada dasawarsa terakhir. Urbanisasi merupakan salah satu proses yang tercepat diantara perubahan-perubahan sosial di seluruh dunia. Pada umumnya urbanisasi itu diartikan sebagai suatu proses, yang membawa bagian yang semakin besar dari penduduk suatu negara untuk berdiam di pusat-pusat perkotaan. Pada tahun-tahun mendatang wilayah perkotaan diperkirakan akan terus tumbuh, paling tidak secepat ini.

Separuh dari kenaikan total penduduk perkotaan disebabkan oleh urbanisasi dari desa ke kota yang biasa disebut dengan istilah migrasi. Seseorang dikatakan melakukan migrasi apabila ia melakukan pindah tempat tinggal secara permanen atau relatif permanen (untuk jangka waktu minimal) dengan menempuh jarak minimal tertentu pula.

Gerak penduduk dari desa ke kota sering merupakan sumber kerisauan di beberapa negara berkembang karena terbatasnya kemampuan penyediaan lapangan kerja dan berbagai fasilitas perkotaan bagi penduduk desa yang datang. Salah satu sebab meningkatnya jumlah penduduk perkotaan akibat adanya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan.

Dengan demikian maka pengertian urbanisasi juga dianggap mengandung arti :

1. Pergeseran penduduk dari desa ke kota.
2. Bertambah besarnya jumlah tenaga kerja non agraris di sektor industri dan sektor tersier di daerah perkotaan dalam berbagai bentuk dan ukuran.
3. Tumbuhnya permukiman menjadi kota.
4. Meluasnya pengaruh kota di daerah pedesaan mengenai segi ekonomi, sosial, kebudayaan, psikologi dan lembaga-lembaga sosial yang lain.

Dalam ilmu-ilmu pengetahuan sosial, urbanisasi juga diartikan sebagai tambahan proses-proses yang bersifat kekotaan.

Sebab-sebab yang menimbulkan arus perpindahan dari desa ke kota sering dicakup dengan istilah faktor pendorong (*push faktor*) dan faktor penarik (*pull faktor*). Sebagai faktor pendorong dapat disebut kemiskinan di desa-desa. Sebab kemiskinan itu bermacam-macam, seperti: cepatnya pertambahan penduduk yang tidak seimbang dengan kecepatan pertambahan persediaan pertanian baru, mekanisasi pertanian dan terdesaknya kerajinan tangan di desa-desa oleh produk industri modern. Terutama di bagian-bagian Asia yang memang sudah padat penduduknya, tekanan kepada penduduk itu amat terasa. Dalam keadaan demikian itu orang pergi ke kota untuk beberapa waktu guna mengumpulkan uang yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat.

Di samping faktor yang seolah-olah mengusir penduduk dari pedesaan, ada faktor penarik yang berasal dari kota, seperti: lapangan pekerjaan yang cukup banyak, upah cukup tinggi, keindahan kota fasilitas-fasilitas sosial jauh lebih banyak dibanding di desa. Faktor penarik seperti tersebut di atas merupakan harapan bagi orang-orang yang pindah ke kota, tetapi diantaranya banyak yang kecewa karena harapan tersebut tidak dapat tercapai.

Menurut *Everest S. Lee* (1976) bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi

orang untuk melaksanakan migrasi atau tidak bermigrasi, yaitu : (1). Faktor daerah asal; (2). Faktor daerah tujuan; (3). Faktor penghalang antara; (4). Faktor individu.

Meskipun pada umumnya migrasi itu dipandang sebagai faktor terpenting yang menyebabkan bertambahnya penduduk kota, akan tetapi juga terdengar suara-suara yang menyimpang dari pendirian tersebut, yang menganggap tambahnya penduduk tersebut karena proses alam sebagai faktor utama.

Menurut *Kingsley Davis* (1966) bahwa, masyarakat kurang berkembang yang sudah berhimpit-himpitan di daerah tempat tinggalnya secara menyedihkan bertambah miskin dan dengan hari depan ekonomi yang gelap. Rakyatnya bertambah banyak karena pertambahan secara biologik dengan kecepatan yang belum pernah terjadi. Ledakan penduduk inilah yang terutama bertanggung jawab atas kecepatan dari inflasi penduduk kota di negara-negara seperti itu. Berlawanan dengan pendapat umum, baik di dalam maupun di luar negara itu, yang menjadi faktor utama bukanlah migrasi dari pedesaan ke perkotaan.

Jadi bukan migrasi atau urbanisasi itu yang terasa mencemaskan, namun proses kemiskinan yang cenderung dibiarkan menyertai kehidupan mayoritas penghuni kota-kota itulah yang merisaukan setiap bangsa, sebab dapat dibayangkan, kalau masyarakat yang miskin itu sudah sulit hidup di desa, dan tetap melarat ketika harus lari ke kota, lalu kemana lagi mereka mengadu nasib.

Dengan demikian kota telah menjelma menjadi tumpuan harapan bagi masa depan sejumlah pihak yang saling berebut kepentingan. Hingga penduduk dari pedesaan itupun berbondong-bondong membanjiri dan menuju celah-celah kehidupan kota. Itulah ladang juang yang baru, tempat taruhan hidup mati mereka. Namun kota-kota itu telah terlanjur dipersiapkan bukan untuk mereka, tetapi tempat pemukiman bagi mereka yang berharta dan berkuasa. Pabrik dan industri, pasar uang dan modal, serta pusat-pusat kekuatan ekonomi, politik dan pemerintahan.

Tak heran, kota merupakan gejala paradoks, tempat konsentrasi harta kekayaan nasional yang terbesar adalah di daerah perkotaan, tetapi di kota-kota pula terjadi konsentrasi terbesar dari pemukiman penduduk yang hidup pada tingkat kemiskinan absolut. Sementara bagian terbesar penduduk kota

bermukim, bekerja dan memperoleh nafkah dari kegiatan sektor informal, pola pembangunan dan pelayanan kota masih saja terus ditujukan untuk kepentingan kelompok elite kota di sektor formal. Meskipun produksivitas dan pendapatan per kapita yang tertinggi menurut ukuran nasional tercatat di kota-kota besar, namun hingga kini pembangunan kota-kota tersebut tidak dibiayai dari hasil sumberdaya kota itu sendiri. Bahkan dengan segala akumulasi kekayaan dan produktivitas yang terkumpul dalam kota besar itu, belum ada satu pemerintahan kotapun yang mampu untuk memanfaatkannya untuk membiayai penyediaan fasilitas pelayanan bagi kebutuhan dasar mayoritas warga kota yang berpenghasilan rendah. Pertumbuhan ekonomi kota tidak dengan sendirinya untuk melayani kebutuhan warganya secara adil dan merata, sebagaimana yang dikenal dengan adanya 8 jalur pemerataan kebutuhan dasar manusia.

Namun, apa hendak dikata. Banjir arus penduduk menyerbu kota itu tidak akan mereda, dan pemekaran daerah-daerah perkotaan adalah mustahil. Karena itu konsentrasi penduduk miskin di daerah perkotaan juga akan terus meningkat, yang berarti kian meningkat pula tuntutan akan penyediaan fasilitas pelayanan kebutuhan dasar bagi lapisan tersebut. Sementara pertumbuhan lapisan masyarakat miskin di kota berjalan lebih cepat dari upaya maupun kemampuan pemerintah kotamadya menyediakan fasilitas pelayanan bagi mereka, pertumbuhan sektor ekonomi modernpun tak akan begitu saja akan menetes ke sektor informal. Andaikata saja kemampuan pemerintah kota bisa ditingkatkan, agaknya belum cukup untuk menutup seluruh kebutuhan pelayanan penduduk miskin yang cepat membengkak itu.

Dengan adanya arus urbanisasi yang semakin meningkat pada dasawarsa ini yang tidak diimbangi dengan laju pertumbuhan ekonomi maka dapat menimbulkan berbagai problem sosial, misalnya akan timbul masalah kemiskinan. Pengertian umum dari kemiskinan itu sendiri adalah kurangnya kesempatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang utama (pokok) seperti: sandang, pangan, papan.

Menurut *Sandra Wallman* (1977) kemiskinan dapat diartikan sebagai berikut: Bahwa kemiskinan itu akibat terbatasnya sumber-sumber ekonomi maupun non-ekonomi dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumberdaya ekonomi seperti : modal, tanah, manusia dan sumberdaya alam.

Sumber non-ekonomi seperti pendidikan, keterampilan dan keahlian:.

Kemiskinan dalam pengertian ini merupakan kemiskinan yang diderita oleh sesuatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan (faktor-faktor produksi) yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Dengan menggunakan kriterium tertentu maka dapat dikatakan/ ditetapkan garis kemiskinan, yang selanjutnya proporsi penduduk di bawah garis ini digolongkan miskin. Dalam penggolongan yang dilakukan selanjutnya, telah ditetapkan oleh *Sajogjo* (1973, 71) bahwa: Batas tingkat pengeluaran per kapita per tahun kurang dari 240 kg beras bagi penduduk pedesaan dan 360 kg beras bagi penduduk perkotaan tergolong miskin sekali, sedangkan pengeluaran kurang dari 180 kg beras bagi penduduk pedesaan dan 270 kg beras bagi penduduk perkotaan sebagai tergolong paling miskin dan yang tergolong miskin adalah mereka yang mempunyai tingkat pengeluaran kurang dari 320 kg beras bagi penduduk pedesaan dan 480 kg beras untuk penduduk perkotaan.

Dengan demikian orang yang berada di bawah garis kemiskinan selalu berusaha untuk memperbaiki hidupnya, salah satu cara yaitu dengan jalan mengadakan urbanisasi ke kota. Di kota mereka mencari orang-orang yang memiliki nasib yang sama, dan kemudian mengisolir diri dalam perkampungan miskin yang bergaya pedesaan. Di tempat yang secara sosial terisolir ini mereka hidup dalam keadaan melarat, karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan layak. Di dalam pemukiman miskin ini terdapat suasana kehidupan yang pengap, karena adanya transisi tersebut.

Menurut *Oscar Lewis* (1965) akibat proses ini timbulah budaya kemelaratan: Budaya kemelaratan seperti: apatisme, serba curiga, fanatisme, putus asa, tergantung dan rendah diri, kriminalitas, banyaknya anak diluar perkawinan, pemborosan dan konsumtif, berorientasi pada hari ini, serta tidak berintegrasi dengan kehidupan kota, kesemuanya itu disosialisasi dari generasi ke generasi.

Hal ini sangat nyata pada permukiman miskin yang tetap merupakan ciri yang menonjol dalam pemandangan kota. Menurut *Mc Taggart* berkomentar: Para migran membangun wilayah pemukiman miskin yang luas dan perumahan liar di sekeliling kota, menempati tanah-tanah kosong

yang mereka temukan. Jasa dan pelayanan yang memenuhi standar yang memadai tidak tersedia bagi daerah pinggiran kota yang tumbuh dengan pesat. Kecenderungan ini akan membesar masalah tersebut, dan membuat kota tetap mewarisi pemukiman yang tidak memadai, komunikasi tidak lancar dan sistem pelayanan umum tidak efektif.

Dengan demikian maka sudah jelas bahwa masalah urbanisasi mempunyai dampak terhadap masalah kemiskinan terutama di negara-negara sedang berkembang yang memiliki latar belakang yang sangat kompleks.

2. Urbanisasi

Proses terjadinya perubahan tenaga kerja dari desa ke kota seperti yang dikemukakan oleh W. Athur Lewis yaitu ekonomi itu terdiri dari dua sektor; a) sektor subsistensi pedesaan yang ditandai dengan produktivitas yang rendah atau surplus tenaga kerja; b) sektor industri perkotaan modern yang ditandai dengan produktivitas yang tinggi, maka terjadi perpindahan tenaga kerja dari pedesaan/ sektor subsistensi secara bertahap ke kota (Todaro, 2000).

Bila diperhatikan lebih lanjut karakteristik migran itu adalah ;

1) karakteristik demografi; pada migran tersebut terdiri dai pemuda-pemuda yang berumur 15-24 tahun;
2) karakteristik pendidikan; tujuan migran ke kota adalah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi yaitu maksud tujuan yang positif;
3) karakteristik ekonomi; pada umumnya yang migran itu adalah orang yang miskin, di desa tidak punya tanah/ sawah, orang-orang yang tidak mempunyai keterampilan yang di desa tidak ada kesempatan untuk memperoleh pekerjaan.

Ketidakseimbangan perekonomian dimungkinkan karena tidak adanya pengaturan pada daerah-daerah yang berpotensi atau daerah yang kurang atau tidak berpotensi berikut kegiatan-kegiatan dan usaha yang dilakukan.

Setiap urbanisasi berlangsung selalu membawa dampak terhadap pembangunan di kota maupun dampak terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Akibat urbanisasi yang terjadi dengan cepatnya terdapat bangunan-bangunan kumuh yang kurang memadai dari segi kesehatan.

Para urban yang melakukan urbanisasi tentu tidak akan berpindah begitu saja, karena keinginan semata, meskipun memang benar bagi masyarakat miskin. Sebagaimanapun orang-orang pedesaan membandingkan kesempatan atau peluang kerja dalam jangka panjang di kota-kota dengan di kampung-kampung yang miskin dengan berbagai macam fasilitas yang tidak memadai. Mereka pada bagian lain terlihat telah mempunyai tempat tinggal yang jauh dari kesederhanaan. Namun jumlah ini lebih sedikit bila kita bandingkan dengan kelompok mereka yang memiliki rumah sederhana.

3. Dampak Urbanisasi

Perpindahan penduduk dari desa ke kota tidak dapat diimbangi dengan kesempatan kerja yang tersedia pada industri di kota. Hal inilah yang dapat menimbulkan akibat yang negatif baik bagi orang yang datang maupun daerah yang didatanginya. Akibatnya banyak diantara mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, tinggal pada rumah-rumah kecil yang tidak beraturan letaknya, atau bahkan ada di bawah kolong jembatan. Demikian pula halnya dengan fasilitas-fasilitas kota yang tersedia pada umumnya sangat kurang dibandingkan dengan banyaknya jumlah pendatang yang harus mendapatkannya. Pembangunan perumahan jauh tidak mencukupi untuk menampung kaum pendatang. Fasilitas pelayanan kesehatan, transportasi dan lain sebagainya tidak mampu memberikan pelayanan yang memadai. Akibat ketidak mapuan ini maka tidak bisa dielakkan lagi akan semakin meningkatnya pemukiman kumuh di perkampungan kota atau di kantong-kantong kota. Kehidupan mereka jauh di bawah garis kemiskinan, dimana rumah tempat tinggal mereka terbuat dari kayu, tidak punya listrik, pendidikan rendah dan tingkat sanitasi yang tidak sesuai dengan syarat-syarat lingkungan.

4. Kemiskinan

Kemiskinan yang telah berjalan dalam rentang ruang dan waktu yang pajang, dan gejala tersebut tidak cukup diterangkan dengan realitas ekonomi. Artinya kemiskinan tidak sekedar gejala keterbatasan lapangan kerja, pendapatan, pendidikan dan kesehatan mesyarakat. Kemiskinan telah menjadi realitas sistem/struktur dari tata nilai kemasyarakatan. Kemiskinan

merupakan suatu realitas budaya yang antara lain berbentuk sikap menyerah pada keadaan.

Kemiskinan rakyat Indonesia tidak disebabkan mereka sejak semula tidak mempunyai faktor-faktor kultural yang dinamis. Mereka miskin dan terbelakang karena kesempatan tidak diberikan kepada mereka. Atau mereka miskin karena kesempatan-kesempatan telah dihancurkan dari mereka. Dan proses penghancuran itu telah berlangsung sejak dulu sampai sekarang, dimulai sejak zaman feodalisme kerajaan, zaman kolonialisme Belanda dan akhirnya pada zaman ketergantungan sekarang ini.

Secara spesifik, kemiskinan rakyat Indonesia sebagian besar disebabkan oleh proses penghancuran kesempatan yang terjadi sebagai akibat proses eksploitasi. Proses eksploitasi ini mengambil bentuk-bentuk yang berikut; 1) pertukaran yang tidak adil dalam perdagangan barang-barang; 2) pembayaran yang tidak adil atas jasa-jasa pekerja; 3) penggunaan pungutan yang relatif memberatkan dari penguasa terhadap rakyat kecil (Adi Sasono, 1987). Di samping itu adanya pengangguran yang terbuka dan terselubung, ini merupakan komponen yang pertama menimbulkan kemiskinan. Kedua, pengangguran ini menyebabkan ratio ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu perbandingan antara jumlah penduduk aktif dengan pendududk yang tidak aktif menjadi tinggi. Di Indonesia *dependency ratio* yang tinggi ini dialami oleh sebagain besar golongan miskin.

Dalam situasi seperti ini timbullah lingkungan kemiskinan (*vicius circle of poverty*) bersama-sama dengan lingkungan keterlebihan (*vicius circle of affwence*). Lingkaran kemiskinan ini terjadi karena kemiskinan, maka produktivitas rendah yang nantinya akan menyebabkan pendapatan rendah dan ini akan membuat daya tawar dan daya kerja lemah, oleh karena produktivitas dan pendapatan rendah maka timbul kemiskinan.

Situasi kemiskinan yang ditanggung itu tidak dapat lagi menimbulkan keharmonisan di pedesaan, maka timbul keinginan untuk mencari penghidupan yang lebih baik dan ingin mencari keharmonisan baru, oleh sebeb itu rakyat pedesaan akan teransang untuk migran ke kota. Tetapi apa yang didapatkan di kota tidak seperti apa yang diharapkan maka timbul masalah baru setelah di kota, hal ini disebabkan karena sampai saat ini kota masih dianggap kota sebagai lambang kehidupan modern. Orang-orang

yang merasa ingin maju berupaya untuk pergi ke kota, baik mencari pekerjaan yang lebih baik, mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, keinginan untuk melepas tradisi yang terikat di desa, ataupun mencari kebutuhan lain yang dianggap dapat meningkatkan status sosialnya.

5. Kemiskinan dan Dampaknya

Secara konseptual kemiskinan dapat dipandang dari berbagai segi. Pertama-tama dari segi subsistem, dimana penghasilan seseorang hanya paspasan untuk dimakan saja bahkan tidak cukup untuk itu. Sedangkan dari segi ekternal mencerminkan kosekuensi dari kemiskinan terhadap masyarakat disekelilingnya, yaitu bagaimana kemiskinan yang berlarut-larut mengakibatkan dampak sosial yang tidak ada habisnya.

Dari segi lain kemiskinan absolut merupakan tingkat hidup seseorang tidak memungkinkan seseorang untuk memenuhi keperluannya yang mendasar, sehingga kesehatannya baik fisik maupun mental terganggu.

Atas dasar ini maka Sayogyo menentukan garis kemiskinan berdasarkan nilai gizi minimal yang diperlukan rata-rata orang. Dari penelitian ini dia menetapkan garis kemiskinan itu pada pendapatan perkapita setahun senilai 240 Kg beras/ tahun untuk daerah pedesaan dan 360 kg beras/ tahun untuk perkotaan. Garis itu tentunya garis yang sangat miskin karena didasarkan atas jumlah pangan minimal yang diperlukan untuk sekedar menyambung hidup.

Kemiskinan sangat berhubungan erat dengan pola pembagian pendapatan. Dari data yang dikemukakan oleh Almasdi Syahza (2009) hasil penelitian di Daerah Riau, terlihat keadaan sebagai berikut;

1) 40 % dari penduduk dengan tingkat pendapatan terendah menerima 26,74 % dari PDRB;
2) 40 % dari penduduk dengan tingkat pendapatan menengah menerima 40,38 % dari PDRB;
3) 20 % dari penduduk termasuk golongan berpendapatan tinggi menerima 32,88 % dari PDRB.

Dari data tersebut terlihat perbandingan antara masyarakat berpenghasilan 20% tertinggi dibandingkan dengan masyarakat 405 berpenghasilan terendah sebesar 1,23. Kondisi ini jauh lebih baik

dibandingkan dengan tahun 1995, dimana perbandingan antara 20% masyarakat berpenghasilan tertinggi dengan 40% masyarakat berpenghasilan terendah sebesar 2,19. Artinya kebijakan pembangunan selama decade 1995-2009 telah berhasil mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di daerah.

Berhasilnya suatu pembangunan memberikan dampak terhadap perubahan pendapatan masyarakat suatu daerah/negara. Artinya pembangunan tersebut berhasil mengetaskan kemiskinan atau dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walau kemiskinan itu tidak bias diberantas sama sekali. Namun pembuat kebijakan berusaha untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan. Dampak kemiskinan yaitu ;

a. Dampak kemiskinan terhadap orang-orang miskin sendiri dan terhadap lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam, dengan sendirinya sudah jelas negatif. Orang miskin tidak mampu memenuhi gizi minimal bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya, dengan akibat bahwa ia dan keluarganya merana fisik dan mentalnya. Dampak lansung adalah keterbelakangan dan rendahnya produktivitas.
b. Dampak kemiskinan terhadap lingkungan sosial tampak pada mengalirnya penduduk ke kota-kota tanpa bekal pengetahuan. Akibatnya sampai di kota bekerja sebagai tukang becak, pemulung, gelandangan dan pengemis yang menghuni kampung-kampung liar yang jorok digubuk-gubuk yang tidak pantas didiami oleh manusia.
c. Dampak lain dari kemiskinan ialah dampaknya terhadap lingkungan alam, sehingga dikatakan masalah lingkungan alam di Indonesia ini adalah masalah kemiskinan.

Sebab kemiskinan itu bersumber dari mentalitas simiskin itu sendiri, minimnya keterampilan yang dimiliki, ketidakmampuan memamfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia, dan peningkatan jumlah penduduk yang relatif berlebihan.

6. Penanggulangan Kemiskinan

Motivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan pasti ada pada setiap diri manusia yang normal, walaupun pada suatu saat dalam

keadaan tertentu motivasi itu tampaknya musnah seperti terlihat dalam sikap "nerimo". Mengenai ini segala sesuatu yang mungkin dilakukan sudah dirancang oleh pemerintah, tentu saja tinggal penyempurnaannya dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya untuk memperoleh gambaran mengenai apa yang telah diprogramkan pemerintah di masa lalu untuk memberantas kemiskinan dan keterbelakangan, diantaranya adalah :

1. Delapan jalur pemerataan yaitu;
   - Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok, khususnya sandang, pangan, dan perumahan.
   - Pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayan kesehatan masyarakat.
   - Pemerataan pembagian pendapatan
   - Pemerataan kesempatan kerja
   - Pemerataan kesempatan berusaha
   - Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya pemuda dan wanita.
   - Pemerataan pembangunan seluruh Indonesia
   - Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Jangkauan semua langkah diatas telah mencakup semua bidang kegiatan masyarakat, termasuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, pengangkutan, industri, bangunan dan jasa.

2. Untuk membangun sektor pertanian, adanya kebijaksanaan dalam usaha intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian dengan pembinaan Pancausaha Tani yaitu ;
   - Penanaman bibit unggul
   - Penggunaan pupuk
   - Perbaikan irigasi
   - Peningkatan alat dan cara bertani
   - Pemberantasan hama dan penyakit tanaman.

3. Menggiatkan transmigrasi, dan didukung oleh pembinaan ekonomi melalui sistim koperasi.

Trasmigrasi ini bila dilaksanakan secara wajar merupakan cara yang memberikan harapan bagi suksesnya usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup si miskin, karena transmigrasi bisa mengurangi kepadatan penduduk di Jawa, mensuplay pulau-pulau lain yang jarang penduduknya dengan angkatan kerja, memberikan sumber penghidupan baru yang mengandung harapan untuk bisa ditingkatkan.

4. Untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan penduduk desa, pada masa pemerintahan orde baru dicanangkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang merupakan salah satu upaya-upaya pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Melalui IDT ini masyarakat desa menentukan kegiatan apa yang diinginkan, yang berarti masyarakat desa itu sendirilah yang dianggap paling mengetahui kegiatan yang paling menguntungkan untuk merubah wajah kehidupan mereka. Namun yang bersifat non teknis perlu mendapat perhatian yang serius karena tidak jarang faktor-faktor non teknis merupakan kendala yang bisa mengurangi bahkan menggagalkan program IDT.

5. Pada pemerintahan reformasi telah dikembangkan berbagai bentuk investasi untuk masyarakat pedesaan dan kalangan berpenghasilan rendah, antara lain: kredit koperasi primer untuk anggota (KKPA), kredit usaha rakyat (KUR), usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP), pembinaan dan pemberian modal usaha bagi penyelenggara usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

7. Kesejahteraan

Setiap manusia di muka bumi ini selalu berusaha untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila kebutuhan hidup belum terpenuhi manusia itu akan merasa risik dan gelisah, bahkan bisa mengarah kepada perbuatan yang tidak baik. Namun apabila kebutuhan hidup sudah terpenuhi maka hidupnya merasa nayaman dan tentram.

Kebutuhan hidup secara ekonomi dapat dibagai menjadi tiga tingkatan, yaitu: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tertier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar bagi suatu keluarga.

Kebutuhan primer ini di Indonesia dikenal dengan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako), yaitu: beras, gula, sabun, minyak tanah, minyak goreng, susu, tepung terigu, lauk pauk, dan pakaian dasar. Terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut berarti suatu keluarga sudah merasa nyamar hidupnya, karena kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari dalam menyambung didup dalam suatu keluarga.

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan bagi suatu keluarga guna meningkatkan kesejahteraan dalam suatu keluarga. Biasanya kebutuhan ini muncul setelah suatu keluarga telah memenuhi kebutuhan primernya. Jadi apabila suatu keluarga sudah dapat memenuhi kebutuhan sekundernya maka keluarga tersebut telah mengalami peningkatan kesejahteraan. Kebutuhan sekunder bertujuan untuk mendapatkan kepuasan dari hasil usaha yang telah dilakukan selama ini. Sebagai contoh: pesawat televisi, VCD, alat komunikasi (telepeon dan HP), kendaraan roda dua (sepeda atau motor), dan lain sebagainya.

Apabila suatu keluarga memperoleh pendapatan yang layak, maka keluarga tersebut akan berusaha meningkatkan kesejahteraannya melalui pemenuhan kebutuhan tertier. Kebutuhan tertier ini adalah kebutuhan bagi suatu kelaurga untuk bersenang-senang. Artinya suatu keluarga menikmati hasil pencahariannya selama ini untuk kesejahteraan keluarga. Karena semua kebutuhan mulai dari primer dan sekunder sudah terpenuhi, maka mereka yang mempunyai pendapatan yang layak sepatutnya pula merasakan kesenangan dalam keluarganya. Kebutuhan tertier tersebut merupakan kepemilikan barang-barang mewah (relatif mahal). Disini juga muncul rasa hargadiri, kebanggaan, dan kepuasan. Contoh kebutuhan tertier, antara lain: televisi, mobil (termasuk pemilikan mobil mewah), rumah mewah, vila, pola hidup mewah, menu makanan yang relatif modern, dan lain sebagainya yang biaya perolahnya relatif besar.

Tujuan hidup bagi setiap manusia adalah memperoleh kesejahteraan. Setiap manusia melakukan usaha adalah untuk memperoleh pendapatan yang layak. Bagi mereka yang mempunyai penghasilan pas-pasan, maka dapat memenuhi kebutuhan primer saja. Apabila pendapatan mengalami kenaikan maka kebutuhan sekunder mulai terpenuhi. Begitu juga jika pendapatan selalu meningkat, sudah jelas manusia tersebut berusaha

meningkatkan kesejahteraanya melalui pemenuhan kebutuhan tertier. Jadi Kebutuhan tertier dapat dipenuhi bagi suatu kelaurga apabila sudah mempunyai penghasilan yang layak.

Bagi suatu keluarga yang mempunyai penghasilan relatif rendah, namun dari sisi penampilannya (gaya hidup) seperti orang yang berpenghasilan tinggi maka gaya hidup oarang tersebut dikebak dengan *demontration effect*. *Demontration effect* adalah orang miskin yang meniru-niru gaya kehidupan orang kaya. Tujuannya adalah suapaya dia dipandang oleh orang lain juga merupakan orang yang ekonominya mampan. Padahal semuanya itu adalah kebohongan ekonomi rumah tangga. Hal tersebut akan membuat orang akan jatuh kepada kemiskinan.

Suatu keluarga dikatakan sejahtera apabila keluarga tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya relatif sempurna. Artinya setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarga tersebut. Kebutuhan setiap keluarga akan sangat berbeda sekali, karena itu tingkat konsumsi keluarga juga relatif berbeda. Bagi suatu kelaurga pemilikan rumah mewah merupakan kebutuhan dan kebanggan, namun bagi keluarga lain barangkali cukup mempunyai rumah yang biasa saja, tapi punya mobil buatan eropa sudah merupakan kebanggaan tersendiri pula.

Hasil penelitian Almasdi Syahza (2008), sebagai indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu keluarga dapat ditelusuri melalui pengeluaran keluarga melalui: pendidikan, kesehatan, transpotasi, rekreasi, komunikasi, kebutuhan listrik, dan asuransi. Ketujuh kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan sekunder dan tertier bagi suatu keluarga. Suatu keluarga tidak akan memenuhi kebutuhan tersebut apabila kebutuhan primernya belum terpenuhi.

Pendidikan

Di Indonesia pendidikan dasar yang dikenal dengan wajib belajar sembilan tahun (wajar 9 tahun) merupakan program pemerintah. Bahkan pemerintah untuk program wajar 9 tahun biaya operasional sekolah ditanggung sepenuhnya (khusus untuk sekolah negeri). Artinya biaya sekolah wajar 9 tahun bagi putra-putri Indonesia relatif rendah. Timbul pertanyaan, siapa yang

ikut pendidikan gratis tersebut? mereka golongan ekonomi mana yang ikut menikmati sekolah gratis itu?

Rata-rata murid yang mengenyam pendidikan di sekolah gratis tersebut sebagian besar adalah orang tua yang ekonominya kurang mampu atau mereka yang berda di pedesaan. Bagi ekonomi yang mampu di pdesaan juga ikut sekolah gratis karena tidak ada pilihan. Bagi keluarga yang ekonominya relatif mampu justru memilih sekolah swasta yang biayanya relatif mahal. Keluarga ini beranggapan bahwa membayar dengan mahal mereka akan memperoleh tingkat keuasan yang relatif seimbang dengan pengorbanan yang dikeluarkan.

Menyekolahkan anak di sekolah biayanya yang relatif lebih murah mereka tidak mendapat keuasan terutama dari cara dan fasilitas pendidikan di sekolah. Bagi mereka yang ekonomi mampu akan menjatuhkan pilihan untuk pendidikan anak-anaknya di sekolah yang bagus tenta saja diimbangi dengan baiaya yang seimbang. Disini muncul kepuasan keluarga dalam pendidikan anak. Kepuasan ini harus dibayar mahal. Hanya keluarga ekonomi mampu yang dapat melakukan ini semua.

Bagi keluarga ekonomi mampu pendidikan merupakan kebutuhan utama guna meraih kesejahteraan jangka panjnag untuk generasi berikutnya. Mereka sanggup mengeluarkan dana investasi untuk pendidikan bermutu terhadap anak-anak mereka. Justru keluarga mampu telah mempunyai anggaran pendidikan anak-anaknya dimasa datang. Anggaran pendidikan ini pada umumnya telah direncanakan melalui tabungan, investasi, dan asuransi pendidikan. Ini semua hanya dapat dilakukan bagi keluarga yang ekonominya mampan. Sementara keluarga miskin belum memikirkan anggaran pendidikan, karena mereka baru terfokus pada kebutuhan primer semata.

Kesehatan

Kesehatan merupakan kunci untuk meraih kesejahteraan. Guna mempertahankan kesehatan yang prima bagi seseorang membutuhkan pemeliharaan kesehatan yang baik. Bagi keluarga yang ekonominya mampu, kesehatan dari sisi ekonomi sangat mahal harganya. Sebagai contoh, suatu keluarga ingin mempertahankan kesehatannya selalu prima, maka keluarga

tersebut membutuhkan perawatan dirinya yang teratur. Mereka selalu berkosultasi dengan dokter, mengkonsumsi makanan yang bermutu tinggi dan mengandung vitamin, memiliki alat olah raga yang baiak, bahkan mengkonsumsi suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Semuanya itu membutuhkan biaya.

Bagaimana suatu keluarga bisa sejahtera apabila ada salah satu anggota keluarga yang sakit. Bagi keluarga yang kehidupannya mampan, biaya perawatan cukup tinggi dibandingkan dengan keluarga miskin. Bagi keluarga kaya berobat bisa ke dokter spesialis dan pearawatan lebih cenderung ke rumah sakit swasta bahkan ke luarnegeri. Namun bagi keluarga miskin berobat cukup ke puskesmas atau untuk mereka di pedesaan mengandalkan dukun semata.

Jadi tingkat kesejahteraan dari sisi kesehatan dapat dilihat bagaimana suatu keluarga tersebut menyisihkan sebagian pendapatannya dalam upaya mempertahan kesehatan. Biaya ini dapat dilihat secara langsung dan tidak langsung. Biaya yang dikeluarkan untuk kesehatan secara langsung antara lain: biaya konsultasi dengan dokter, biaya perawatan di rumah sakit, pembelian obat yang disarankan oleh dokter (resep). Biaya kesehatan secara tidak langsung antara lain: konsumsi untuk suplemen, biaya peralatan olah raga, merubah pola makanan kepada yang lebih bergizi dan berkualita.

Transpotasi

Keluarga ekonomi menengah ke bawah sarana transportasi lebih banyak menggunakan sarana transportasi umum. Sudah barang tentu pengeluaran sebagian pendapatan dalam bentuk konsumsi sangatlah rendah dibandingkan dengan orang kaya. Bagi keluarga ekonomi menengah ke atas lebih banyak menggunakan sarana transportasi pribadi. Dari dua bentuk sarana transportasi ini menunjukkan pengeluaran rumaha tangga yang berbeda.

Bagi keluarga ekonomi mampan, mereka memiliki mobil pribadi sampai beberapa buah untuk kebutuhan sarana transportasi keluarga. Fasilitas tersebut membutuhkan biaya yang tinggi seperti perawatan, bahan bakar, komponen kendaraan, perawatan kendaraan, pajak kendaraan. Semuanya ini adalah bagian dari konsumsi rumah tangga.

Rekreasi

Kegiatan rekreasi merupakan bagian dari kesehatan. Rekreasi merupakan cerminan juga dari kesejahteraan suatu keluarga. Rekreasi membutuhkan biaya yang juga cukup tinggi bila dibandingkan dengan jenis konsumsi yang lain. Yang termasuk bagian dari rekreasi adalah, antara lain: berlibur, berkunjung ke tempat keluarga di luar kota, berakhir pekan dengan keluarga, olah raga, *shoping* ke mal atau ke luar negeri, dan lain sebagainya.

Kita ambil contoh olah raga keluarga kaya, antara lain: golf, bowling, tenis, berkuda, terbang layang, selam, selancar, balet, dansa, balap motor/ mobil. Semuanya itu membutuhkan invesatsi yang relatif tinggi. Sudah barang tentu jenis olah raga ini tidak diminati oleh keluarga yang ekonominya pas-pasan.

Bagi keluarga miskin, rekreasi ini belum merupakan kebutuhan karena biayanya cukup tinggi. Oleh karena itu rekreasi lebih banyak dinikmati bagi keluarga kaya atau ekonominya sudah mulai mampan.

Komunikasi

Sarana komunikasi merupakan kebutuhan primer bagi semua golongan ekonomi, namun yang membedakan antara oarang miskin dengan orang kaya adalah fasilitas dan perkengkapan komunikasi tersebut. Dari sisi lain juga membedakannya adalah pengeluaran untuk komunikasi seperti biaya bulanan atau pulsa telepon.

Komunikasi juga mencerminkan kemajuan suatu keluara dari sisi informasi. Keluarga kaya membutuhkan informasi yang lengkap terkait dengan aktifitasnya sehari-hari. Mulai dari informasi tentang keluarga (baik dekat maupun jauh) sampai kepada kegiatan dunnia kerja (kantor dan bisnis). Sudah barang tentu frekuensi pemakainnya sangat mempengaruhi pengeluaran rumah tangga.

Investasi peralatan komunikasi yang dimiliki oleh keluarga antara lain: pesawat telepon/fax, handphone, radio dan sejenisnya, televisi, kamera, handycam. Jenis kepemilikan alat komunikasi tersebut memperlihatkan strata ekonomi keluarga.

Kebutuhan Listrik

Keluarga kaya kebutuhan listrik di rumahtangganya sangat tinggi. Semua aktivitas di rumah pada umumnya sangat tergantung kepada listrik. Kebutuhan akan listrik ini merupakan bagian dari kesejahteraan suatu keluarga. Hal ini sangat beralasan, karena pemenuhan kebutuhan rumah tangga memakai alat elektronic merupakan kebutuhan primer bagi suatu rumah tangga yang ekonominya mampan, antara lain: alat pendingin rungan (AC), televisi, alat pemasak, peralatan air (pompa, pemanas air), elektronik lainnya yang mendukung aktivitas di rumah tangga.

Semakin tinggi tagihan rekening listrik, menunjukkan kebutuhan akan listrik di keluarga tersebut sangat tinggi, beban biaya rekening merupakan pengeluaran rumah tangga. Artinya semakin tinggi beban rekening listrik memperlihatkan tingkat pemakaiannya tinggi, dan ini bisa menjadi indikator kesejahteraan suatu kelaurga.

Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis jaminan kesejahteraan jangka panjang. Pada tahap awal si nasabah hanya melakukan pembayaran sebagai premi untuk jenis barang dan jasa yang dijaminkan untuk masa depan. Bentuk jaminan dimasa depan tersebut antara lain: asuransi jiwa (dengan segala macam jenis), asuransi kesehatan, asuransi pendidikan untuk putra-putri, asuransi kendaraan, asuransi pertanian, asuransi kebakaran, dan lain sebagainya. Semuanya itu merupakan bagian dari pengeluaran rumah tangga yang pemanfaatannya dapat diperoleh pada masa datang. Asuransi merupakan investasi untuk masa datang dalam bentuk jaminan kesejahteraan keluarga.

D. Investasi Sumberdaya Manusia dalam Pembangunan Ekonomi

Kualitas sumberdaya manusia (SDM) menjadi syarat mutlak untuk melaksanakan pembangunan dimasa datang. Setiap manusia dituntut kompetensi individunya untuk berinovasi guna memacu pembangunan ekonomi disegala bidang. Kualitas SDM itu ditingkatkan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal. Meningkatkan kualitas SDM merupakan investasi manusia jangka panjang, karena setiap orang menempuh jalur

pendidikan tidak secara otaomatis menjadikan dirinya berkualitas. Masih diperlukan proses dalam dunia kerjanya menuju ke jenjang yang lebih ahli atau berkualitas.

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur dari segi ekonomi tapi sejauh mana pembangunan itu bisa meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM). Dalam pembangunan berkelanjutan dewasa ini tidak hanya ditunjang oleh pembangunan ekonomi tetapi juga oleh pembangunan SDM. Karena itu investasi pada aspek manusia sebagai modal dasar pembangunan sangat didahulukan.

Peningkatan kualitas SDM juga merupakan tuntutan yang tumbuh sebagai akibat perkembangan pembangunan yang makin cepat dan komplek. Perkembangan ekonomi, industrialisasi, arus informasi, dan perkembangan iptek yang pesat makin membuat kualitas SDM sangat dibutuhkan. Pembangunan SDM dapat dilakukan melalui empat jalur kebijaksanaan yaitu: 1) Peningkatan kualitas hidup yang meliputi kualitas manusia seperti jasmani, rohani maupun kualitas kehidupan; 2) Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya penyebarannya; 3) Peningkatan SDM yang berkembang dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan penguasaan iptek; dan 4) Pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan perangkat yang mendukung peningkatan kualitas SDM.

Pada saat ini, SDM Indonesia sebagai salah satu sumberdaya pembangunan masih merupakan potensi. Pertumbuhan SDM yang cepat, tetapi dengan kualitas yang masih rendah, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumberdaya pembangunan. Sehubungan dengan itu pemerintah Indonesia mulai mencanangkan perbaikan mutu pendidikan sejak pendidikan dasar yakni melalui penerapan pendidikan wajib belajar 12 tahun bagi anak Indonesia. Kurikulum disempurnakan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Sistem pendidikan diperguruan tinggi semakin diperbaiki melalui peningkatan mutu pendidikan dan kualitas tenaga kependidikan.

SDM merupakan salah satu faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka panjang, bersama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi,

sumberdaya alam (SDA), dan kapasitas produksi yang terpasang dalam masyarakat yang bersangkutan. Namun diantaranya perananm SDM mengambil tempat yang sentral khususnya dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang dimana kesejakteraan manusia dijadikan tujuan pokok dalam ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu SDM sangat dipengaruhi oleh peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan.

1. Pendidikan dan Pelatihan

Telaahan mengenai peran pendidikan dalam pembangunan biasanya berpangkal pada saran pendapat bahwa pendidikan merupakan prasarat untuk meningkatkan martabat manusia. Melalui pendidikan warga masyarakat mendapat kesempatan untuk membina kemampuannya dalam mengatur kehidupannya secara wajar. Perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan berarti membuka kesempatan ekonomi untuk mengupayakan perbaikan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Satu sama lain akan mendukung terlaksananya pemerataan pendapatan masyarakat.

Selama dasawarsa yang lampau sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah negara berkembang dibidang pendidikan formal. Kesempatan untuk pendidikan sudah diperluas, namun hal itu dalam arti kuantitatif. Jalur pendidikan formal yang semakin meluas belum juga menunjukkan hasil yang diharapkan. Kalau diukur dengan serangkaian masalah yang harus ditanggulangi secara lebih mendasar, pengangguran (terbuka maupun terselubung) yang masih cenderung meningkat dengan bertambahnya angkatan kerja yang keterampilannya masih terbatas. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja mendesak ke arah penambahan tempat belajar. Dalam suatu tahap, hal itu memang dilakukan akan tetapi semata-mata secara kuantitatif dan tidak disertai oleh usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan.

Pembinaan mutu SDM dalam rangka pembangunan ekonomi harus diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan dan meluaskan keterampilan teknis, keahlian profesional, dan kecerdasan akademis *(technical skill, professional expertise and academic qualitie)* dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Ditinjau dari sudut penerimaan pendapatan, maka beda antara pendapatan yang diterima oleh seorang keluaran pendidikan tinggi dengan pendapatan seorang tenaga kerja yang hanya mendapatkan pendidikan dasar, tidak begitu besar. Padahal biaya pendidikan tinggi per pelajar adalah 88 kali lebih besar dibandingkan dengan biaya per anak sekolah di tingkat pendidikan dasar. Ketimpangan nisbi pada penerimaan pendapatan dibandingkan dengan tingkat biaya untuk pendidikan tinggi bagaimanapun juga mencerminkan ketimpangan pada tingkat produktivitas dalam ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Artinya, dari sudut kepentingan masyarakat secara menyeluruh kenaikan produktivitas seorang keluaran pendidikan tinggi (diukur dengan pendapatan yang diterimanya) secara nisbi tidak memadai dengan biaya investasi dalam pendidikan.

Disuatu pihak tuntutan zaman mengharuskan agar mutu pendidikan ditingkatkan dan kalau perlu dengan membatasi perluasannya secara kuantitatif. Di pihak lain, akan dihadapi secara terus menerus desakan masyarakat agar disediakan kesempatan pendidikan yang semakin meluas dengan fasilitasnya yang semakin banyak, kendatipun dengan mengabaikan segi mutunya.

Kunci kebijaksanaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya adalah memperbaiki mutu tenaga pengajar dan membina motivasi golongan pengajar. Dikebanyakan negara berkembang tenaga pengajar di sekolah dasar mendapat pendidikan di sekolah lanjutan atas ataupun dengan pelatihan melalui kursus-kursus.

Kelemahan pokok dalam sistem pendidikan di negara berkembang termasuk Indonesia terletak pada sistem dan struktur pendidikan umum di tingkat menengah dan lansung berkaitan dengan pendidikan guru yang diperlukan. Hal ini disebabkan oleh kompartmentasi karena terlalu dini diadakan pemisahan diantara berbagai rupa jurusan, di samping itu banyaknya mata pelajaran/kuliah yang tumpang tindih.

2. Kesehatan Rakyat dan Pembangunan

Tekanan penduduk yang semakin bertambah mengandung akibat bahwa persyaratan minimal mengenai mutu gizi dalam makanan tidak memadai. Begitu pula mengenai fasilitas medis dan pelayan kesehatan umum. Dampak

negatif dari pertambahan penduduk yang sangat tidak terkendali sangat luas dan mendalam. Di keluarga yang tidak melakukan program keluarga berencana dan mempunyai banyak anak, maka anak-anak yang lebih muda sering kali dihinggapi penyakit *malnutrition*. Walaupun keluarga menjadi semakin lebih besar, hal itu sering tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan yang sepadan. Penyediaan pangan maupun perhatian kesehatan terhadap anak-anak yang lebih kecil secara nisbi menjadi berkurang.

Kekurangan gizi menjadi salah satu penyebab bagi gangguan kesehatan dan kematian yang prematur. Sering tidak terpenuhi kebutuhan kalori sehari-hari yang diperlukan secara minimal untuk menjaga kesehatan.

Persyaratan minimal mengenai kebutuhan kalori, protein, vitamin dan unsur-unsur mineral dalam makanan harus amat diperhatikan dari sudut mutu SDM dalam proses pembangunan. Hal itu sama lain mempengaruhi pertumbuhan fisiknya maupun kemampuan nalarnya dan perkembangan mentalnya.

Dari beberapa masalah dan target untuk meningkatkan SDM kita tidak terlepas dari faktor ekonomi terutama masalah investasi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas SDM supaya target pembangunan di masa datang dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk meningkatkan kualitas SDM perlu dipersiapkan mulai dari kebutuhan makanan yang menyangkut dengan perbaikan gizi, sampai kepada penyempurnaan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan di masa depan. Sudah barang tentu membutuhkan investasi yang sangat besar sekali terutama untuk penyediaan sarana dan prasarana.

Untuk perbaikan gizi pemerintah Indonesia telah memulai sejak PJP I (awal tahun 1980-an) yaitu diterapkannya pemakaian Air Susu Ibu (ASI), penyediaan posyandu dengan tenaga medis dan bermacam imunisasi untuk ibu hamil dan anak balita, perbaikan gizi, semuanya ini untuk meningkatkan kualitas manusia masa depan dan menperpanjang harapan hidup anak Indonesia. Sehingga pada generasi yang akan datang diharapkan anak Indonesia mampu menjadi manusia yang berkualitas yang dapat menyokong roda pembangunan di masa akan datang.

Program yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dengan penerapan perbaikan gizi melalui posyandu dalam upaya memperpanjang

harapan hidup anak Indonesia. Perbaikan gizi diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dari sisi fisik dan nonfisik. Pembangunan ekonomi di masa datang sangat tergantung kepada kualitas angkatan kerja dari sisi jasmanni dan rohani. Karena itu perbaikan gizi dimulai dari anak usia dini. Semuanya itu harus didukung oleh program kesehatan masyarakat melalui kebijakan pemerintah.

BAB IV
TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENGEMBANGAN DI WILAYAH PEDESAAN

A. Teori Pembangunan Ekonomi

Setiap negara bekerja keras untuk membangun. Kemajuan ekonomi adalah komponen utama pembangunan, tetapi bukan merupakan satu-satunya. Pembangunan bukan saja fenomena ekonomi. Pembangunan seharusnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan soal pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial.

Pembangunan ekonomi bukanlah konsep baru. Selama berpuluh tahun silam, para ahli ilmu sosial telah bergulat dengan masalah pembangunan ekonomi, tetapi mereka belum berhasil mengembangkan suatu teori pertumbuhan ekonomi yang tersusun secara sistematis. Berikut ini dicoba menyajikan beberapa teori pembangunan yang dikemukanan oleh para ahli ekonomi, sehingga dapat menjadi suatu bahan perbandingan.

1. Teori Pembangunan Klasik

Aliran Klasik muncul pada akhir abad ke 18 dan permulaan abad ke 19, yaitu di masa revolusi industri. Suasana pada waktu itu merupakan awal bagi perkembangan ekonomi. Pada waktu itu sistem liberal sedang merajalela dan menurut Klasik pertumbuhan ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Teori Klasik tentang pembangunan ekonomi membicarakan tentang: (1) Kebijaksanaan pasar. Ahli ekonomi Klasik meyakini adanya perekonomian, persaingan sempurna, pasar bebas yang secara otomatis bebas dari campur tangan pemerintah. Dalam kegiatan ekonomi dapat memaksimumkan keuntungan melalui tangan-tangan yang tak kelihatan; (2) Pemupukan modal. Semua kaum Klasik memandang pemupukan modal merupakan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi. Karena itu mereka menekankan arti tabungan dalam jumlah yang besar; (3) Keuntungan, rangsangan bagi

investasi. Semakin besar keuntungan yang diperoleh dari penanaman investasi, maka semakin besar pula akumulasi modal dan investasi; (4) Keuntungan cenderung menurun. Keuntungan tidak akan naik secara terus menerus, namun cenderung menurun apabila persaingan antara kapitalis cenderung meningkat: dan (5) Keadaan stasionef. Ahli ekonomi Klasik meramalkan timbulnya keadaan stasioner pada akhir proses pemupukan modal. Sekali keuntungan mulai menurun, proses ini akan berlangsung terus sampai keuntungan mencapai nol, pertumbuhan penduduk dan pemupukan modal berhenti, dan tingkat upah mencapai tingkat kebutuhan hidup minimal. Sehingga Malthus menyatakan adanya korelasi antara pertumbuhan penduduk dengan persediaan makanan.

Teori Pembangunan Adam Smith

Adam Smith (1723-1790) bapak dari ilmu ekonomi modern yang terkenal dengan teori nilainya yaitu teori yang menyelidiki faktor-faktor yang menentukan nilai atau harga suatu barang. Tetapi dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776)* yang terkenal dengan buku *Wealth of Nations* yang tema pokoknya mengenai bagaimana perekonomian itu tumbuh.

Adam Smith melihat proses pertumbuhan ekonomi itu dari dua segi yaitu pertumbuhan output (GNP) total, dan pertumbuhan penduduk. Kedua aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain. Smith melihat sistem produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok yaitu; sumber-sumber alam, manusia (pembagian kerja), dan stok barang.

Smith meyakini berlakunya doktrin hukum alam dalam persoalan ekonomi. Setiap orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri, karena itu jika semua orang dibiarkan bebas akan memaksimalkan kesejahteraannya secara agregat. Smith pada dasarnya menentang campur tangan pemerintah dalam industri dan perniagaan. Kekuatan pasar persaingan sempurna merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, dan cenderung untuk meningkatkan kesejahteraan nasional.

Pembagian kerja merupakan titik permulaan dari teori pembangunan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja.

Ia menghubungkan kenaikan itu dengan; 1) meningkatnya keterampilan pekerja; 2) penghematan waktu dalam memproduksi barang; dan 3) penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga.

Dari sisi pemupukan modal harus dilakukan dahulu dari pada pembagian kerja, karena pemupukan modal dalam bentuk barang harus lebih dahulu dilakukan sebelum pembagian kerja. Smith menganggap pemupukan modal sebagai salah satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi, dengan demikian masalah pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal.

Teori Ricardian

David Ricardo (1772-1823) dalam bukunya *The Principles of Political Economy and Taxation* ikut mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi Klasik. Ricardo menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (sumber-sumber alam) tidak dapat ditambah, sehingga akhirnya bertindak sebagai faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat.

Teori pembangunan ekonomi Ricardo ditandai oleh beberapa ciri-ciri antara lain; (1) Tanah terbatas jumlahnya; (2) tenaga kerja (penduduk) yang meningkat atau menurun sesuai dengan tingkat upah alamiah; (3) Akumulasi kapital terjadi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik kapital berada di atas tingkat keuntungan minimal; (4) Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi; (5) Sektor pertanian dominan; (6) Berlaku bagi tanah hukum hasil yang semakin berkurang (*law of diminishing return*).

Dalam teorinya Ricardo mengatakan, apabila potensi sumber-sumber alam telah dieksploitir secara penuh maka perekonomian berhenti tumbuh. Masyarakat mencapai posisi stasioner, dengan ciri-ciri sebagai berikut (Mudrajad Kuncoro, 2000):1) Tingkat output (GDP) konstan (berhenti berkembang); 2) Jumlah penduduk konstan (berhenti bertambah); 3) Pendapatan per kapitan konstan (akibat poin 1 dan 2); 4) Tingkat upah pada tingkat upah alamiah; 5) Tingkat keuntungan berada pada keuntungan minimal; 6) Akumulasi kapital berhenti; dan 7) Tingkat sewa tanah yang maksimal.

Gerakan menuju stasioner dalam model Ricardo diterangi melalui Gambar 4.1. Jumlah penduduk digambarkan pada sumbu horizontal, dan

total produk dikurangi sewa pada sumbu vertikal. Kurva OP adalah fungsi produksi yang menunjukkan total produksi dikurangi sewa sebagai fungsi dari penduduk. Karena penduduk meningkat maka kurva OP mendatar sesuai dengan *law of diminishing return.* Garis lurus yang melalui titik pusat OW mengukur upah nyata konstan. Jadi W_1N_1, W_2N_2, dan W_3N_3 adalah jumlah rekening pada tingkat penduduk ON_1, ON_2, dan ON_3. Pada waktu upah W_1N_1 keuntungan adalah sebesar P_1W_1 sehingga investasi teransang, dan pada saat keuntungan mendekati nol tidak terjadi investasi lagi sehingga terjadi keadaan stasioner.

Dari apa yang telah diuraikan, teori Ricardo mempunyai kelemahan tertentu, diantaranya: 1) Mengabaikan pengaruh teknologi; 2) Pengertian yang salah tentang keadaan stasioneri; 3) Pengertian yang salah tentang penduduk; 4) Kebijaksanaan pasar bebas yang tidak dapat diterapkan; 5) Mengabaikan faktor-faktor kelembagaan; 6) Teori Ricardo adalah teori distribusi, bukanlah teori pertumbuhan; 7) Tanah juga menghasilkan selain dari gandum; dan 8) Modal dan buruh bukanlah koefisien yang tetap.

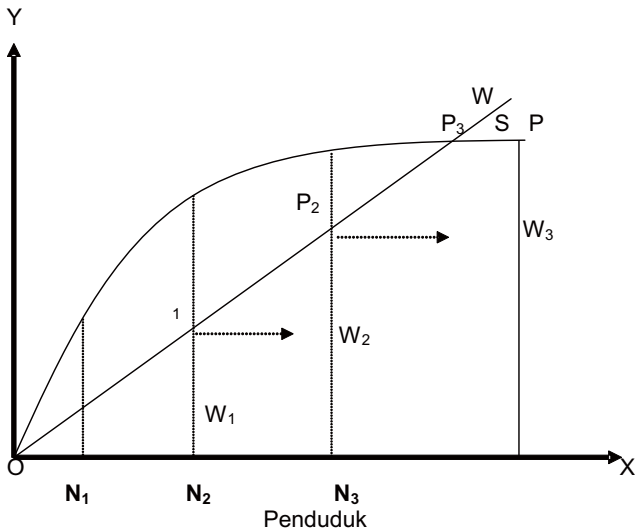

Gambar 4.1. Keadaan Menuju Stasioner

Teori Pembangunan Malthus

Dalam bukunya *Principles of Political Economy* pada tahun 1820 yang terkenal dengan teori kependudukan, kemudian di keluarkan teori tentang pembangunan ekonomi dalam bukunya *The Progress of Wealth* pada tahun yang sama.

Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malah proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten di pihak rakyat. Malthus lebih menitikkan perhatian kepada perkembangan kesejahteraan suatu negara yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan itu tergantung kepada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya dan sebagian lagi dihasilkan oleh nilai produk itu sendiri.

Menurut Malthus pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk melangsungkan pembangunan ekonomi. Malahan pertumbuhan penduduk akibat dari proses pembangunan. Ia mengatakan pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan apabila dapat meningkatkan permintaan efektif. Untuk itu ada beberapa saran yang diajukan oleh Malthus untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yaitu:

- Pertumbuhan yang berimbang. Di dalam sistem Malthus perekonomian dibagi menjadi sektor pertanian dan industri. Kemajuan teknologilah di kedua sektor itu yang dapat mambawa kepada pembangunan ekonomi.
- Menaikkan permintaan efektif. Selain kemajuan teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi juga harus diimbangi dengan meningkatnya permintaan efektif. Untuk itu perlu langkah-langkah sebagai berikut; *Pertama*, pendistribusian kesejahteraan dan pemilikan tanah secara adil; *Kedua*, permintaan efektif dapat ditingkatkan melalui perluasan perdagangan internal dan eksternal., karena perdagangan akan meningkatkan keinginan, hasrat, dan selera untuk mengkonsumsi yang sasarannya untuk menjaga harga di pasar komoditi; *Ketiga*, mempertahankan konsumen tidak produktif untuk meningkatkan permintaan efektif.

Kelemahan teori Malthus**,** antara lain: 1) Stagnasi sekuler tidak melekat pada akumulasi modal; 2) Pandangan negatif terhadap akumulasi modal; 3) Komoditi tidak dipertukarkan dengan komoditi secara langsung; 4) Konsumen tidak produktif memperlambat kemajuan; dan 5) Dasar tabungan bersisi satu.

2. Teori Schumpeter

Josept Schumpeter hidup di zaman modern (1883-1950), teorinya diungkapkan dalam suatu kerangka analisis sosial yang luas seperti halnya ekonom Klasik. Bukunya yang mengungkapkan pertumbuhan ekonomi *Theory of Economic Development (1911)*, kemudian diuraikan dalam buku *Business Cycles (1939)*, dan *Capitalsm, Socialism, and Democracy (1942).*

Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Keseimbangan ini ditandai oleh arus sirkuler yang senantiasa berulang kembali dengan cara yang sama dari tahun ke tahun. Menurut Schumpeter pembangunan adalah perubahan yang spontan terputus-putus pada saluran-saluran arus sirkules tersebut, gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan keseimbangan yang ada sebelumnya. Unsur pertama teletak pada adanya kombinasi baru dalam kegiatan pembangunan tersebut berupa inovasi yang pelakunya adalah wiraswasta atau inovator atau entrepreuner.

Inovasi itu terdiri dari: (1) pengenalan barang baru; (2) pengenalan metode produksi baru; (3) pembukaan pasar baru; (4) penemuan sumber-sumber ekonomi baru; dan (5) menjalankan organisasi baru dalam industri. Schumpeter mengatakan, pengenalan produk baru dan perbaikan terus menerus pada produk inilah yang membawa kepada pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu sumber kenaikan output, tetapi ia bukanlah suatu sumber yang menarik atau yang paling penting. Yang lebih menarik adalah kenaikan output yang bersumber dari perkembangan ekonomi yang disebabkan adanya inovasi tadi. Inovasi ini berarti perbaikan teknologi dalam arti luas.

Inovasi mempunyai tiga pengaruh yaitu: (1) diperkenalkannya teknologi baru; (2) inovasi menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital; dan (3) inovasi pada tahap-tahap

selanjutnya akan menimbulkan proses imitasi, yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi tersebut.

Proses imitasi ini mempunyai pengaruh berupa: 1) Menurunnya keuntungan monopolis yang dinikmati oleh para inovator; 2) Penyebaran teknologi baru di dalam masyarakat (teknologi tersebut tidak lagi menjadi monopoli para inovatornya)

Dalam analisis Schumpeter membedakan antara pertumbuhan ekonomi (growth) dengan perkembangan ekonomi (*development*) seperti disajikan pada Gambar 4.2.

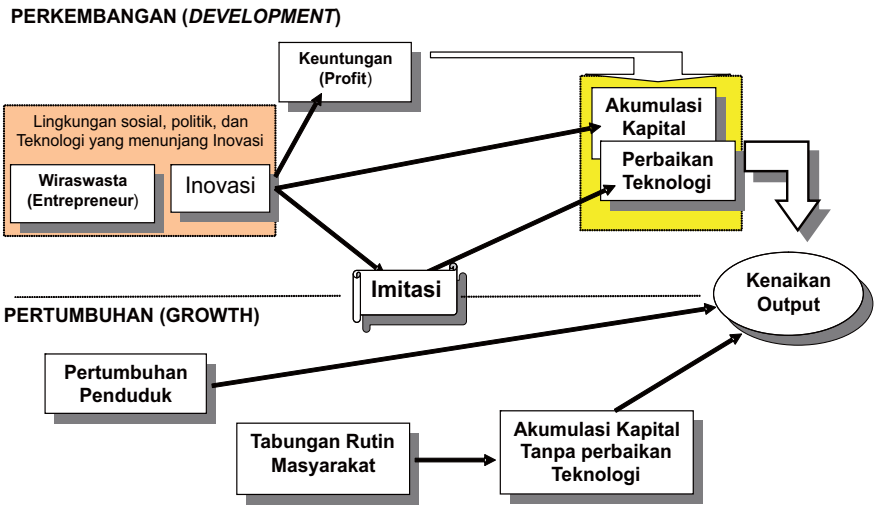

Gambar 4.2. Proses Kemajuan Ekonomi

1. 3. Teori Keynes

Menurut John Maynard Keynes (1936) semakin besar pendapatan nasional semakin besar volume pekerja yang dihasilkan, demikian sebaliknya. Volume pekerja tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari penmintaan konsumsi dan investasi.

Keynes mengemukakan beberapa syarat pokok dalam kemajuan ekonomi, yaitu: (1) kemampuan mengendalikan penduduk; (2) kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil; (3) kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan dan mempedomani hal-hal yang sesuai dengan ilmu pengetahuan; (4) tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produk dan konsumsi.

Teori yang dikembangkan oleh Keynes ini tidak dapat diterapkan pada setiap tatanan sosio-ekonomi. Teori ini hanya berlaku pada ekonomi kapitalis demokratis yang telah maju. Untuk penerapannya di negara terbelakang bersifat terbatas. Asumsi yang dipakainya adalah sebagai berikut: 1) Teori Keynes didasarkan adanya pengangguran siklis yang terjadi selama depresi. Pengangguran ini disebabkan oleh menurunnya permintaan efektif. Pengangguran ini dapat dihilangkan dengan menaikkan permintaan efektif; 2) Analisis Keynes merupakan analisis periode jangka pendek; 3) Teori Keynes didasarkan pada perekonomian tertutup, tetapi negara terbelakang bukanlah perekonomian tertutup, karena perdagangan luar negeri memainkan peranan yang dominan; 4) Adanya penawaran lebih faktor komplemen, faktor tenaga kerja dan sumber perlengkapan lainnya dalam perekonomian.

Peralatan yang dipakai Keynes untuk menguji kebenaran teorinya bagi negara terbelakang, antara lain adalah: 1) Permintaan efektif. Pengangguran merupakan akibat dari kurangnya permintaan efektif dan untuk mengatasinya Keynes menyarankan agar memperbesar pengeluaran konsumsi dan non konsumsi; 2) Kecenderungan mengkonsumsi; 3) Kecenderungan menabung. Ia menyorot tabungan sebagai sifat sosial yang buruk, karena menabung menyebabkan berkurangnya permintaan agregat; 4) Kecenderungan marginal modal; 5) Suku bunga. Suku bunga merupakan faktor penentu kedua investasi; 6) *Multiplier*. Konsep ini didasarkan pada asumsi: (a) pengangguran terpaksa; (b) kurva penawaran output yang tidak elastis; (c) kapasitas lebih pada industri barang konsumsi; dan (d) penawaran modal kerja bersifat elastis; dan7) Langkah-langkah kebijaksanaan.

4. Tahap-tahap Pertumbuhan Ekonomi Rostov

Rostov dalam proses perkembangan ekonomi membagi lima tahap pertumbuhan ekonomi yaitu: 1) Masyarakat tradisional; 2) Pra-syarat tinggal

landas; 3) Tinggal landas; 4) Dorongan menuju kedewasaan; dan 5) Era konsumsi massa dan besar-besaran.

Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional diartikan sebagai suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi. Struktur sosial masyarakat ini berjenjang; hubungan darah dan keluarga sangat menentukan. Kekuasaan politik terpusat di daerah, ditangan bangsawan pemilik tanah yang didukung oleh sekelompok serdadu dan pegawai negeri.

Pra-Syarat Tinggal Landas

Tahap kedua ini merupakan masa transisi dimana prasarat-prasarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan. Manusia-manusia baru yang mau bekerja keras muncul memasuki sektor ekonomi, mereka bersedia menganbil resiko untuk mengejar keuntungan. Pada tahap ini telah muncul perusahaan manufakturing yang menggunakan metode baru, sehingga kegiatan mereka mengarah kepada industrialisasi. Prasarat yang diperlukan untuk mempertahankan industrialisasi menurut Rostov adalah: (1) Perluasan modal overhead sosial khususnya dibidang transpor untuk memperluas pasar, menggarap sumberdaya alam yang lebih produktif; (2) revolusi teknologi di bidang pertanian, sehingga produktivitas pertanian meningkat untuk memenuhi kebutuhan penduduk; (3) perluasan impor, termasuk impor modal yang dibiaya oleh produksi yang efisien dan pemasaran sumber alam untuk diekspor.

Tinggal Landas

Tahap ini merupakan titik yang menentukan di dalam kehidupan suatu masyarakat ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya, kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat istiadat dan lembaga-lembaga. Rostov mendifinisikan tinggal landas sebagai revolusi industri yang bertalian secara langsung dengan perubahan radikal di dalam metode produksi, dalam jangka waktu yang relatif singkat menimbulkan konsekuensi yang menentukan.

Syarat tinggal landas menurut Rostov: (1) kenaikan laju investasi produktif melebihi 10 persen dari pendapatan nasional; (2) perkembangan

salah satu atau beberapa sektor manufaktur penting dengan laju pertumbuhan yang tinggi; (3) hadirnya secara cepat kerangka politik , sosial dan organisasi yang menampung hasrat ekspansi di sektor modern dan memberikan daya dorong pada pertumbuhan.

Dorongan Menuju Kedewasaan

Tahap ini masyarakat telah menerapkan teknologi modern terhadap keseluruhan sumberdaya mereka. Pada tahap ini ada tiga perubahan penting yang terjadi, yaitu: (1) sifat tenaga kerja berubah menjadi tanaga kerja terdidik. Orang lebih suka tinggal di kota dari pada di desa. Upah nyata mulai meningkat, orang telah memikirkan jaminan sosial dan ekonomi yang lebih besar; (2) watak pengusaha berubah, pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer efisien yang halus dan sopan; (3) masyarakat merasa bosan dengan keajaiban industrialisasi dan menginginkan sesuatu yang baru menuju perubahan lebih jauh.

Era Konsumsi Massa dan Besar-besaran

Tahap ini ditandai dengan migrasi besar-besaran ke pinggir kota, pemakaian mobil secara luas, barang-barang konsumen dan peralatan rumah tangga yang tahan lama. Pada tahap ini keseimbangan perhatian masyarakat beralih dari penawaran ke permintaan, dari persoalan produksi ke persoalan konsumsi dan kesejahteraan dalam arti luas. Dalam tahap ini terlihat tiga kekuatan yang tampak cenderung meningkatkan kesejahteraan, yaitu: (1) penerapan kebijaksanaan nasional guna meningkatkan kekuasaan dan pengaruh; (2) ingin memiliki satu negara kesejahteraan dengan pemerataan pendapatan nasional yang lebih adil melalui pajak progresif, jaminan sosial, fasilitas hiburan; (3) keputusan untuk membangun pusat perdagangan dan sektor penting.

B. Teori Basis Ekonomi (*Economic Base*)

Teori *economic base* menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi sektor industri di suatu daerah yang menggunakan sumberdaya produksi lokal, termasuk

tenaga kerja, bahan baku, dan outputnya diekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, dan penciptaan peluang kerja (*job creation*) di daerah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Lincolin Arsyad, 1999).

Ferroux dalam Mudrajad Kuncoro (2002) merupakan orang pertama mengemukakan konsep pusat pertumbuhan ekonomi (*economic growth center*). Ferroux menyatakan pusat pertumbuhan ekonomi itu merupakan suatu tempat dalam suatu ruang atau suatu wilayah, darimana kekuatan-kekuatan sentrifugal memancar dan kemana kekuatan-kekuatan sentripental ditarik. Di dalam suatu proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi di seluruh wilayah secara serentak melainkan akan bekerja kearah pengelompokan aktivitas ekonomi yang akhirnya membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Setiap pusat pertumbuhan ekonomi akan mempunyai daerah penarikan dan daerah penolakan sampai batas tertentu, sehingga dalam suatu wilayah yang luas akan terbentuk gugusan-gugusan pusat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah pengaruhnya (*hinterland*) masing-masing. Konsep pusat pertumbuhan ekonomi ini sebagai suatu gugusan industri-industri, baik yang saling terkait maupun yang berdiri sendiri-sendiri, yang kemudian berkembang menjadi kota dan berlokasi pada suatu tempat tertentu dalam suatu wilayah.

Setiap pusat pertumbuhan ekonomi akan mempunyai daerah penarikan dan daerah penolakan sampai batas tertentu, sehingga dalam suatu wilayah yang luas akan terbentuk gugusan-gugusan pusat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah pengaruhnya (*hinterland*) masing-masing. Menurut Ayub M. Padangaran (1999) konsep pusat pertumbuhan ekonomi ini kemudian dikembangkan dan dijelaskan lebih lanjut oleh Myrdal, Hirschman, Friedman dan Alonso, Boudevile, Hermensen, Hansen, Darwent, dan Richardson

sebagai suatu gugusan industri-industri, baik yang saling terkait maupun yang berdiri sendiri-sendiri, yang kemudian berkembang menjadi kota dan berlokasi pada suatu tempat tertentu dalam suatu wilayah.

Dalam ilmu ekonomi regional teori pusat pertumbuhan ekonomi dinyatakan sebagai salah satu instrumen pembangunan wilayah yang cukup baik karena dapat menimbulkan beraneka efek atau dampak yang positif terhadap pembangunan wilayah yang ada disekitarnya (Richardson, 1977). Pusat pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan efek tetesan ke bawah (*trickling down effect* atau *spread effect*) dan efek polarisasi (*polarization effect* atau *backwash effect*) pada wilayah yang ada disekitarnya (*hinterland*), pendapatan wilayah akan lebih besar jika investasi pembangunan dikonsentrasikan pada pusat pertumbuhan dibandingkan jika investasi pembangunan yang sama digunakan secara menyebar dalam seluruh wilayah yang bersangkutan. Efek pusat pertumbuhan ekonomi terhadap wilayah sekitarnya masih bersifat umum, yaitu pusat-pusat pertumbuhan akan menyebarkan efek yang beraneka ragam terhadap perekonomian wilayah sekitarnya melalui saluran yang beraneka ragam pula.

Pendapat Feroux dijelaskan lebih rinci oleh Myrdal dalam Tulus T.H. Tambunan (2001a), pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi akan berkembang industri-industri yang akan memancarkan berbagai bentuk keuntungan (*spread effect*) ke wilayah sekitarnya berupa permintaan hasil-hasil produksi dari wilayah sekitarnya sehingga perekonomian wilayah sekitar pusat pertumbuhan ekonomi akan ikut berkembang. Lebih lanjut Myrdal menjelaskan kemungkinan adanya efek negatif (*backwash effect*) dari suatu pusat pertumbuhan ekonomi terhadap wilayah sekitarnya yaitu tertariknya atau mengalirnya tenaga kerja potensial dan modal dari wilayah sekitar ke pusat pertumbuhan sehingga wilayah sekitarnya akan kekurangan tenaga kerja yang inovatif atau produktif dan juga dapat mengalami kekurangan modal untuk melakukan atau mengembangkan usaha.

Hirschman (1958) menjelaskan lebih rinci tentang pendapat Myrdal, yaitu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang merupakan daerah maju akan memberikan dua jenis efek ekonomi yang langsung terhadap wilayah sekitarnya yakni efek yang menyenangkan dan efek yang tidak menyenangkan. Efek yang dikemukakan pertama adalah efek menyebar ke

bawah (*trickling down effect*) yaitu meningkatnya pembelian hasil-hasil produksi dan terserapnya tenaga kerja menganggur dari wilayah sekitar oleh industri-industri yang ada di pusat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan efek yang tidak menyenangkan adalah efek polarisasi (*polarization effect*) yakni semangkin lemahnya daya saing industri-industri yang ada di wilayah sekitar terhadap industri yang serupa di pusat pertumbuhan ekonomi sebagai akibat adanya penghematan aglomerasi.

Friedman (1964) juga menjelaskan mengenai efek pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi relatif berbeda dengan penjelasan Myrdal yaitu efek yang ditimbulkan oleh suatu pusat pertumbuhan ekonomi terhadap wilayah sekitarnya dibagi menjadi lima kategori yaitu: 1) efek dominasi, yaitu berpindahnya sumberdaya berupa tenaga kerja dan modal dari wilayah *hinterland* ke pusat pertumbuhan ekonomi; 2) efek informasi, yaitu makin besarnya hubungan dan interaksi antara wilayah sekitar dengan pusat pertumbuhan ekonomi; 3) efek psikologis, yaitu kecenderungan masyarakat pada wilayah *hinterland* untuk mengikuti perilaku dan pola hidup masyarakat yang ada di pusat pertumbuhan ekonomi; 4) efek modernisasi, yaitu terjadinya perubahan-perubahan nilai sosial yang cepat di wilayah *hinterland*; dan 5) efek ekonomi, yaitu terciptanya kondisi berupa imbalan atau hasil yang diperoleh dari setiap kegiatan usaha akan makin besar karena adanya spesialisasi dan peningkatan skala usaha di wilayah *hinterland*.

Pemikiran Mellor dan Lele (1973) serta Mellor (1976, 1984, 1989) amat terkenal dengan model *rural-led strategy of growth*. Johnston dan Kilby (1975) mengembangkan konsep *agricultural and structural transformation model.* King dan Byerlee (1978) menemukan bahwa keterkaitan industri dengan sektor pertanian amat kuat apabila sektor industri mempunyai keterkaitan ke belakang yang tinggi (Mudrajad Kuncoro, 2000).

Adelman (1987) menekankan pentingnya *agricultural demand-led industrialization* (ADLI). Dengan sejumlah analisis, ia membuktikan bahwa strategi ADLI lebih superior dibandingkan strategi *export-led growth,* khususnya apabila diterapkan di negara berkembang di mana peranan sektor pertanian masih substansial. Strategi ini menghendaki pergeseran strategi pertanian dari *surplus extraction* menjadi *surplus creation,* dan ditumbuhkan keterkaitan permintaan antara sektor pertanian dengan sektor lain dalam

perekonomian. Ini sejalan dengan pemikiran Sumodiningrat dan Kuncoro (1990) yang mencoba menuangkan pola simbiosis antara sektor pertanian dan industri di Indonesia melalui strategi pengembangan agroindusti dan agribisnis. Banyak yang sependapat bahwa salah satu syarat perlu (*necessary condition*) untuk dapat dicapai transformasi struktural dari pertanian (industri primer) ke industri manufaktur (industri sekunder) adalah adanya keterkaitan sektor pertanian dan sektor industri yang tangguh. Kaitan yang paling sesuai adalah pengolahan produk-produk pertanian ke dalam pengembangan agroindustri (Mudrajad Kuncoro, 2000).

Pembangunan ekonomi daerah juga didukung oleh teori lokasi. Teori ini juga sering digunakan untuk penentuan dan pengembangan kawasan industri di suatu daerah. Pemikiran teori ini didasarkan pada sifat rasional pengusaha yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin. Karena itu pengusaha akan memilih lokasi usaha yang memaksimumkan keuntungan dan meminimalisasikan biaya produksinya, yakni lokasi yang dekat dengan bahan baku dan pasar (Tulus T.H. Tambunan, 2001). Di samping itu juga banyak faktor lain yang juga harus dipertimbangkan seorang pengusaha untuk memilih lokasi, seperti ketersediaan tenaga kerja, tingkat upah, biaya energi, ketersediaan pemasok bahan baku, komunikasi, infrastruktur, termasuk alat transportasi, sanitasi, fasilitas-fasilitas pendidikan dan pelatihan, dan kualitas pemerintah. Untuk pengembangan suatu lokasi industri di suatu daerah, apakah mampu setiap daerah menciptakan faktor-faktor lokasi insentif yang dapat menarik perusahaan-perusahaan dari luar daerah. Kalau pemerintah daerah mampu melakukan ini, maka akan terjadi *spread effect* di daerah tersebut.

Dalam upaya pembangunan ekonomi pedesaan di daerah Riau, maka industri yang diunggulkan adalah industri pengolahan hasil perkebunan (kelapa sawit). Pembangunan ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, pemerintah daerah berusaha menarik investor dari luar, apakah dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau dalam bentuk penanaman modal asing (PMA). Dalam kerangka pemikiran Kotler (1997), ada sejumlah faktor penentu pembangunan industri di suatu daerah, yaitu faktor daya tarik industri dan faktor daya saing daerah. Kerangka pemikiran Kotler tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.3.

Dari gambar tersebut dapat diuraikan faktor daya tarik industri di suatu daerah, yaitu:

1) Nilai tambah yang tinggi per kapita. Ini berarti industri tersebut memiliki sumbangan yang penting tidak hanya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga terhadap pembentukan PDRB.

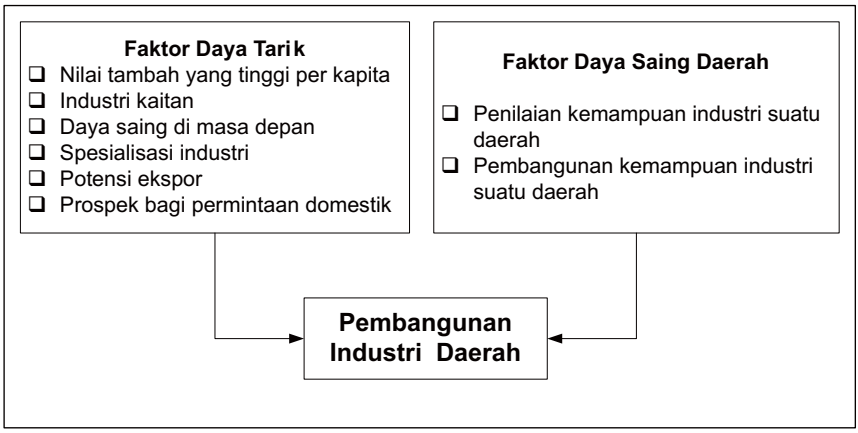

Sumber: Kotler (1997)

Gambar 4.3 Faktor Penentu dalam Pembangunan Industri Suatu Daerah

2) Industri-industri kaitan. Perkembangan industri tersebut akan meningkatkan total nilai tambah daerah atau mengurangi kebocoran ekonomi dan ketergantungan impor.
3) Daya saing di masa depan. Ini sangat menentukan prospek dari pengembangan industri yang bersangkutan.
4) Spesialisasi industri. Sesuatu dasar pemikiran teori klasik mengenai perdagangan internasional, suatu daerah sebaiknya berspesialisasi pada industri-industri dimana daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif sehingga daerah tersebut akan menikmati *gain from trade*.
5) Potensi ekspor. Apabila suatu daerah memiliki *gain from trade,* maka daerah tersebut dapat mengekspor barangnya dengan biaya yang lebih rendah, karena adanya spesialisasi produk dari daerah tersebut.
6) Prospek bagi permintaan domestik. Ini akan memberikan suatu kontribusi yang berarti bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui konsumsi lokal.

Menurut Kotler (1997), faktor penyumbang pada daya tarik industri di suatu daerah/wilayah dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

1) Faktor pasar. Termasuk faktor ini adalah ukuran pasar, ukuran segmen kunci, laju pertumbuhan pasar, keragaman pasar, kepekaan terhadap harga dan faktor ekternal, siklus dan musim, serta kemampuan tawar menawar.
2) Faktor persaingan. Antara lain tingkat pemusatan, substitusi disebabkan oleh progres teknologi, tingkat dan jenis integrasi, dan *entry rate* dan *exit rate.*
3) Faktor keuangan dan ekonomi. Faktor ini adalah nilai tambah, kesempatan kerja, keamanan, stabilitas ekonomi, pemanfaatan kapasitas produksi, skala ekonomis, dan ketersediaan infrastuktur keuangan.
4) Faktor teknologi. Berkaitan dengan teknologi adalah kompleksitas, diferensiasi, paten dan hak cipta, teknologi proses manufaktur yang diperlukan.

Berdasarkan pemikiran Doz dan Prohalad (1987) dalam Tulus T.H. Tambunan (2001a), keunggulan kompetitif yang ada atau yang potensial dari suatu daerah yang menentukan kemampuan industri di daerah tersebut tergantung pada: 1) daya saing-faktor-faktornya, yakni kekuatan relatif faktor-faktor produksinya yang mencakup sumberdaya fisik, sumberdaya manusia, dan teknologinya; 2) daya saing atau kekuatan relatif perusahaan-perusahaan di daerah tersebut. Pada Gambar 4.4 disajikan pendapat dari Doz dan Prohalad tentang penilaian kemampuan industri suatu daerah.

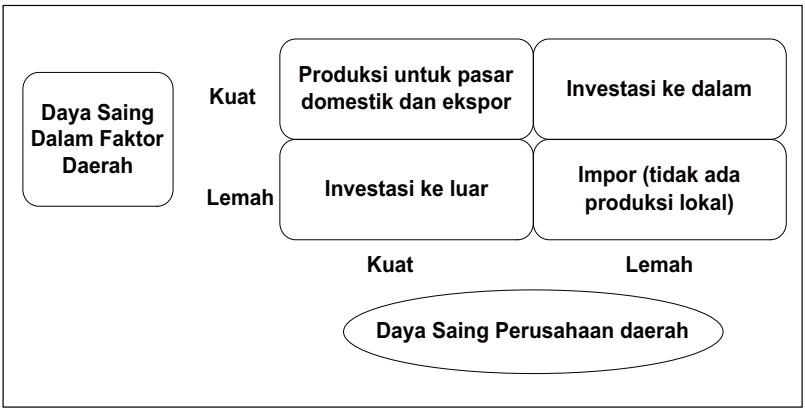

Sumber: Tulus T.H. Tambunan., 2001a

Gambar 4.4 Penilaian Kemampuan Industri Suatu daerah

Ketika daya saing faktor-faktor suatu daerah tinggi dan perusahaan-perusahaan lokalnya sangat kompetitif, maka industri di daerah tersebut akan berkembang pesat. Apabila daya saing perusahaan-perusahaan di daerah tinggi, namum daya saing faktor-faktornya rendah, maka akan timbul tekanan bagi investasi ke luar daerah (*outward investment*), yaitu investasi ke daerah-daerah lain yang mempunyai daya saing faktor yang tinggi. Apabila daya saing perusahaan-perusahaan di suatu daerah rendah, sedangkan faktor-faktor yang dimiliki daerah tersebut tinggi, maka akan timbul investasi ke dalam (*inward investment*) untuk industri-industri di mana perusahaan-perusahaan tersebut berada.

C. Pembangunan Sektor Industri di Pedesaan

Struktur ekonomi yang seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri dapat diwujudkan dengan cara melaksanakan pembangunan yang seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri, sehingga tidak terjadi hambatan dari sisi penawaran dan permintaan. Pada dasarnya alasan yang menimbulkan perlunya pembangunan yang seimbang adalah untuk menjaga agar pembangunan tersebut tidak menghadapi hambatan dalam memperoleh bahan baku, tenaga ahli, listrik, dan fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar. Demikian juga untuk memperoleh pasar dari barang-barang yang diproduksi.

Jika diperhatikan strategi pembangunan di Indonesia sampai saat ini dilakukan pembangunan yang berimbang antara sektor pertanian dengan sektor industri. Pelaksanaan pembangunan yang berimbang ini dapat dilihat dari peranan kedua sektor tersebut terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada masa lalu peranan sektor pertanian terhadap PDB jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor industri.

Sebenarnya strategi pembangunan seimbang itu bertujuan untuk keselarasan dalam perekonomian agar antar sektor mampu saling menunjang dan melengkapi satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari program pembangunan pertanian di subsektor perkebunan. Dalam hal ini pembangunan perkebunan kelapa sawit harus ditunjang oleh industri hulunya, antara lain: penyediaan bibit yang baik, sarana produksi yang memadai, alat-alat pertanian yang mendukung. Begitu juga untuk ke depan

pembangunan perkebunan kelapa sawit juga dapat merangsang tumbuhnya industri hilir, seperti: pabrik kelapa sawit (PKS) yang menghasilkan minyak sawit, dan industri hilir lainnya yang berbahan baku dari minyak sawit, seperti: industri minyak goreng, deterjen, kosmetik, dan industri kimia lainnya.

Menurut Mellor (1976), pembangunan di sektor industri dan sektor pertanian saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Sektor pertanian memproduksi berbagai produk konsumsi dan bahan baku sektor industri (agroindustri), sedangkan sektor industri memproduksi berbagai kebutuhan untuk sektor pertanian.

Selanjutnya studi yang dilakukan oleh Mellor (1984), telah menunjukan adanya hubungan antara satu sektor dengan sektor lainnya dan hubungan tersebut meningkat sejalan dengan tumbuhnya perekonomian. Stagnasi yang terjadi pada sektor pertanian akan dapat menghambat pertumbuhan sektor industri, khususnya agroindustri karena terlambatnya aliran bahan baku dari pertanian yang diperlukan. Sebaliknya jika terjadi kemunduran di sektor industri, maka sektor pertanian mengalami kesulitan untuk memperoleh barang-barang yang diperlukan. Walaupun seluruh sektor dalam perekonomian menurut para ahli saling ada keterkaitan satu sama lain, akan tetapi kuat atau lemahnya keterkaitan antar sektor sangat berbeda.

Pendapat Mellor tersebut juga didukung oleh Jhingan (1990), pertumbuhan berimbang membutuhkan keseimbangan antara berbagai sektor ekonomi. Harus ada keseimbangan yang tepat antara investasi di bidang pertanian dan bidang industri, karena kedua bidang ini bersifat saling melengkapi. Peningkatan output di bidang industri membutuhkan perluasan output di bidang pertanian. Jika pekerjaan di sektor industri meningkat, akan membawa peningkatan permintaan bahan-bahan makanan. Oleh karena itu penawaran bahan makanan harus ditingkatkan. Bersamaan dengan meluasnya sektor industri tersebut, penawaran bahan mentah juga harus ditingkatkan. Karena itu sektor pertanian harus berkembang bersama-sama dengan sektor industri.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Lewis dalam Jhingan (1990), di dalam program pembangunan, semua sektor ekonomi harus tumbuh secara serentak untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara industri dan pertanian serta antara produksi untuk konsumsi dalam negeri dan produksi untuk ekspor.

Dari sisi lain Jhingan (2006) menyatakan, setiap investasi dapat mempunyai pengaruh keterkaitan ke depan maupun pengaruh keterkaitan ke belakang. Pengaruh kaitan ke depan mendorong investasi pada tahap produksi berikutnya, dan pengaruh kaitan ke belakang mendorong investasi pada tahap produksi sebelumnya. Pembangunan harus bertujuan untuk menemukan proyek-proyek yang mempunyai kaitan total paling besar. Keterkaitan ke depan (*forward linkage*) diukur berdasarkan perbandingan antara nilai jual hasil industri diluar sektor industri yang bersangkutan dan seluruh nilai dari jumlah permintaan, dan dinyatakan dalam persentase. Keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) diukur berdasarkan perbandingan antara pembelian dari luar sektor yang bersangkutan dan jumlah nilai produksi yang dihasilkan dan dinyatakan dalam persentase. Keterkaitan ini memperlihatkan saling ketergantungan struktural dalam suatu ekonomi dan seberapa jauh pertumbuhan pada satu sektor dapat memberikan rangsangan terhadap pengembangan sektor lainnya.

Begitu juga apa yang dikemukakan oleh Hirschman dalam Jhingan (1990), investasi pada sektor industri atau sektor-sektor perekonomian yang strategis akan menghasilkan kesempatan investasi baru dan membuka jalan bagi pembangunan ekonomi lebih lanjut. Pembangunan harus berlangsung dengan cara ini, dengan pertumbuhan yang menjalar dari sektor utama ekonomi ke sektor pendukungnya, dari satu industri ke industri lainnya.

Pengalaman di negara-negara Asia menunjukkan adanya berbagai model mobilisasi perekonomian pedesaan untuk memerangi kemiskinan, yaitu (Mudradjat Kuncoro, 2000): *Pertama*, mendasarkan pada mobilisasi tenaga kerja yang masih belum didayagunakan dalam rumah tangga petani gurem agar terjadi pembentukan modal di pedesaan (Nurkse, 1951). Ide tenaga kerja yang masih belum didayagunakan pada rumah tangga petani kecil dan gurem merupakan sumberdaya yang tersembunyi dan merupakan potensi tabungan. Kendati demikian, bila tenaga kerja tersebut diupah sesuai dengan tingkat upah yang berlaku dan potensi tabungan direalisasikan, beberapa cara perlu dilakukan untuk mengamankan tenaga kerja dalam rumah tangga tersebut. Alternatif cara yang dapat digunakan untuk memobilisasikan tenaga kerja adalah: menyusun kerangka lembaga di

pedesaan yang memungkinkan untuk memberdayakan tenaga kerja pedesaan, terutama industri yang berbasis bahan baku dari pedesaan.

Kedua, menitik beratkan pada transfer sumberdaya pertanian ke industri melalui mekanisme pasar (Lewis, 1954; Fei dan Ranis, 1964). Ide bahwa suplai tenaga kerja yang tidak terbatas dari rumah tangga petani kecil dapat meningkatkan tabungan dan formasi modal lewat proses pasar, mulanya tidak berkaitan sama sekali dengan mobilisasi ekonomi pedesaan. Ketersediaan tenaga kerja semacam itu dikemukakan hanya untuk menjelaskan bagaimana pangsa relatif upah dan laba pada sektor kapitalis (apakah sektor pertanian atau industri diperekonomian pedesaan atau kota) dapat saja dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja di sektor subsistem, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tabungan dan invesatsi dalam perekonomian secara umum.

Ketiga, menyoroti pesatnya pertumbuhan pada sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi dan kemungkinan sektor pertanian menjadi sektor memimpin (Schultz, 1963; Mellor, 1976). Model ini dikenal dengan model berbasis teknologi (*Rural-Led Development*). Beberapa permasalahan dalam strategi pembangunan dengan sektor unggulan pertanian didasarkan atas kemungkinan dibukanya pertanian oleh teknologi modern. Sektor pertanian tidak hanya sebagai pemasok sumberdaya (baik pangan, bahan baku, tenaga kerja, atau tabungan), namun sebagai sektor yang mampu meningkatkan permintaan atas produk pertanian dan nonpertanian, karena itu mendukung proses pembangunan seimbang. Proses ini akan berhasil apabila dua syarat berikut terpenuhi, yaitu: 1) kemampuan mencapai tingkat pertumbuhan output pertanian yang tinggi; 2) proses ini juga menciptakan pola permintaan yang kondusif terhadap pertumbuhan. Pada gilirannya ini tergantung pada dampak keterkaitan ekonomi pedesaan lewat pengeluaran atas barang konsumsi yang dipasok dari dalam sektor itu sendiri, dan melalui investasi yang didorong.

Investasi yang terbentuk di suatu wilayah akan menyebabkan munculnya nilai tambah dari kegiatan industri tersebut. Salahsatu tujuan pembangunanekonomi yang berbasis pertanian (agribisnis) adalah kegiatan industri dapat menimbulkan mnilai tambah dari produk pertanian dan menciptakan *multiplier effect* ekonomi di wilayah tersbut.

Nilai tambah yang diciptakan oleh aktivitas agribisnis dihitung dengan rumus:

$$NT = \left[\frac{O}{I_{bb}} H_o \right] - (H_{bb} + B_{lb}) \quad \text{atau} \quad NT(\%) = \frac{I_{bb}}{O} x \frac{NT}{H_o} x100\%$$

Keterangan: NT= nilai tambah (Rp/kg bahan baku), O= luaran (kg/satu proses produksi), I_{bb}= Volume masukan (*input*) bahan baku (kg/satu proses produksi), H_o= Harga luaran (Rp/kg), H_{bb}= Harga bahan baku (Rp/kg), dan B_{lb}= Biaya di luar bahan baku per unit bahan (Rp/kg bahan baku).

Keuntungan yang diperoleh oleh pengolah (pelaku agribisnis) dapat diketahui dengan rumus:

$$KP = NT - ITK \qquad KP(\%) = \frac{}{N_p}.100\%$$

$$ITK = \frac{I_{tk}}{I_{bb}}.U_{tk} \qquad N_p = \left[\frac{O}{I_{bb}} H_o \right]$$

Keterangan: KP= Keuntungan pengolah (Rp/kg bahan baku), N_p= Nilai produksi per unit bahan baku (Rp/kg bahan baku), ITK= Imbalan tenaga kerja (Rp/kg bahan baku), I_{tk}= Masukan tenaga baku (kg/satu proses produksi), dan U_{tk}= Upah rerata tenaga kerja (Rp/HKP).

D. Distorsi Harga dan Pemasaran

Sistem pemasaran pertanian merupakan satu kesatuan urutan lembaga-lembaga pemasaran. Tugasnya melakukan fungsi-fungsi pemasaran untuk memperlancar aliran produk pertanian dari produsen awal ke tangan konsumen akhir. Begitu pula sebaliknya memperlancar aliran uang, nilai produk yang tercipta oleh kegiatan produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran dari tangan konsumen akhir ke tangan produsen awal dalam suatu sistem komoditas (*Gumbira Sa'id, E. dan A. Harizt Intan,* 2001).

Sistem pemasaran pertanian mencakup banyak lembaga, baik yang berorientasi laba maupun nirlaba, baik yang terlibat dan terkait secara langsung maupun yang tidak terlibat atau terkait langsung dengan operasi sistem pemasaran pertanian. Sistem pemasaran yang kompleks tersebut diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya memaksimalkan tingkat konsumsi kepuasan konsumen, pilihan konsumen, dan mutu hidup masyarakat (*Downey. W David* dan *Steven P. Erickson*, 1987).

Dalam pengembangan sektor pertanian ke depan masih ditemui beberapa kendala, terutama dalam pengembangan sistem pertanian yang berbasiskan agribisnis dan agroindustri. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan pertanian khususnya petani skala kecil, antara lain: *Pertama*, lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan. Salah satu faktor produksi penting dalam usahatani adalah modal. Besar-kecilnya skala usahatani yang dilakukan tergantung dari pemilikan modal. Secara umum pemilikan modal petani masih relatif kecil, karena modal ini biasanya bersumber dari penyisihan pendapatan usahatani sebelumnya. Untuk memodali usahatani selanjutnya petani terpaksa memilih alternatif lain, yaitu meminjam uang pada orang lain yang lebih mampu (pedagang) atau segala kebutuhan usahatani diambil dulu dari toko dengan perjanjian pembayarannya setelah panen. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan petani sering terjerat pada sistem pinjaman yang secara ekonomi merugikan pihak petani.

Kedua, ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah sebagai faktor produksi utama dalam pertanian makin bermasalah. Permasalahannya bukan saja menyangkut makin terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan petani, tetapi juga berkaitan dengan perubahan perilaku petani dalam berusahatani. Dari sisi lain mengakibatkan terjadinya pembagian penggunaan tanah untuk berbagai subsektor pertanian yang dikembangkan oleh petani.

Ketiga, pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Sarana produksi sangat diperlukan dalam proses produksi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Pengadaan sarana produksi itu bukan hanya menyangkut ketersediaannya dalam jumlah yang cukup, tetapi yang lebih penting adalah jenis dan kualitasnya. Oleh karena itu pengadaan sarana produksi ini perlu

direncanakan sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan dipergunakan pada waktu yang tepat.

Keempat, terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi. Usaha pertanian merupakan suatu proses yang memerlukan jangka waktu tertentu. Dalam proses tersebut akan terakumulasi berbagai faktor produksi dan sarana produksi yang merupakan faktor masukan produksi yang diperlukan dalam proses tersebut untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan. Petani yang bertindak sebagai manajer dan pekerja pada usahataninya haruslah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan berbagai faktor masukan usahatani, sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha yang dilakukan.

Kelima, lemahnya organisasi dan manajemen usahatani. Organisasi merupakan wadah yang sangat penting dalam masyarakat, terutama kaitannya dengan penyampaian informasi (*top down*) dan panyaluran inspirasi (*bottom up*) para anggotanya. Dalam pertanian organisasi yang tidak kalah pentingnya adalah kelompok tani. Selama ini kelompok tani sudah terbukti menjadi wadah penggerak pengembangan pertanian di pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari manfaat kelompok tani dalam hal memudahkan koordinasi, penyuluhan dan pemberian paket teknologi.

Keenam, kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk sektor agribisnis. Petani merupakan sumberdaya manusia yang memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan usahatani, karena petani merupakan pekerja dan sekaligus manajer dalam usahatani itu sendiri. Ada dua hal yang dapat dilihat berkaitan dengan sumberdaya manusia ini, yaitu jumlah yang tersedia dan kualitas sumberdaya manusia itu sendiri. Kedua hal ini sering dijadikan sebagai indikator dalam menilai permasalahan yang ada pada kegiatan pertanian.

Solusi untuk menghindari terjadinya distorsi harga di tingkat petani, di pedesaan seharusnya dibentuk lembaga ekonomi masyarakat yakni koperasi. Dengan adanya koperasi fluktuasi harga dapat diperkecil. Sudah seharusnya koperasi di pedesaan melakukan terobosan baru dalam bentuk usaha agroindustri. Koperasi di pedesaan dapat berfungsi sebagai, antara lain: Pertama, mencarikan alternatif pemecahan masalah pertanian seperti

penyediaan kredit, pembentukan modal bersama melalui tabungan, penyediaan sarana produksi, pengendalian hama terpadu, pelaku agroindustri, memasarkan produk pertanian dan sebagainya; Kedua, memberikan kemudahan berupa pelatihan dan pembinaan kepada petani dalam usaha-usaha yang dilakukannya; dan ketiga, petani perlu diorganisir untuk memperkuat posisi tawar-menawarnya dalam menghadapi persaingan dan melakukan kemitraan dengan pihak lain (Almasdi Syahza, 2003b).

Dalam era globalisasi pada saat ini dan masa-masa mendatang untuk menyongsong liberalisasi perdagangan peranan pemerintah makin kecil, bahkan kebijaksanaan pajak impor dan subsidi akan dihapuskan bila sampai waktunya. Dengan demikian peranserta pihak swasta, yaitu perusahaan-perusahaan besar sangat diperlukan untuk mengisi dan melengkapi berbagai program pemerintah. Pihak pengusaha yang berada pada posisi yang kuat dapat membantu petani pada posisi yang lemah dalam bentuk jaringan kemitraan. Hubungan ini dapat memberikan keuntungan kepada petani, yaitu: Pertama, transfer teknologi dan penyediaan masukan sehingga petani mampu bersaing dengan produk lain yang dihasilkan dengan menggunakan masukan dan teknologi yang lebih unggul; Kedua, dapat memperoleh informasi dan peluang pasar secara cepat; Ketiga, dapat membuka akses terhadap modal dan pasar; dan keempat, adanya jaminan dan kepastian pasar bagi produk pertanian (Almasdi Syahza, 2003e).

E. Disparitas Pembangunan Wilayah

Sumitro Djojohadikusumo(1994) mengemukakan bahwa, dimensi ekonomi regional dalam persepsi kesenjangan menunjukkan pada ketidakseimbangan dalam jalannya perekonomian antar daerah. Di sini kita dihadapkan dengan suatu dilema yang dapat disebut sebagai dualisme teknologis. Secara pokok adanya dualisme teknologis menimbulkan perbedaan dan ketimpangan mengenai pola dan laju pertumbuhan di antara berbagai kawasan dalam batas wilayah ataupun secara regional. Tanpa adanya kebijaksanaan aktif untuk menanggulangi kecenderungan itu, maka akan ada ketimpangan kumulatif pada pertumbuhan ekonomi di antara berbagai pusat kegiatan dalam wilayah.

Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu proyek pembangunan adalah peningkatan dan pemeratan pendapatan. Pengertian pemerataan pendapatan masih belum diberikan secara jelas, karena para ahli ekonomi umumnya hanya memperhatikan jumlah pendapatan itu sendiri tanpa memperhatikan dari manakah asalnya pendapatan itu. Sekelompok masyarakat dapat saja memperoleh jumlah pendapatan yang sama, namun pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan tersebut belum tentu akan sama besarnya. Karena itu para ahli ekonomi dalam merencanakan pemerataan ini umumnya lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan individual, kemudian mengelompokannya pada suatu ukuran tertentu. Kelompok-kelompok berdasarkan pendapatan tersebut kemudian diukur dan dianalisis. Dari hasil yang diperoleh kemudian disusun perencanaan untuk menentukan langkah-langkah kebijaksanaan yang dapat diambil.

Kalau kita telaah lebih lanjut tentang sasaran pembangunan yakni pemerataan pembangunan masih merupakan tanda tanya yang patut dikaji terutama bila dikaitkan dengan aspek spasialnya. Apakah dengan semakin tumbuh dan berkembangnya investasi swasta yang ditandai dengan semakin pesatnya penanaman modal baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri akan memperkecil disparitas spasial ?

Jika jawaban atas pertanyaan tersebut tidak, jelas yang terjadi selama ini adalah *polarization effect* yang ditandai dengan mengalirnya modal dan tenaga kerja dari daerah yang belum berkembang ke daerah yang telah berkembang dan *spread effect* serta *strikling down effect* (banyaknya bahan baku dari daerah yang belum berkembang yang dapat dipasarkan ke daerah yang telah berkembang karena kebutuhan di daerah tersebut meningkat) yang diharapkan malah tidak terjadi. Akibat yang dirasakan adalah daerah yang sudah berkembang semakin berkembang dan di daerah tersebut akan terjadi penumpukan kegiatan industri, sementara daerah-daerah lain semakin tertinggal dan tidak diminati oleh investor. Adanya hal-hal yang dikemukakan di atas mendorong keharusan adanya *government intervention* (campur tangan pemerintah) untuk mengurangi tingkat *Regional Inequalities* tersebut.

Menurut Tulus T.H. Tambunan (2001) cukup banyak studi mengenai ketimpangan ekonomi regional di Indonesia dan faktor-faktor penyebabnya. Diantaranya dari Ibrahim, Hendra Esmara, Uppal dan Handoko, Iwan Jaya

Aziz, Hill dan Williamson, Sediono dan Igusa, Sondakh, Aktia dan Lukman, dan Syafrizal. Kesemua pandangan dari hasil-hasil studi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar propinsi di Indonesia adalah, antara lain: 1) kosentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah; 2) kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut menjadi rendah; 3) kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapital antar propinsi; 4) perbedaan sumberdaya alam antar wilayah, dan pemanfatan serta pengeloaan yang tidak efisien; 5) perbedaan kondisi demografi antar daerah, penyebab utamanya adalah pertumbuhan dan jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat, dan etos kerja; dan 6) kurang lancarnya perdagangan antar daerah, penyebabnya adalah terbatasnya sarana transportasi dan komunikasi.

Menurut Mudradjat Kuncoro (2000) ada teori yang menyatakan ada *tradeoff* antara ketidak merataan dan pertumbuhan. Namun kenyataan membuktikan ketidak merataan di negara sedang berkembang dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi rendah. Di banyak negara sedang berkembang tidak ada *tradeoff* antara pertumbuhan dan ketidakmerataan. Jeffrey Williamson, menyimpulkan bahwa ketidak merataan yang timbul berdampak sedikit terhadap akumulasi modal, namun ketidak merataan yang timbul memang memegang peranan penting dalam sulitnya akumulasi modal. Ada berbagai cara pertumbuhan ekonomi mempengaruhi distribusi pendapatan. Menurut Fields. Gary S (1990), ada tidaknya *tradeoff* antara pertumbuhan dengan pemerataan tergantung jenis data yang digunakan, apakah silang tempat (*cross section*), runtut waktu (*time series*), ataukah menggunakan data mikro.

Studi kompresif yang dilakukan oleh Fields menemukan fakta, yaitu: *Pertama*, negara yang mengalami kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan ternyata kurang lebih sama dengan banyaknya negara yang mengalami ketimpangan pendapatan; *Kedua*, kemiskinan absolut menurun di kebanyakan negara; dan *ketiga*, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan banyak yang berjalan beriringan. Fields menyimpulkan, pertumbuhan ekonomi

yang cepat umumnya menurunkan kemiskinan, namun pertumbuhan ekonomi tidak menjamin adanya pengurangan kemiskinan.

Dari apa yang diungkapkan di atas tentang penyebab ketimpangan antar wilayah dan ketidak merataan pendapatan, maka dalam penelitian ini mencoba mengkaji apakah pembangunan perkebunan di daerah Riau juga penyebab ketimpangan antar daerah atau sebaliknya dapat mengurangi ketimpangan tersebut dan menciptakan pendapatan yang lebih merata antar golongan dalam masyarakat, khususnya pada masyarakat pedesaan.

Bagi Indonesia dalam pembangunan di masa datang akan menghadapi tiga kelompok permasalahan mendasar (Sumitro Djojohadikusumo, 1994), yaitu; *Pertama*, lapangan kerja produktif dan pengangguran. Masalah ini terkait dengan ketimpangan antara produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dan produktivitas di sektor sekunder (industri dan kontruksi); *Kedua*, ketimpangan pada perimbangan kekuatan di antara golongan-golongan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa; dan *ketiga*, ketidakseimbangan ekonomi antar daerah.

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah rasio gini (*gini ratio*) dan kriteria Bank Dunia. Nilai gini rasio berkisar antara nol dan satu. Bila rasio gini sama dengan nol berarti distribusi pendapatan amat merata sekali karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Secara grafis, ini ditunjukkan oleh berimpitnya kurva Lorens dengan garis kemerataan sempurna. Namun bila rasio gini sama dengan satu menunjukan terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja. Singkatnya semakin tinggi nilai rasio gini maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu negara. Sebaliknya, semakin rendah nilai rasio gini berarti semakin merata distribusi pendapatan. Perbandingan tingkat ketimpangan dari Bank Dunia dan Gini Ratio dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rasio Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Kriteria Penilaian		Tingkat Ketimpangan
Gini Ratio	Bank Dunia*	
< 0,30	> 17 %	Rendah
0,30 – 0,40	12 – 17 %	Sedang
> 0,40	< 12 %	Tinggi

*) Untuk 40 persen penduduk berpendapatan terendah
Sumber: Suseno Triyanto W, 1990, *Indikator Ekonomi*.

Berbagai studi empiris menunjukkan modernisasi pertanian telah memperbesar kesenjangan distribusi pendapatan. Studi Gibbons menyimpulkan bahwa revolusi hijau telah memperparah kepincangan distribusi pendapatan masyarakat karena meskipun petani kecil secara umum membaik kondisinya sebagai hasil modernisasi pertanian, namun posisi mereka secara relatif lebih buruk dibandingkan petani kaya yang jauh meningkat penghasilannya. Hasil penelitian Arief dan Wong membuktikan bahwa di daerah pedesaan Jawa terjadi proses meningkatnya kepincangan pendapatan, seperti ditunjukkan oleh meningkatnya rasio gini dari 0,3048 pada tahun 1970 menjadi 0,3604 pada tahun 1976 (Mudradjat Kuncoro, 2000).

Amiruddin Ardani (1996) menganalisis kesenjangan pendapatan dan konsumsi antar daerah dengan menggunakan indeks Williamson selama 1968-1993 dan 1983-1993. Kesimpulannya mendukung hipotesis Williamson bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi terdapat kesenjangan kemakmuran antar daerah, namun semakin maju pembangunan ekonomi kesenjangan tersebut semakin menyempit.

Indek Williamson merupakan salah satu alat untuk menganalisis tingkat ketimpangan antar wilayah pada suatu negara/daerah. Pada awal perkembangannya, sebenarnya Williamson menggunakan pengukuran regional inequalities tersebut pada beberapa negara. Pengukuran serta interpretasinya terhadap *regional inequalities* ini disebutkan sebagai *International Cross-Section Analysis*. Data dasar yang digunakan ialah pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Jadi pengertian *inequalities* (ketimpangan wilayah) disini diartikan sebagai ketimpangan dalam pendapatan per kapita.

Seperti yang dikutip oleh Tommy Firman (1977), menurut Williamson, pada umumnya *Regional Inequelities* cenderung membesar pada saat terjadinya proses perkembangan. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut: 1) migrasi penduduk yang produktif (usia kerja) dan memiliki skill/ terdidik ke daerah-daerah yang telah berkembang, karena di sana mereka dapat memperoleh upah/gaji yang lebih tinggi; 2) investasi cenderung berlaku di daerah yang telah berkembang, karena faktor market dan lain-lain, dimana keuntungan relatif lebih besar, demikian pula resiko kerugian relatif lebih kecil; 3) kebijaksanaan pemerintah cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya *social and economic overhead capital* di daerah yang telah berkembang karena kebutuhan yang lebih besar. Hal ini justru mendorong perkembangan industri yang lebih pesat; 4) tidak adanya kaitan (*linkages*) diantara *regional markets,* menyebabkan rintangan untuk pemancaran (*spread effects*) inovasi dan *income multiplier*.

Apabila diamati pembangunan di Daerah Riau yang terjadi selama ini, adalah *polarization effect*, seperti terjadinya urbanisasi oleh tenaga kerja pedesaan, pemusatan industri pengolahan di daerah perkotaan. Sementara *spread effect* serta *strikling down effect* yang diharapkan malah tidak terjadi, seperti tidak berminatnya investor melakukan investasi di daerah pedesaan (sumber bahan baku). Akibat yang dirasakan adalah daerah yang sudah berkembang semakin berkembang dan di daerah tersebut akan terjadi penumpukan kegiatan industri, sementara daerah-daerah lain semakin tertinggal dan kurang diminati oleh investor.

Salah satu sebab meningkatnya kesenjangan dan kemiskinan antar daerah di masyarakat pedesaan adalah karena adanya distorsi pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan yang dikuasai kelompok ekonomi kuat, dimana mereka ini dekat dengan kekuasaan. Dampaknya terhadap kepemilikan faktor produksi seperti tanah, modal tidak merata dan tidak adil. Selain itu rendahnya teknologi produksi, sedikitnya teknologi pengolahan hasil, akses pemasaran serta rendahnya keterampilan menyebabkan mereka tidak dapat berbuat banyak untuk kegiatan produksi, akibatnya pendapatan mereka menjadi sangat rendah. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah pesatnya pembanguan sektor perkebunan,

kegiatan HPH dan HTI telah mendesak mereka sehingga memberikan dampak negatif terhadap kepemilikan lahan bagi keluarga miskin di pedesaan.

Untuk mengetahui perhitungan disparitas spasial (regional inequality) di antara daerah kabupaten/kota digunakan Indek Williamson.

$$Iw = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{Y}}$$

Keterangan: $\mathbf{I_w}$ adalah Indek Williamson; $\mathbf{f_i}$ adalah jumlah penduduk di masing-masing daerah tingkat dua; **n** merupakan jumlah penduduk Riau; $\mathbf{Y_i}$ adalah pendapatan per kapita di masing-masing daerah tingkat dua; dan **Y** adalah pendapatan per kapita Riau. Angka indek bergerak dari nol sampai 1 ($0 < \mathbf{I_w} < 1$). Indeks Williamson semakin mendekati 1 menunjukkan semakin besar disparitas antar daerah (disparitas spasial).

F. Daya Dukung Wilayah

Daya dukung wilayah adalah kemampuan wilayah dalam menyediakan bahan baku industri yang ada di kawasan wilayah itu sendiri. Konsep daya dukung wilayah paling mudah diterapkan pada sistem agraris. Dalam sistem itu industri yang berbasis agraris kesinambungan kegiatannya tertumpu pada pertanian dalam arti luas. Menurut Sostroamidjojo dan Entang (1975) pengukuran daya dukung wilayah didasarkan pada kemampuan lahan (*land capability*). Pada umumnya kemampuan lahan dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan lahan dalam fungsinya sebagai media tumbuh untuk mencapai tingkat produksi tertentu. Dalam keadaan ini yang ditinjau adalah daya dukung wilayah terhadap pengembangan industri hilir yang berbasis kelapa sawit.

Menurut Suparmoko (1997), lahan merupakan sumberdaya alam yang paling penting untuk kelangsungan kehidupan manusia, karena lahan atau tanah merupakan masukan (input) yang diperlukan untuk setiap bentuk aktifitas manusia, baik untuk kegiatan pertanian, daerah industri, daerah pemukiman, jalan-jalan, daerah rekreasi maupun untuk keperluan tertentu seperti untuk kegiatan alamiah. Sedangkan Todaro (2000) berpendapat bahwa

lahan merupakan sumber fisik yang mempengaruhi potensi suatu negara untuk pertumbuhan ekonominya.

Berdasarkan pengertian dari *land capability* akan dapat diketahui kemampuan lahan di daerah Riau untuk memproduksi TBS. Kemampuan tersebut ditentukan bedasarkan kebutuhan bahan baku per tahun, luas perkebunan kelapa sawit, dan produktivitas lahan tersebut.

Pada dasarnya daya dukung itu tergantung pada kemampuan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perkebunan guna mendukung berkembangnya industri yang berbasis kelapa sawit. Makin besar persentasi lahan yang dipakai untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit makin besar daya dukung wilayah. Karena semakin luas areal perkebunan akan semakin besar produksinya. Tentu saja akan menghasilkan bahan baku yang diperlukan untuk industri pengolahan kelapa sawit. Persentasi lahan ditentukan oleh kesesuaian tanah untuk perkebunan kelapa sawit.

Daya dukung suatu wilayah ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain: a) adanya potensi bahan baku yang memungkinkan pengembangannya di masa yang akan datang; b) adanya sistem kelembagaan yang dapat merealisasikan daya dukung tersebut; dan c) adanya iklim dan ketinggian topografi yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan bahan baku tersebut.

Daya dukung wilayah juga didukung oleh kondisi tanah itu sendiri. Proses fisik, kimiawi, dan biologis di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh iklim kehidupan tanaman dan hewan serta aktivitas manusia. Petani harus menyadari bagaimana proses-proses ini dipengaruhi dan bisa dimanipulasi guna membudidayakan tanaman yang sehat dan produktif. Mereka harus menciptakan dan mempertahankan konsisi-kondisi tanah sebagai berikut (Reijntjes, 1999): a) ketersediaan air, udara, dan unsur hara tepat waktu dalam jumlah seimbang dan mencukupi; b) struktur tanah yang meningkatkan pertumbuhan akar, pertukaran unsur-unsur gas, ketersediaan air, dan kapasitas penyimpanan; c) suhu tanah yang meningkatkan kehidupan tanah dan pertumbuhan tanaman; dan d) tidak adanya unsur tostik

Agar kondisi tanah dapat mendukung pertumbuhan tanaman serta meningkatkan produktivitas lahan maka perlu diperhatikan beberapa hal yang dapat menjaga tingkat kesuburan tanah (*Reijntjes, 1999*), antara lain:

1. Memperhatikan unsur-unsur tanah yang penting

Tanah seringkali digambarkan dari partikel-partikel padat, air, unsur-unsur gas, humus, dan bahan organik mentah. Aspek penting yang sering kali dilupakan adalah tanah juga merupakan tempat tinggal bagi sejumlah makhluk hidup yang sangat beragam. Kehidupan tanah ini mencakup flora tanah dan fauna tanah. Organisme-organisme ini memainkan peranan utama dalam berbagai proses tanah dan intereaksi tanah-tanaman, seperti pembentukan tanah, penciptaan struktur tanah, mineralisasi sampai pada unsur hara bebas untuk pertumbuhan tanaman, pembentukan humus, pengikatan nitrogen, pelarutan fosfat serta penyerapan unsur hara oleh akar tanaman. Ada saling ketergantungan yang kuat antara akar dan kehidupan tanah karena akar mengeluarkan senyawa yang merangsang kehidupan tanah (*Subba Rao dalam Coen Reijntjes, 1999*).

2. Mengelola bahan organik

Bahan organik berfungsi sebagai penyimpanan unsur hara yang secara perlahan akan dilepaskan kedalam larutan air tanah yang gunanya untuk tanaman. Bahan organik di dalam atau di atas tanah juga melindungi dan membantu mengatur suhu dan kelembaban tanah.

Ada lima cara penanganan bahan organik, yaitu: 1) memberikan langsung ke tanah, baik itu sebagai mulsa pada permukaan tanah maupun dipendam dalam tanah; 2) membakarnya (mengakibatkan mineralisasi); 3) mengomposnya; 4) menjadikan sebagai pakan ternak; dan 5) memfermantasikannya dalam instalasi biogas.

Jika unsur hara digantikan terutama oleh bahan-bahan kimia dan petani tidak lagi menganggap pemberian pupuk kandang penting, maka tanah akan menjadi miskin bahan organik dan unsur hara penyangga. Dengan kata lain produktivitas dan kestabilan sistem pertanian akan menurun.

3. Mengolah tanah

Kondisi tanah bisa juga diperbaiki dengan pengolahan terhadap struktur tanah, kemampuan menahan air, aerasi, kemampuan infiltrasi, suhu, dan evaporasi. Pengolahan tanah akan mengurangi pembentukan panas dan memecahkan saluran-saluran kapiler dalam tanah. Lapisan yang diolah akan

mengering dengan cepat, tetapi kelembaban dapat terkonservasi dengan lebih baik. Pengolahan tanah dapat menciptakan kondisi yang mendukung perkecambahan benih dan mungkin diperlukan untuk memerangi gulma dan hama tanaman lainnya atau untuk membantu mengendalikan erosi.

Teknik pengolahan konservasi dan teknik tanpa pengolahan akhir-akhir ini telah dikembangkan oleh ilmuwan dan petani. Ini merupakan praktek-praktek pertanian tradisional di beberapa tempat.

4. Mengelola kesuburan tanah

Tanah yang sehat merupakan prakondisi bagi kesehatan tanaman. Kesehatan tanaman dipengaruhi langsung oleh penyerapan senyawa organik tertentu yang dibentuk ketika organisme tanah memineralisasi bahan organik. Kesehatan tanaman dipengaruhi secara tidak langsung ketika suatu organisme tanah menekan perkembangan organisme lain yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Pemupukan seimbang merupakan dasar kesehatan tanaman. Unsur hara yang terlalu banyak atau terlalu sedikit bisa menyebabkan tanaman lebih rentan terhadap serangan penyakit dan hama.

Pengelolaan bahan organik, pengolahan tanah, dan pengelolaan kesehatan tanah mungkin tidak cukup untuk menciptakan kondisi yang mendukung bagi pertumbuhan tanaman tertentu. Keadaan ini memerlukan permintaan investasi untuk perbaikan guna peningkatan produktivitas tanah terutama lahan pertanian.

Dari sisi lain Marsudi Djojodipuro (1992) menyatakan bahwa daya dukung wilayah untuk pembangunan industri diperngaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: *factor endowment*, pasar dan harga, bahan baku dan energi, aglomerasi (keterkaitan antar industri dan penghematan ekstern), kebijaksanaan pemerintah, dan biaya angkutan.

Factor endowment adalah tersedianya faktor produksi secara kualitatif maupun kuantitatif di suatu daerah, antara lain: tanah, tenaga dan modal. Makin banyak *factor endowment* yang dimiliki oleh suatu daerah makin tinggi daya dukung wilayah tersebut terhadap pengembangan industri. Setiap daerah memiliki faktor endowment yang berbeda. Sebagi contoh untuk tanaman kelapa sawit, daerah Riau mempunyai keunggulan dari segi tanah, yaitu kondisi tanah yang mendukung untuk media tumbuh kelapa sawit,

daerah yang relatif rata sehingga dapat menekan biaya produksi kelapa sawit. Disamping itu juga rendahnya biaya tenaga kerja yang bekerja disektor perkebunan kelapa sawit.

Analisis daya dukung wilayah (DDW) yang berbasis agribisnis dilakukan untuk mengetahui kemampuan wilayah dalam menyediakan bahan baku untuk suatu industri. Untuk mengetahui daya dukung wilayah tersebut digunakan data produksi sektor pertanian dan jumlah kebutuhan bahan baku untuk industri yang bersangkutan. Secara matematis daya dukung wilayah terhadap industri berbasis agribisnis:

$$DDW = \frac{L_i \times P_i}{KBB}$$

DDW merupakan daya dukung wilayah dalam pengembangan industri, L_i adalah luas lahan pemasok bahan baku industri, P_i adalah produktivitas lahan per hektar, dan KBB merupakan kebutuhan bahan baku industri hilir dalam satu satuan.

Apabila hasil perhitungan menunjukan rasionya >1, maka daya dukung wilayah dalam pengembangan industri cukup kuat, dan sebaliknya apabila rasionya <1, daya dukung wilayah sangat lemah untuk pengembangan industri.

Hasil perhitungan DDW dapat memberikan gambaran kebutuhan atau kapasitas pabrik yang akan dibangun untuk mengembangkan produk turunan dari sektor pertanian. Apabila suatu wilayah memberikan DDW lebih besar, maka sangat memungkinkan diwialayah tersebut dibangun industri pengolahan. Dimana pembangunan industri pengolahan akan meciptakan nilai tambah dari produk itu sendiri. Secara berkesinambungan akan menimbulkan *multiplier effect* ekonomi di wialayah tersebut.

G. Eskpor dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek yakni: proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Melihat bagaimana suatu perekonomian

berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita, oleh sebab itu ada dua sisi yang harus diperhatikan yakni; sisi output total (GNP) dan sisi jumlah penduduk.

Prof. Simon Kuznets mendifinisikan pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukannya (Jhingan, 1994). Definisi ini memiliki tiga komponen yaitu; *Pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; *Kedua,* teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; dan *ketiga,* penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaan di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat.

Teori pertumbuhan ekonomi sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan ouput per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan.

Salah satu model teoritis tentang pembangunan paling terkenal, yang memusatkan perhatian pada transformasi struktural (*structural transformation*) suatu perekonomian subsisten, mula-mula dirumuskan oleh W. Arthur Lewis dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John Fei dan Gustav Ranis. Model dua sektor Lewis (*Lewis two-sector model*) ini sekarang telah diakui sebagai teori umum yang baku.

Menurut model pembangunan yang diajulan Lewis, perekonomian yang terbelakang terdiri dari dua sektor, yakni: 1) sektor tradisional, yaitu sektor pedesaan subsisten yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol, ini merupakan situasi yang memungkinkan Lewis untuk mendifinisikan kondisi surplus tenaga kerja (*surplus labor*) sebagai suatu fakta bahwa sebagian tenaga kerja tersebut ditarik dari sektor pertanian dan sektor tersebut tidak akan kehilangan

outputnya sedikitpun; 2) sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten. Perhatian utama dari model ini diarahkan pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja, serta pertumbuhan output dan peningkatan penyerpan tenaga kerja di sektor modern. Pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja tersebut dimungkinkan oleh adanya perluasan output pada sektor modern tersebut. Adapun laju atau kecepatan terjadinya perluasan tersebut ditentukan oleh tingkat investasi di bidang industri dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern. Peningkatan investasi itu sendiri dimungkinkan oleh adanya keuntungan sektor modern dari selisih upah, dengan asumsi bahwa para kapitalis yang berkecimpung dalam sektor modern tersebut bersedia menanamkan kembali seluruh keuntungannya. Yang terakhir, tingkat upah di sektor industri perkotaan (sektor modern) diasumsikan konstan dan, berdasarkan suatu premis tertentu, jumlahnya ditetapkan melebihi tingkat rata-rata upah di sektor pertanian subsisten tradisional. (Lewis berasumsi bahwasanya tingkat upah di daerah perkotaan sekurang-kurangnya harus 30 persen lebih tinggi daripada rata-rata pendapatan di daerah-daerah pedesaan untuk memaksa pekerja pindah dari desa-desa asalnya ke kota-kota). Pada tingkat upah di daerah perkotaan yang konstan, maka kurva penawaran tenaga kerja pedesaan dianggap elastis sempurna (Todaro, Michael P., 2000).

Rangkaian proses pertumbuhan berkesinambungan (*self sustaining growth*) atas sektor modern dan perluasan kesempatan kerja tersebut di atas, diasumsikan akan terus berlangsung sampai semua surplus tenaga kerja pedesaan diserap habis oleh sektor industri. Selanjutnya, tenaga kerja tambahan yang berikutnya hanya dapat ditarik dari sektor pertanian dengan biaya yang lebih tinggi karena hal tersebut pasti akan mengakibatkan merosotnya produksi pangan. Hanya penurunan rasio tenaga kerja terhadap tanah secara drastis saja yang akan mampu membuat produk marginal tenaga kerja desa menjadi tidak sama dengan nol lagi. Pada saat tingkat upah dan kesempatan kerja di sektor modern terus mengalami pertumbuhan, maka kemiringan kurva penawaran tenaga kerja bernilai positif. Transformasi struktural perekonomian dengan sendirinya akan menjadi suatu kenyataan

dan perekonomian itupun pada akhirnya pasti beralih dari perekonomian pertanian tradisional yang berpusat di daerah pedesaan mendaji sebuah perekonomian industri modern yang berorientasikan kepada pola kehidupan perkotaan.

Kuznets menyatakan, ada lima pola penting pertumbuhan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi modern. Kelima pola tersebut adalah: penemuan ilmiah atau penyempurnaan pengetahuan teknik, invensi, inovasi, penyempurnaan, dan penyebarluasan penemuan yang biasanya diikuti dengan penyempurnaan. Inovasi terdiri dari dua macam: pertama, penurunan biaya yang tidak menghasilkan perubahan apapun pada kualitas produk; kedua, pembaharuan yang menciptakan produk baru dan menciptakan permintaan baru akan produk tersebut. Pembaharuan ini akan menciptakan perubahan dalam permintaan (Jhingan, 1990).

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan metode dalam proses produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lainnya (Jhingan, 1990).

Menurut Schumpeter dalam Jingan (1990), unsur utama pembangunan terletak pada usaha melakukan kombinasi baru yang di dalamnya terkandung berbagai kemungkinan dalam keadaan mantap. Kombinasi baru ini muncul dalam bentuk inovasi. Inovasi dapat terdiri dari: 1) pengenalan barang baru; 2) pengenalan metode produksi baru; 3) pembukaan pasar baru; 4) penguasaan sumber penawaran baru bahan mentah atau barang semi manufaktur; dan 5) pembentukan organisasi baru pada setiap industri. Pengenalan produk baru dan perbaikan terus menerus pada produksi inilah yang membawa kepada pembangunan. Peranan inovator tidak kepada kapitalis tetapi kepada pengusaha. Pengusaha bukanlah seorang manusia yang mempunyai kemampuan manajemen biasa tetapi sesorang yang memperkenalkan sesuatu yang sama sekali baru. Dia tidak menyediakan dana tetapi mengatur pemakaiannya. Pengusaha didorong oleh: a) keinginan untuk mendirikan kerajaan bisnis swasta; b) keinginan untuk menguasai dan membuktikan superioritasnya, dan c) kesenangan membuat dan mendapatkan sesuatu, atau skedar menyalurkan kepintaran dan tenaga seseorang.

Inovasi mempunyai tiga pengaruh yaitu: (1) diperkenalkannya teknologi baru; (2) inovasi menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital; dan (3) inovasi pada tahap-tahap selanjutnya akan menimbulkan proses imitasi, yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi tersebut. Proses imitasi ini mempunyai pengaruh berupa: Pertama, menurunnya keuntungan monopolis yang dinikmati oleh para innovator; dan kedua, penyebaran teknologi baru di dalam masyarakat (teknologi tersebut tidak lagi menjadi monopoli para inovatornya)

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu sumber kenaikan output, tetapi ia bukanlah suatu sumber yang menarik atau yang paling penting. Yang lebih menarik adalah kenaikan output yang bersumber dari perkembangan ekonomi yang disebabkan adanya inovasi tadi. Inovasi ini berarti perbaikan teknologi dalam arti luas.

Pertumbuhan ekonomi modern merupakan pertanda pentingnya di dalam kehidupan perekonomian. *Simon Kuznets* menunjukkan enam ciri pertumbuhan ekonomi modern, yaitu (Jhingan, 1994): *Pertama*, laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita. Penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi, satu sisi dapat menciptakan permintaan akan barang produksi dan dari sisi lain sebagai penawaran tenaga kerja dalam proses produksi. Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi jika penduduk itu mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil yang dihasilkannya. Apabila laju pertumbuhan penduduk dapat diimbangi oleh laju pertumbuhan produktivitas, maka pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Tetapi apabila pertambahan penduduk lebih cepat dari pertambahan penghasilan akan menyebabkan mundurnya perekonomian, inilah yang diragukan dalam teori Malthus.

Kedua, peningkatan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi modern terlihat dari semakin meningkatnya laju produk per kapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit input. Kenaikan efisiensi berarti penggunaan output yang semakin besar setiap unit input.

Ketiga, laju perubahan struktural yang tinggi. Kecepatan perubahan struktural di dalam pertumbuhan ekonomi modern dapat juga tergambar dalam perubahan distribusi tenaga kerja diantara tiga sektor utama yakni: pertanian, industri, dan jasa. Perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif, dan peralihan dari perusahaan perorangan menjadi perusahaan berbadan hukum.

Keempat, Urbanisasi. Pertumbuhan ekonomi modern ditandai dengan semakin banyaknya perpindahan penduduk dari desa ke daerah perkotaan. Urbanisasi pada umumnya merupakan produk industrialisasi. Urbanisasi mempengaruhi tingkat dan struktur pengeluaran konsumen negara melalui tiga cara: (1) urbanisasi menghasilkan pembagian kerja dan spesialisasi yang semakin meningkat dan perubahan aktivitas dari berbagai usaha keluarga dari tidak berorientasi pasar menjadi usaha yang berorientasi pasar; (2) urbanisasi membuat biaya pemenuhan sejumlah kebutuhan menjadi semakin mahal. Hal ini disebabkan karena kehidupan kota semakin mahal dibandingkan dengan kehidupan desa. Seperti, perumahan, kebersihan, air, angkutan dalam dan antar kota, dan fasilitas lainnya; dan (3) *demonstration effect*, kehidupan kota mendorong kelompok urbanis meniru pola konsumsi orang kota sehingga menyebabkan meningkatnya pengeluaran konsumen.

Kelima, ekspansi negara maju. Ekspansi negara-negara maju yang bermula dari bangsa Eropa tidak lain adalah akibat revolusi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi. Hal ini melahirkan dominasi politik terhadap negara jajahan.

Keenam, arus barang, modal, dan orang antar bangsa. Arus barang, modal dan orang antar bangsa dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan karena tidak ada suatu negarapun yang bisa memenuhi kebutuhan bangsanya dengan semata-mata hasil produksinya. Arus barang komoditi merupakan unsur yang dominan untuk ekspansi keluar dari negara maju. Begitu juga dengan kekurangan modal suatu negara akan menyebabkan mengalirnya investasi dari negara kaya ke negara berkembang dan diikuti dengan aliran migrasi sebagai pembawa ilmu pengetahuan dan teknologi.

Potensi subsektor perkebunan untuk dijadilan andalan ekspor di masa-masa mendatang sangat besar. Prasarat yang diperlukan hanyalah perbaikan dan penyempurnaan iklim usaha dan struktur pasar komoditas perkebunan dari sektor hulu sampai hilir. Mustahil kinerja ekspor akan lebih baik jika kegiatan produksi di sektor hulu, pola perdagangan, dan distribusi komoditas perkebunan domestik masih mengalami banyak hambatan dan distorsi pasar (Bustanul Arifin, 2001).

Sebenarnya masih terdapat banyak ruang untuk memanfaatkan potensi dan peluang ekspor komoditas perkebunan. *Pertama*, perbaikan efisiensi pemasaran (transportasi, logistik, dan administrasi) mengingat Indonesia telah dikenal sebagai *planter* yang paling efisien dibandingkan beberapa produsen komoditas perkebunan seperti Amerika Latin dan Afrika. Keunggulan komparatif karena rendahnya biaya produksi di tingkat kebun ini seharusnya dapat ditranfer sampai pada kegiatan pemasaran dengan cara mengurangi faktor non teknis, seperti biaya siluman dan bahkan pajak ekspor di bidang perdagangan. *Kedua*, upaya pendalaman (*deepening*) pada beberapa komoditas strategis dengan meningkatkan program-program diversifikasi produk dan percepatan pertumbuhan sektor hilir. Upaya ini, walaupun beskala jangka panjang, sangat bermanfaat untuk menambah daya tahan industri komoditas perkebunan dari gejolak pasar internasional produk hilir. Selain meningkatkan nilai tambah (*added-value*) dapat dilaksanakan di dalam negeri, tenaga kerja produktif yang sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi.

Menurut Duft dalam Hill. Hall (2002), diversifikasi berarti tampil dalam berbagai jenis bentuk. Pada umumnya, diversifikasi berhubungan dengan jenis-jenis produk atau jasa yang berbeda-beda dalam suatu penawaran bisnis. Melakukan diversifikasi juga berarti bergerak pada beberapa lini produk. Diversifikasi merupakan salah satu cara untuk mengeleminasi dampak negatif atau resiko yang dihadapi seorang pengusaha agribisnis. Menurut Barghouti (1992), isu diversifikasi dapat didekati pada empat tingkatan, yakni tingkatan usahatani, regional, sektoral dan intersektoral. Diversifikasi menjadi tidak populer karena meningkatnya tekanan efisiensi, sehingga spesialisasi pada suatu lini produk, yang memiliki keunggulan kompotitif, menjadi suatu pilihan.

Produk minyak kelapa sawit berpotensi besar untuk dijadikan andalan ekspor di luar minyak dan gas bumi, dan bisa menggeser posisi industri

ekspor hasil kayu dan tekstil yang kini sedang mengalami perlambtan. Dari sisi penawaran, ekspor produk-produk kelapa sawit mengalami peningkatan yang sangat mengagumkan, terutama pada lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) meningkat sebesar 21,2 persen per tahun (Bustanil Arifin, 2001). Kecenderungan ini pasti akan meningkat, mengingat pertumbuhan investasi, areal tanam serta produksi kelapa sawit nasional juga meningkat.

Khusus di daerah Riau sejak pertengahan tahun 1980-an dikembangkan subsektor perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit, karet dan kelapa. Kegiatan ini menyebabkan penanaman investasi di daerah Riau semakin cepat. Sejak dikembangkan perkebunan kelapa sawit di Riau menunjukkan dampak terhadap ekonomi masyarakat Riau, karena perkebunan ini terasa memberikan tetesan langsung kepada masyarakat. Berbeda halnya dengan investasi di sektor industri dan perminyakan yang hanya melibatkan golongan tertentu. Perkembangan investasi ini juga memberi peningkatan perkembangan ekspor, terutama ekspor non migas yang berasasl dari sektor pertanian.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi para investor menanam modalnya di Riau. Motivasi yang *pertama*, untuk menunjang kebutuhan industri minyak, hal ini terlihat dalam investasi dan ekspor perlengkapan penambangan minyak, besi, dan baja (terutama pipa logam); *kedua*, untuk memenuhi keperluan pasar Singapura berupa hasil pertanian dan pangan, pariwisata dan pakaian; *ketiga*, untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada dan tenaga kerja yang lebih murah; *keempat*, untuk mengantisipasi pertumbuhan Batam dan sekitarnya dengan terjun dibidang real estate, kawasan industri, tempat-tempat wisata dan proyek infrastruktur yang lain.

H. Pembangunan Pertanian Berbasis Agribisnis

Program pembangunan pertanian pada hakikatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani, dan mendorong berkembangnya sistem agribisnis dan usaha-usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan desentralistis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan pertanian diarahkan kepada pencapaian tujuan pembangunan pertanian jangka panjang yaitu sektor agribisnis sebagai

andalan pembangunan nasional (Departemen Pertanian, 2004).

Program pengembangan agribisnis dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan sistem dan usaha-usaha agribisnis, yang mengarahkan agar seluruh subsistem agribisnis dapat secara produktif dan menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Tujuan program ini adalah mengembangkan, antara lain: 1) subsistem hulu; 2) subsistem *on-farm*; 3) subsistem pengolahan; 4) subsistem pemasaran; dan 5) subsistem penunjang sebagai satu kesatuan sistem yang sinergis. Sasaran program adalah berkembangnya: 1) semua subsistem agribisnis secara serasi dan seimbang; dan 2) usaha-usaha agribisnis (Departemen Pertanian, 2001).

Sektor agribisnis merupakan lapangan kerja yang berperan besar dalam penurunan tingkat pengangguran. Karena itu pengembangan pertanian sudah seharusnya dipusatkan kepada pengembangan produktivitas yang dicapai melalui manajemen agribisnis yang ditata dengan baik. Agribisnis mencakup keseluruhan perusahaan yang terkait dengan kegiatan usahatani dan pemasarannya sehingga produksinya sampai pada konsumen akhir. Agribisnis meliputi seluruh sektor bahan masukan usahatani, terlibat dalam proses produksi, dan pada akhirnya menangani pemprosesan, penyebaran, penjualan secara borongan dan enceran produk kepada konsumen akhir. Agribisnis merupakan sektor perekonomian yang menghasilkan dan mendistribusikan masukan bagi pengusahatani, memasarkan, dan memproses serta mendistribusikan produk usahatani kepada pemakai akhir (Downey, W. David, Steven P Erickson, 1987)

Dimasa lalu (PJP I), sebagian rakyat kita berada pada mata rantai yang memberikan nilai tambah kecil (pertanian primer) dalam keseluruhan kegiatan ekonomi yang berbasis pertanian, mulai dari industri hulu hingga hilir, sehingga wajar jika pendapatan petani kita rendah. Sementara mereka yang menguasai mata rantai kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah terbesar seperti industri hulu dan hilir pertanian beserta kegiatan perdagangannya, mampu berkembang dan menjadi konglomerat besar. Oleh sebab itu kita perlu memperkuat ekonomi rakyat agar mampu merebut nilai tambah yang besar. Menurut Bungaran Saragih (2001b) dalam upaya

penguatan ekonomi rakyat, industrialisasi pertanian merupakan syarat keharusan (*necessary condition*). Industrialisasi menjamin iklim makro kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat yang sebagian besar berada pada kegiatan ekonomi berbasis pertanian. Untuk penguatan ekonomi rakyat secara riil, diperlukan syarat kecukupan (*sufficient condition*) berupa pengembangan organisasi bisnis petani yang dapat merebut nilai tambah yang tercipta pada setiap mata rantai ekonomi dalam industrialisasi pertanian.

Lebih lanjut Bungaran Saragih (2001a) menyatakan, cara yang paling efektif dan efisien untuk memberdayakan ekonomi rakyat adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang menjadi tumpuan kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat yaitu sektor agribisnis. Dengan perkataan lain, pembangunan ekonomi nasional yang memberikan prioritas pada pengembangan sektor agribisnis merupakan syarat keharusan bagi pemberdayaan ekonomi rakyat, bahkan pemberdayaan ekonomi nasional. Saat ini sektor agribisnis Indonesia memungkinkan untuk mampu bersaing guna merebut peluang pasar pada era perdagangan bebas. Di luar sektor agribisnis, bukan hanya sulit bersaing tetapi juga tidak mampu memberdayakan ekonomi rakyat. Pemihakan kebijakan pemerintah pada pengembangan sektor agribisnis di level makro perlu disertai dengan upaya mikro agar manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat. Pengalaman lalu menunjukkan bahwa kontribusi yang besar sektor agribisnis dalam perekonomian nasional ternayata tidak diikuti peningkatan pendapatn petani yang memadai. Oleh karena itu, dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, keperpihakan pada pembangunan sektor agribisnis secara nasional perlu disertai dengan suatu mekanisme yang menjamin bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat.

Pembangunan pedesaan yang berbasis agribisnis harus dapat mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Salah satu konsep yang pernah dikemukakan oleh *Friedmann. J* dan *Mike Douglass* (1976) adalah pengembangan agropolitan. Dalam konsep tersebut dikemukakan bagaimana cara mempercepat pembangunan di pedesaan dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Untuk itu hal yang perlu dilakukan adalah: *Pertama*, merubah daerah pedesaan dengan cara memperkenalkan unsur-unsur gaya hidup kota (*urbanism*) yang telah disesuaikan pada lingkungan pedesaan tertentu.

Bentuk ini tidak lagi mendorong perpindahan penduduk desa ke kota. Menanam modal di pedesaan merupakan salah satu cara menekan urbanisasi dan merubah tempat permukinan di desa menjadi suatu bentuk campuran yang dinamakan agropolis atau kota di ladang.

Kedua, memperluas hubungan sosial di pedesaan sampai keluar batas-batas desanya, sehingga terbentuk suatu ruang sosio-ekonomi dan politik yang lebih luas (*agropolitan district*).

Ketiga, memperkecil keretakan sosial (*social dislocation*) dalam proses pembangunan, yaitu: memelihara kesatuan keluarga, memperteguh rasa aman, dan memberi kepuasan pribadi dalam membangun masyarakat baru.

Keempat, menstabilisasikan pendapatan desa dan kota. Memperkecil perbedaannya dengan cara memperbanyak kesempatan kerja yang produktif di pedesaan, khususnya memadukan kegiatan pertanian dengan nonpertanian dalam lingkungan masyarakat yang sama.

Kelima, menggunakan tenaga kerja yang ada secara lebih efektif dengan mengarahkan pada usaha-usaha pengembangan sumberdaya di tiap-tiap agropolitan district, termasuk peningkatan hasil pertanian.

Keenam, merangkai *agropolitan district* menjadi jaringan regional dengan cara membangun dan memperbaiki sarana hubungan antara agropolitan district dengan kota.

Ketujuh, menyusun suatu pemerintahan dan perencanaan yang sesuai dengan lingkungan, sehingga dapat mengendalikan pemberian prioritas pembangunan serta pelaksanaannya pada penduduk daerahnya.

Kedelapan, menyediakan sumber-sumber keuangan untuk membangun agropolitan dengan cara: a) menanam kembali bagian terbesar dari tabungan setempat di tiap-tiap distrik; b) mengadakan sistem bekerja sebagai pengganti pajak bagi semua anggota masyarakat yang telah dewasa; c) mengalihkan dana pembangunan dari pusat-pusat kota dan kawasan industri khusus untuk pembangunan agropolitan; dan d) memperbaiki nilai tukar barang-barang yang merugikan antara petani dan penduduk kota agar lebih menguntungkan petani.

Bagi pemerintah Indonesia, pembangungan pedesaan selama ini mengacu kepada pembangunan sektor pertanian dan kemudian dikembangkan dalam bentuk agribisnis. Pembangunan pertanian yang dikembangkan dalam bentuk skala besar selama ini adalah subsektor

perkebunan yang salah satunya menjadi komoditi unggulan adalah kelapa sawit. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kelapa sawit dapat memberikan pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan tanaman lainnya.

Hasil penelitian Elpawati (2000) bagi petani peserta pola PIR, petani kelapa sawit sudah berada pada kategori sejahtera. Untuk itu diperlukan pembinaan dan pengembangan usahatani di sekitar areal pola PIR untuk mempercepat difusi teknologi dan mencegah terjadinya kesenjangan teknologi antara petani PIR dengan petani non PIR. Untuk mendukung pengembangan usahatani tersebut, Juraemi (2003) mengungkapkan perlunya dikembangkan subsistem pengolahan dan pemasaran yang akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani kelapa sawit. Untuk itu perlu dikembangkan industri hilir yang berbasis kelapa sawit di daerah pedesaan. Menurut Wiwit Suhartiningsih (2003), untuk pengembangan agroindustri berbasis kelapa sawit di Indonesia perlu dilakukan deregulasi dalam industri kelapa sawit. Untuk berinvestasi industri kelapa sawit di Indonesia selama ini, investor harus melewati 17 lembaga di pusat dan 27 lembaga di daerah. Hal ini akan menambah biaya perizinan bagi investor. Di Malaysia investor hanya berhubungan dengan *Malaysian Palm Oil Board* (MPOB). Lebih lanjut Wiwit Suhartiningsih menganjurkan sebaiknya di Indonesia dibentuk *Indonesia Palm Oil Board* (IPOB). Dengan adanya dukungan industri pengolahan kelapa sawit di daerah yang berpotensi, maka diharapkan akan dapat menciptakan nilai tambah dan *multiplier effect* ekonomi.

Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari Imron Zahri (2003), yaitu perlunya peningkatan pembinaan dan kinerja kelembagaan seperti koperasi dan kelompopk tani. Perlu perbaikan pola kemitraan sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan, pengembangan kemitraan dengan manajemen koperasi, dan pemberian lahan minimal 2 ha per rumah tangga petani, agar petani dapat hidup layak. Dari sisi lain Juraemi (2003) menyarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan konsep-konsep baru dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit yang mampu memberdayakan petani di daerah pedesaan.

Menurut Ginandjar Kartasasmita (1996), pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya. Pembangunan pedesaan harus mengikuti empat upaya besar, satu sama

lain saling berkaitan dan merupakan strategi pokok pembangunan pedesaan, yaitu: *Pertama*, memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Dalam upaya ini diperlukan masukan modal dan bimbingan-bimbingan pemanfaatan teknologi dan pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat desa; *Kedua*, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing; *Ketiga,* pembangunan prasarana di pedesaan. Untuk daerah pedesaan prasarana perhubungan merupakan kebutuhan yang mutlak, karena prasarana perhubungan akan memacu ketertinggalan masyarakat pedesaan; dan *keempat*, membangun kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal maupun nonformal. Kelembagaan yang dibutuhkan oleh pedesaan adalah terciptanya pelayanan yang baik terutama untuk memacu perekonomian pedesaan seperti lembaga keuangan.

I. Indikator Pembangunan Pedesaan

Pembangunan ekonomi di pedesaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kebutuhan akan sarana untuk meningkatkan pendapatan keluarga tergantung kepada ketersediaan sumberdaya di pedesaan termasuk penyediaan modal untuk pengembangan usaha pedesaan. Keberhasilan pembangunan pedesaan dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain: tekanan penduduk, kegiatan dasar wilayah, pendapatan petani, perkembangan penduduk, perkebangan pusat pertumbuhan, kerapatan tenaga kerja, keadaan sosial ekonomi. Keberhasilan pembangunan pembangunan ekonomi pedesaan dapat diketahui dari angka multiplier effec ekonomi.

1. Tekanan Penduduk

Tekanan penduduk merupakan indeks yang dimaksudkan untuk menghitung dampak penduduk di lahan pertanian terhadap lahan tersebut. Makin besar jumlah penduduk makin besar pula kebutuhan sumberdaya, sehingga tekanan terhadap sumberdaya juga meningkat. Dengan kualitas penduduk yang rendah, kenaikan tekanan terhadap sumberdaya akan meningkat sebanding dengan kenaikan jumlah penduduk. Tekanan penduduk

dapat diamati setiap tahun dengan menggunakan rumus:

$$TP = Zx\frac{f.P_0(1+r)^t}{L}$$

Keterangan:

TP = Indeks tekanan penduduk;
Z = Luas lahan minimal perpetani untuk dapat hidup layak;
F = Proporsi petani dalam populasi;
P_o = Jumlah penduduk pada waktu t=0;
r = Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun;
t = Rentang waktu dalam tahun
L = Total luas wilayah pertanian.

Hasil perhitungan tersebut diinterpretasikan sebagai berikut:

TPd"1 lahan masih dapat menampung lebih banyak penduduk petani

TP> 1 tekanan penduduk melebihi kapasitas lahan

Sebagai catatan, besarnya nilai Z adalah luas lahan yang mampu memberikan hasil yang cukup (hidup yang layak bagi keluarga petani) sebesar 2,5 ha.

2. Kegiatan Dasar Wilayah

Indek ini digunakan untuk menentukan sektor ekonomi yang paling berpengaruh terhadap penduduk wilayah tertentu. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{M_i / M}{R_i / R}$$

Keterangan:

LQ_1 = Koefisien lokasi
M_1 = Jumlah tenaga kerja yang terlibat di dalam sektor I pada satu wilayah pengamatan

M = Jumlah tenaga kerja yang ada di satu wilayah pengamatan tersebut.

R_1 = Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam sektor I pada seluruh wilayah pengamatan.

R = Jumlah tenaga kerja yang ada di seluruh wilayah pengamatan.

R = $R_1 + R_2 + R_3 + \ldots + R_n$

LQ_1 dapat bernilai < 1 atau > 1. Jika nilai LQ untuk sektor pertanian lebih besar dari satu, berarti sektor pertanian sangat penting dan masyarakat sangat tergantung pada sektor tersebut.

3. Tingkat Pendapatan Petani

Sebagai tolok ukur kesejahteraan petani, jumlah pendapatan per kapita petani dihitung dari gabungan pendapatan yang diperoleh dari hasil usahatani dan hasil di luar usahatani dibagi jumlah anggota keluarga yang ada di dalam tanggungannya. Tingkat pendapatan digunakan untuk menentukan apakah bantuan yang diberikan kepada petani sebaiknya berupa bantuan penuh dari pemerintah, subsidi atau pemberian kredit atau petani dapat menanggung seluruh biaya.

4. Perkembangan Penduduk dan Kesejahteraan

Analisis perkembangan penduduk dan kesejahteraannya diharapkan memberikan informasi tingkat perkembangan penduduk dan tingkat kesejahteraan pada masing-masing wilayah yang diamati. Dengan informasi tersebut dapat diketahui gambaran homogenitas dari wilayah yang diamati secara menyeluruh. Parameter yang banyak terkait dalam perkembangan penduduk dan kesejahteraan antara lain: jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, rasio jenis kelamin, kepadatan penduduk, jumlah tenaga kerja produktif bruto, kepadatan tenaga kerja produktif, dan pendapatan per kapita.

Guna mengetahui tingkat kemakmuran dan tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan terutama di sekitar pengembangan perkebunan kelapa sawit dilakukan pengujian dengan rumus sebagai berikut (Todaro, Michael P, 2000):

$$G = w_1 g_1 + w_2 g_2 + \ldots\ldots + w_i g_i$$

G adalah indek pertumbuhan kesejahteraan sosial; g_i adalah tingkat pertumbuhan sosial quantile ke i; dan w_i merupakan bobot kesejahteraan kelompok quantile ke i.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagai akibat dari pembangunan ekonomi di pedesaan ditunjukkan dengan semakin besarnya nilai indek pertumbuhan kesejahteraan (G) dari periode ke periode.

5. Pusat Pertumbuhan Wilayah

Analisis pusat pertumbuhan wilayah untuk memberikan gambaran dan informasi perkembangan wilayah yang lain dalam satu kesatuan wilayah administratif. Parameter yang digunakan pada analisis adalah fungsi pelayanan di wilayah yang diamati seperti: prasarana ekonomi (bank, pasar, dll.), prasarana komunikasi, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

6. Kerapatan Tenaga Kerja

Jumlah gambaran tenaga kerja yang produktif tersedia dalam wilayah didapatkan dari perhitungan jumlah penduduk yang berusia antara 16 s/d 55 tahun. Klasifikasi umur tersebut dikategorikan sebagai angkatan kerja produktif, sedang yang berumur di bawah 16 tahun dan di atas 55 tahun dikategorikan sebagai angkatan kerja tidak produktif. Karena keadaan tersebut berada dalam satu wilayah maka tenaga kerja tidak produktif menjadi beban tanggungan tenaga kerja produktif untuk menopang kehidupannya.

Analisis ini menggunakan indikator tenaga kerja, yaitu: beban tanggungan tenaga produktif, kerapatan tenaga kerja geografis, kerapatan tenaga kerja agraris, kepadatan penduduk geografis, dan kepadatan penduduk agraris.

Kerapatan tenaga kerja (KTK) geografis

$$KTK_g = \frac{TK_{tp}}{L_g}$$

Kerapatan tenaga kerja (KTK) agraris:

$$KTK_a = \frac{TK_{tp}}{L_a}$$

Keterangan: KTK_g merupakan kerapatan tenaga kerja geografis; $KTK\text{-}_a$ adalah kerapatan tenaga kerha agraris; TK_{tp} adalah tenaga kerja tidak produktif; L_g luas wilayah geografis; L_a adalah luas lahan agraris.

7. Indek Daya Dukung Lahan

Guna mengetahui kemampuan lahan dalam menyediakan kehidupan yang layak di pedesaan dilakukan dengan analisis daya dukung lahan (DDL). Data yang diperlukan adalah data sosial ekonomi antara lain: luas lahan garapan, jenis tanaman pangan yang diusahakan, produksi dan produktivitas tanaman, persentase tingkat konsumsi minimum dari semua jenis tanaman pangan yang diusahakan dalam menu makanan penduduk per tahun, serta konsumsi per kapita per hari (kkal).

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan rumus daya dukung lahan murni sebagai berikut (Soemarwoto, 2001):

$$K = \frac{\sum_{i=1}^{n} A_{si} . Y_{si}}{\sum_{i=1}^{n} C_{si}} x \frac{1}{R}$$

Keterangan: K=daya dukung lahan (orang/ha); ASi=luas lahan yang ditanami dengan jenis tanaman Si (ha); Ysi=produksi bersih tanaman pangan Si (kkal/tahun); Csi=tingkat konsumsi untuk masing- masing jenis tanaman pangan dalam menu penduduk (%kkal/tahun); dan R=kebutuhan kalori rata-rata per orang (kkal/orang/tahun).

8. Peta keadaan Sosial Ekonomi

Untuk mempermudah informasi dalam penentuan rencana pembangunan pedesaan yang bersifat teknis, informasi sosial ekonomi digambarkan dalam

bentuk peta sosial ekonomi. Variabel-variabel yang digambarkan dalam peta sosial ekonomi adalah variabel-variabel dasar sosial ekonomi setempat meliputi: tekanan penduduk (TP), kegiatan dasar wilayah (ketergantungan terhadap sumber pendapatan) (LQ), pendapatan petani (P), pusat pertumbuhan wilayah (T), perkembangan penduduk dan kesejahteraan (L), dan kerapatan tenaga kerja (TK). Secara sederhana variabel sosial ekonomi dapat dituliskan pada peta sebagai berikut :

$$\frac{TP\,;LQ\,;P}{TK\,;T\,;L}$$

BAGIAN KEDUA

MODEL DAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DI PEDESAAN

BAB V
PEMBANGUNAN PEDESAAN

Pada masa lalu pembangunan lebih banyak terfokus di perkotaan, sehingga pedesaan terasa terabaikan dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah lebih memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa dan industri yang merupakan ekonomi perkotaan dengan mengabaikan pertumbuhan ekonomi di pedesaan (sektor pertanian). Sudah waktunya pembangunan itu dimulai dari desa melalui pengembangan sektor pertanian. Sektor pertanian harus menjadi basis untuk pengembangan industri di pedesaan.

A. Sumberdaya dalam Pengembangan Agribisnis

Agribisnis dalam arti luas mempunyai peranan yang cukup berarti dalam perekonomian nasional. Selama pembangunan jangka panjang pertama (PJP I) pada pemerintahan orde baru, ekspor barang industri Indonesia sebagian besar adalah ekspor barang agroindustri, maka masa reformasi peluang itu akan semakin besar karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk pengembangan ekspor non migas Indonesia, terutama bersumber dari sektor pertanian. Ini merupakan peluang yang dibuka oleh pemerintah yang bersifat kelembagaan.

Kalau diperhatikan peningkatan permintaan komoditas pertanian yang bermutu tinggi akan mendorong perusahaan besar untuk bergerak di bidang usaha agribisnis dengan ciri-ciri sebagai berikut, antara lain: 1) Menghasilkan nilai tambah tinggi per hektar; 2) Tidak perlu terlalu luas untuk mencapai skala ekonomi minimum (jenis usaha yang tidak *land intensive*); dan 3) Dimungkinkan penggunaan teknologi untuk mengurangi ketergantungan terhadap faktor alam dan untuk meningkatkan produktivitas.

Ada beberapa alasan dipilihnya pengembangan agribisnis dan agroindustri sebagai salah satu pendekatan dalam pengembangan pertanian, antara lain: 1) Agribisnis dan agroindustri dalam struktur perekonomian merupakan perekat antara sektor pertanian dan sektor lainnya, sehingga dimungkinkan untuk mengalokasikan sumberdaya secara efisien; 2) Dengan

agribisnis dan agroindustri maka suatu komoditi dapat dikelola secara efisien dengan kualitas (segar maupun olahan) tinggi; 3) Dengan kegiatan yang saling berantai maka agribisnis dan agroindustri akan meningkatkan nilai tambah komoditas yang dihasilkan, sehingga merupakan peluang bagi petani untuk meraih pendapatan yang lebih tinggi; dan 4) Agribisnis dan agroindustri menyangkut berbagai aspek yang dapat menumbuhkan kegiatan yang saling terkait, sehingga dengan rekayasa pengembangan yang tepat kegiatan agribisnis dan agroindustri berpotensi besar untuk menampung tenaga kerja yang lebih banyak atau mendorong terciptanya kesempatan kerja baru.

Diharapkan agribisnis dan agroindustri menjadi suatu sektor yang akan memimpin pada masa datang dengan alasan sebagai berikut: 1) Agroindustri mempunyai keterkaitan (*lingkages*) yang besar dengan sektor ekonomi lainnya; 2) Produk-produk agroindustri, terutama agroindustri pengolah umumnya memiliki nilai elastisitas permintaan akan pendapatan yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan produk pertanian dalam bentuk segar atau bahan mentah; 3) Kegiatan agroindustri umumnya bersifat *resource base* industri. Sehingga dengan dukungan potensi sumberdaya alam, akan semakin besar kemungkinan untuk memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam pasar dunia, di samping dapat memiliki pasar domestik yang cukup terjamin; (4) Kegiatan agroindustri pada umumnya menggunakan input yang *renewable*, sehingga keberlangsungan (*sustainability*) kegiatan ini dapat terjamin; (5) Agroindustri merupakan sektor yang telah dan akan terus memberikan sumbangan yang besar bagi sektor non migas; dan (6) Agroindustri yang memiliki basis di pedesaan akan mengurangi kecendrungan perpindahan tenaga kerja yang berlebihan dari desa ke kota.

Dalam menunjang pengembangan agribisnis dan agroindustri di daerah pedesaan untuk masa mendatang, ada beberapa faktor yang perlu dikaji dan dikembangkan supaya sasaran pengembangan agribisnis tersebut tercapai, antara lain: 1) sumberdaya lahan; 2) sumberdaya manusia; 3) teknologi; dan 4) investasi.

1. Sumberdaya Lahan

Adanya peningkatan kegiatan di sektor pertanian merupakan salah satu pendorong dalam peningkatan kegiatan sektor-sektor perekonomian lainnya

yang ada di daerah. Kegiatan transportasi, perdagangan, industri dan kegiatan lainnya muncul mengiringi aktifitas pada sektor pertanian. Adanya keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor lainnya mengakibatkan pola pengembangan perekonomian daerah masih berorientasi pada sektor pertanian (Almasdi Syahza, 2002).

Sektor pertanian sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian daerah Riau. Pengaruh tersebut tampak dalam pendapatan masyarakat dan juga dalam penyerapan tenaga kerja. Terutama di pedesaan sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dan merupakan tumpuan utama dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

Dukungan yang diberikan oleh sektor pertanian ini tidak hanya sebagai mata pencarian pokok, namun merupakan pendukung utama bagi perkembangan sektor lainnya, seperti sektor perdagangan, transportasi dan industri, terutama di daerah Batam dan sekitarnya. Di samping itu sektor pertanian merupakan andalan bagi perekonomian Riau.

Penurunan luas lahan dan produksi di subsektor tanaman pangan disebabkan karena terbatasnya lahan pertanian yang tersedia dan adanya perubahan penggunaan tanah dari lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan perkebunan. Untuk itu terbuka peluang dikembangkannya suatu teknologi yang dapat menunjang pertumbuhan produksi yang tinggi pada lahan yang terbatas.

2. Sumberdaya Manusia

Perspektif pembangunan pertanian merupakan integral dari pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian yang mempunyai kemampuan fisik dan daya nalar yang prima sehingga pengembangan pertanian mengarah pada industrialisasi pertanian. Sumberdaya manusia terbesar adalah petani. Pada struktur masyarakat Indonesia unit terkecil pendukung ketangguhan perekonomian pedesaan adalah rumah tangga, maka grup sasaran terkecil dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ini hendaknya dengan penekanan yang diarahkan pada pembinaan rumah tangga petani.

Pendidikan dan latihan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan sumberdaya manusia, di satu pihak pendidikan meningkatkan produktivitas kerja, di lain pihak pendidikan merupakan indikator tingkat kemiskinan. Begitu juga penambahan pengetahuan kepada para petani akan membuat para petani berkecakapan atau berkemampuan untuk mengusahakan usahataninya lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mempertinggi pendapatannya.

Karena itu peluang meningkatkan pendapatan melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan petani dapat ditingkatkan. Di samping itu banyaknya tenaga kerja yang tersedia di daerah Riau dengan tingkat upah yang masih relatif murah akan membuka peluang yang besar untuk pengembangan agribisnis dan agroindustri.

3. Pemanfaatan Teknologi

Untuk meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan dan membangun masyarakat desa guna memenuhi kebutuhan akan pangan dan komoditas pertanian lainnya secara berkesinambungan pemanfaatan teknologi merupakan salah satu yang dianggap tepat. Menurut Soekartawi (1993) untuk pembangunan pertanian perlu memperhatikan beberapa aspek yakni: (1) Pemanfaatan sumberdaya alam tanpa merusak lingkungan; (2) Pemanfaatan teknologi yang senantiasa berubah; dan (3) Pemanfaatan kelembagaan yang saling menguntungkan; dan (4) Pemanfaatan budaya untuk keberhasilan pembangunan pertanian.

Setiap penemuan teknologi baru, tentu akan membawa konsekuensi, bagaimana menyediakan sarana produksi sehingga dapat diterapkan. Pada hakekatnya penerapan teknologi baru yang dilaksanakan oleh para petani yang tersebar letak usahanya. Oleh karena itu timbul masalah bagaimana caranya agar sarana itu dapat tersedia disatu tempat. Selanjutnya agar petani benar-benar bersedia menggunakan sarana itu, masih perlu adanya unsur-unsur penunjang, seperti mutu, harga terjangkau, cara penyediaan harus menarik dan sebagainya. Untuk memecahkan masalah ini perlu dikembangkan teknologi agroindustri, karena agroindustri bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas dan selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan petani.

Semakin berkembangnya agribisnis dan agroindustri di daerah Riau akan menuntut perkebanganan teknologi yang dapat mengimbangi perkembangan agribisnis dan agroindustri guna meningkatkan pendapatan petani.

4. Investasi

Investasi dalam bidang agribisnis dan agroindustri akan terjadi dengan sendirinya sejalan dengan melimpahnya bahan baku pertanian dan berkembangnya permintaan akan bahan olahan produk pertanian di dalam maupun di luar negeri. Untuk mengurangi kemungkinan *over invesment* dan *over capacity* yang merugikan diperlukan transparansi pasar, data base pertanian yang lengkap dan akurat. Di samping itu, perlu adanya koordinasi rencana investasi dengan semua instansi terkait.

Bila diperhatikan lima tahun terakhir ini pihak investor telah mulai tertarik untuk penanaman investasinya di daerah Riau, apakah di sektor pertanian atau di sektor non pertanian. Hal ini terlihat dari pesatnya pembangunan untuk sektor industri dan sektor pertanian, khususnya perkebunan.

Dalam pengembangan agribisnis dan agroindustri di daerah Riau tidak perlu diragukan lagi untuk mendapatkan investasi dari pihak investor. Hal ini disebabkan Riau termasuk pusat pertumbuhan ekonomi yang sekarang digalakkan dengan negara tetangga. Dengan demikian, peluang untuk pengembangan agribisnis dan agroindustri akan menjadi terbuka lebar.

Peluang untuk pengembangan investasi khususnya disektor pertanian mulai digalakkan. Dilihat secara garis besar peluang investasi di sektor pertanian di Indonesia adalah sebagai berikut: (1) Agribisnis perannya sebagai pengembangan penyediaan sarana/input untuk sektor pertanian; (2) Agribisnis pengembangan budidaya komoditi pertanian; dan (3) Agribisnis sebagai pemasaran barang dan jasa.

B. Peluang Pengembangan Agribisnis Di Pedesaan

Memasuki abad XXI akan terjadi perubahan yang cukup besar dalam pola hidup masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendidikan dan globalisasi gaya hidup. Perubahan ini mempunyai dampak positif maupun negatif.

Dampak positif adalah meningkatnya konsumsi barang-barang konsumsi termasuk produk-produk yang berasal dari komoditas pertanian. Dampak negatif adalah perubahan struktur persediaan angkatan kerja yang dapat diserap oleh sektor pertanian. Perubahan pola hidup akan semakin meningkatkan urbanisasi dan menimbulkan keengganan bagi angkatan kerja baru untuk terjun ke sektor pertanian.

Di samping itu, di masa akan datang akan terjadi peningkatan pendapatan per kapita sedemikian rupa yang akan menimbulkan peningkatan kebutuhan barang konsumsi secara drastis, dari sisi lain terjadi perubahan komposisi berbagai barang konsumsi. Dalam pembangunan di masa lalu, konsumsi penduduk pedesaan lebih didominasi oleh barang-barang kebutuhan pokok, sedang barang-barang mewah lebih banyak dibutuhkan di daerah perkotaan. Pada masa datang akan terjadi perubahan, yaitu barang-barang mewah akan juga dimiliki oleh masyarakat pedesaan. Hal ini didukung dengan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat pedesaan dari sektor pertanian (agribisnis).

Barang-barang yang berasal dari komoditas pertanian berupa komoditas pertanian yang bernilai tinggi kebutuhannya akan meningkat, terutama produk hortikultura dan komoditas pertanian yang diproses lebih lanjut. Dengan adanya prospek semacam itu akan menunjang ekonomi petani melalui pengembangan agribisnis dan agroindustri di masa datang. Produk pertanian yang diproses lebih lanjut akan menciptakan nilai tambah yang tinggi sehingga dengan pengembangan agribisnis dan agroindustri tersebut akan mendorong peningkatan pendapatan petani dan sektor pertanian akan berkembang.

Agribisnis dalam arti luas mempunyai peranan yang cukup berarti dalam perekonomian nasional. Selama PJP I ekspor barang industri Indonesia sebagian besar adalah ekspor barang agroindustri, maka di masa datang peluang itu akan semakin besar karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk pengembangan ekspor non migas Indonesia, terutama bersumber dari sektor pertanian. Ini merupakan peluang yang dibuka oleh pemerintah yang bersifat kelembagaan.

Di lain pihak, peningkatan pendapatan yang disertai dengan perubahan pola hidup, terutama yang akan dialami oleh penduduk di perkotaan besar dalam kurun waktu 25 tahun mendatang, jelas akan menciptakan peluang-

peluang usaha yang lebih besar dalam berbagai bidang, antara lain buah-buahan dan sayur-sayuran bermutu tinggi, bersih dan tidak tercemar. Dapat diperkirakan bahwa porsi buah-buahan dan sayur-sayuran bermutu tinggi yang saat ini masih kecil, akan meningkat secara berarti. Demikian pula pasar bunga akan lebih berkembang lagi dengan globalisasi *set it with flowers*.

Dengan meningkatnya permintaan komoditas pertanian terutama untuk sayur-sayuran, tanaman hias, buah-buahan dan ikan segar, maka dapat diperkirakan terjadi perubahan pola komoditas agribisnis dalam kurun waktu mendatang. Oleh sebab itu, ada dua peluang besar bagi perusahaan agribisnis yang akan diraih, yaitu: (1) Di bidang hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan ikan segar); dan (2) Di bidang agroindustri yaitu pengolahan lanjut dari komoditas pertanian untuk kebutuhan berbagai industri.

Globalisasi akan semakin deras di masa datang yang dapat menyebabkan pasar internasional bagi produk-produk pertanian akan semakin terbuka, sehingga tingkat persaingan di pasar internasional akan semakin ketat.

Salah satu syarat agar produk itu mampu bersaing dengan produk-produk sejenis dari negara lain adalah efisiensi yang tinggi dalam mengusahakan komoditas yang bersangkutan dengan kualitas yang sesuai dengan tuntutan pasar. Namun demikian mengingat kondisi sumberdaya yang terbatas dan beragam, untuk melaksanakan kegiatan produksi seperti yang disyaratkan tersebut tidaklah mudah. Oleh karena itu, perlu adanya strategi dasar yang dapat mendorong terjadinya alokasi sumberdaya secara tepat sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi. Khusus untuk produk pertanian melalui agribisnis dan agroindustri merupakan salah satu jalan pemecahannya.

Untuk dapat mengembangkan agribisnis dan agroindustri diperlukan pelaku-pelaku pembangunan pertanian yang tangguh. Keterampilan dan keahlian harus diupayakan oleh semua pihak dan sistem pendidikan harus mampu menyediakan tenaga-tenaga profesional dan manajer yang sekaligus menjadi entrepreneur. Petani Indonesia diharapkan menjadi petani yang kuat dan tangguh yang berani menerima teknologi baru.

Dari kenyataan dapat dilihat bahwa perkembangan agribisnis dan agroindustri mengarah kepada agribisnis dan agroindustri skala besar terutama di daerah Riau yang diperkirakan mempunyai dampak penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah yang tinggi.

Dari segi lain, hal yang sangat mendukung prospek pengembangan agribisnis dan agroindustri di daerah Riau di masa mendatang adalah: (1) Penduduk yang semakin bertambah dengan kebutuhan kualitas menu makan yang semakin baik; (2) Kemungkinan terjadinya diversifikasi di sektor pertanian karena semakin sempitnya lahan pertanian; (3) Semakin meningkatnya perkembangan industri di daerah Riau terutama Batam dan sekitarnya, sehingga dituntut penyediaan bahan baku dan makanan dari sektor pertanian sebagai penunjang industri tersebut; (4) Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat sebagai akibat berkembangnya sektor industri di daerah Riau, (5) Adanya peluang masuknya investasi asing ke daerah Riau, sehingga tidak tertutup kemungkinan penyerapan tenaga kerja asing yang membutuhkan kualitas menu yang tinggi terutama menu yang menyangkut dengan sektor pertanian; dan (6) Peluang untuk menampung tenaga kerja yang semakin bertambah.

Dengan demikian kegiatan agribisnis dan agroindustri di daerah Riau akan mempunyai peluang dan arti yang besar untuk dikembangkan. Di samping itu perkembangan sektor agribisnis dan agroindustri di Riau dapat menumbuhkan sektor ekonomi lain yang mempunyai dampak positif terhadap perubahan perekonomian masyarakat Riau di antaranya; (1) Kegiatan agribisnis dan agroindustri dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian regional daerah Riau, karena mempunyai efek ganda terhadap sektor ekonomi lainnya; (2) Perkembangan agribisnis dan agroindustri akan memberikan sumbangan terbesar di samping sektor migas; (3) Produktivitas sektor pertanian mempunyai peluang besar untuk terus ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan yang terjadi pada seluruh sub sektor yang ada; (4) Di samping memberikan hasil yang jelas bagi petani dan telah menimbulkan perubahan pola pikir dalam pengelolaan usahatani; (5) Perkembangan agribis-nis dan agroindustri akan meningkatkan laju pertumbuhan di sektor pertanian, di samping dapat menunjang pertumbuhan di sektor lainnya; dan (6) Majunya perkembangan sektor agribisnis dan

agroindustri akan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat antara sektor pertanian dan non pertanian. (7) Agribisnis dan agroindustri yang memiliki basis di pedesaan akan mengurangi kecenderungan perpindahan tenaga kerja yang berlebihan dari desa ke kota.

C. Sasaran Pengembangan Agribisnis

Pengembangan agribisnis dan agroindustri memperoleh perhatian serius sejak awal tahun 1980-an, dan pada saat ini telah menunjukkan hasil-hasilnya yang diungkapkan gambarannya dalam perekonomian nasional. Di samping itu, potensi dan sejumlah kendala pengembangan khususnya yang menyangkut industri pengolahan hasil pertanian telah dapat pula diidentifikasi. Pengembangan agribisnis dan agroindustri di daerah pedesaan memiliki beberapa sasaran sebagai berikut: 1) Menarik pembangunan sektor pertanian; 2) Menciptakan nilai tambah; 3) Menciptakan lapangan pekerjaan; 4) Meningkatkan penerimaan devisa negara; 5) Memperbaiki pembagian pendapatan; dan 6) Meningkatkan pengetahuan petani melalui usahatani.

1. Menarik Pembangunan

Peranan Agribisnis dan agroindustri dalam menarik pembangunan sektor pertanian dapat ditinjau dari keterkaitan antara sektor pertanian dan agribisnis. Keterkaitan itu dapat ditinjau dari dua indikator yaitu kaitan harga (keterpaduan pasar) dan kaitan komoditas. Kaitan harga menunjukkan hubungan harga bahan baku (hasil pertanian) dengan harga produk agribisnis dan agroindustri. Apabila pasar di tingkat petani terpadu baik dengan pasar barang olahan maka keduanya saling membutuhkan. Sementara itu kaitan komoditas adalah keserasian jumlah, mutu, dan waktu antara penyediaan bahan baku yang dihasilkan petani dan yang dibutuhkan agroindustri (Simatupang, 1990).

Dengan adanya agribisnis dan agroindustri ini tentu diharapkan pembangunan pertanian di pedesaan dapat meningkat, petani yang selama ini kurang meminati bertani menjadi berminat, dan ladang yang selama ini kurang diurus menjadi lebih diperhatikan oleh petani itu sendiri karena adanya harapan pendapatan dapat meningkat.

Untuk pengembangan agribisnis maupun agroindustri di daerah Riau akan mempunyai prospek yang baik. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan yang sudah mulai dikelola secara intensifikasi dan diversifikasi termasuk peluang pasar untuk pengembangannya baik regional maupun internasional.

Di lain pihak dengan adanya peningkatan kegiatan di sektor pertanian merupakan salah satu pendorong dalam peningkatan kegiatan sektor perekonomian lainnya yang ada di daerah. Kegiatan transportasi, perdagangan, industri dan kegiatan lainnya muncul mengiringi aktivitas pada sektor pertanian. Adanya keterkaitan antara sektor pertanian dan sektor lainnya mengakibatkan pola pengembangan perekonomian daerah masih berorientasi pada sektor pertanian (Almasdi Syahza, 2001).

2. Nilai Tambah

Dengan adanya agribisnis dan agroindustri ini dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil-hasil pertanian tersebut, sehingga petani juga ikut merasakan kenaikan pendapatan yang diterimanya.

Bila diperhatikan selama ini sebagian besar produksi buah-buahan, seperti nenas dan rambutan dikirim ke daerah Sumatera Barat dalam bentuk segar, yang tak jarang terjadi masalah kelebihan produksi sehingga harga di daerah pemasaran menjadi turun dan apalagi buah nenas merupakan buah-buahan yang tidak tahan lama. Sedangkan pisang, kecil kemungkinannya untuk dikirimkan secara komersil ke Sumatera Barat, karena Sumatera barat juga sebagai penghasil pisang dalam jumlah lebih banyak dan mutu yang lebih baik.

Oleh sebab itu, dengan adanya agroindustri akan dapat membantu petani meningkatkan pendapatannya. Apalagi untuk daerah pemasaran di Riau sangatlah baik, karena banyaknya perusahan-perusahaan asing yang beroperasi di Riau, di samping itu Riau juga dipersiapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan dikembangkannya segitiga pertumbuhan ekonomi tersebut maka pangsa pasar di daerah Riau, terutama Batam dan sekitarnya, mempunyai prospek yang baik.

3. Lapangan Pekerjaan

Apabila agribisnis dan agroindustri ini dikembangkan di daerah Riau tentu saja perhatian petani akan tercurah untuk memproduksi hasil pertanian,

dan petani tidak menjadikan tanaman, seperti buah-buahan, sebagai usaha sampingan malahan menjadi usaha utama yang dapat merubah nasib petani. Dengan adanya perubahan atau peningkatan produktivitas melalui peningkatan produksi pertanian akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan petani.

Petani yang selama ini kurang berminat bisa mengembangkan usahatani dari hasil yang diperolehnya, apalagi di daerah Riau lahan untuk usahatani masih berpeluang untuk diperluas. Selama ini curahan tenaga kerja terpusat pada usahatani padi, perkebunan, dan ladang berpindah akan terangsang pula untuk mengembangkan suatu usahatani dan agroindustrinya. Penduduk yang selama ini pergi ke kota untuk mencari pekerjaan akan tertarik untuk berusahatani. Semakin berkembangnya pertanian melalui agribisnis dan agroindustri akan semakin terbuka pula lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang ada di daerah Riau.

4. Devisa Negara

Sejak awal tahun 1980-an peningkatan ekspor non migas menjadi perhatian utama pemerintah. Hal ini disebabkan sektor minyak dan gas sulit untuk dijadikan andalan utama sumber penerimaan negara karena merosotnya harga minyak bumi dunia sejak tahun 1980. Komoditas primer yang selama ini menjadi sumber utama penerimaan devisa dari sektor non-migas juga mengalami penurunan harga di pasaran dunia pada waktu yang sama. Oleh karena itu untuk memperbaiki neraca pembayaran luar negeri pemerintah berpaling pada peningkatan ekspor industri pengolahan hasil pertanian.

Salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah pengembangan agribisnis dan agroindustri di daerah yang mempunyai peluang untuk pengembangan.

5. Pembagian Pendapatan

Pembagian pendapatan yang dimaksud disini adalah pembagian nilai tambah antara pekerja dan pemilik modal. Nilai tambah yang diterima pekerja adalah nilai upah yang dibayar perusahaan. Sedangkan nilai tambah yang diterima pemilik modal adalah keuntungan perusahaan. Begitu juga

dengan petani sendiri dengan adanya industri pengolahan hasil pertanian maka petani akan memperoleh nilai tambah dari hasil penjualan produksi usahataninya.

Melalui pengembangan agribisnis dan agroindustri akan menciptakan distribusi pendapatan masyarakat sektor petanian dan non pertanian. Tentusaja pengembangan agribisnis dan agroindustri tersebut harus bersifat pengembangan industri hulu dan industri hilir di daerah tersebut. Dilain pihak dengan berkembangnya agribisnis dan agroindustri akan menumbuhkan sektor ekonomi lainnya seperti sektor transportasi serta perdagangan.

6. Pengetahuan

Untuk meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan dan membangun masyarakat desa guna memenuhi kebutuhan akan pangan dan komoditas pertanian lainnya secara berkesinambungan maka langkah strategis yang patut dilakukan adalah pengembangan agribisnis dan agroindustri.

Di sisi lain, penambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada para petani dapat meningkatkan kemampuan petani atau keterampilan untuk mengusahakan usahatani yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mempertinggi pendapatannya.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah sektor pertanian yang tangguh sehingga dapat mendukung sektor industri. Sasaran untuk memperluas dan menciptakan lapangan kerja serta meratakan pembangunan. Dengan majunya sektor pertanian dapat merangsang pertumbuhan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja baru dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Supaya sektor pertanian berperanan penting dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat, salah satu cara yang terbaik adalah pengembangan agribisnis dan agroindustri.

Melalui agribisnis dan agroindustri produk pertanian dapat memberikan nilai tambah tinggi yang dapat diperoleh petani, di samping dapat memberikan efek multiplier terhadap sektor perekonomian lain. Hal ini dapat dilakukan dengan sistem pengembangan industri hilir dan industri hulu.

Di daerah sebagian besar rakyat adalah petani, karena itu menjadi tugas semua anasir yang terkait untuk mengadakan perbaikan lahan dan menyiapkan rencana pembangunan pertanian. Keberhasilan rencana tergantung kepada seberapa jauh produktivitas petani dapat ditingkatkan. Kenaikan produksi pertanian adalah penting untuk memenuhi bahan mentah keperluan industri, untuk melestarikan swasembada pangan, mengendalikan harga, memperbesar sumber untuk keperluan pembangunan dan pemanfaatan secara efektif dan efisien atas sumber tenaga kerja yang kurang dimanfaatkan terutama di daerah pedesaan.

Pada awal tahun 1990-an, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bidang industri mencapai 11 persen sedangkan di bidang pertanian 3 persen. Sementara di daerah pada pertengahan tahun 1990an pertumbuhan sektor industri mencapai 14,8 persen sementara sektor pertanian sebesar 4,79 persen. Hal ini merupakan ketimpangan yang harus diperhatikan, dalam bentuk hambatan produktivitas, hambatan dalam tenaga terampil dan hambatan dalam akses teknologi.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan perhatian dalam bidang pertanian terutama menyangkut waktu, sarana dan prasarana, investasi dan teknologi yang menyokong bidang pertanian. Walaupun terjadi penekanan yang semakin besar dalam industri, namun pada saat ini pertanian masih merupakan sektor ekonomi potensial dalam sumbangannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di masing-masing daerah.

Agar sasaran pembangunan pertanian yang dimaksudkan tetap mampu memberikan sumbangan nyata pada perekonomian daerah Riau, maka berbagai upaya perlu dikembangkan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: 1) Tetap memperhatikan prinsip keunggulan komparatif; 2) Terus meningkatkan keterampilan masyarakat setempat; 3) Terus meningkatkan produksi bahan baku yang berkesinambungan; dan 4) Mengembangkan diversifikasi dan intensifikasi pertanian.

Dari keempat upaya ini, maka dimasa dating sektor pertanian mampu berperan dalam pengembangan agribisnis dan agroindustri dalam bentuk sumbangan terhadap hasil pertanian, pangsa pasar dari hasil pertanian, faktor produksi pertanian atau lainnya, dan devisa yang semakin besar. Perhatian

dalam menunjang pengembangan agribisnis dan agroindustri sangat besar sekali faedahnya terutama bagi sektor pertanian di daerah pedesaan. Pada saat ini sektor pertanian bagi pemerintah daerah Riau mendapat prioritas karena sumbangan sektor pertanian tersebut dalam perekonomian daerah memegang peranan penting.

Petani sebagai titik tolak pembangunan pertanian, dan orang yang mempunyai bidang usaha pembudidayaan pertanian mempunyai tiga aspirasi dasar atau sasaran usaha yaitu: (a) Meningkatkan pendapatan, dengan usaha itu petani ingin menjadi lebih banyak penghasilannya; (b) Peningkatan konsumsi, diharapkan konsumsinya dapat meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas; dan (c) Pemupukan modal agar usahanya dapat berkembang lebih baik. Petani ingin memperoleh kemakmuran dari barang-barang yang lebih banyak untuk memenuhi kepuasan hidupnya.

Petani sebagai produsen komoditas pertanian melakukan serangkaian kegiatan ekonomi dalam suatu usahatani. Cabang-cabang kegiatan ekonomi dalam usahatani itu bisa berupa peternakan, perikanan, persawahan, perkebunan ataupun peme-liharaan bunga, sayur-mayur maupun buah-buahan dalam pekarangan rumah. Kesemua cabang usaha itu dipadukan dalam usahatani yang optimal dalam mencapai ketiga sasaran usaha tersebut di atas. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan agribisnis dan agroindustri.

Ke depan masyarakat petani di pedesaan diharapkan menjadi pendukung pertanian tangguh yang diharapkan, yakni, terciptanya pertanian yang dinamik yang dapat mempertahankan swasembada pangan, mendukung sektor industri, meningkatkan ekspor non-migas, memberikan lapangan kerja yang lebih luas, mempertahankan sumberdaya alam dan lingkungan, serta mendukung pembangunan desa. Dengan kata lain pertanian tangguh juga dapat digambarkan sebagai: Pertanian yang dinamik, yang bisa terjadi bila didukung oleh adanya petani yang berfikir maju dan mandiri, berorientasi permintaan pasar, dan efisiensi. Pertanian yang tangguh itu tercipta bila para petani memiliki kedudukan tawar menawar (*bargaining position*) dan memiliki daya beli yang kuat.

Pembangunan pedesaan sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi nasional ditopang oleh pembangunan pertanian yang bertujuan

menciptakan pertanian yang maju, efisen dan tangguh. Peranan penelitian dan pengembangan yang disertai dengan penyuluhan dan pendidikan di bidang pertanian tetap diperlukan guna menunjang pengembangan agribisnis dan agroindustri. Dengan demikian peranan penyuluhan pertanian sangat penting artinya guna meningkatkan kemampuan masyarakat tani dalam rangka pengelolaan dan pengembangan usahataninya. Produktivitas lahan yang dikelola dapat lebih ditingkatkan yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatannya.

Pada hakekatnya untuk pengembangan agribisnis dan agroindustri adalah petani, tentu saja peran ini sangat strategis kedudukannya karena menyangkut kelompok masyarakat terbanyak di daerah Riau. Oleh karena itu usaha-usaha yang dilakukan di sektor pertanian ini di samping meningkatkan produktivitas juga harus dapat meningkatkan pendapatan petani sebagai produsen. Peningkatan dan perubahan penda-patan petani akan dipengaruhi oleh dua unsur penting, yaitu produksi yang diperoleh dari usahatani yang dikelolanya dan tingkat harga komoditas yang diterima petani.

Peningkatan produksi dapat dilakukan dengan pemanfaatan faktor-faktor produksi seoptimum mungkin serta melalui diversifikasi dan intensifikasi produk pertanian. Sedangkan peningkatan harga dapat dilakukan dengan perbaikan mutu, perluasan pasar, spesialisasi produk pertanian serta melalui pengolhan lebih lanjut produk pertanian melalui agroindustri.

Selanjutnya peluang pengembangan agribisnis dan agroindustri tidak terlepas dari tujuan pembangunan pertanian melalui pengembangan agribisnis dan agroindustri di era mendatang yaitu: 1) Meningkatkan pendapatan petani melalui diversifikasi pertanian dengan upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian yang berwawasan lingkungan dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian yang berdaya saing tinggi; 2) Meningkatkan kualitas konsumsi gizi masyarakat melalui diversifikasi konsumsi dan diversifikasi penyediaan pangan dan gizi dari sector pertanian; 3) Mendorong dan meningkatkan penciptaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di pedesaan melalui pemanfaatan keterkaitan ekonomi sektoral dan sistem agribisnis; dan 4) Mendorong peningkatan pertumbuhan industri dan penerimaan devisa melalui penyediaan bahan baku yang cukup dan peningkatan nilai ekspor hasil pertanian.

Sejalan dengan strategi ini, untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui pengembangan agribisnis dan agroindustri dalam dekade mendatang usaha-usaha pokok pembangunan pertanian meliputi; 1) Pengembangan diversifikasi dan intensifikasi pertanian; 2) Peningkatan rehabilitasi sumberdaya pertanian; dan 3) Pengembangan demokrasi ekonomi di sektor pertanian. Ketiga usaha pokok tersebut merupakan kerangka meningkatkan citra pertanian dan kualitas sumberdaya manusia pertanian.

Untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian, maka pertanian perlu dikembangkan dengan memanfaatkan sumberdaya alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta keanekaragaman hasil pertanian, sehingga dapat meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan industri dalam negeri melalui peremajaan, rehabilitasi, perbaikan mutu tanaman, penganekaragaman jenis dan pemanfaatan lahan transmigrasi perkebunan, lahan kering dan rawa yang ditangani secara lebih intensif dan terpadu, serta penggunaan teknologi, penyuluhan, penyediaan sarana dan prasarana.

Dengan demikian usaha pertanian berskala besar dengan sistem pertanian modern yang menghasilkan produksi pertanian yang mampu bersaing di pasar internasional terus dikembangkan dan diintensifkan dengan tetap memperhatikan kaitannya yang saling menunjang dan saling menguntungkan dengan pertanian rakyat.

Perspektif pengembangan agribisnis dan agroindustri merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian yang mempunyai kemampuan fisik dan daya nalar yang prima sehingga pengembangan pertanian mengarah pada industriali-sasi pertanian. Pada struktur masyarakat daerah Riau unit terkecil pendukung ketangguhan perekonomian pedesaan adalah rumah tangga, maka kelompok sasaran terkecil dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ini penekanan hendaknya diarahkan pada pembinaan rumah tangga petani.

Untuk menunjang pembangunan pertanian yang berorientasi pada peningkatan pendapatan petani melalui pengembangan agribisnis dan agroindustri adalah menciptakan lapangan kerja di daerah yang relatif padat

tenaga kerjannya dan mengusahakan pemanfaatan sumberdaya alam seoptimal mungkin sehingga tujuan pembangunan ekonomi melalui pembangunan pertanian dapat tercapai.

Pengembangan agribisnis dan agroindustri tersebut diperlukan agar terciptanya keterkaitan yang erat antara sektor pertanian dan sektor industri, sehingga proses transformasi struktur perekonomian berjalan seimbang dengan mulus dan efisien dari dominasi sektor pertanian menjadi dominasi sektor industri.

BAB VI
KENDALA PEMBANGUNAN PEDESAAN

Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama. Karena sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian negara, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pertanian dengan lebih baik. Pembangunan industri harus memperhatikan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) dengan sektor pertanian atau sektor primer sedangkan keterkaitan kedepan (*forward lingkage*) harus memperhatikan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik sehingga produk yang dihasilkan tidak sia-sia.

Pengembangan sektor pertanian ke depan harus diarahkan kepada sistem agribisnis, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis di daerah. Sektor pertanian (agribisnis) sebagai sektor ekonomi rakyat di pedesaan memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperkuat ekonomi rakyat, maupun sebagai andalan Indonesia dalam perdagangan bebas. Ketimpangan pembangunan pada masa lalu lebih memihak kepada sektor ekonomi perkotaan yaitu industri dan jasa, sementara ekonomi pedesaan yakni pertanian terabaikan. Tidak bisa dipungkiri, sejak krisis ekonomi tahun 1998 sektor pertanian memperlihatkan perubahan ekonomi di pedesaan menjadi lebih baik karena ditopang oleh komoditi yang berorientasi ekspor.

Pembangunan ke depan tidak bisa mengabaikan pembangunan pedesaan melalui pengembangan sektor pertanian. Hal tersebut disebabkan sektor pertanian mempunyai peluang untuk dikembangkan di masa datang, antara lain: 1) Penduduk yang semakin bertambah sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, ini merupakan peluang pasar yang baik bagi pelaku agribisnis; 2) Meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan

kebutuhan pangan berkualitas dan beragam (diversifikasi). Keragaman produk menuntut adanya pengolahan hasil (agroindustri); dan 3) Perkembangan agribisnis juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya diharapkan akan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.

Harapan masa depan sektor pertanian tersebut tidak bisa diraih dengan begitu mudahnya. Keberhasilan sektor pertanian juga tidak lepas dari peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan, perusahaan agribisnis sebagai investasi dan penggerak pasar, dan partisipasi masyarakat tani untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya. Selain dari ketiga komponen tersebut, di lapangan ditemukan kendala yang dihadapi oleh pelaku usahatani berupa adanya mafia pemasaran produk pertanian. Apakah produk usahatani skala kecil maupun skala besar. Pada skala kecil di pedesaan ditemukan mafia pemasaran hasil pertanian yang dilakukan oleh pedagang pengumpul (istilah pedesaan toke) tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Mereka ini mempunyai kekuatan untuk mengendalikan harga di tingkat petani dengan berbagai dalih/alasan. Sementara di tingkat skala besar bentuk mafia pemasaran lebih penekanan kepada kekuatan modal dan kekuasaan pasar dan kartel produk pertanian (Almasdi Syahza, 2011b).

A. Kendala dalam Pembangunan Ekonomi di Pedesaan

Pembangunan ekonomi pedesaan terutama di daerah yang terpencil (tertinggal) tidak terlepas dari pembangunan sektor pertanian. Kondisi ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat pedesaan (sekitar 80%) mencari nafkah dari sektor pertanian yakni: perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, tanaman pangan dan hortikultura. Apabila ingin memacu pertumbuhan ekonomi di pedesaan salah satu prioritasnya adalah pengembangan sektor pertanian yang berbasis agribisnis. Untuk jenis agribisnis skala besar seperti perkebunan boleh dikatakan tidak banyak kendala, karena sektor perkebunan yang dikembangkan selama ini berorientasi ekspor yang dikelola oleh perusahan besar. Namun yang jadi masalah adalah pengembangan ekonomi pedesaan dari usahatani skala kecil yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat.

Dalam pengembangan sektor pertanian skala kecil tersebut masih ditemui beberapa kendala, terutama dalam pengembangan sistem pertanian yang berbasiskan agribisnis dan agroindustri. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan pertanian khususnya petani skala kecil, antara lain (Almasdi Syahza, 2011b): *Pertama*, lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan. Salah satu faktor produksi penting dalam usaha tani adalah modal. Besar-kecilnya skala usaha yang dilakukan tergantung dari pemilikan modal. Secara umum pemilikan modal bagi masyarakat pedesan masih relatif kecil, karena modal ini biasanya bersumber dari penyisihan pendapatan usaha sebelumnya. Untuk memodali usaha selanjutnya masyarakat desa (petani) terpaksa memilih alternatif lain, yaitu meminjam uang pada orang lain yang lebih mampu (pedagang) atau segala kebutuhan usaha tani diambil dulu dari toko dengan perjanjian pembayarannya setelah panen. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan petani sering terjerat pada sistem pinjaman yang secara ekonomi merugikan pihak petani.

Kedua, ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah si pedesaan sebagai faktor produksi utama dalam pertanian makin bermasalah. Permasalahannya bukan saja menyangkut makin terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan petani, tetapi juga berkaitan dengan perubahan perilaku petani dalam berusaha tani. Dari sisi lain mengakibatkan terjadinya pembagian penggunaan tanah untuk berbagai subsektor pertanian yang dikembangkan oleh petani.

Ketiga, pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Sarana produksi sangat diperlukan dalam proses produksi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Pengadaan sarana produksi di pedesaan itu bukan hanya menyangkut ketersediaannya dalam jumlah yang cukup, tetapi yang lebih penting adalah jenis dan kualitasnya. Oleh karena itu pengadaan sarana produksi ini perlu direncanakan sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan dipergunakan pada waktu yang tepat.

Keempat, terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi. Usaha pertanian di pedesaan merupakan suatu proses yang memerlukan jangka waktu tertentu. Dalam proses tersebut akan terakumulasi berbagai faktor produksi dan sarana produksi yang merupakan faktor masukan produksi

yang diperlukan dalam proses tersebut untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan. Petani yang bertindak sebagai manajer dan pekerja pada usaha taninya haruslah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan berbagai faktor masukan usaha tani, sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha yang dilakukan.

Kelima, lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani. Organisasi merupakan wadah yang sangat penting dalam masyarakat, terutama kaitannya dengan penyampaian informasi (*top down*) dan panyaluran inspirasi (*bottom up*) para anggotanya. Dalam pertanian organisasi yang tidak kalah pentingnya adalah kelompok tani. Selama ini kelompok tani sudah terbukti menjadi wadah penggerak pengembangan pertanian di pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari manfaat kelompok tani dalam hal memudahkan koordinasi, penyuluhan dan pemberian paket teknologi.

Keenam, kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk sektor agribisnis. Petani merupakan sumberdaya manusia yang memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan usaha tani, karena petani merupakan pekerja dan sekaligus manajer dalam usaha tani itu sendiri. Ada dua hal yang dapat dilihat berkaitan dengan sumberdaya manusia ini, yaitu jumlah yang tersedia dan kualitas sumberdaya manusia itu sendiri. Kedua hal ini sering dijadikan sebagai indikator dalam menilai permasalahan yang ada pada kegiatan pertanian.

Secara umum permasalahan yang yang dihadapi dan harapan dalam pelaksanaan program pengetasan kemiskinan bagi masyarakat pedesaan disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Permasalahan dan Harapan pada Masyarakat Pedesaan

Kondisi saat ini	Kondisi yang diharapkan
Kurangnya budaya kewirausahaan	Pertanian yang berorientasi pasar
Belum berfungsinya lembaga ekonomi pedesaan (koperasi)	Tersedianya pelayanan lembaga ekonomi pedesaan yang memadai bagi masyarakat
Rendahnya kemampuan sumber daya manusia	Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang tinggi
Tingkat penguasaan ilmu dan teknologi yang rendah	Peningkatan ilmu dan penguasaan teknologi yang bisa mendukung inovasi.
Kurangnya informasi/penguasaan pasar	Peningkatan sistem manajemen informasi dan perluasan pangsa pasar
Keterbatasan modal untuk investasi dan modal kerja	Kecukupan modal guna pengembangan usaha dan kelanjutan usaha
Belum memiliki bentuk organisasi dan manajemen yang mampu menghadapi perubahan dengan cepat	Terbentuknya organisasi yang mampu menghadapi perubahan lingkungan dengan cepat dan manajemen yang profesional
Masih dirasakan adanya budaya lebih menyukai produk impor oleh sebagian konsumen	Adanya budaya cinta produk nasional
Masih kurangnya *political will* pemerintah	Adanya keberpihakan pemerintah terhadap petani

Sumber: Almasdi Syahza (2011c)

B. Kendala Dalam Pemasaran Produk Pertanian

Pemasaran pertanian merupakan satu kesatuan urutan lembaga-lembaga pemasaran. Pemasaran bertujuan untuk memperlancar aliran produk pertanian dari produsen awal ke industri pengolah atau ke tangan konsumen akhir. Pemasaran produk pertanian mencakup banyak lembaga, baik yang berorientasi laba maupun nirlaba, baik yang terlibat dan terkait secara langsung maupun yang tidak terlibat atau terkait langsung dengan operasi sistem pemasaran pertanian. Khusus untuk beberapa komoditi terutama komoditi yang berorientasi ekspor seperti komoditi perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, pinang, gambir dan lain sebagainya) sering dihadapi dengan kendala pemasaran, terutama di daerah pedesaan. Bagi petani keterbatasan pengetahuan dan ketidak jelian pasar justru dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku bisnis di daerah (yang dikenal dengan toke). Pelaku ini sering

memamfaatkan kondisi di pedesaan untuk mempermainkan harga, sehingga pihak petani selalu berada pada posisi tawar menawar yang rendah. Bahkan dalam kondisi tertentu harga hanya ditentukan sepihak oleh para toke, akibatnya petani sebenarnya menghadapi pasar monopsonistic. Sebagai catatan toke adalah pedagang pengumpul hasil pertanian di pedesaan dengan memiliki bergagai fasilitas sarana dan prasarana serta modal yang kuat. Pada waktu tertentu petani diberi pinjamam uang untuk kebutuhan harian tanpa anggunan. Namun imbalannya adalah hasil pertanian harus dijual kepada toke. Pada kondisi ini si toke mempunyai kekuatan menawar dengan harga yang rendah. Dari sisi lain peluang si toke (kalau boleh disebut mafia pemasaran) memanfaatkan kelemahan pemasaran sektor pertanian di pedesaan.

Pemasaran dalam kegiatan pertanian dianggap memainkan peran ganda. Peran pertama merupakan peralihan harga antara produsen dengan konsumen. Peran kedua adalah transmisi fisik dari titik produksi (petani atau produsen) ke tempat pembelian (konsumen). Namun untuk memainkan kedua peran tersebut petani menghadapi berbagai kendala untuk memasarkan produk pertanian, khususnya bagi petani berskala kecil. Masalah utama yang menyebabkan harga dapat dipermainkan oleh mafia pemasaran adalah melalui titik lemah produk pertanian, antara lain Almasdi Syahza, 2011c):

1. Kesinambungan produksi

Salah satu penyebab timbulnya berbagai masalah pemasaran hasil petanian berhubungan dengan sifat dan ciri khas produk pertanian, yaitu: *Pertama*, volume produksi yang kecil karena diusahakan dengan skala usaha kecil *(small scale farming*). Pada umumnya petani melakukan kegiatan usahatani dengan luas lahan yang sempit, yaitu kurang dari 0,5 ha. Di samping itu, teknologi yang digunakan masih sederhana dan belum dikelola secara intensif, sehingga produksinya belum optimal. *Kedua*, produksi bersifat musiman sehingga hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu. Kondisi tersebut mengakibatkan pada saat musim produksi yang dihasilkan melimpah sehingga harga jual produk tersebut cenderung menurun. Sebaliknya pada saat tidak musim produk yang tersedia terbatas dan harga jual melambung tinggi, sehingga pedagang-pedagang pengumpul harus

menyediakan modal yang cukup besar untuk membeli produk tersebut. Bahkan pada saat-saat tertentu produk tersebut tidak tersedia sehingga perlu didatangkan dari daerah lain. *Ketiga*, lokasi usahatani yang terpencar-pencar sehingga menyulitkan dalam proses pengumpulan produksi. Hal ini disebabkan karena letak lokasi usahatani antara satu petani dengan petani lain berjauhan dan mereka selalu berusaha untuk mencari lokasi penanaman yang sesuai dengan keadaan tanah dan iklim yang cocok untuk tanaman yang diusahakan. Kondisi tersebut menyulitkan pedagang pengumpul dalam hal pengumpulan dan pengangkutan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan produk yang dihasilkan petani. Kondisi tersebut akan memperbesar biaya pemasaran. *Keempat*, sifat produk pertanian yang mudah rusak, berat dan memerlukan banyak tempat. Hal ini menyebabkan ada pedagang-pedagang tertentu yang tidak mampu menjual produk pertanian, karena secara ekonomis lebih menguntungkan menjual produk industri (agroindustri). Ketidak senambungan produksi pertanian merupakan celah bagi mafia pemasaran di pedesaan, baik waktu membeli hasil pertanian maupun waktu menjual kebutuhan petani di pedesaan terutama kebutuhan harian sebagai pendukung aktifitas di pedesaan.

2. Kurang memadainya pasar

Kurang memadainya pasar yang dimaksud berhubungan dengan cara penetapan harga dan pembayaran. Ada tiga cara penetapan harga jual produk pertanian yaitu: sesuai dengan harga yang berlaku; tawar-menawar; dan borongan. Pemasaran sesuai dengan harga yang berlaku tergantung pada penawaran dan permintaan yang mengikuti mekanisme pasar. Penetapan harga melalui tawar-menawar lebih bersifat kekeluargaan, apabila tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli maka transaksi terlaksana. Praktek pemasaran dengan cara borongan terjadi karena keadaan keuangan petani yang masih lemah. Cara ini terjadi melalui pedagang perantara. Pedagang perantara ini membeli produk dengan jalan memberikan uang muka kepada petani. Hal ini dilakukan sebagai jaminan terhadap produk yang diingini pedagang bersangkutan, sehingga petani tidak punya keberanian untuk menjualnya kepada pedagang lain, karena ada rasa tanggung jawab pada janji yang telah disepakati antara petani dengan pedagang bersangkutan.

3. Panjangnya saluran pemasaran

Panjangnya saluran pemasaran menyebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan (marjin pemasaran yang tinggi) serta ada bagian yang dikeluarkan sebagai keuntungan pedagang. Hal tersebut cenderung memperkecil bagian yang diterima petani dan memperbesar biaya yang dibayarkan konsumen. Panjang pendeknya saluran pemasaran ditandai dengan jumlah pedagang perantara yang harus dilalui mulai dari petani sampai ke konsumen akhir.

4. Rendahnya kemampuan tawar-menawar

Kemampuan petani dalam penawaran produk yang dihasilkan masih terbatas karena keterbatasan modal yang dimiliki, sehingga ada kecenderungan produk-produk yang dihasilkan dijual dengan harga yang rendah. Berdasarkan keadaan tersebut, maka yang meraih keuntungan besar pada umumnya adalah pihak pedagang. Keterbatasan modal tersebut berhubungan dengan: *Pertama*, sikap mental petani yang suka mendapatkan pinjaman kepada tengkulak dan pedagang perantara. Hal ini menyebabkan tingkat ketergantungan petani yang tinggi pada pedagang perantara, sehingga petani selalu berada dalam posisi yang lemah; *Kedua*, fasilitas perkreditan yang disediakan pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya antara lain belum tahu tentang prosedur pinjaman, letak lembaga perkreditan yang jauh dari tempat tinggal, tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Di samping itu khawatir terhadap risiko dan ketidakpastian selama proses produksi sehingga pada waktunya tidak mampu mengembalikan kredit. Ini menunjukkan pengetahuan dan pemahaman petani tentang masalah perkreditan masih terbatas, serta tingkat kepercayaan petani yang masih rendah.

5. Berfluktuasinya harga

Harga produksi hasil pertanian yang selalu berfluktuasi tergantung dari perubahan yang terjadi pada permintaan dan penawaran. Naik turunnya harga dapat terjadi dalam jangka pendek yaitu per bulan, per minggu bahkan per hari atau dapat pula terjadi dalam jangka panjang.

Untuk komoditas pertanian yang cepat rusak seperti sayur-sayuran dan buah-buahan pengaruh perubahan permintaan pasar kadang-kadang

sangat menyolok sekali sehingga harga yang berlaku berubah dengan cepat. Hal ini dapat diamati perubahan harga pasar yang berbeda pada pagi, siang dan sore hari. Pada saat musim produk melimpah harga rendah, sebaliknya pada saat tidak musim harga meningkat drastis. Keadaan tersebut menyebabkan petani sulit dalam melakukan perencanaan produksi, begitu juga dengan pedagang sulit dalam memperkirakan permintaan.

6. Kurang tersedianya informasi pasar

Informasi pasar merupakan faktor yang menentukan apa yang diproduksi, di mana, mengapa, bagaimana dan untuk siapa produk dijual dengan keuntungan terbaik. Oleh sebab itu informasi pasar yang tepat dapat mengurangi resiko usaha sehingga pedagang dapat beroperasi dengan margin pemasaran yang rendah dan memberikan keuntungan bagi pedagang itu sendiri, produsen dan konsumen. Keterbatasan informasi pasar terkait dengan letak lokasi usahatani yang terpencil, pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data yang masih kurang dan lain sebagainya. Di samping itu, dengan pendidikan formal masyarakat khususnya petani masih sangat rendah menyebabkan kemampuan untuk mencerna atau menganalisis sumber informasi sangat terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan usahatani dilakukan tanpa melalui perencanaan yang matang. Dari pihak pemasaran, justru memanfaatkan kondisi ini untuk menekan harga jual demi mendapatkan keuntungan yang besar.

7. Kurang jelasnya jaringan pemasaran

Produsen dan/atau pedagang dari daerah sulit untuk menembus jaringan pemasaran yang ada di daerah lain karena pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan pemasaran tersebut dan tempat kegiatan berlangsung tidak diketahui. Di samping itu, tidak diketahui pula aturan-aturan yang berlaku dalam sistem tersebut. Hal ini menyebabkan produksi yang dihasilkan mengalami hambatan dalam hal perluasan jaringan pemasaran. Pada umumnya suatu jaringan pemasaran yang ada antara produsen dan pedagang memiliki suatu kesepakatan yang membentuk suatu ikatan yang kuat. Kesepakatan tersebut merupakan suatu rahasia tidak tertulis yang sulit untuk diketahui oleh pihak lain.

8. Rendahnya kualitas produksi

Rendahnya kualitas produk yang dihasilkan karena penanganan yang dilakukan belum intensif. Masalah mutu ini timbul karena penanganan kegiatan mulai dari pra panen sampai dengan panen yang belum dilakukan dengan baik. Masalah mutu produk yang dihasilkan juga ditentukan pada kegiatan pasca panen, seperti melalui standarisasi dan *grading*. Standarisasi dapat memperlancar proses muat-bongkar dan menghemat ruangan. *Grading* dapat menghilangkan keperluan inspeksi, memudahkan perbandingan harga, mengurangi praktek kecurangan, dan mempercepat terjadinya proses jual beli. Dengan demikian kedua kegiatan tersebut dapat melindungi barang dari kerusakan, di samping itu juga mengurangi biaya angkut dan biaya penyimpanan.

Namun demikian kedua kegiatan tersebut sulit dilakukan untuk produksi hasil pertanian yang cepat rusak. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi antara lain mutu produk dapat berubah setelah berada di tempat tujuan, susut dan/atau rusak karena pengangkutan, penanganan dan penyimpanan. Hal ini menyebabkan produk yang sebelumnya telah diklasifikasikan berdasarkan mutu tertentu sesuai dengan permintaan dapat berubah sehingga dapat saja ditolak atau dibeli dengan harga yang lebih murah.

9. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia

Masalah pemasaran yang tak kalah pentingnya adalah rendahnya mutu sumberdaya manusia, khususnya di daerah pedesaan. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini tidak pula didukung oleh fasilitas pelatihan yang memadai, sehingga penanganan produk mulai dari prapanen sampai ke pascapanen dan pemasaran tidak dilakukan dengan baik. Di samping itu, pembinaan petani selama ini lebih banyak kepada praktek budidaya dan belum mengarah kepada praktek pemasaran. Hal ini menyebabkan pengetahuan petani tentang pemasaran tetap saja kurang, sehingga subsistem pemasaran menjadi yang paling lemah dan perlu dibangun dalam sistem agribisnis.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi di perkotaan, yaitu kemampuan para pedagang perantara juga masih terbatas. Hal ini dapat diamati dari kemampuan melakukan negosiasi dengan mitra dagang dan mitra usaha

yang bertaraf modern (swalayan, *supermarket*, restoran, hotel) masih langka. Padahal pasar modern merupakan peluang produk pertanian yang sangat bagus karena memberikan nilai tambah yang tinggi.

Untuk mengatasi masalah pemasaran produk pertanian yang dialami oleh petani, maka perlu dipikirkan paradigma baru dalam mengatasi masalah tersebut. Terutama yang terkait dengan pemasaran produk pertanian. Salah satu alternatif pemecahannya adalah memberdayakan lembaga ekonomi pedesaan yaitu koperasi. Untuk memperkuat tawar menawar di tingkat petani, petani harus bersatu dalam satu wadah kepentingan bersama dalam bentuk organisasi ekonomi atau badan usaha di tingkat desa melalui kelompok-kelompok usaha seperti koperasi. Tanpa koperasi tidak mungkin agribisnis kecil dapat berkembang. Koperasi inilah yang akan berhubungan dengan pengusaha besar. Melalui koperasi masalah yang dihadapi oleh petani dapat teratasi.

Koperasi merupakan badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh subsistem agribisnis. Dari sisi lain koperasi juga merupakan pedagang perantara dari produk pertanian yang dihasilkan oleh anggotanya. Koperasi berfungsi sebagai lembaga pemasaran dari produk pertanian. Dalam koperasi dilakukan pengolahan hasil (sortiran, pengolahan, pengepakan, pemberian label, dan penyimpanan) sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar. Koperasi juga berperan sebagai media informasi pasar, apakah menyangkut dengan peluang pasar, perkembangan harga, dan daya beli pasar. Melalui informasi pasar koperasi harus dapat menciptakan peluang pasar produk-produk pertanian, sehingga petani tidak ragu untuk melakukan kegiatan usahatani mereka karena ada jaminan dari koperasi bahwa produk mereka akan ditampung. Kegiatan ini akan merangsang partisipasi anggota terhadap koperasi, yang pada hakikatnya terjadi kesinambungan usaha koperasi.

Koperasi juga berperan sebagai penyedia kredit yang diperoleh dari lembaga perkreditan dan pengusaha. Pemberian kredit ini didasarkan kepada bentuk usaha pertanian yang mengembangkan komoditi unggulan dan punya peluang pasar. Tingkat pengembalian kredit oleh petani dapat dilakukan melalui pemotongan penjualan hasil pertanian kepada koperasi.

Kegiatan unit usaha ini akan menimbulkan *multiplier effect* ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya usahata pertanian melalui

sistem agribisnis sebagai unit usaha dapat menciptakan peluang usaha dalam kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan naiknya pendapatan mayarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Melalui pembentukan koperasi agribisnis di pedesaan, maka mafia pemasaran di level bawah secara bertahap akan dapat dihilangkan.

C. Program Pembangunan Daerah Tertinggal

Sejalan dengan pengembangan ekonomi Indonesia yang bertumpu kepada ekonomi kerakyatan, maka pemerintah kabupaten/kota melakukan pembangunan ekonomi harus berbasis kerakyatan. Pembangunan ekonomi terutama di pedesaan dalam rangka mengangkat marwah, derajat, harkat, martabat masyarakat pedesaan sebagai upaya mewujudkan program pengetasan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang mobiltas barang dan penduduk desa-kota. Dalam upaya memacu pembangunan dari sisi aspek ekonomi dan sosial di daerah tertinggal, maka program pembangunan pedesaan harus memproritaskan ketiga aspek tersebut.

1. Peningkatan Ekonomi Rakyat (Mengentaskan Kemiskinan)

Program pengetasan kemiskinan merupakan pendekatan pembangunan yang bersifat komprehensif dan mendasar dalam tataran kesejahteraan dan harkat yang manusiawi, oleh karena sekalipun kemiskinan merupakan fenomena ekonomi namun memberikan konsekwensi yang kuat terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat yang mengalami kemiskinan tersebut menjadi rendah nilai-nilai kemanusiaannya sehingga dalam kehidupannya kurang bermarwah.

Khusus untuk daerah tertinggal pemilikan aset produktif seperti lahan sangat tidak adil, hal ini menyebabkan terjadikan ketimpangan pendapatan bagi masyarakat pedesaan. Dari hasil pengamatan terlihat penguasaan asset produktif (lahan) di pedesaan lebih banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar dan orang kota. Dampak dari semuanya ini terhadap mekanisme pasar yang dipengaruhi secara signifikan oleh aspek permodalan dan kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat miskin. Masyarakat lebih banyak berhadapan dengan pasar yang bersifat monopsoni.

2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pengetasan Kebodohan)

Kebodohan sebagai cerminan dari rendahnya mutu sumberdaya manusia (SDM). Kualitas SDM sangat menentukan perubahan dan percepatan pembangunan disuatu daerah. Apabila kualitas SDM rendah, maka masyarakat akan sulit menerima perubahan, mereka tidak mampu untuk mengikuti perubahan baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi kemajuan ekonomi. Mutu SDM yang rendah akan berdampak pada rendahnya tingkat keterampikan dan penguasaan teknologi. Individu ataupun kelompok masyarakat yang mengalami kondisi ini akan selalu menjadi objek pembangunan dan sangat terbatas kemampuannya untuk menjadi subjek yang berperan secara aktif dalam pembangunan.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk melancarkan dan mensukseskan pencapaian berbagai tujuan dan keinginan di berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi kebodohan. Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten/kota. Peningkatan ini hendaknya tidak saja melalui kuantitas tetapi juga kualitasnya yang meliputi fasilitas transporlasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai akan dapat mengembangkan potensi sumberdaya manusia (SDM) dan potensi sumberdaya alam (SDA) secara optimal dan dapat mengeliminasi kesenjangan antar kelompok masyarakat, antar wilayah kabupaten/kota, serta antara pedesaan dengan perkotaan. Semuanya ini akan semakin mengangkat derajat, harkat, martabat dan marwah rakyat di daerah pedesaan karena eksistensinya akan semakin diakui dan diperhitungan dalam konteks persaingan global.

D. Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pembinaan terhadap kelembagaan ekonomi masyarakat di daerah tertinggal, seperti koperasi, usaha kecil dan menengah serta usaha mikro lainnya, harus dikembangkan guna terwujudnya struktur perekonomian yang

kuat dengan didukung oleh ekonomi rakyat yang tangguh. Untuk mendukung mengembangkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan, dibutuhkan dukungan kebijakan dalam bentuk: 1) memberikan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta perubahan struktur masyarakat dengan pengembangan perencanaan pembangunan yang komprehensif/ partisipatif, demokratis, aspiratif dan transparan; 2) melakukan restrukturisasi dan redistribusi kepemilikan asset produktif kepada masyarakat pedesaan dengan memakai standar skala ekonomi keluarga sejahtera (3 ha/KK); 3) melakukan optimalisasi peran dan fungsi seluruh perusahaan agribisnis dan *forestry* (dengan Peraturan Daerah) sebagai investor di pedesaan untuk melakukan reinvestasi melalui kemitraan pola perusahaan patungan bersama pemerintah dan masyarakat pedesaan dalam membangun sistem perekonomian pedesaan; 4) mengembangan usaha kecil, menengah, koperasi dan usaha mikro lainnya dengan cara peningkatan dan pengembangan keterkaitan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan: 5) mengembangkan bidang-bidang yang mempunyai keterkaitan dengan pengembangan bidang-bidang lainnya yaitu bidang industri, pertanian dalam arti luas, bidang transportasi, perdagangan, pariwisata serta bidang kelautan yang cukup strategis sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah; 6) meningkatkan upaya pembangunan infrastruktur terutama perhubungan darat, laut dan udara untuk meningkatkan aksesbilitas dan kelancaran lalu lintas orang dan barang; 7) mendorong upaya peningkatan nilai tambah *(value added)* sebagai produk pertanian yang dihasilkan oleh petani di pedesaan melalui sistem agribisnis dan agroindustri yang menekankan pada upaya pengembangan berbagai industri turunan; 8) memberdayakan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat di pedesaan sebagai wadah pengembangan kegiatan usaha produktif dan memberdayakan masyarakat miskin serta mendorong berkembangnya lembaga-lembaga keuangan mikro dalam rangka mendekatkan masyarakat pada akses permodalan guna mengembangkan ekonomi kerakyatan.

BAB VII
MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN BERBASIS AGRIBISNIS

Guna memacu pertumbuhan ekonomi di pedesaan, salah satu caranya adalah mengembangkan sektor pertanian berbasis agribisnis. Kegiatan agribisnis akan dapat menciptakan nilai tambah. Secara sinergi akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlibat dengan aktivitas agribinis tersebut.

A. Potensi Ekonomi Pedesaan

Perkembangan sektor pertanian di daerah Riau sampai saat ini cukup menggembirakan. Namun tingkat pendapatan masyarakat dari usaha pertanian belum meningkat seperti yang diharapkan. Karena itu Pemerintah Daerah Riau mencanangkan sasaran pembangunan Daerah Riau harus mengacu kepada Lima Pilar Utama, yaitu: 1) pembangunan ekonomi berbasiskan kerakyatan; 2) pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia; 3) pembangunan kesehatan/olahraga; 4) pembangunan/ kegiatan seni budaya; dan 5) pembangunan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa. Pembangunan ekonomi kerakyatan akan difokuskan kepada pemberdayaan petani terutama di pedesaan, nelayan, perajin; dan pengusaha industri kecil (Pemda Riau dalam Almasdi Syahza, 2001a).

Setiap pembangunan di daerah tidak terlepas dari kelima pilar utama pembangunan daerah Riau. Karena pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan, khususnya sektor pertanian. Potensi tersebut antara lain: 1) pengembangan tanaman hortikultura; 2) tanaman perkebunan; 3) usaha perikanan; 4) usaha peternakan; 5) usaha pertambangan; 6) sektor industri; dan 7) potensi keparawisataan (Almasdi Syahza, 2003b).

Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah (Bustanul Arifin, 2001).

Faktor lain yang mendukung prospek pengembangan agribisnis di Daerah Riau untuk masa datang, antara lain: 1) penduduk yang semakin bertambah sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, ini merupakan peluang pasar yang baik bagi pelaku agribisnis; 2) meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan pangan berkualitas dan beragam (diversifikasi). Keragaman produk menuntut adanya pengolahan hasil (agroindustri); dan 3) perkembangan agribisnis juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya diharapkan akan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat (Almasdi Syahza, 2002a).

Menurut Bungaran Saragih (2001a), sektor agribisnis sebagai sektor ekonomi rakyat masih memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperkuat ekonomi rakyat, maupun sebagai andalan Indonesia dalam perdagangan bebas.

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor pertanian maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis dan agroindustri yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Dalam upaya penguatan ekonomi rakyat, industrialisasi pertanian merupakan syarat keharusan (*necessary condition*), yang menjamin iklim makro yang kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat yang sebagian besar berada pada kegiatan ekonomi berbasis pertanian. Untuk penguatan ekonomi rakyat secara riil, diperlukan syarat kecukupan (*sufficient condition*) berupa pengembangan organisasi bisnis petani yang dapat merebut nilai tambah yang tercipta pada setiap mata rantai ekonomi dalam industrialisasi

pertanian (Bungaran Saragih, 2001b). Organisasi bisnis di pedesaan ini berfungsi sebagai lembaga pemasaran produk pertanian.

B. Kesenjangan Ekonomi Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi yang kita pacu selama ini belum mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, seperti masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan atau pinggiran mendapat porsi yang kecil dan tertinggal. Masih terjadi kesenjangan (disparitas) terutama antar daerah dan sektor serta antar golongan masyarakat. Kesenjangan antar daerah ini paling menyolok adalah antara daerah pengembangan kawasan industri dengan kawasan pengembangan pertanian. Daerah pengembangan pertanian tersebut mata pencarian pokok masyarakatnya hanya bergantung kepada pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia yaitu, perkebunan, mencari kayu, nelayan, dan petani tradisional (subsisten).

Kesenjangan ini akan diperburuk karena adanya kesenjangan dalam pembangunan antar sektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi pedesaan) dan nonpetanian (basis ekonomi perkotaan). Kesenjangan ini akan berakibat pada tingkat kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat. Jika masalah ini tidak ditangani secara serius, maka kesenjangan antar kota dan pedesaan akan semakin parah, sehingga daerah-daerah tertinggal akan semakin banyak ditemui. Kesenjangan ini cukup berbahaya karena menyimpan potensi konflik kerusuhan dan kecemburuan sosial (Almasdi Syahza, 2002b).

Adanya daerah-daerah tertinggal ini tidak hanya membawa kemiskinan bagi masyarakat, tetapi dalam jangka panjang akan menyebabkan daerah tertinggal akan semakin tertinggal sementara yang maju akan tetap semakin maju dengan percepatan yang semakin tinggi dan sulit dikejar. Penyebabnya adalah perbedaan sumberdaya manusia (SDM), pertumbuhan awal dan hasil pembangunan yang secara akumulatif mendorong pertumbuhan selanjutnya, sehingga akselerasi pembangunan di kedua daerah akan tetap berbeda. Kesenjangan ini hanya dapat diatasi melalui campur tangan pemerintah dengan cara mengkatrol daerah tertinggal sehingga basis perekonomian

menjadi terangkat untuk memacu pertumbuhan dan bersaing dengan daerah lain.

Secara teoritis meningkatnya kesenjangan antar daerah atau antar masyarakat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: kurangnya pendidikan dan keterampilan, tidak memiliki faktor produksi seperti tanah dan modal, tidak adanya akses terhadap permodalan dan pemasaran hasil pertanian. Kekurangan tersebut akan menyebabkan rendahnya kemampuan berpoduksi, sehingga akan berakibat rendahnya pendapatan keluarga (Almasdi Syahza, 2003c).

Untuk mengatasi kesenjangan antara daerah-daerah tertinggal dan maju ini pemerintah melakukan berbagai usaha untuk mengkatrol daerah tertinggal sekaligus memberdayakan keluarga miskin (petani), antara lain: dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui bantuan modal, meningkatkan pendidikan dan keterampilan, memberikan bimbingan dan pelatihan. Di dalam sektor pertanian, dikenal bermacam-macam jenis kredit untuk membantu permodalan usaha petanian, perikanan, dan perkebunan. Namun usaha yang dilakukan tersebut belum mampu mengangkat kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat pedesaan. Untuk itu perlu adanya terobosan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Terobosan ini dilakukan harus disesuaikan dengan potensi masyarakat dan ketersediaan sumberdaya yang ada, misalnya bantuan modal dan pendampingan untuk membantu pemasaran dan manajemen produksi. Untuk keberhasilan program ini adalah penting bahwa program bimbingan dan pelatihan ini harus dilakukan secara berkesinambungan untuk beberapa periode dan dievaluasi.

C. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Dengan adanya kriris ekonomi yang melanda saat ini telah menyebabkan pemerintah dan para pengambil kebijaksanaan kembali berpikir ulang tentang arah perekonomian yang selama ini ditempuh. Kini timbul kemauan politik yang kuat untuk membenahi inefisiensi dan mis-alokasi sumberdaya (*misallocation of resources*) yang terjadi di sektor ril yang selama ini dibiarkan saja terjadi karena kuatnya *vested interest* para pemburu *rente* yang menguasai birokrasi pemerintahan. Akibat dari mis-alokasi sumberdaya adalah terabaikannya pembangunan pertanian dan industri yang berbasis

sumberdaya alam serta sumberdaya pertanian (*resource based industries*). Banyak industri yang dibangun yang membutuhkan bahan baku dan komponen yang harus diimpor atau industri-industri yang tidak banyak terkait dengan perekonomian lokal sehingga industri ini sangat rentan terhadap gejolak mata nilai uang. Industri-industri jenis ini pada umumnya adalah industri yang berpihak kepada golongan ekonomi kuat (Almasdi Syahza, 2003a).

Dalam mengatasi krisis ekonomi sekarang kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama. Karena sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian negara, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pertanian lebih baik. Pembangunan industri harus memperhatikan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) dengan sektor pertanian atau sektor primer sedangkan keterkaitan kedepan (*forward lingkage*) harus memperhatikan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik sehingga produk yang dihasilkan tidak sia-sia. Konsep pengembangan pertanian ini disebut dengan konsep agribisnis.

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor pertanian maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Pemberdayaan ekonomi pedesaan yang berbasis agribisnis akan dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan keluarga petani. Pertanian merupakan mata pencarian pokok masyarakat pedesaan karena di pedesaan memang sesuai untuk kegiatan pertanian terutama perkebunan kelapa sawit, karet, kelapa, gambir, kakau, dan lainya. Dari sektor perkebunan menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan petani, karena dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan keluarga. Namun sebagian masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan perkebunan kehidupannya sangat memprihatinkan, karena keterbatasan sumberdaya yang mereka

miliki, antara lain: modal, tingkat pendidikan, dan keterbatasan pengetahuan mereka terhadap pemasaran produk pertanian. Dari sisi lain juga masih banyaknya daerah terisolir dan terbatasnya sarana transportasi. Hal ini menyebabkan sulitnya masyarakat petani untuk memasarkan produk mereka ke luar daerah (Almasdi Syahza, 2001c).

Guna mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan tersebut, maka perlu ditemukan suatu alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh petani pedesaan. Dengan cara ini akan dapat membuka daerah pemasaran produk pertanian, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan.

D. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis

Sistem Agribisnis adalah semua aktifitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk yang dihasilkan usahatani dan agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Agribisnis sebagai suatu sistem meliputi; 1) subsistem pengadaan sarana produksi; 2) subsistem produksi; 3) subsistem pengolahan hasil; 4) subsistem pemasaran; dan 5) subsistem kelembagaan. Agar semua subsistem itu dapat berjalan sesuai dengan tuntutan agribisnis, maka perlu dirancang model pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan berbasiskan agribisnis dengan melibatkan beberapa lembaga yang mendukung.

Hasil pengamatan di lapangan ditemukan beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi pedesaan yang berbasis agribisnis, antara lain: 1) peran perguruan tinggi; 2) pengusaha; 3) lembaga perkreditan; 4) pengusaha tani (petani); 5) instansi terkait; dan 6) koperasi sebagai badan usaha. Rangkaian kerja dari faktor pendukung ekonomi pedesaan tersebut disajikan pada Gambar 7.1.

1. Peran Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi (PT) melalui lembaga penelitian, atau pusat penelitian sangat memegang peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Peran PT ini memiliki tiga dimensi kekuatan. Dimensi pertama PT harus dapat menggali potensi wilayah sumbedaya manusia (SDM),

sumberdaya alam (SDA) termasuk kesesuian lahan, ketersediaan lahan serta komoditi unggulan daerah. Dimensi kedua mengetahui potensi lingkungan masyarakat pedesaan dan peluang usaha yang cocok dengan sosial budayanya termasuk ketersediaan prasarana dan sarana. Dimensi ketiga merupakan perumusan rekomendasi dari perpaduan dimensi pertama dan kedua kepada kelompok mitra usaha agribisnis. Di samping itu sebagai lembaga indenpenden, PT merupakan lembaga pemantau kegiatan agribisnis di pedesaan.

Pada kelompok mitra usaha agribisnis terlibat lima kelompok pelaku agribisnis, yaitu; lembaga ekonomi pedesaan (koperasi), pengusaha tani (petani), lembaga perkreditan, pengusaha, dan instansi pemerintah. Kelima kelompok mitra usaha ini harus merupakan satu kesatuan yang saling berkait dalam kegiatan agribisnis.

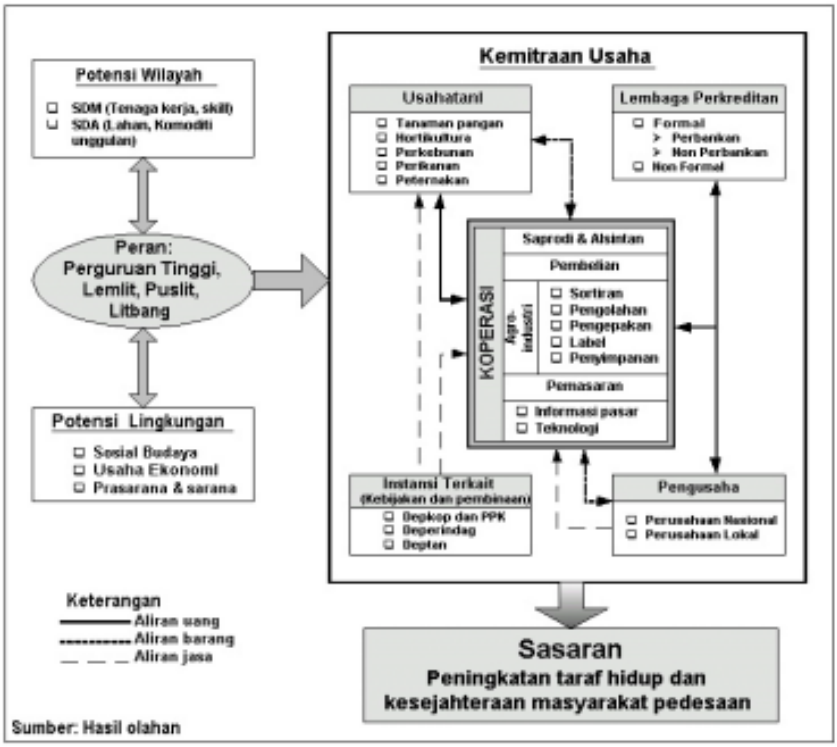

Gambar 7.1 Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis

2. Pengusaha

Pengusaha yang dimaksud disini adalah pengusaha sebagai pemilik modal dan sebagai pedagang (perantara, penyalur, pengecer). Sebagai pemilik modal menjalin kerjasama dengan koperasi dalam penyediaan sarana produksi, alat/ mesin pertanian, dan termasuk penyedia teknologi yang mendukung kegiatan agribisnis di pedesaan. Fungsinya sebagai pedagang adalah penyalur produk pertanian yang telah melalui proses pengolahan oleh koperasi sesuai standar yang ditentukan oleh pedagang. Target pasar disesuaikan dengan kriteria produk yang ada, bisa saja ekspor, swalayan, restoran, hotel, atau pasar tradisional. Dari sisi lain pengusaha juga memberikan informasi pasar melalui koperasi, apakah menyangkut daya beli pasar, peluang pasar, dan lain sebagainya. Termasuk juga menyediakan tenaga ahli yang ditempatkan di koperasi. Tenaga ahli ini disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, apakah tenaga ahli bidang produksi, pemasaran, atau pengendali mutu.

3. Lembaga Perkreditan

Lembaga perkreditan pada kegiatan agribisnis cukup pegang peranan. Lembaga ini sebagai penyedia kredit kepada koperasi dan pengusaha. Pada model pemberdayaan ekonomi yang berbasiskan agribisnis ini, lembaga perkreditan hanya berhubungan langsung dengan koperasi dan pengusaha. Kredit disalurkan melalui koperasi di pedesaan yang sudah mempunyai bentuk usaha agribisnis dan agroindustri. Koperasi mengajukan kredit untuk modal kerja bagi anggota (petani) dan modal kerja bagi koperasi itu sendiri (sebagai pelaku agroindustri). Sementara kredit kepada pengusaha bisa saja dalam bentuk pengembangan usaha (swalayan, toko, ekspor, penyediaan teknologi, dan lain sebagainya).

4. Pengusaha tani (petani)

Kurang berkembangnya kegiatan pertanian yang berbasiskan agribisnis di pedesaan disebabkan karena beberapa hal, antara lain: tingkat pengetahuan petani, pemilikan modal, tidak adanya kepastian pasar, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Untuk mengatasi semuanya ini harus melalui suatu organisasi yang mempunyai misi sama. Koperasi di pedesaan merupakan pilihan yang paling tepat. Koperasi merupakan salah

satu jaminan pasar produk pertanian di pedesaan. Oleh karena itu petani harus mengutamakan produksi komoditi unggulan di daerahnya. Petani melakukan usahanya berdasarkan perjanjian dengan pihak koperasi sebagai penyedia dana. Petani melakukan kegiatan usahataninya didampingi oleh tim ahli yang ditunjuk oleh koperasi. Dengan demikian terjadi hubungan yang erat antara koperasi dan petani. Bentuk mitra usaha ini akan memberikan beberapa keuntungan kepada petani, antara lain; 1) adanya jaminan pasar produk pertanian bagi petani; 2) petani terhindar dari resiko fluktuasi harga; 3) petani mendapat tiga keuntungan, yaitu keuntungan dari hasil penjualan produk pertanian, keuntungan dari pembagian sisa usaha oleh koperasi pada akhir tahun, dan keuntungan dari investasi yang ditanamkan pada koperasi (paket agroestat); dan 4) terjalinnya hubungan kemitraan usaha antara koperasi dan petani.

5. Instansi terkait

Keterlibatan pihak pemerintah dalam model pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan yang berbasikan agribisnis diharapkan hanya sebatas pembuat kebijakan dan pembinaan. Kebijakan menyangkut dengan ketentuan dan peraturan yang saling menguntungkan pelaku agribisnis. Sedangkan pembinaan diberikan kepada koperasi dan petani. Instansi terkait dapat saja melakukan pembinaan kepada kedua kelompok ini dengan memakai tenaga profesional dari luar, baik dari perguruan tinggi maupun dari lembaga profesi lainnya.

6. Koperasi sebagai badan usaha

Untuk mengembangkan usaha agribisnis skala kecil perlu dibentuk koperasi. Tanpa koperasi tidak mungkin agribisnis kecil dapat berkembang. Koperasi inilah nantinya akan berhubungan dengan pengusaha besar (Bungaran Saragih, 2001b).

Koperasi memegang peranan sangat penting pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Koperasi harus berfungsi sebagai badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh subsistem agribisnis. Koperasi sebagai perantara penyalur sarana produksi dan alat/mesin pertanian kepada anggota (petani). Dari sisi lain koperasi juga sebagai

pedagang perantara dari produk pertanian yang dihasilkan oleh anggotanya. Koperasi juga berfungsi sebagai lembaga pemasaran dari produk pertanian. Pada koperasi dilakukan pengolahan hasil (sortiran, pengepakan, pemberian label, dan penyimpanan) sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar. Koperasi juga berperan sebagai media informasi pasar, apakah peluang pasar, perkembangan harga, dan daya beli pasar. Melalui informasi pasar koperasi harus dapat menciptakan peluang pasar produk-produk pertanian, sehingga petani tidak ragu untuk melakukan kegiatan usahatani mereka karena ada jaminan dari koperasi bahwa produk mereka akan ditampung. Kegiatan ini akan meransang partisipasi anggota terhadap koperasi, yang pada hakekatnya terjadi kesinambungan usaha koperasi.

Investasi yang dilakukan oleh koperasi berupa transportasi, mesin pengolah produk pertanian (agroindustri), mesin dan alat pertanian harus berupa penanaman modal atas nama anggota. Artinya setiap anggota mempunyai saham kepemilikan aset koperasi. Dengan demikia konsep agroestat di pedesaan dapat berkembang (Almasdi Syahza, 2002a).

Koperasi juga berperan sebagai penyedia kredit yang diperoleh dari lembaga perkreditan dan pengusaha. Pemberian kredit ini didasarkan kepada bentuk usaha pertanian yang mengembangkan komoditi unggulan dan punya peluang pasar. Tingkat pengembalian kredit oleh petani dapat dilakukan melalui pemotongan penjualan hasil pertanian kepada koperasi.

Koperasi sebagai unit usaha dibidang agtribisnis, secara umum mencakup bidang-bidang usaha yang sangat luas yang pada prinsipnya dapat dikelompokan kepada lima komponen utama, yaitu; 1) bidang usaha yang menyediakan dan menyalurkan sarana produksi berupa alat-alat dan mesin-mesin pertanian; 2) bidang usaha dalam produksi komoditas pertanian; 3) bidang usaha industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri); 4) bidang usaha pemasaran hasil-hasil pertanian; dan 5) bidang usaha pelayanan seperti perbankan, angkutan, asuransi, atau penyimpanan (Almasdi Syahza, 2003b).

Kegiatan unit usaha ini akan menimbulkan multiplier efek ekonomi dalam kehidupan masyarakat, pada hakekatnya agribisnis sebagai unit usaha dapat menciptakan peluang usaha dalam kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan naiknya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

BAB VIII
MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI PEDESAAN MELALUI PEMBANGUNAN AGROESTATE KELAPA SAWIT

Kelapa sawit merupakan tanaman primadona masyarakat di pedesaan, karena kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang memberi harapan pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan subsektor yang lain. Tingginya minat masyarakat terhadap tanaman kelapa sawit disebabkan karena adanya jaminan pasar dari tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan petani. Begitu juga pendapatan petani kelapa sawit jauh lebih tinggi dari pendapatan usahatani yang lain.

A. Potensi Perkebunan Kelapa Sawit

Perkembangan sektor pertanian di daerah Riau sampai saat ini cukup menggembirakan dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 35,63 % (tahun 2008 tanpa migas), namun tingkat pendapatan masyarakat dari usaha pertanian belum meningkat seperti yang diharapkan, kecuali pendapatan petani kelapa sawit, yakni Rp 40.200.000 per tahun pada tahun 2009 (Almasdi Syahza, 2009b).

Untuk pembangunan ekonomi pedesaan pemerintah daerah telah mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan. Arah kebijaksanaan sektor perkebunan ini adalah melaksanakan perluasan areal perkebunan dengan menggunakan sistem perkebunan inti rakyat (PIR) dan kredit koperasi primer untuk anggota (KKPA) serta memberikan kesempatan kepada perkebunan swasta. Sub sektor ini dapat menyerap tenaga kerja, menunjang program permukiman dan mobilitas penduduk serta meningkatkan produksi dalam negeri maupun ekspor nonmigas (Almasdi Syahza, 2003c).

Ada beberapa alasan kenapa Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit sebagai komoditas utama, antara lain: *Pertama,* dari segi fisik dan lingkungan keadaan Derah Riau memungkinkan dikembangkan

perkebunan kelapa sawit. Kondisi Daerah Riau yang relatif datar akan memudahkan dalam pengelolaan dan dapat menekan biaya produksi; *Kedua,* kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanam kelapa sawit akan membuat produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain; *Ketiga,* dari segi pemasaran hasil produksi Daerah Riau mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura; *Keempat,* Daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama IMS-GT dan IMT-GT, tentu saja akan membuka peluang pasar yang lebih menguntungkan; dan *kelima,* berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Almasdi Syahza, 1999).

Karena alasan di atas maka kelapa sawit di daerah Riau merupakan tanaman primadona yang mendorong masyarakat diluar program PIR-BUN mulai dari masyarakat kalangan bawah sampai masyarakat kalangan atas tertarik untuk menanam kelapa sawit secara swadaya. Akibatnya perkebunan kelapa sawit berkembang begitu cepatnya di daerah Riau.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang penting dan strategis di daerah Riau karena peranannya yang cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi petani perkebunan. Hal ini cukup beralasan karena daerah Riau memang cocok dan potensial untuk pembangunan pertanian perkebunan. Dengan luas mencapai 1.119.798 ha pada akhir tahun 2001, maka pada saat ini daerah Riau mempunyai kebun kelapa sawit terluas di Indonesia. Untuk masa-masa akan datang luas areal kelapa sawit akan terus berkembang, karena tingginya animo masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit (*Almasdi Syahza,* 2003a). Perkembangan luas areal perkebunan tersebut tentu saja akan diikuti oleh produksi tandan buah segar (TBS). Hal ini akan menuntut munculnya industri pengolah dari TBS tersebut. Karena itu untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit ke depan perlu difikirkan strategi pembangunan yang berbasis pedesaan, khususnya pembangunan perkebunan kelapa sawit dan industri hilirnya.

Bungaran Saragih (2001a) menyatakan, dalam upaya penguatan ekonomi rakyat, industrialisasi pertanian merupakan syarat keharusan (*necessary condition*), yang menjamin iklim makro yang kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat yang sebagian besar berada pada kegiatan ekonomi berbasis pertanian. Untuk penguatan ekonomi rakyat secara nyata, diperlukan syarat kecukupan (*sufficient condition*) berupa pengembangan organisasi bisnis petani yang dapat merebut nilai tambah yang tercipta pada setiap mata rantai ekonomi dalam industrialisasi pertanian.

Lebih lanjut dinyatakan oleh Bustanul Arifin (2001) pembangunan perkebunan kelapa sawit pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi pedesaan. Sasaran pembangunan sektor perkebunan tersebut adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Dengan demikian jumlah masyarakat miskin terutama di pedesaan dapat ditekan. Secara teoritis salah satu sebab terjadinya kemiskinan dan kesenjangan adalah kurangnya kepemilikan terhadap faktor produksi dan keterampilan yang mengakibatkan rendahnya kemampuan berproduksi dan rendahnya pendapatan keluarga

B. Tujuan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

Pembangunan merupakan suatu upaya sadar untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka memacu pembangunan di Riau, khususnya pembangunan perkebunan rakyat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dan merupakan salah satu bentuk pembangunan ekonomi pedesaan. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut tidaklah mudah, karena pembangunan harus memperhatikan tiga aspek (kelayakan), yaitu kelayakan teknis, kelayakan usaha, kelayakan sosial ekonomi dan budaya. Begitu juga pembangunan perkebunan rakyat yang direncanakan di daerah pedesaan harus memperhatikan ketiga aspek tersebut. Secara spesifik pembangunan tersebut bertujuan, antara lain: 1) mendukung perekonomian lokal dan pembangunan daerah; 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan;

3) membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha khususnya bagi masyarakat tempatan dan sekitarnya; 4) turut meningkatkan pendapatan asli daerah nasional melalui produksi perkebunan.

Sebagai salah satu aktivitas ekonomi, kegiatan pengusahaan perkebunan kelapa sawit di pedesaan tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya atau memberikan pengaruh eksternal, terutama lingkungan sosial ekonomi. Pengaruh eksternal terhadap lingkungan sosial ekonomi wilayah dapat diindentifikasikan dari adanya peningkatan aktivitas perekonomian dan perkembangan pusat-pusat pertumbuhan dalam upaya peningkatan fungsi pelayanan, terutama bagi daerah pedesaan.

Sebagaimana dengan aktivitas pembangunan sektor lain, pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat diperkirakan akan memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi masyarakat pedesaan dan sekitarnya. Manfaat kegiatan tersebut terhadap aspek sosial ekonomi antara lain adalah: 1) memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 2) peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan sekitarnya; dan 3) memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan yang secara langsung akan memberikan dampak terhadap komponen sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar antara lain: 1) Kegiatan pembinaan masyarakat desa dan di masyarakat sekitar perkebunan; 2) Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat; 3) Penyerapan tenaga kerja lokal; 4) Penyuluhan pertanian, kesehatan dan pendidikan; dan 5) Pembayaran kewajiban perusahaan terhadap negara (pajak-pajak dan biaya kompensasi lain).

Kegiatan pembangunan perkebunan akan memerlukan tenaga kerja langsung (tidak termasuk *skilled-labour*) dan tenaga teknis perkebunan dalam pengelolaannya. Secara ideal tenaga kerja direkrut dari masyarakat sekitar, terutama untuk tenaga kerja teknis perkebunan. Kegiatan pembangunan perkebunan ini sangat memungkinkan banyak menyerap tenaga kerja langsung, disamping itu kegiatan tersebut umumnya dilaksanakan secara manual sehingga tenaga kerja manusia sangat diperlukan.

Dengan adanya aktivitas kegiatan pembangunan perkebunan rakyat, khususnya pengadaan sarana prasarana akan menyebabkan aktivitas dan mobilitas masyarakat semakin tinggi. Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan berusaha terutama dalam bidang jasa dan perdagangan.

Kegiatan pembangunan jaringan jalan akan meningkatkan mobilitas masyarakat, membantu masyarakat dalam pemasaran hasil pertaniannya. Di samping itu kebutuhan hidup masyarakat di *base camp* proyek perkebunan dapat dipenuhi dari hasil pertanian masyarakat. Kerjasama dengan masyarakat setempat dalam pengadaan kebutuhan perusahaan, merupakan salah satu dampak positif terhadap peningkatan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar.

Pengusahaan perkebunan kelapa sawit melibatkan banyak tenaga kerja dan investasi yang relatif besar, diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja dan lapangan berusaha melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses pembangunan (*backward linkages*) serta kegiatan ekonomi pada waktu pasca pembangunan (*foreward linkages*). *Backward linkages* yang diperkirakan muncul antara lain jasa kontruksi, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan peralatan kerja, bahan dan material yang dibutuhkan dalam pengusahaan perkebunan. Sedangkan *foreward linkages* yang muncul adalah jasa angkutan, perdagangan.

Apabila dikaji dari struktur biaya pembangunan perkebunan rakyat yang teknis operasionalnya dirancang lebih banyak menggunakan teknik manual, biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung serta tenaga teknis di lapangan memiliki porsi yang cukup besar, yakni diperkirakan rata-rata sebesar ± 54 % dari total pembiayaan tahunannya (Almasdi Syahza, 2003c). Berdasarkan hal tersebut, perputaran uang yang terjadi di lokasi dalam jangka panjang diperkirakan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dengan tumbuhnya perdagangan dan jasa. Hal ini memberikan arti bahwa memberikan *multiplier effect,* terutama dalam memberikan lapangan pekerjaan dan lapangan berusaha.

Sebagai bahan perbandingan pada Tabel 8.1 disajikan perkiraan penyerapan tenaga kerja pada kegiatan perkebunan mulai dari persemaian sampai tanaman belum menghasilkan (TBM) pada umur 3 tahun.

Tabel 8.1. Perkiraan Penyerapan Tenaga Kerja Per Ha pada Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

No	Uraian Kegiatan	Tenaga Kerja Per Ha Per Tahun		
		Tenaga Kerja Lepas	Tenaga Kerja Terampil	Mandor
1	Tahap Persemaian [1)]	196	-	12
2	Pembukaan lahan[2)]	25	4	1
3	Penanaman, pemeliharaan (TBM-0)	76	-	9
4	Pemeliharaan (TBM-1)	74	-	3
5	Pemeliharaan (TBM-2)	82	-	3
6	Pemeliharaan (TBM-3)	61	-	3

Sumber: Almasdi Syahza, 2003g

Keterangan: 1) Perhitungan untuk 3 bulan
2) Tenaga terampil termasuk tenaga operator dozer 1 orang

Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kuantitatif dapat diindikasikan oleh peningkatan pendapatan per kapitanya. Salah satu parameter yang paling mudah dilihat secara kuantitatif adalah penyerapan tenaga kerja yang akan meningkatkan pendapatan dari upah tenaga kerja. Dalam analisis ini, diasumsikan upah tenaga kerja sebesar Rp 18.000,- per hari kerja. Dengan asumsi jumlah hari kerja selama 25 hari per bulan, maka peningkatan pendapatan dari upah ini sebesar Rp 450.000,- per bulan atau sekitar Rp 5.400.000,- per tahun. Disamping memperoleh pendapatan dari upah tenaga kerja, kegiatan usahatani masyarakat setempat masih dapat dilaksanakan sehingga nilai tersebut merupakan tambahan dari pendapatan yang sudah ada dari kegiatan pertaniaannya.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat akibat adanya aktivitas perkebunan rakyat ini tidak seluruhnya dapat dinilai secara kuantitatif. Pengadaan fasilitas sosial yang dapat digunakan oleh masyarakat umum (sarana pendidikan, kesehatan, ibadah), bimbingan dan penyuluhan juga

dapat dinilai sebagai suatu upaya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

Perkebunan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan memberikan devisa bagi daerah maupun pemerintah pusat. Pembangunan perkebunan akan sangat membantu peningkatan pendapatan daerah. Kegiatan pembangunan perkebunan yang dilakukan di daerah pedesaan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan dan memenuhi bahan baku bagi pabrik kelapa sawit (PKS) serta menjamin kehidupan petani secara berkesinambungan.

Begitu juga investasi pada pembangunan perkebunan rakyat di pedesaan akan memberikan sumbangan terhadap peningkatan pendapatan wilayah dan menyediakan *investible surplus* untuk mendukung investasi sektor perkebunan maupun sektor lainnya.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimana proporsi keuangan yang berasal dari pembayaran kewajiban finansial perusahaan lebih besar untuk pemerintah daerah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan PAD setempat secara nyata sehingga pembangunan perkebunan rakyat di daerah pedesaan akan membantu pelaksanaan pembangunan daerah.

C. Model Pembangunan Agroestate Kelapa Sawit

Model yang disajikan dalam konsep ini dimaksudkan untuk mencoba menetralisir dikotomi-dikotomi dari pembagian keuntungan yang tidak adil antara petani plasma dengan perusahaan inti, disamping untuk menjamin pengembangan perusahaan dan kelangsungan pabrik kelapa sawit (PKS) itu sendiri. Program pembangunan perkebunan kelapa sawit selama ini hanya terbatas untuk perkebunan rakyat (plasma) dan perkebunan perusahaan (inti). Pemilikan petani hanya sebatas kebun yang telah ditentukan dalam program plasma, sementara pabrik pengolah tandan buah segar (TBS) hanya dimiliki oleh perusahaan inti. Untuk ke depan perlu dipikirkan model bentuk kemitraan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit atau disebut agroestate

kelapa sawit, dimana petani memiliki kebun kelapa sawit dan pemilikan saham pada pabrik kelapa sawit (PKS). Petani membeli paket melalui koperasi yang terdiri dari kebun kelapa sawit dan saham PKS. Khusus untuk daerah Riau bentuk kegiatan ini sangat sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor 07 Tahun 2001, dimana pada pasal 12 ayat 6 dinyatakan hak petani peserta yaitu; memperoleh kesempatan untuk membeli saham di PKS perusahaan inti.

Jaminan ketersediaan bahan baku secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitas merupakan suatu keharusan untuk mencapai suatu agroindustri termasuk industri minyak sawit. Keterkaiatan antara sumber penghasil bahan baku dan agroindustri kelapa sawit harus diintegrasikan ke dalam suatu pemilikan. Konsep model agroestate ini menekankan kepada azas kepemilikan bersama oleh petani baik usahataninya maupun pabrik pengolahannya.

Aplikasi berorientasi kepada kesejahteraan petani melalui penekanan efesiensi pengolahan usahatani yang produktif serta peningkatan nilai tambah dalam konteks agribisnis , dimana kelembagaannya dirancang dalam jaringan kerja berdasarkan kemampuan dan profesionalisme yang dimiliki dari berbagai pelaku (aktor), yaitu: pengusaha pengembang (developer usahatani), pabrik industri, permukiman petani peserta, petani peserta aktif, badan usaha pengelola (BUP) atau koperasi, atau manajemen pengelola (usahatani, pabrik industri), dan lembaga pembiayaan.

Dalam model ini terdapat dua kegiatan bisnis utama yaitu yang *pertama*, kegiatan bisnis membangun kebun dan pabrik industri serta jika diperlukan permukiman petani peserta yang akan dilakukan oleh perusahaan pengembang (developer); *kedua*, adalah bisnis mengelola kebun dan pabrik milik petani peserta serta memasarkan hasilnya yang dilakukan oleh badan usaha pengelola yaitu koperasi yang dibentuk oleh petani peserta itu sendiri.

Secara singkat konsep model agribisnis kelapa sawit yang akan melibatkan masyarakat pedesaan disajikan pada Gambar 8.1.

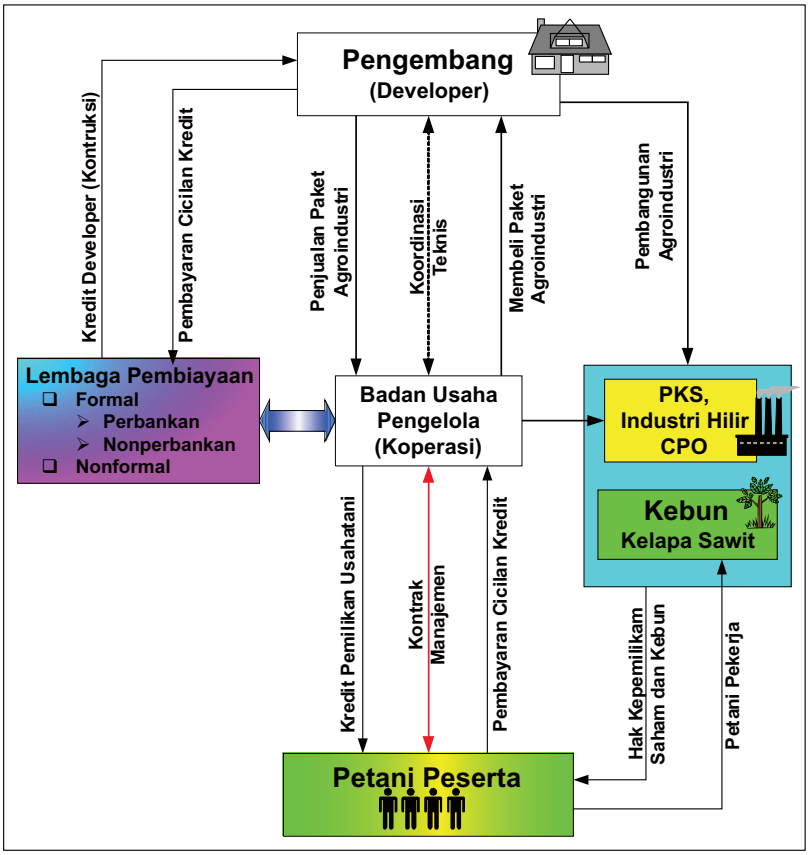

Gambar 8.1. Skema Konseptual Mitra Usaha Agroestate Kelapa Sawit di Pedesaan (Almasdi Syahza, 2003g)

Untuk lebih jelasnya model agroestate tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perusahaan pengembang (developer) membangun kebun (usahatani) dan pabrik pengolahan hasil kebun (agribisnis) sampai kebun dalam bentuk siap menghasilkan dan pabrik industri dalam bentuk siap operasi. Sumber dana untuk membangun kebun pabrik dapat menggunakan dana sendiri atau pinjaman dari bank atau pihak lain yang memungkinkan.

b. Perusahaan (developer) kebun dan pabrik yang sudah dibangun dijual dalam bentuk unit kaveling atau saham pabrik kepada petani aktif yaitu petani yang benar-benar berminat untuk mengelola kebun dan pesertanya adalah masyarakat pedesaan. Sebagai pemilik kebun petani peserta akan menerima sertifikat pemilikan tanah dan sebagai bukti pemilikan pabrik petani peserta akan menerima surat berharga dalam bentuk lembaran saham.

c. Para petani peserta membeli kebun dan saham pabrik dengan menggunakan fasilitas kredit lembaga pembiayaan yang ada. Skim kredit ini difasilitasi ketersediaannya oleh pengusaha pengembang atau dapat pula oleh koperasi. Para petani peserta sebagai pemilik unit kavling menyerahkan pengelolaan (manajemen fee) yang besarnya telah ditentukan didalam kontrak manajemen yang telah disepakati. Perusahaan jasa manajemen akan mengelola kebun dan pabrik dengan prinsip-prinsip manajemen perkebunan yang terbaik dan profesional.

d. Kepemilikan saham PKS bagi petani peserta dibatasi maksimum 40 % dari total modal kerja, selebihnya dimiliki oleh perusahaan inti dan saham pemerintah daerah. Ini bertujuan untuk menjaga profesional pengelolaan PKS. Model pemilikan saham dapat dilihat pada Gambar 8.2.

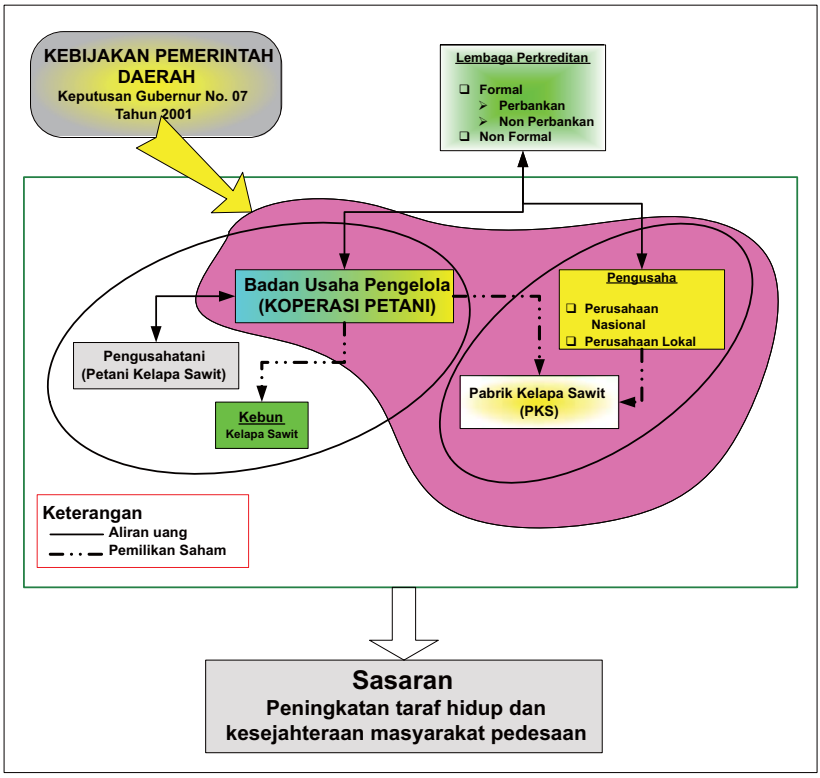

Gambar 8.2. Model Mitra Usaha Kepemilikan Modal pada Pembangunan Agroestate Kelapa Sawit di Pedesaan (Almasdi Syahza, 2003g)

e. Dalam pengelolaan kebun, petani aktif dikelompokkan ke dalam kelompok petani hamparan (KPH) dan diperlukan sebagai tenaga kerja yang mendapatkan upah sesuai kesepakatan.

f. Pendapatan petani diharapkan cukup besar, karena dapat berasal dari berbagai sumber. Bagi petani aktif pendapatannya akan bersumber dari hasil panen kebun miliknya, upah kerja dan dividen saham pabrik. Keunggulan lain adalah kontiniutas bahan baku untuk PKS akan terjamin karena petani merasa memiliki PKS sehingga kemungkinan menjual TBS ke PKS lain akan terhindar.

Perusahaan pengembang (developer) akan mengembalikan modal yang dipakai (dana sendiri, dan pinjaman dari lembaga pembiayaan) dan akan mendapatkan keuntungan dari hasil kebun dan saham pabrik industri yang telah dibangun.

Lingkup kewenangan kerja dan tanggung jawab pelaku atau aktor pembangunan agroestate kelapa sawit dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perusahaan Pengembang atau Developer

(1) Melakukan survey/penelitian lapangan yang meliputi aspek kesesuaian lahan, teknologi yang dipakai, transportasi, komoditi yang dikembangkan, produk yang dihasilkan, keuangan atau sumber dana dan pemasaran.

(2) Membuat studi kelayakan pembangunan agroestate kelapa sawit meliputi pembangunan usahatani dan pabrik pengolah untuk petani peserta.

(3) Mempresentasikan studi kelayakan kepada pihak-pihak terkait antara lain kepada perbankan atau sumber dana, instansi pemerintah, calon konsumen dan lain-lainnya.

(4) Melakukan negosiasi sehingga mencapai kesepakatan tentang kebutuhan dana dengan pihak perbankan atau sumber dana yang meliputi kredit untuk pembangun agroestate (usahatani, pabrik) dan kredit untuk petani peserta berupa usahatani dan saham pabrik yang telah dibangun oleh developer dengan bunga (interest) yang layak usaha (finansial).

(5) Membangun agroestate yang meliputi usahatani dan pabrik pengolahan (industri) sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

(6) Merawat usahatani sampai usahatani tersebut menghasilkan.

(7) Melakukan pemasaran (penjualan) unit usahatani, saham pabrik secara paket kepada masyarakat konsumen calon petani peserta.

(8) Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Pengelola (koperasi) dalam hal ini koperasi untuk memberlakukan persyaratan teknis dan administrasi dalam proses perawatan maupun penjualan paket unit usahatani, saham pabrik pengolah (industri).

(9) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

b. Badan Usaha Pengelola (Koperasi)

(1) Secara umum mengikat kontrak manajemen dengan petani peserta yang di dalamnya memuat antara lain peraturan dan persyaratan sebagai berikut: a) Badan Usaha Pengelola akan mengelola agroestate secara profesional untuk kemajuan agroestate dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi petani peserta; b) Penentuan besarnya biaya jasa pengelolaan (fee) untuk Badan Usaha Pengelola; c) Aturan-aturan pemutusan hubungan kontrak antara Badan Usaha Pengelola dengan petani peserta; d) Perpindahan kepemilikan unit usahatani dan saham pabrik pengolahan (industri) harus sepengetahuan dan persetujuan Badan Usaha Pengelola; e) Petani peserta tidak diperkenankan merubah jenis tanaman pokok, kecuali persetujuan Badan Usaha Pengelola; f) Petani peserta menjual hasil panen usahataninya kepada pabrik pengolahan (industri) melalui Badan Usaha Pengelola; g) Petani peserta akan membayar cicilan kredit sesuai jadwal melalui Badan Usaha Pengelola; dan h) Petani peserta mengikuti pola perawatan usahatani dan tata cara panen sesuai dengan arahan Badan Usaha Pengelola.

(2) Susunan organisasi Badan Usaha pengelola (Koperasi) secara teknis menyangkut dengan lingkup kerja Badan Usaha Pengelola adalah: a) Melaksanakan koordinasi dengan developer tentang pembangunan usahatani, perawatan usahatani, dan penjualan unit usaha; b) Mempersiapkan dan melaksanakan manajemen usahatani; c) Menjadikan dan mendistribusikan sarana produksi; d) Mengatur tata cara panen, transportasi hasil panen ke pabrik; e) Mengatur, membimbing dan membina keterampilan teknis perawatan dan panen usahatani; f) Menampung, memproses dalam pabrik hasil usahatani, dan memasarkan produk akhir; g) Memberlakukan dan melaksanakan prinsip-prinsip manajemen pabrik yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas, produktifitas, dan peningkatan nilai tambah (*value added*) berdasarkan *zero defect,*

zero loss dan *zero waste*; dan h) Melaksanakan manajemen limbah dan lingkungan yang baik.

c. Lembaga Pembiayaan

(1) Menyediakan dana konstruksi kepada developer untuk pembangunan usahatani dan pabrik kelapa sawit.
(2) Menyediakan kredit usahatani dan saham pabrik kepada petani peserta.
(3) Membuat dan melaksanakan administrasi individual tabungan petani peserta, baik untuk cost of living, tabungan peremajaan dan tabungan petani peserta lainnya.
(4) Melakukan pengawasan pengembalian kredit baik kredit usahatani maupun pemilikan saham PKS.

d. Petani Peserta

(1) Membeli paket agroestate yang terdiri dari unit usahatani dan saham pabrik pengolahan (industri).
(2) Memanfaatkan dan mengembalikan kredit usahatani, saham pabrik pengolahan (industri) yang disediakan bank yang telah ditunjuk oleh pengembang (developer).
(3) Mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pengelola dan oleh instansi pemerintah terkait.
(4) Mengikat kontrak manajemen dengan Badan Usaha Pengelola dan mentaati peraturan dan persyaratan yang telah disepakati bersama.
(5) Menjual hasil usahatani kepada pabrik melalui Badan Usaha Pengelola (Koperasi) dengan harga yang telah ditetapkan bersama.
(6) Merawat usahatani dan lingkungan permukiman dengan semangat kerja keras dan berdasarkan bimbingan teknis dari Badan Usaha Pengelola.
(7) Menunjuk wakil untuk menjadi komisaris di Badan Usaha Pengelola.

D. Mekanisme Kerja Agroestate Kelapa Sawit

Di dalam model pengusahaan agroestate terdapat dua kegiatan bisnis utama yaitu yang *pertama* kegiatan bisnis membangun kebun dan pabrik

industri yang akan dilakukan oleh perusahaan pengembang (developer), sedangkan yang *kedua* adalah bisnis mengolah kebun dan pabrik milik petani peserta serta memasarkan hasil olahannya yang dilakukan oleh badan usaha pengelola (koperasi), yaitu suatu badan usaha jasa manajemen pengelola (sebagai operator atau administrator kebun dan pabrik).

Pembangunan agroestate kelapa sawit banyak pihak yang terlibat dalam bisnis pengembangan dan pengelolaan usaha agroestate tersebut, antara lain: developer, badan usaha pengelola, petani peserta, lembaga pembiayaan dan pihak yang terkait lainnya. Supaya kegiatan ini lancar maka diperlukan pengaturan mekanisme kerja yang baku/standar yang menjadi pedoman bagi pihak yang berkepentingan dalam bisnis agroestate, antara lain: a) mekanisme penjualan dan pembayaran paket; b) penjualan paket agroestate (usahatani + modal penyertaan pabrik); c) pembayaran paket bagi petani; d) pemotongan cicilan paket untuk petani; e) pembayaran hasil usaha; f) pemanenan, sortasi dan penimbang; g) pengangkutan; h) pemeliharaan kebun; i) penetapan harga; j) supervisi internal; dan k) mekanisme rapat umum peserta tahunan (RUPT).

BAB IX
KELAPA SAWIT, DAMPAKNYA TERHADAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN

Hasil kajian memnunjukkan pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan ekonomi, khususnya untuk daerah pedesaan. Pengaruh ini terlihat dari indikator, antara lain: *multiplier effect* ekonomi; indek kesejahteraan masyarakat; dan indek Kesenjangan Ekonomi.

A. Perkembangan Luas Areal Komoditi Utama Perkebunan

Secara kuantitatif pelaksanaan pembangunan di daerah Riau telah mencapai hasil yang cukup baik seperti yang terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2002-2007 pertumbuhan ekonomi Riau sebesar 8,40%, pertumbuhan yang tinggi ini ditopang oleh sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan. Pada tahun 1996 sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi rakyat pedesaan Riau hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2 % sementara sektor industri melaju sebesar 14 persen. Namun pada tahun 2002 sektor pertanian sudah mulai membaik dengan angka pertumbuhan sebesar 6,06 persen, sedangkan sektor industri 12,47 persen. Selama periode 2002-2007 perumbuhan sektor pertanian cukup baik yaitu sebesar 6,79. Tingginya pertumbuhan sektor pertanian karena ditunjang oleh tanaman perkebunan yang berorientasi ekspor seperti kelapa sawit, karet, kelapa dan sebagainya (Almasdi Syahza, 2007a).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, seperti masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan atau pinggiran mendapat porsi yang kecil dan tertinggal. Kesenjangan di daerah ini semakin diperburuk karena adanya kesenjangan dalam pembangunan antar sektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi pedesaan) dan non-pertanian (ekonomi perkotaan).

Perkembangan sektor pertanian di daerah Riau sampai saat ini secara kuantitatif cukup menggembirakan, yaitu dengan rataan pertumbuhan selama lima tahun terakhir sebesar 6,79%. Namun tingkat pendapatan masyarakat dari usaha pertanian belum meningkat seperti yang diharapkan. Karena itu Pemerintah Daerah Riau mencanangkan pembangunan Daerah Riau melalui program pemberantasan kemisninan, kebodohan dan pembangunan infrastruktur (lebih dikenal dengan program K2I). Setiap pembangunan yang dilaksanakan di Daerah Riau harus mengacu kepada Program K2I. Karena pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan, khususnya sektor perkebunan (kelapa sawit, karet, dan kelapa). Sampai saat ini kelapa sawit merupakan tanaman primadona masyarakat Riau.

Ada beberapa alasan kenapa Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit sebagai komoditas utama, antara lain: *Pertama,* dari segi fisik dan lingkungan keadaan daerah Riau memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kondisi daerah Riau yang relatif datar memudahkan dalam pengelolaan dan dapat menekan biaya produksi; *Kedua,* kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit menghasilkan produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain; *Ketiga,* dari segi pemasaran hasil produksi Daerah Riau mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura; *Keempat,* Daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT), berarti terbuka peluang pasar yang lebih menguntungkan; dan *kelima,* berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Almasdi Syahza, 2002). Untuk lebih jelasnya perkembangan luas areal komoditi unggulan perkebunan di Daerah Riau disajikan pada Tabel 9.1.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan khususnya di daerah pedesaan, di samping itu juga memperhatikan pemerataan perekonomian antar golongan dan antar

wilayah. Pembangunan pertanian yang berbasis perkebunan dalam arti luas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga terjadi suatu perubahan dalam pola hidup masyarakat di sekitarnya.

Tabel 9.1 Perkembangan Luas Areal Komoditi Utama Perkebunan di Propinsi Riau Tahun 2002–2011 (dalam ha)

Tahun	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet
2002	1.312.661	622.796	566.130
2003	1.340.306	633.157	547.123
2004	1.392.232	639.340	544.735
2005	1.486.989	550.052	543.783
2006	1.530.150	546.927	528.697
2007	1.612.382	557.022	532.901
2008	1.673.551	542.749	528.655
2009	2.056.008	542.332	528.288
2010	2.103.174	525.398	499.490
2011	2.256.538	521.019	498.907
Pertumbuhan (%)	6,20	-1,96	-1,39

Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Riau, 2012

Tulisan ini mencoba mengidentifikasi dampak pembangunan perkebunan kelapa sawit terhadap percepatan pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan. Kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat mengangkat perekonomian masyarakat khususnya mereka yang bermata pencaharian dari sektor pertanian. Dampak dari pembangunan tersebut akan terlihat dari beberapa indikator, antara lain:

- Angka *multiplier effect* ekonomi yang diciptakan dari kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit di pedesaan
- Indek kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagai akibat dari pembangunan perkebunan kelapa sawit.
- Indek kesenjangan ekonomi antar golongan dan antar wilayah

B. *Multiplier Effect* Ekonomi

Hasil penelitian Almasdi Syahza (2005), pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau membawa perubahan besar terhadap keadaan masyarakat pedesaan. Di samping itu dengan berkembangnya perkebunan kelapa sawit juga merangsang tumbuhnya industri pengolahan yang bahan bakunya dari kelapa sawit. Pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini telah memberikan tetesan manfaat (*trickle down effect*), sehingga dapat memperluas daya penyebaran (*power of dispersion*) pada masyarakat sekitarnya. Semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit, semakin terasa dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada sektor perkebunan dan sektor turunannya. Dampak tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat petani, sehingga meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, baik untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

Dampak terhadap masyarakat sekitar pengembangan perkebunan kelapa sawit, tercermin dalam terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat tempatan. Begitu juga timbulnya kesempatan berusaha, seperti: membuka kios makanan dan minuman, jasa transportasi, industri rumah tangga, erta jasa perbankan. Semuanya ini akhirnya menimbulkan munculnya pasar-pasar tradisional di daerah permukiman dan pedesaan. Dengan demikian pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Dari sisi lain menyebabkan pola konsumsi dan pendidikan masyarakat akan meningkat pula (Almasdi Syahza, 2007a).

Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian, tujuan utama pengembangan agribisnis kelapa sawit adalah 1) menumbuhkembangkan usaha kelapa sawit di pedesaan yang akan memacu aktivitas ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan 2) menumbuhkan industri pengolahan CPO dan produk turunannya serta industri penunjang (pupuk, obat-obatan dan alsin) dalam

meningkatkan daya saing dan nilai tambah CPO dan produk turunannya (Almasdi Syahza, 2003).

Dari potensi yang ada, maka pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau juga akan membuka peluang pembangunan industri hulu-hilir kelapa sawit, membuka peluang usaha, tumbuhnya diversifikasi usaha, dan meningkatkan sumber devisa bagi daerah Riau. Pembangunan ini juga akan membuka peluang kerja di daerah dan akan menumbuhkan sektor ekonomi lainnya yang pada gilirannya akan memunculkan daerah-daerah baru sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah (Almasdi Syahza, 2007a).

Pengembangan perkebunan di pedesaan telah membuka peluang kerja bagi masyarakat yang mampu untuk menerima peluang tersebut. Dengan adanya perusahaan perkebunan, mata pencaharian masyarakat tempatan tidak lagi terbatas pada sektor primer dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Bermacam sumber pendapatan yang memberikan andil yaitu pedagang (dagang barang-barang harian, dagang karet, tiket angkutan dan penjual es), pegawai (guru, pemerintahan desa), industri rumah tangga (industri tahu, roti, dan percetakan genteng), buruh kasar, nelayan, pencari kayu di hutan dan tukang kayu.

Selain besaran jumlah pendapatan pada masing-masing rumah tangga petani kelapa sawit, hal yang perlu dicermati dalam mengamati dampak pelaksanaan investasi perkebunan adalah timbulnya usaha-usaha baru yang dikelola oleh masyarakat. Kegiatan usaha tersebut pada dasarnya merupakan upaya pemanfaatan peluang usaha yang tercipta sebagai akibat adanya mobilitas penduduk, baik yang terpengaruh secara langsung maupun sebagai akibat usaha yang tercipta oleh adanya pengaruh tidak langsung dari pembangunan perkebunan yang memungkinkan terbukanya peluang usaha lainnya.

Suatu peluang usaha akan menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat jika mampu menangkap peluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi suatu

kegiatan usaha yang nyata. Dengan demikian kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang itu sendiri. Yang kedua adalah kemampuan mengorganisir sumberdaya yang dimiliki sedemikian rupa sehingga peluang yang potensial menjadi usaha yang secara aktual dapat dioperasionalkan.

Walaupun tidak semua kegiatan perkebunan memberikan atau menyebabkan timbulnya sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat, namun tergantung kepada jenis investasi perkebunan (inti atau plasma) dan sektor ekonomi yang akan dilakukan. Investasi tersebut pada akhirnya akan berpengaruh kepada seberapa besar manfaat kegiatan perkebunan memberi tetesan pada masyarakat sekitarnya. Kebijaksanaan pemerintah dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh manfaat dari adanya pembangunan perkebunan sangat berpengaruh. Hal ini akan menentukan variasi sumber-sumber pendapatan yang muncul kemudian.

Secara umum dapat diungkapkan bahwa dengan adanya kawasan perkebunan telah menyebabkan munculnya sumber-sumber pendapatan baru yang bervariasi. Sebelum dibukanya kawasan perkebunan di pedesaan, sumber pendapatan masyarakat relatif homogen, yakni menggantungkan hidupnya pada sektor primer, memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia seperti apa adanya tanpa penggunaan teknologi yang berarti. Data lapangan mengungkapkan pada umumnya masyarakat hidup dari sektor pertanian sebagai petani tanaman pangan (terutama palawija) dan perkebunan (karet). Pada masyarakat di sekitar aliran sungai mata pencaharian sehari-hari pada umumnya sebagai nelayan dan pencari kayu di hutan. Selain teknologi yang digunakan sangat sederhana dan monoton sifatnya tanpa pembaharuan (dari apa yang mampu dilakukan). Orientasi usahanya juga terbatas kepada pemenuhan kebutuhan keluarga untuk satu atau dua hari mendatang tanpa perencanaan pengembangan usaha yang jelas (subsisten).

Kondisi sebelum pembangunan perkebunan dengan setelah adanya kegiatan perkebunan pendapatan masyarakat semakin beragam. Keragaman ini semakin memperkuat stabilitas struktur pendapatan rumah tangga karena

memberikan alternatif pemasukan bagi keluarga pada saat sumber pendapatan lain mengalami kegagalan usaha. Rataan pendapatannya dari masyarakat pedesaan dari kelapa sawit sebesar 87,64% dan 12,36% bersumber dari pendapatan di luar perkebunan kelapa sawit.

Kegiatan pembangunan perkebunan telah menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi. Akibatnya di daerah-daerah sekitar pembangunan perkebunan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, terutama terhadap kebutuhan rutin rumah tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan kelapa sawit.

Apabila dikaji dari struktur biaya pengusahaan perkebunan kelapa sawit yang teknis operasionalnya dirancang lebih banyak menggunakan teknik manual, biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung serta tenaga teknis di lapangan memiliki porsi yang cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, perputaran uang yang terjadi di lokasi dalam jangka panjang diperkirakan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dengan tumbuhnya perdagangan dan jasa. Hal ini memberikan arti bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan *multiplier effect,* terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha.

Pendekatan penciptaan *multiplier effect* pada kegiatan perkebunan kelapa sawit digunakan formula sebagai berikut (Almasdi Syahza, 2004).

$$K = \frac{1}{1-(MPCxPSY)}$$

Keterangan: K adalah pengaruh ekonomi wilayah (*multiplier effect)*; MPC merupakan proporsi pendapatan petani yang dibelanjakan di daerah tersebut; dan PSY adalah bagian dari pengeluaran petani yang menghasilkan pendapatan di daerah tersebut atau persen kebutuhan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dapat dipenuhi oleh wilayah setempat. Semakin tinggi angka *multiplier effect* kegiatan perkebunan kelapa sawit (K) maka semakin tinggi pula perputaran uang di daerah pedesaan.

Penelitian Almasdi Syahza (2006), pembangunan perkebunan kelapa sawit telah memberikan dampak ekonomi secara berantai, ini ditunjukkan dengan angka pengganda sebesar 2,48. Nilai ini dapat memberikan arti bahwa setiap pembelanjaan oleh petani kelapa sawit di lokasi dan sekitarnya sebesar Rp 100, secara sinerjik menjadikan perputaran uang di lokasi tersebut dan sekitarnya sebesar Rp 248 melalui bentuk-bentuk usaha, baik sektor riil maupun jasa. Nilai-nilai tersebut diperoleh dengan dasar dan asumsi sebagai berikut:

1) Persentase pendapatan petani sawit dibelanjakan di wilayah setempat (MPC) sekitar 84,15 %.
2) Kebutuhan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dapat dipenuhi di wilayah setempat (PSY) sebesar 70, 97 %, antara lain:
   - Kebutuhan peralatan pertanian ringan yang digunakan dalam kelola teknis diproyeksikan mampu dipenuhi oleh wilayah setempat.
   - Pengadaan sarana prasarana penunjang yang disediakan oleh perusahaan perkebunan dan koperasi dapat dipenuhi oleh wilayah setempat.

C. Indek Kesejahteraan Masyarakat

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan banyak tenaga kerja dan investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya, diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan industri hilirnya akan mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkages*). Pada proses kegiatan ini akan muncul antara lain jasa kontruksi, jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan peralatan kerja serta bahan dan material yang dibutuhkan selama proses tersebut. Sedangkan pada kegiatan ekonomi waktu pascapanen dan proses produksi akan mempunyai keterkaitan ke depan (*foreward linkages*). Proses *foreward linkages* yang diperkirakan akan muncul adalah sektor jasa, antara lain: angkutan, perhotelan, koperasi,

perbankan, perdagangan, industri kecil di pedesaan yang memproduksi alat produksi pertanian (Almasdi Syahza, 2007c). Semua aktivitas ini akan meningkatkan indek kesejahteraan masyarakat di daerah sekitarnya.

Dalam perhitungan ekonomi indek kesejahteraan dapat dilakukan dengan formula:

$$G = w_1 g_1 + w_2 g_2 + \ldots + w_i g_i$$

Keterangan: G adalah indek pertumbuhan kesejahteraan (IPK); g_i adalah tingkat pertumbuhan sosial quantile ke i; dan w_i merupakan bobot kesejahteraan kelompok quantile ke i.

Berdasarkan rumus IPK, pertumbuhan indek kesejahteraan petani kelapa sawit di Riau pada tahun 1995 hanya sebesar 0,49 yang berarti tingkat pertumbuhan kesejahteraan meningkat sebesar 49 persen (Tabel 9.2).

Pada tahun 1998 terjadi penurunan indeks kesejahteraan sebesar –1,09. Penurunan ini disebabkan kondisi ekonomi nasional pada waktu itu tidak menguntungkan, harga barang melonjak naik, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika menurun. Namun untuk tingkat golongan 80 persen berpendapatan rendah mengalami peningkatan. Yang paling besar adalah golongan 20 % terendah. Ini disebabkan karena ketergantungan mereka terhadap produk luar (barang sektor modern sangat rendah). Mereka lebih banyak memakai barang sektor tradisional atau produksi lokal.

Tabel 9.2. Pertumbuhan Indeks Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Daerah Riau

Kelompok Pendapatan	1995		1998		2003		2006		2009	
	w	g	w	g	W	g	W	G	w	g
20 % terendah	0.0805	-0.0084	0.1513	0.0708	0.1169	-0.0344	0.1040	-0.0129	0.1127	-0.0087
20 % terendah kedua	0.1267	0.0090	0.1946	0.0679	0.1583	-0.0363	0.1590	0.0007	0.1547	0.0043
20 % terendah ketiga	0.1438	-0.0056	0.2152	0.0714	0.1831	-0.0321	0.1791	-0.0040	0.1841	-0.0050
20 % terendah keempat	0.1955	-0.0119	0.2010	0.0055	0.2107	0.0097	0.2260	0.0153	0.2197	0.0063
20 % tertinggi	0.4535	0.0167	0.2379	-0.2156	0.3309	0.0930	0.3319	0.0010	0.3288	0.0031
Indek Pertumbuhan Kesejahteraan	0.49		-1.09		1.72		0.18		0.12	

Sumber: Hasil penelitian Almasdi Syahza (1995, 1998, 2003, 2006, dan 2009)

Setelah ekonomi pulih kembali pada tahun 2003 indeks pertumbuhan kesejahteraan petani meningkat lagi menjadi 1,72. Berarti pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit mengalami kemajuan sebesar 172 persen. Pertumbuhan ini hanya dinikmati oleh kelompok yang berpenghasilan 40 persen tertinggi sebesar 32,8 persen, sedangkan kelompok 60 persen terendah justru mengalami penurunan kesejahteraan sebesar –15,6 persen. Namun pada tahun 2006 memperlihatkan indek pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit sangat dirasakan oleh kelompok pendapatan 40% terendah (miskin), ini dibuktikan dengan angka indek pertumbuhan kesejahteraan bernilai positif 0,23. Kelompok berpenghasilan tertinggi (20% tertinggi) justru mengalami penurunan kesejahteraan. Sampai pada tahun 2009 indek kesejahteraan masyarakat pedesaan masih bernilai positif.

Hasil penelitian Almasdi Syahza (2003) menunjukkan, aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain: 1) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan 3) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan dampak terhadap komponen ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat sekitar, antara lain: 1) Kegiatan pembangunan sumberdaya masyarakat desa; 2) Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat; 3) Penyerapan tenaga kerja lokal; 4) Penyuluhan pertanian, kesehatan dan pendidikan; dan 5) Pembayaran kewajiban perusahaan terhadap negara (pajak-pajak dan biaya kompensasi lain).

Kegiatan pengusahaan perkebunan kelapa sawit baik dalam bentuk perusahaan maupun swadaya membutuhkan tenaga kerja langsung (tidak termasuk *skilled-labour*) dan tenaga teknis perkebunan dalam pengelolaannya. Secara ideal tenaga kerja direkrut dari masyarakat sekitar perkebunan, terutama untuk tenaga kerja teknis perkebunan yang diambil dari masyarakat desa sekitarnya. Kegiatan perkebunan kelapa sawit ini menyerap tenaga kerja cukup banyak, di samping itu kegiatannya bersifat manual sehingga tenaga kerja manusia sangat diperlukan.

Adanya aktivitas kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit, khususnya pengadaan sarana prasarana menyebabkan aktivitas dan mobilitas masyarakat makin tinggi. Hal ini berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan berusaha terutama dalam bidang jasa dan perdagangan.

Kegiatan pembangunan jaringan jalan juga meningkatkan mobilitas masyarakat, membantu masyarakat dalam pemasaran hasil pertaniannya. Di samping itu kebutuhan hidup masyarakat di pedesaan dapat dipenuhi dari hasil pertanian masyarakat itu sendiri. Pengadaan kebutuhan perusahaan dapat bekerjasama dengan masyarakat setempat. Ini merupakan salah satu dampak positif terhadap peningkatan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar.

D. Indek Kesenjangan Ekonomi

Dari segi penanaman investasi yang dilaksananakan, hampir semua daerah kabupaten/kota memanfaatkan investasi. Tetapi kalau dilihat dari segi dampak ekonominya belum menunjukkan hasil yang diharapkan, hal ini disebabkan karena investasi pada beberapa daerah kabupaten/kota mempunyai *multiplier effect* yang kecil kecuali untuk sektor industri dan jasa di daerah perkotaan Dumai dan Pekanbaru.

Ada empat kemungkinan sebab mengapa fenomena ini terjadi. *Pertama*, investasi sektor industri di daerah kabupaten/kota yang menyebabkan disparitas spasial semakin membesar disebabkan oleh industri milik swasta dengan fasilitas PMA dan PMDN bukan investasi pemerintah. Investasi sektor swasta lebih mengutamakan target keuntungan, sementara invesatsi pemerintah lebih mengutamakan nilai manfaat untuk masyarakat; *Kedua*, kemungkinan industri dengan fasilitas PMDN dan PMA di masing-masing daerah kabupaten/kota ada yang tinggi nilainya tetapi menimbulkan *multiplier effect* yang kecil sehingga tidak memperbesar PDRB daerah bersangkutan (seperti sektor pertanian). Sebaliknya investasi swasta dengan fasilitas PMA dan PMDN, walaupun nilainya kecil di suatu daerah kabupaten/kota tetapi mempunyai *multiplier effect* yang besar sehingga dapat mempertinggi PDRB daerah bersangkutan; *Ketiga*, penanaman investasi pada daerah kabupaten/kota baik PMDN maupun PMA terfokus pada sektor pertanian yang pengembalian tingkat investasinya dalam jangka waktu yang agak lama;

dan *keempat*, kemungkinan investasi yang dilakukan oleh sektor pemerintah baik swasta yang bersumber PMDN dan PMA tertanam pada sektor sosial yang mempunyai *multiplier effect* yang kecil serta tingkat pengembaliannya yang lambat.

Untuk mengetahui perhitungan disparitas spasial atau *regional inequality* antara Kabupaten/kota di Riau digunakan Indek Williamson. Semakin besar nilai Indeks Williamson berarti semakin besar juga disparitas antar daerah (disparitas spasial).

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - Y)^2 \frac{f_i}{n}}{Y}}$$

Keterangan:

V_w = nilai disparitas spasial atau regional

f_i = jumlah penduduk di masing-masing Kabupaten/kota

n = jumlah penduduk Riau

Y_i = pendapatan perkapita di masing-masing Kabupaten/kota

Y = pendapatan perkapita Riau

Melalui hasil perhitungan Indeks Williamson pada Tabel 9.3, diketahui bagaimana peran investasi disektor perkebunan dalam mengeliminasi disparitas spasial di daerah Riau. Analisis ketimpangan di daerah Riau selama periode tahun 2004-2008 dilihat dari dua segi yaitu: 1) analisis tanpa subsektor perkebunan; dan 2) analisis memasukkan subsektor perkebunan. Analisis ini berpegang pada beberapa asumsi, antara lain: 1) sektor industri, perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor yang berbasis ekonomi perkotaan; 2) Sektor pertanian berbasis ekonomi pedesaan, dalam hal ini subsektor perkebunan memberikan peranan penting terhadap pembangunan ekonomi pedesaan. Ini terbukti dikembangkannya kelapa sawit sebagai komoditi unggulan daerah Riau.

Analisis disparitasl spasial menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang di dalamnya

merupakan akumulasi sumbangan seluruh kegiatan sektor ekonomi di daerah Riau tahun 2004-2010. Besarnya disparitas yang dinyatakan dalam Indeks Williamson disajikan pada Tabel 9.3. Data dasar yang digunakan ialah pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Dari tabel tersebut terlihat nilai ketimpangan antar daerah kabupaten/kota di Riau.

Tabel 9.3 Analisis Ketimpangan Antar Daerah, Tekanan Penduduk, Daya Dukung Lahan

Tahun	Indek Williamson		Tekanan Penduduk		DDL
	Tanpa Perke-bunan	Termasuk Perke-bunan	Termasuk Perke-bunan	Tanpa Perke-bunan	
2004	0.6309	0.3429	0.07	6.01	129.30
2005	0.5866	0.3146	0.08	7.57	130.26
2006	0.4211	0.2802	0.14	9.84	121.20
2007	0.4661	0.2527	0.16	10.39	147.68
2008	0.4117	0.2156	0.92	11.04	138.77
2009	0.4021	0.2132	2.13	15.62	152.81
2010	0.4101	0.1993	3.44	17.09	162.34

Sumber: Almasdi Syahza (2011)

Perhitungan tanpa memasukkan subsektor perkebunan, memperlihatkan nilai ketimpangan cukup besar. Selama periode tahun 2004-2010 nilai ketimpangan berkisar 0,4101-06309. Angka tersebut menunjukkan ketimpangan sedang. Ketimpangan ini disebabkan karena tanpa subsektor perkebunan merupakan kegiatan ekonomi yang berbasis perkotaan, yaitu sektor industri dan jasa. Keterikatan sektor industri dan jasa terhadap ekonomi pedesaan sangat kecil. Namun apabila analisis memasukkan data subsektor perkebunan, ketimpangan antar daerah lebih kecil, selama periode tahun 2004-2010 berkisar antara 0,1993-0,3429. Angka indek ini memperlihatkan ketimpangan rendah.

Berdasarkan angka Indeks Williamson tersebut dapat diberikan interpretasi bahwa hasil pembangunan Daerah Riau yang mengandalkan sektor industri dan jasa selama periode tahun 2004-2010 menyebabkan

terjadinya ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota. Akibat ini akan menimbulkan juga ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Masyarakat yang bekerja di sektor industri dan jasa akan mendapatkan porsi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang bekerja di luar sektor industri (sektor pertanian), karena sektor industri dan jasa mampu memberikan nilai tambah yang tinggi.

Analisis disparitas tanpa sektor industri dan jasa memperlihatkan ketimpangan tidak begitu berat. Tanpa sektor industri menyebabkan ketimpangan antar wilayah semakin kecil. Hal ini disebabkan subsektor perkebunan dapat mendongkrak ekonomi pedesaan. Sejak krisis tahun 1998, ekonomi pedesaan yang berbasis pertanian menunjukkan kontribusi yang besar terhadap pendapatan per kapita masyarakat. Hasil perhitungan pada menunjukkan ketimpangan yang lebih kecil pada tahun 2010 sebesar 0,1993. Pengembangan perkebunan cenderung menurunkan angka ketimpangan ekonomi antar daerah kabupaten/kota. Tanpa subsektor perkebunan indek ketimpangan sebesar 0.4101 pada tahun 2010. Artinya tanpa terlibat ekonomi perkeotaan (industri dan jasa) ketimpangan antar daerah kabupaten/kota semakin kecil.

Dari hasil analisis yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit di dearah Riau dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat pedesaan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit juga dapat menekan tingkat ketimpangan antar daerah kabupaten/kota di Riau. Dengan demikian pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Subsektor perkebunan memberikan kontribusi pembangunan di pedesaan, sehingga dapat menekan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Penurunan indek ketimpangan ini lebih banyak disebabkan kegiatan perkebunan menyebabkan mata pencaharian masyarakat tidak lagi terbatas pada sektor primer dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Kegiatan ini menimbulkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di sekitamya. Manfaat kegiatan perkebunan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain: memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; peningkatan

kesejahteraan masyarakat sekitar; dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

E. Indek Tekanan Penduduk

Tekanan penduduk adalah indeks untuk menghitung dampak penduduk di lahan pertanian terhadap lahan. Semakin tinggi indeks tekanan penduduk memperlihatkan beban lahan terhadap jaminan kehidupan masyarakat semakin tinggi. Apabila tidak dilakukan perubahan teknologi untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan cara intensifikasi, maka akan terjadi perambahan hutan dan konflik lahan. Ketergantungan penduduk terhadap lahan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Apalagi selama satu warsa terakhir ini permintaan lahan terhadap perkebunan sangat tinggi, sehingga terjadi alih fungsi lahan.

Bertambahnya jumlah penduduk akan diikuti oleh peningkatan kebutuhan terhadap sumberdaya lahan. Dengan kualitas penduduk yang rendah, kenaikan tekanan terhadap sumberdaya akan meningkat sebanding dengan kenaikan jumlah penduduk. Apabila tidak diikuti dengan pengembangan areal pertanian baru maka rasio populasi penduduk dan areal lahan yang bisa ditanami semakin besar. Artinya, jumlah orang yang harus disokong atau didukung oleh lahan semakin banyak, sehingga intensifikasi menjadi prioritas utama dalam pembangunan pertanian.

Tabel 9.4. Luas Lahan Menurut Penggunaan Provinsi Riau Periode Tahun 2004-2008

Penggunaan Lahan		2004		2008		+/- (Ha)
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	
A	**Tanaman Pangan**					
1	Padi Sawah	123384	1.01	120,849	1.05	-2,535
2	Padi Ladang	27714	0.23	26,947	0.23	-767
3	Jagung	19285	0.16	21,397	0.19	2,112
4	Ubikayu	4445	0.04	4,625	0.04	180
5	Kacang Tanah	3554	0.03	2,412	0.02	-1,142
6	Ubijalar	1269	0.01	1,429	0.01	160
7	Kacang Kedelai	1781	0.01	4,319	0.04	2,538
8	Kacang Hijau	1155	0.01	1,577	0.01	422
	Jumlah	182587	1.50	183555	1.60	968
B	**Perkebunan**					
1	Kelapa Sawit	1,340,036	11.01	1,674,845	14.60	334,809
2	Karet	543,783	4.47	528,655	4.61	-15,128
3	Kelapa	550,052	4.52	542,740	4.73	-7,312
4	Kopi	10,894	0.09	7,978	0.07	-2,916
5	Sagu	66,555	0.55	69,917	0.61	3,362
	Jumlah	2,511,320	20.64	2,824,135	24.63	312,815
C	**Kehutanan**					
1	Hutan Lindung	397,150	3.26	228,794	2.00	-168,356
2	Hutan Suaka Alam	451,240	3.71	531,853	4.64	80,613
3	Hutan Produksi	3,857,685	31.70	3,421,713	29.84	-435,972
4	Hutan Produksi Konversi (HP)	4,770,085	39.20	4,277,964	37.30	-492,121
	Jumlah	9,476,160	77.86	8,460,324	73.77	-1,015,836
Total		12,170,067	100.00	11,468,014	100.00	-702,053

Sumber: BPS, Riau Dalam Angka Tahun 2010

Lahan yang merupakan faktor produksi utama dalam pertanian ketersediaannya kini semakin terbatas. Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk dalam batas-batas geografis tertentu telah menimbulkan tekanan yang berat terhadap sumberdaya lahan yang tersedia. Tanah-tanah subur yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, kini mulai digarap dan ditanami tanaman untuk memenuhi keperluan hidup. Akibatnya, telah terjadi perubahan penggunaan lahan tidur dan rawa serta hutan negara di Provinsi Riau selama 5 tahun terakhir (2004-2008) seluas 1,015,836 ha (lihat Tabel 9.4).

Perkembangan perkebunan kelapa sawit menyebabkan perubahan pada tekanan penduduk. Tekanan penduduk adalah indeks yang dimaksudkan untuk menghitung dampak penduduk di lahan pertanian terhadap lahan tersebut. Makin besar jumlah penduduk makin besar pula kebutuhan sumberdaya, sehingga tekanan terhadap sumberdaya juga meningkat. Dengan kualitas penduduk yang rendah, kenaikan tekanan terhadap sumberdaya akan meningkat sebanding dengan kenaikan jumlah penduduk. Salah satu permasalahan kependudukan adalah ledakan penduduk yang akan berakibat timbulnya permasalahan pemukiman, lapangan kerja, pendidikan, pangan dan gizi, kesehatan dan mutu lingkungan Untuk mengetahui tekanan penduduk di wilayah pembangunan perkebunan kelapa sawit digunakan analisis sebagai berikut (Almasdi Syahza, 2005).

$$TP = Zx\frac{f.P_0(1+r)^t}{L}$$

Keterangan: TP = Indeks tekanan penduduk; Z = luas lahan minimal perpetani untuk dapat hidup layak; f = proporsi petani dalam populasi; P_o=jumlah penduduk pada waktu t=0; r=tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun; t=Rentang waktu dalam tahun; L =total luas wilayah pertanian.

Hasil perhitungan tersebut diinterpretasikan sebagai berikut: Jika TPd”1 lahan masih dapat menampung lebih banyak penduduk petani dan jika TP> 1 tekanan penduduk melebihi kapasitas lahan

Sebagai catatan, besarnya nilai Z adalah luas lahan yang mampu memberikan hasil yang cukup sebesar 2,75 ha. Setelah tekanan penduduk pada lahan diketahui, maka dapat dipilih kegiatan yang menunjang konservasi tanah.

Dari hasil survei memperlihatkan tekanan penduduk di Daerah Riau cukup tinggi (Tabel 9.5). Pada tahun 2004 tekanan penduduk dengan masuknya subsektor perkebunan masih kecil dari 1 yakni sebesar 0,07. Artinya lahan di daerah Riau masih mampu memberikan kehidupan yang layak terhadap penduduknya. Berkembangnya subsektor perkebunan khususnya kelapa sawit, tekanan penduduk terhadap lahan meningkat selama lima tahun menjadi 0,92. Perhitungan tekanan penduduk tersebut berdasarkan asumsi, yaitu: 1) luas lahan untuk hidup layak petani di disesuaikan dengan standar pola PIR yang dikeluarkan oleh Departemen Perkebunan, yaitu 2,75 ha per petani dan untuk tanaman pangan 2,0 ha per petani; 2) lahan yang dapat menjamin hidup layak petani adalah lahan perkebunan dan lahan tanaman pangan beserta palawija.

Analisis tekanan penduduk tanpa subsektor perkebunan sudah melebihi kapasitas kemampuan lahan (>1) yakni sebesar 6,01 pada tahun 2004. Pada tahun 2008 tekanan penduduk selalu mengalami peningkatan yakni sebesar 11,04. Tingginya tekanan penduduk di Daerah Riau memberikan gambaran bahwa lahan pertanian (lahan tanaman pangan) tidak mampu lagi memberikan kehidupan yang layak baik bagi petani maupun sebagai jaminan sumber pangan bagi penduduk secara keseluruhan. Tingginya tekanan penduduk di Daerah Riau dipicu oleh beberapa alasan, antara lain: 1) Tingkat pertumbhan penduduk yang tinggi karena tingginya tingkat migrasi dari daerah lain ke Daerah Riau; 2) permintaan lahan terhadap lahan perkebunan sangat tinggi, karena subsektor perkebunan seperti karet, kelapa sawit sangat memberikan peluang ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan tanaman pangan.

Tabel 9.5 Perkembangan Tekanan Penduduk di Daerah Riau Tahun 2004-2008

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Petani		Luas lahan Pertanian			Indek T.Penduduk	
		Jiwa	%	Kebun	Pangan	Jumlah	Ter-masuk Perke-bunan	Tanpa Perke-bunan
2004	4.491.393	549125	12.23	2532092	182857	2714949	0.07	6.01
2005	4.614.930	623403	13.51	2602030	164672	2766702	0.08	7.57
2006	4.764.205	823654	17.29	2701403	167346	2868749	0.14	9.84
2007	5.070.952	931078	18.36	2791153	179282	2970435	0.16	10.39
2008	5.189.152	1013540	19.53	2848060	183555	3031615	0.92	11.04

Catatan: Luas lahan untuk hidup layak (perkebunan 2,75 ha, tanaman pangan 2,0 ha)

Tingginya tekanan penduduk terhadap lahan pertanian di Daerah Riau (>1), ini berarti lahan pertanian di Riau telah melampaui kemampuannya untuk menjamin kehidupan yang layak bagi keluarga tani atau tekanan penduduk telah melebihi kapasitas lahan. Tingginya tekanan penduduk terhadap lahan disebabkan karena berkurangnya lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya disebabkan oleh besarnya lahan diperuntukkan untuk tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet yang dikelola oleh perusahaan besar swasta.

F. Indek Daya Dukung Lahan

Guna mengetahui kemampuan lahan dalam menyediakan kehidupan yang layak di Daerah Riau dilakukan dengan analisis daya dukung lahan (DDL). Metode yang digunakan adalah metode survai terpadu. Data yang diperlukan adalah data sosial ekonomi antara lain: jumlah penduduk (jiwa), termasuk tingkat umur, luas lahan garapan, jenis tanaman pangan yang diusahakan, produksi dan produktivitas tanaman, persentase tingkat konsumsi minimum dari semua jenis tanaman pangan yang diusahakan dalam menu makanan penduduk per tahun, serta konsumsi per kapita per hari (kkal).

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan rumus daya dukung lahan murni sebagai berikut (Soemarwoto, 2001):

$$K = \frac{\sum_{i=1}^{n} A_{si} . Y_{si}}{\sum_{i=1}^{n} C_{si}} x \frac{1}{R}$$

Keterangan: K=daya dukung lahan (orang/ha); ASi=luas lahan yang ditanami dengan jenis tanaman Si (ha); Ysi=produksi bersih tanaman pangan Si (kkal/tahun); Csi=tingkat konsumsi untuk masing- masing jenis tanaman pangan dalam menu penduduk (%kkal/tahun); dan R=kebutuhan kalori rata-rata per orang (kkal/orang/tahun).

Analisis daya dukung lahan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Mengumpulkan data luas panen (ha) tanaman-tanaman penghasil

kalori utama (jagung, padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan; 2) Mengumpulkan data-data produksi (ton/ha) tanaman-tanaman penghasil kalori utama (jagung, padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan; 3) Menghitung produksi bruto/produksi kotor (ton) tanaman-tanaman penghasil kalori utama (jagung, padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan); 4) Menghitung produksi netto/produksi bersih (kkal/tahun) tanaman-tanaman peng-hasil kalori utama (jagung, padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan); 5) Menghitung nilai konversi jumlah kalori i masing-masing tanaman penghasil kalori utama sesuai ketetapan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM); dan 6) Menghitung daya dukung lahan (K) setiap kabupaten.

Perkembangan penduduk yang pesat mengakibatkan tingginya tekanan penduduk terhadap lahan pertanian. Seiring dengan itu juga menyebabkan beban lahan untuk mendukung kehidupan juga tinggi. Kehidupan dan aktivitas manusia sehari-hari tidak bisa dilepaskan dengan lahan. Lahan merupakan bagian dari lingkungan sebagai sumberdaya alam yang mempunyai peranan sangat penting untuk berbagai kepentingan bagi manusia. Lahan dimanfaatkan antara lain untuk pemukiman, pertanian, peternakan, pertambangan, jalan dan tempat bangunan fasilitas sosial, ekonomi dan sebagainya.

Pesatnya perkembangan di sektor industri dan pemukiman berdampak pada berkurangnya lahan–lahan yang subur sehingga pembangunan pertanian khususnya pelestarian swasembada pangan menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama terhadap ketersedian sumberdaya lahan. Tantangan tersebut dapat kita lihat puluhan ribu hektar lahan pertanian yang produktif setiap tahun beralih fungsi menjadi sektor non pertanian. Masalah lahan lebih nyata terlihat di daerah perdesaan karena kurang lebih 80 persen penduduk tinggal di perdesaan, dengan sumber mata pencaharian utama di bidang pertanian. Dengan demikian di perdesaan sangat potensil terjadi konflik sosial atau fisik masalah lahan .

Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan luas lahan garapan cenderung makin kecil, keadaan ini menyebabkan meningkatnya tekanan penduduk terhadap lahan. Kemudian di daerah perladang berpindah kenaikan kepadatan penduduk juga meningkatkan tekanan penduduk terhadap lahan karena naiknya kebutuhan akan pangan akibatnya diperpendeknya masa

istirahat lahan (Soemarwoto, 2001). Meningkatnya kepadatan penduduk daya dukung lahan pada akhirnya akan terlampaui. Hal ini menunjukkan bahwa lahan di suatu wilayah tidak mampu lagi mendukung jumlah penduduk di atasnya pada tingkat kesejahteraan tertentu.

Guna mengetahui kemampuan lahan dalam menyediakan kehidupan yang layak di Daerah Riau dilakukan dengan analisis daya dukung lahan (DDL). DDL di Daerah Riau sangat tinggi sekali bila dibandingkan dengan daerah pertanian lainnya (Tabel 9.6).

Tabel 9.6 Produksi tanaman pangan Utama di Riau (kkal/tahun) hasil konversi dan Daya Dukung Lahan (DDL)

Komoditas	2004	2005	2006	2007	2008
Padi-padian	519,538	464,789	535,687	528,714	498,967
Jagung	64,984,383	59,372,277	53,232,117	77,900,210	71,198,225
Ubi-ubian	7,396,944	7,834,944	7,220,576	8,255,424	7,177,360
Kacang-kacangan	25,426,500	31,384,650	33,875,550	28,904,100	29,742,450
Jumlah	98,327,365	99,056,660	94,863,930	115,588,448	108,617,002
Luas Tanam (ha)	182,587	164,672	167,346	179,282	183,555
DDL	**129.30**	**130.26**	**121.20**	**147.68**	**138.77**

DDL pada tahun 2004 sebesar 129,3 yang berarti setiap satu hektar lahan tanaman pangan menjamin kehidupan 129,3 orang. Angka DDL selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 DDL sudah mencapai 138,77. Tingginya angka DDL ini disebabkan karena luas lahan pertanian (khususnya tanaman pangan) dibandingkan dengan jumlah penduduk sangat kecil. Sebagian besar lahan pertanian di Daerah Riau diusahan untuk subsektor perkebunan. Akibat ini Daerah Riau kekurangan sumber pangan. Untuk kebutuhan pangan, maka diekspor dari daerah tetangga seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

G. Indek Distribusi Pendapatan

Salah satu tolok ukur keberhasilan suatu proyek pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan. Pengertian pemerataan

pendapatan masih belum diberikan secara jelas, karena para ahli ekonomi umumnya hanya memperhatikan jumlah pendapatan itu sendiri tanpa memperhatikan dari manakah asalnya pendapatan itu. Sekelompok masyarakat dapat saja memperoleh jumlah pendapatan yang sama, namun pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan tersebut belum tentu akan sama besarnya. Karena itu para ahli ekonomi dalam merencanakan pemerataan ini umumnya lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan individual, kemudian mengelompokannya pada suatu ukuran tertentu. Kelompok-kelompok berdasarkan pendapatan tersebut kemudian diukur dan dianalisis. Dari hasil yang diperoleh kemudian disusun perencanaan untuk menentukan langkah-langkah kebijaksanaan yang dapat diambil.

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dilakukan analisis Gini Rasio, dimana Koefisien Gini membandingkan antara persentase pendapatan diantara kelompok-kelompok pendapatan masyarakat yang ada dengan formula sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i}^{n} f_i (Y_i + Y_{i-1})$$

Keterangan: GR adalah Angka Gini Ratio; f_i adalah proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i; Y_i adalah proporsi jumlah pendapatan rumah tangga komulatif dalam kelas i.

Pembangunan pedesaan di Daerah Riau melalui pembangunan pertanian, khususnya subsektor perkebunan telah menunjukkan hasil yang lebih baik dari segi pendapatan masyarakat pedesaan di Riau. Pembnguna pertanian melalui subsektor perkebunan baik yang berasal dari penanaman modal perusahaan swasta dan BUMN maupun penanaman modal yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya telah memberikan sumbangan ekonomi pedesaan. Kontribusi masyarakat yang terlibat langsung dengan sektor perkebunan juga telah memberikan penghasilan kepada masyarakat sekitarnya dengan terbukanya peluang usaha bagi masyarakat sekitarnya, seperti transportasi, perdagangan, jasa perhotelan dan sebagainya. Dengan demikian daerah di sekitar pengembangan perkebunan telah menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, tidak saja bagi pengembang subsektor perkebunan

tetapi juga sektor ekonomi lainnya seperti industri, industri kecil dan industri jasa.

Untuk memperoleh gambaran seberapa besar pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, perlu dikaji distribusi pendapatan yang diterima masyarakat pada sektor perkebunan tersebut, terutama petani kelapa sawit. Distribusi pendapatan ini diukur melalui sampel yang diperoleh di lapangan. Untuk itu disusun kelompok masyarakat berdasarkan persentase pendapatannya dalam suatu tabel persentase pendapatan menurut beberapa kategori dari semua sampel. Hasil yang diperoleh kemudian diukur berdasarkan urutan menurut kriteria penilaian sebagai tercantum pada Tabel 9.7.

Tabel 9.7 Kriteria Ratio Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Kriteria Penilaian		Tingkat Ketimpangan
Gini Ratio	**Bank Dunia***	
< 0,30	> 17 %	Rendah
0,30 – 0,40	12 – 17 %	Sedang
> 0,40	< 12 %	Tinggi

*) Untuk 40 persen penduduk berpendapatan terendah
Sumber: Suseno Triyanto W dalam Almasdi Syahza (2004)

Perhitungan distribusi pendapatan petani kelapa sawit di Riau disajikan pada Tabel 9.8. Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat pedesaan di Riau, dimana 20 persen masyarakat berpendapatan terendah tahun 1992 memperoleh 8,89 persen dari total pendapatan atau 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah menikmati pendapatan 20,64 persen. Sementara 20 persen masyarakat berpenghasilan tertinggi menikmati 43,68 persen dari total pendapatan. Namun pada saat krisis ekonomi tahun 1998 justru masyarakat berpenghasilan terendah menikmati sebesar 15,13 persen dari total pendapatan. Kelompok masyarakat 20 persen tertinggi justru turun menjadi 23,79 persen. Ketimpangan semakin kecil pada tahun 2009, dimana 20% kelompok berpenghasilan terendah menikmati sebesar 11,27% dari total pendapatan. Perbandingan pendapatan antara 40% terendah dengan masyarakat 20% tertinggi sebesar 1,23.

Tabel 9.8 Perkembangan Gini Ratio Pendapatan Masyarakat Pedesaan Di Daerah Riau Periode 1992 –2009

Kelompok Pendapatan	1992[1)]	1995[1)]	1998[1)]	2003[1)]	2006[1)]	2009[2)]
20 % terendah	8,89	8,05	15,130	11,69	10.400	11.270
20 % terendah kedua	11,76	12,66	19,460	15,83	15.900	15.474
20 % terendah ketiga	14,94	14,38	21,520	18,31	17.910	18.409
20 % terendah keempat	20,74	19,55	20,100	21,07	22.600	21.967
20 % tertinggi	43,68	45,35	23,790	33,09	33.190	32.880
Gini Ratio	0,3332	0,3327	0,0736	0,2038	0.2091	0.1989
Rasio 20% tertinggi dan 40% terendah	2,12	2,19	0,69	1,20	1.26	1.23

Sumber: 1) Almasdi Syahza (tahun 1993, 1995, 1998, 2004, 2007)
2) Hasil penelitian 2010

Penyebab meningkatnya distribusi pendapatan kelompok miskin ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain: *Pertama,* kebutuhan masyarakat miskin pada umumnya dapat disediakan oleh produk lokal. Produk ini pada umumnya berbahan baku lokal sehingga tidak berpengaruh langsung oleh penurunan nilai tukar rupiah. Sementara kelompok kaya sangat tergantung kepada barang yang diproduksi secara modern; *Kedua,* pada masa krisis umumnya masyarakat miskin sangat tergantung kepada hasil pertanian. Produk ini dapat mereka peroleh di pedesaan.

Apabila dihubungkan dengan kriteria ketimpangan dari Bank Dunia maka ketimpangan pendapatan dipedesaan termasuk rendah. Begitu juga dengan kriteria Gini Ratio, dimana distribusi pendapatan masyarakat pedesaan di daerah Riau termasuk rendah. Jika diamati pada awal krisis ekonomi pada tahun 1998 ternyata distribusi pendapatan di pedesaan malah mendekati relatif merata. Ini disebabkan karena pada masa krisis terjadi tingkat kesejahteraan yang tinggi pada petani kelapa sawit. Pada saat itu harga CPO di pasar internasional meningkat tajam, yang pada hakekatnya membawa dampak terhad ap pendapatan petani karena harga TBS meningkat. Namun kondisi ini pada tahun berikutnya menurun karena ada kebijakan pemerintah untuk mengurangi ekspor CPO.

Dari Tabel 9.8 dapat dilihat perbandingan antara pendapatan masyarakat tertinggi dengan pendapatan masyarakat terendah sebelum tahun 1998 (saat krisis ekonomi) di atas 2. Artinya pendapatan dari 20 persen kelompok masyarakat berpendapatan tinggi adalah besar dari 2 kali lipat dari pendapatan 40 persen masyarakat kelompok berpendapatan rendah. Namun setelah krisis ekonomi justru terjadinya penurunan ketimpangan dan perbandingan pendapatan. Relatif rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan di pedesaan disebabkan pengaruh perkembangan kawasan perkebunan, sehingga petani di luar program pola PIR banyak melakukan kegiatan usahatani kelapa sawit. Akibat itu masyarakat sekitar pengembangan perkebunan juga dapat menikmati efek dari pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Hasil pengamatan di lapangan, mereka yang berhasil melakukan kegiatan usahatani kelapa sawit adalah masyarakat pendatang, sedangkan masyarakat tempatan masih mengalami kesulitan untuk pengembangan. Akibat itu terjadi ketidak seimbangan pendapatan antara masyarakat pendatang dengan masyarakat tempatan di sekitar pengembangan perkebunan (lihat Tabel 5.10). Masyarakat tempatan masih terfokus dengan kegiatan tradisionil seperti pertanian, nelayan, pencari kayu, sementara masyarakat pendatang telah terlibat dengan kegiatan perkebunan, industri dan jasa yang memberikan balas jasa yang tingi dibandingkan sektor pertanian tradisional. Dari sisi lain kemungkinan disebabkan beberapa hal antara lain: *Pertama***,** mereka yang terlibat dengan kegiatan perkebunan akan memberikan nilai tambah yang tinggi, pendapatan yang diterima juga tinggi. Sedangkan masyarakat yang tidak terlibat dengan kegiatan perkebunan masih menerima pendapatan yang relatif lebih rendah; *Kedua,* masyarakat yang berada di sekitar pengembangan perkebunan (terutama pusat pertumbuhan) dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha sampingan seperti, warung, berdagang, transportasi, jasa, sehingga kegiatan sampingan ini juga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Di lain pihak masyarakat yang jauh dari pusat pertumbuhan kurang merasakan keberadaan perkebunan tersebut sehingga pendapatan mereka relatif rendah; dan *ketiga***,** masih adanya budaya

dalam masyarakat tempatan menerima apa adanya, tidak ada inisiatif untuk mengembangkan usaha lain, produktivitas masih rendah, dan masih mengandalkan hasil yang diperoleh dari alam terutama karet. Hal ini mungkin disebabkan berusahatani karet pekerjaannya lebih mudah dan tidak banyak menguras tenaga.

BAB X
KELAPA SAWIT, DAMPAKNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI PEDESAAN

A. Perkembangan Ekonomi Wilayah

Pesatnya pembangunan subsektor perkebunan di Daerah Riau berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Riau. Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Riau melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yakni mencapai 8,54%. Pada tahun 2009 sedikit mengalami penurunan dari tahun 2006 yakni mencapai 6,44%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Riau pada tahun 2009 disebabkan karena gejolak krisis ekonomi global dan harga minyak sawit dunia. Disamping itu juga disebabkan karena permintaan CPO di pasar dunia melelmah yang berdampak terhadap perekonomi dalam negeri terutama bagi petani kelapa sawit. Walau Indonesia merasakan dampak gejolak ekonomi globar, namum pada pertengahan tahun 2009 sampai tahun 2011 harga kelapa sawit memperlihat relatif stabil. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Riau selama periode 2005-2009 disajikan pada Tabel 10.1.

Kontribusi subsektor perkebunan terhadap perekonomian Riau cukup signifikan, hal tersebut disebabkan karena subsektor perkebunan secara langsung memperbaiki perekonomi masyarakat di pedesaan.

Tabel 10.1 Pertumbuhan Ekonomi Riau Tanpa Migas atas Dasar Harga Konstan

Sektor	Pertumbuhan (%)				
	2005	2006	2007	2008	2009
1. Pertanian	6,77	5,97	4,84	4,79	3,64
2. Pertambangan	27,24	28,61	24,57	18,13	13,07
3. Industri	9,08	9,11	11,41	8,98	6,22
4. Listrik dan Air	9,20	5,86	5,62	6,86	3,03
5. Bangunan	7,15	8,27	11,65	11,14	8,62
6. Perdagangan	10,15	11,29	8,94	9,72	8,72
7. Angkutan	10,46	9,62	7,28	10,45	8,11
8. Keuangan	18,18	15,67	13,33	13,65	9,99
9. Jasa-jasa	7,92	9,94	9,71	9,25	8,39
10. Riau	**8,54**	**8,66**	**8,25**	**8,06**	**6,44**

Sumber: Riau Dalam Angka Tahun 2010

Menurut Rusli Zainal (2011), kinerja ekonomi Riau menunjukkan performa membaik. Hal Ini dibuktikan dengan positifnya sejumlah indikator ekonomi yakni investasi dan berbagai pembangunan berkelanjutan yang juga terus terjadi di Riau. perekonomian Riau memperlihatkan kondisi yang relatif stabil dan kondusif. Secara komulatif, laju pertumbuhan ekonomi di Riau Non Migas mencapai 4,17 persen. Pertumbuhan ekonomi Riau dengan Migas mencapai 4,17 persen. Melalui program K2I telah dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini dibuktikan, dengan menurunnya jumlah angka kemiskinan di Riau menjadi 8,65 persen, yang pada tahun 2009 lalu mencapai 9,84 persen. Program K2I yang menjadi fokus program Pemprov Riau akan terus berlanjut, seiring dengan positifnya kinerja berbagai program Pemprov Riau. Dengan begitu diharapkan pembangunan yang merata dapat tercapai di Riau.

B. Perkembangan Penduduk, Tenaga Kerja, dan Kerapatan Tenaga Kerja

Sejalan denganpertumbuhan ekonomi Riau yang membaik diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Selama periode tahun 2000-2010 pertumbuhan penduduk Riau tercatat sebesar 3,97%. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ini bukan disebabkan karea tingkat kelahiran yang tinggi, namun lebih disebabkan karena tingginya angka migrasi penduduk dari luar Riau. Propinsi Riau saat ini memperlihatkan kondisi ekonomi yang membaik sebagai dampak dari perkembangan ekonomi pedesaan, maka tidak heran lagi Riau merupakan pusat bisnis dan peluang usaha bagi mereka yang dapat menangkap peluang tersebut. Harapan meraih kehidupan yang lebih baik menyebabkan munculnya migrasi ke Daerah Riau. Untuk lebih jelasnya perkembangan penduduk Riau per kabupaten/kota disajikan pada Tabel 10.2.

Tabel 10.2 Perkembangan Penduduk Propinsi Riau Periode 2000-2010

Kabupaten/Kota		Penduduk Riau		Pertum (%)
		2000	2010	
1	Kuantan Singingi	216.732	291.044	2,99
2	Indragiri Hulu	247.306	362.961	3,91
3	Indragiri Hilir	555.701	662.305	1,77
4	Pelalawan	152.949	303.021	7,08
5	Siak	238.786	377.232	4,68
6	Kampar	447.157	686.030	4,37
7	Rokan Hulu	265.686	475.011	5,98
8	Bengkalis	520.241	674.755	2,63
9	Rokan Hilir	352.299	552.433	4,60
10	Pekanbaru	585.440	903.902	4,44
11	Dumai	173.188	254.337	3,92
Riau		3.755.485	5.543.031	3,97

Sumber: BPS Propinsi Riau tahun 2010

Apabila diamati penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dapat dilihat pada Tabel 10.3. Dari tabel tersebut terlihat perkembangan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian selama tahun 2009-2010. Perkebunan kelapa sawit merupakan penyerapan tenaga kerja terbanyak, ini disebabkan karena tanaman kelapa sawit merupakan tanaman primadona masyarakat Riau karena kelapa sawit cukup memberikan andil terhadap pendapatan petani. Penyerapan tenaga kerja ini paling banyak di daerah pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit. Yang menarik dari dari sisi penyerapan tenaga kerja adalah terjadinya penurunan tenaga kerja di subsektor yang lain seperti tanaman pangan. Tenaga kerja lebih banyak berpindah ke aktivitas perkebunan kelapa sawit. Ini terlihat dari tingkat pertumbuhan tenaga kerja di kegiatan perkebunan kelapa sawit sebesar 15,05%, sementara di perkebunan yang lain menunjukkan penurunan. Namun secara menyeluruh penyerapan tenaga kerja sektor pertanian masih cukup tinggi yaitu mengalami kenaikan sebesar 6,00% selama periode 2009-2010.

Tabel 10.3 Penyerapan Tenaga Kerja Sub Sektor Perkebunan Tahun 2009-2010

NO	Komoditi	Tahun		% Perubahan
		2009	2010	
1	Kelapa Sawit	602.478	693.123	15,05
2	Karet	200.888	196.260	-2,30
3	Kelapa	221.462	211.039	-4,71
4	Aneka Tanaman	121.028	114.163	-5,67
	Jumlah	1.145.856	1.214.585	6,00

Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Riau Tahun 2011

Terkait dengan angkatan kerja yang berkerja di sektor pertanian maupun subsektor perkebunan dapat memberikan kontribusi ekonomi terhadap wilayah, namun dengan tingginnya angka tenaga kerja tidak produktif yaitu penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun dan lebig dari 65 tahun merupakan beban bagi tenaga kerja produktif. Dari data yang ada beban tenaga kerja terhadap tenaga kerja yang tidak produktif dihitung dengan menggunakan kerapatan tenaga kerja.

Pada Tabel 10.4. disajikan keadaan luas wilayah pertanian dan kerapatn tenaga kerja agraris maupun geografis. Kerapatan tenaga kerja agraris lebih tinggi dibandingkan kerapatan tenaga kerja geografis. Keadaan ini memberikan indikasi bahwa angka tanggungan tenaga kerja produktif di Riau terhadap tenaga kerja tidak produktif sebesar 0,68 yang berarti setiap hektar lahan pertanian memberikan tanggungan kehidupan terhadap tenaga kerja tidak produktif sebesar 0,68 jiwa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa lahan pertanian secara keseluruhan masih dapat memberikan kehidupan yang layak di Riau. Tentu saja hal tersebut disebabkan karena berkembangnya subsektor perkebunan. Kalau bukan karena subsektor perkebunan tentu saja kerapatan tenaga tkerja di Riau akan lebih tinggi.

Tabel 10.4 Keadaan Luas Wilayah, Tenaga Kerja, Kerapatan Tenaga Kerja, dan Kepadatan Penduduk di Riau Tahun 2010

Kabupaten/Kota		Jumlah Penduduk	Luas wilayah (ha)		Tenaga Kerja		Kerapatan Tenaga Kerja		Kepadatan Penduduk	
			Pertanian	Geografis	Tidak Produktif	Produktif	Geo-grafis	Agraris	Geo-grafis	Agraris
1	Kuantan Singingi	291.044	223.013,6	520.216	100.709	190.335	0,19	0,45	0,56	1,31
2	Indragiri Hulu	362.961	201.112,8	767.627	136.496	226.465	0,18	0,68	0,47	1,80
3	Indragiri Hilir	662.305	762.891,0	1.379.837	200.103	462.202	0,15	0,26	0,48	0,87
4	Pelalawan	303.021	267.646,4	1.240.414	116.125	186.896	0,09	0,43	0,24	1,13
5	Siak	377.232	295.938,8	823.357	168.919	208.313	0,21	0,57	0,46	1,27
6	Kampar	686.030	589.749,0	1.092.820	294.783	391.247	0,27	0,50	0,63	1,16
7	Rokan Hulu	475.011	302.055,7	722.978	209.129	265.882	0,29	0,69	0,66	1,57
8	Bengkalis	674.755	213.465,1	1.204.423	177.056	497.699	0,15	0,83	0,56	3,16
9	Rokan Hilir	552.433	132.011,5	896.143	196.815	355.618	0,22	1,49	0,62	4,18
13	Pekanbaru	903.902	5.301,1	63.301	350.263	553.639	5,53	66,07	14,28	170,51
15	Dumai	254.337	15.365,0	203.900	95.911	158.426	0,47	6,24	1,25	16,55
Riau		5.543.031	3.008.550	8.915.016	2.046.309	3.496.722	0,23	0,68	0,62	1,84

Sumber: Data olahan dari BPS Propinsi Riau Tahun 2010

C. Perkembangan Harga dan Kesejahteraan Masyarakat

Penerimaan petani kelapa sawit sangat tergantung kepada umur tanaman. Semangkin tinggi umur tanaman (umur optimum) menunjukkan kandungan minyak sawit dan inti sawit semangkin tinggi, yaitu 21,87 % untuk minyak sawit dan 5,10 % untuk inti sawit. Tingginya kandungan minyak sawit yang dihasilkan oleh petani akan berpengaruh kepada harga tandan buah segar (TBS) yang diterima oleh petani. Harga yang ditetapkan oleh perusahaan inti atau oleh pabrik kelapa sawit (PKS) berpedoman kepada harga CPO di pasar internasional. Untuk daerah Riau, pentetapan harga TBS berdasakan kepada: 1) Permentan, No.395/2006, tentang Pedoman Penetapan Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun; 2) 2. Pergub Riau, No: 22 Tahun 2006, tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani di Prov.Riau. Pada hakekatnya tujuan tum ini dibentuk adalah menjamin perolehan harga yang wajar dari tandan buah segar (tbs) kelapa sawit produksi petani dan mencegah persaingan tidak sehat diantara pabrik kelapa sawit (PKS).

Dari sisi petani kadang kala tidak mengetahui perkembangan harga sehingga petani kelapa sawit khususnya swadaya sering pada posisi yang lemah (dirugikan), karena itu dasar pembentukan tim penentu harga TBS ini adalah; antara lain: 1) kurang transparannya mekanisme penetapan harga TBS-KS produksi petani; 2) ketidaktahuan masyarakat petani plasma terhadap mekanisme penetapan harga TBS-KS produksi petani; 3) rendemen minyak & inti sawit yg digunakan dalam perhitungan harga TBS-KS dinilai kurang sesuai dengan realisasi pabrik/ rendemen faktual; dan 4) belum diterapkannya manajemen pascapanen secara baik oleh pelaku agribisnis kelapa sawit.

Sebenarnya sistem penetapan harga TBS-KS telah dimulai sejak tahun 2001, setelah adanya Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.531/XI/2001, yang dilaksanakan setiap sebulan sekali. Sejak tahun 2006 hingga sekarang penetapan harga TBS dilakukan setiap minggu setiap bulannya yang dihadiri oleh perwakilan petani, perusaahaan dan instansi terkait yang masuk dalam Tim Penetapan Harga TBS. Wakil dari pihak pemerintah yaitu Dinas Perkebunan Propinsi Riau. Formula penetapan harga adalah:

$$H_{TBS} = K \{(H_{ms} \times R_{ms}) + (H_{is} \times R_{is})\}$$

Keterangan:

H_{TBS} : Harga TBS yang diterima oleh Pekebun ditingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg.

K : Indeks proporsi yang menunjukan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam %.

H_{ms} : Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing peursahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg.

R_{ms} : Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dinyatakan dalam %

H_{is} : Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg.

R_{is} : Rendemen inti sawit (PK) dinyatakan dalam %

Sebagai gambaran rataan harga TBS per bulan pada tahun 2010 disajikanpada Tabel 10.5. Harga TBS yang disajikan tersebut berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Tim Pengkajian dan Penetapan Harga Pembelian TBS Produksi Petani Propinsi Riau per minggu tahun 2010. Dari tabel tersebut memperlihatkan tingkat harga yang diterima oleh petani berdasarkan umur tanaman kelapa sawit. Karena itu penentuan harga yang ditetapkan oleh tim berpengaruh langsung kepada penerimaan petani kelapa sawit khususnya petani peserta plasma.

Aktivitas perkebunan kelapa sawit di Riau dilakukan oleh kelompok yang dikelola oleh mitra kerja (petani plasma) dan petani swadaya. Dari dua bentuk kegiatan perkebunan tersebut terjadi pebedaan pendapatan. Petani swadaya, harga yang diterima pada tingkat petani jauh lebih rendah dari harga pada petani plasma. Harga yang diterima oleh petani swadaya bukan didasarkan kepada harga oleh tim PPHP-TBS, melainkan harga yang ditetapkan oleh pedagang pengumpul (toke). Toke ini merupakan kaki tangan dari PKS di luar empat perusahaan besar. PKS tersebut pada umumnya memiliki sebagian kebun atau tidak memiliki kebun sebagai pendukung bahan baku.

Tabel 10.5 Daftar Hasil Rapat Penetapan Harga Cpo, Karnel, Indeks “K” Dan Harga Tbs Tahun 2010

NO	BULAN	HARGA CPO	HARGA KARNEL	IN-DEK "K"	INDEKS TBS/UMUR TANAMAN (TAHUN)/RP							
					3	4	5	6	7	8	9	10 s/d 20
1	Januari	6.530,11	3.100,74	86,32	979,46	1.094,79	1.171,94	1.222,45	1.251,77	1.290,73	1.331,59	1.429,21
2	Februari	6.626,62	3.251,58	86,10	995,06	1.112,15	1.190,48	1.224,62	1.271,63	1.311,21	1.352,77	1.390,95
3	Maret	6.882,86	3.619,91	86,64	1.047,43	1.170,52	1.252,89	1.288,98	1.338,40	1.380,07	1.423,91	1.464,02
4	April	6.693,83	3.711,17	86,26	1.020,42	1.140,18	1.220,36	1.255,64	1.303,75	1.344,35	1.387,13	1.426,14
5	Mei	6.736,53	3.783,67	86,70	1.101,20	1.154,98	1.236,20	1.271,96	1.320,69	1.361,82	1.405,18	1.467,17
6	Juni	6.643,82	3.875,28	86,27	1.018,96	1.138,41	1.218,42	1.253,76	1.301,76	1.342,31	1.385,11	1.423,99
7	Juli	6.515,10	3.896,82	86,32	1.002,93	1.120,43	1.199,15	1.233,99	1.281,21	1.321,13	1.363,30	1.401,52
8	Agustus	7.243,52	4.194,94	87,64	1.127,64	1.259,86	1.348,41	1.387,50	1.440,63	1.485,50	1.532,85	1.575,89
9	September	7.270,78	4.405,38	87,57	1.137,27	1.270,47	1.359,71	1.399,26	1.452,80	1.498,06	1.545,89	1.589,22
10	Oktober	7.499,10	4.948,59	87,72	1.188,16	1.307,02	1.420,10	1.461,68	1.517,53	1.564,82	1.614,95	1.660,08
11	November	8.201,92	5.457,97	88,69	1.310,95	1.469,16	1.572,19	1.618,25	1.680,08	1.732,44	1.787,95	1.837,90
12	Desember	8.538,88	5.878,05	88,81	1.377,81	1.538,66	1.646,51	1.694,88	1.759,59	1.814,44	1.872,66	1.924,90
Rata-Rata/Tahun		7.115,26	4.177,01	87,09	1.108,94	1.231,39	1.319,70	1.359,41	1.409,98	1.453,91	1.500,27	1.549,25

Harga TBS di tingkat petani swadaya cenderung ditentukan sepihak, hal ini disebabkan antara petani dengan PKS tidak ada keterikatan kontrak. Ini sangat berbeda dengan petani plasma, mereka terikat kontrak dengan perusahaan inti. Rendahnya harga TBS yang diterima oleh petani swadaya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: *Pertama,* petani swadaya tidak ada ikatan dengan pihak PKS atau perusahaan inti. Hasil panen petani swadaya tidak ada kepastian oleh pembeli TBS pada saat panen tiba. Kondisi ini menyebabkan kadang-kadang TBS sampai berhari-hari di kebun. Untuk menghindari ini petani terpaksa menjualnya berdasarkan harga yang telah ditentukan oleh toke; *Kedua,* kurangnya pengetahuan petani swadaya terhadap kualitas TBS mereka. Akibat ini pihak toke juga dapat menekan harga dengan menentukan kualitas TBS (penentuan sepihak); *Ketiga,* untuk menghindari resiko (pembusukan buah, pencurian) di tempat penampungan sementara (TPS), maka petani menjual harga TBS pada saat setelah panen; *keempat*, petani ingin cepat menerima uang hasil kebun mereka. Kalau ditunggu atau ditawarkan kepada beberapa toke hal ini akan memakan waktu, sehingga menimbulkan resiko terhadap kualitas TBS; dan *kelima*, lokasi kebun petani swadaya berpencaran (tidak dalam satu kawasan), kondisi ini juga merupakan alasan bagi toke untuk menekan harga dengan alasan biaya transportasi dan kondisi jalan yang jelek.

Secara keseluruhan pendapatan petani kelapa sawit memperlihatkan jauh lebih tinggi dari pendapatan petani di komoditi perkebunan lainnya. Sebagai bahan perbandingan pada Tabel 10.6 disajikan tingkat pendapatan antara petani kelapa sawit, kelapa dan karet, Pendapatan petani kelapa sawit kecenderungan mengalami peningkatan setiap tahun, Karena itu animo masyarakat sangat tinggi untuk berusahatani di komoiti kelapa sawit. Jika diamati hasil survei tahun 2010 pendapatan petani kelapa sawit mengalami peningkatan sebesar 6,27% per tahun.

Tabel 10.6 Tingkat Pendapatan Petani Perkebunan Tahun 2009-2010

NO	Komoditi	2009 (Rp)		2010 (Rp)		% Pening-katan
		Tahun	Bulan	Tahun	Bulan	
1	Kelapa Sawit	37.793.685	3.149.474	39.526.002	3.293.834	4,58
2	Karet	12.797.010	1.066.418	12.802.263	1.066.855	0,04
3	Kelapa	9.502.305	791.859	9.665.058	805.422	1,71

Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Riau tahun 2011
Catatan: Hasil survei pendapatan petani kelapa sawit per bulan pada tahun 2009 sebesar Rp 3.404.123 dan tahun 2010 sebesar Rp 3.617.574 (naik 6,27%)

D. Daya Dukung Wilayah (DDW) Terhadap Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit

Luas perkebunan kelapa sawit sampai tahun 2011 telah mencapai 2.056.008 ha, luas tersebut berdasarkan foto udara oleh Dinas Perkebunan Propinsi Riau. Namun pada perhitungan daya dukum wilayah menggunakan data luas lahan tahun 2009. Sampai tahun 2010 produksi tandan buah segar (TBS) dari daerah Riau telah mencapai 5.932.310 ton per bulan atau 71.187.720 ton per tahun dengan produktivitas 3,08 ton per hektar. Sementara itu jumlah pabrik kelapa sawit di Riau sebanyak 144 buah dengan kapasitas produksi sebesar 6.091 ton per jam (Dinas Perkebunan Riau, 2010).

Luas kebun kelapa sawit di masa datang diprediksi akan selalu bertambah, karena tingginya animo masyarakat terhadap pengusahaan kelapa sawit. Seiring dengan pertambahan luas areal akan diikuti dengan peningkatan produksi TBS. Kondisi ini juga akan menyebabkan kapasitas pengolahan TBS semakin dibutuhkan baik dari segi jumlah maupun dari segi kapasitas olahnya. Begitu juga untuk luas yang ada, produksinya akan bertambah karena masih banyaknya tanaman yang belum menghasilkan. Sampai tahun 2010 luas tanaman yang belum menghasilkan sebanyak 453.733 ha yang tersebar di duabelas daerah kabupaten/kota. Untuk itu diperlukan analisis daya dukung wilayah (DDW) dalam penyediaan bahan baku PKS. Hasil perhitungan perkembangan DDW disajikan pada Tabel 9.7.

Dari hasil perhitungan DDW yang disajikan pada Tabel10.7, diperlihatkan dua model perhitungan, yakni perhitungan dengan hanya memperhatikan tanaman menghasilkan dan perhitungan dengan memasukkan tanaman

belum menghasilkan. Dari perhitungan pertama diperoleh angka indeks DDW sebesar 4,854. Hasil perhitungan ini membuktikan bahwa angka DDW lebih besar dari 1, yang berarti daya dukung wilayah Riau terhadap penyediaan bahan baku PKS sangat besar. Setiap satu satuan kemampuan olah PKS didukung oleh bahan baku TBS sebanyak 4,854 satuan. Untuk masa yang akan datang produksi TBS mengalami peningkatan karena masih ada kebun yang belum menghasilkan. Jika diasumsikan semua kebun baik tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM) berproduksi, maka DDW meningkat menjadi 6,359. Perhitungan tersebut diasumsikan jam kerja PKS 200 jam per bulan. Jika diasumsikan jam kerja PKS per bulan 400 jam (16 jam per hari, 25 hari per bulan) maka DDW sebesar 2,427 dan 3180. Angka ini juga membuktikan bahwa bahan baku untuk PKS masih mengalami kelebihan. Untuk lebih jelasnya DDW setiap kabupaten/kota disajikan pada Tabel 10.7.

Tabel 10.7 Hasil Perhitungan Daya Dukung Wilayah (DDW) Perkebunan Kelapa Sawit di Daerah Riau Berdasarkan Luas Kebun Tahun 2009

Kabupaten/kota		Luas (ha)	Produksi (ton)	Produk-tivitas	PKS, Kapasitas		DDW
					Unit	Ton/ jam	
1	Kampar	316.282	1.134.925	3,588	34	1.380	4,112
2	Rokan Hulu	379.969	916.074	2,411	22	966	4,742
3	Pelalawan	183.400	639.609	3,488	16	610	5,243
4	Indragiri Hulu	118.538	388.084	3,274	8	285	6,808
5	Kuantan Singingi	122.731	428.147	3,488	10	450	4,757
6	Bengkalis	162.415	435.122	2,679	8	350	6,216
7	Rokan Hilir	206.173	725.917	3,521	21	965	3,761
8	Dumai	31.022	69.814	2,250	1	60	5,818
9	Siak	186.819	546.936	2,928	15	660	4,143
10	Indragiri Hilir	210.529	617.609	2,934	8	385	8,021
11	Pekanbaru	7.464	30.073	4,029	-	-	
Total		1.925.342	5.932.310	3,081	143	6.091	4,854
DDW , jika jam kerja 400 jam/bulan (16 jam/hari), 25 hari/bulan							2,427
DDW termasuk TBM, jika jam kerja 200 jam/bulan							6,359
DDW termasuk TBM, jika jam kerja 400 jam/bulan							3,180

Tingginya angka DDW ini juga memperlihatkan melimpahnya bahan baku yang tersedia di wilayah tersebut. Kelebihan bahan baku ini akan menyebabkan tidak efisiennya proses produksi. Dari sisi lain kelebihan bahan baku yang dipasok dari pihak petani akan menyebabkan penurunan harga jual oleh petani itu sendiri. Karena kondisi pasar yang dihadapi oleh pihak petani adalah monopsonistik, maka petani tidak memiliki kekuatan tawar menawar, sehingga petani hanya sebagai penerima harga dari pihak pedagang (kaki tangan PKS). Kondisi ini juga menyebabkan harga TBS ditingkat petani sangat berfluktuasi, terutama bagi petani swadaya murni.

Hasil perhitungan berdasarkan data yang ada, maka Daerah Riau masih kekurangan PKS untuk masa datang. Prediksi ini didasarkan karena luas kebun kelapa sawit ada kecenderungan meningkat dan masih luasnya tanaman yang beklum menghasilkan. Untuk itu ke depan pembangunan pabrik pengolah kelapa sawit masih dibutuhkan. Sebagai bahan pertimbangan hasil prediksi PKS untuk masa datang di Riau disajikan pada Tabel 9.8.

Pertambahan PKS untuk wilayah pedesaan diperlukan sebanyak 63 unit dengan kapasitas olah 60 ton TBS/jam (Tabel 10.8). Namun pembangunan perlu direncanakan dengan baik sesuai dengan penyebaran kebun petani, terutama petani swadaya. Pada aktivitas kelapa sawit jarak panen dengan pengolahan di PKS perlu menjadi perhatian. Untuk menjamin kualitas dan rendemen minyak sawit, maka dalam waktu 8 jam TBS sudah diolah di PKS. Karena itu kondisi jalan dan jarak antara kebun dengan PKS menjadi pertimbangan untuk menjamin kualitas. Kelemahan perkebunan petani swadaya adalah kebun mereka tersebur secara tidak merata, sedangkan petani plasma kebun kelapa sawit berada dalam satu kawasan. Sehingga dalam perencanaan pembangunan PKS sangat mudah menentukan lokasi PKS.

Tabel 10.8 Prediksi Kebutuhan Pabrik Pengolah Kelapa Sait di Riau

Indikator Perkiraan	Perkiraan
Luas lahan yang ada (ha) tahun 2010	1.925.342
Produksi (ton TBS/bulan) tahun 2010	5.932.310
Kapasitas PKS terpasang (ton TBS/jam) tahun 2010	6.111
Kemampuan olah (ton TBS/bulan) tahun 2010	3.666.600
Jumlah PKS yang sudah terpasang (unit)	144
Kelebihan bahan baku (ton TBS/bulan)	2.265.710
Kekurangan PKS (60 ton TBS/jam) dalam unit	63

Catatan: kemampuan olah PKS jam kerja 600 jam/bulan, 25 hari/bulan

Produk minyak kelapa sawit mempunyai sifat keterkaitan industri ke depan maupun ke belakang yang cukup tinggi. Industri hilir minyak kelapa sawit yang sangat strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak adalah industri minyak goreng, sehingga pemerintah menaruh perhatian yang tinggi terhadap struktur pasar domestik minyak goreng. Tetapi serangkaian kebijakan pemerintah tersebut masih terlalu memfokuskan pada CPO dan melupakan seperangkat permasalahan pada struktur industri minyak goreng (Bustanul Arifin, 2001).

Prospek pembangunan agroindustri kelapa sawit di daerah Riau sangat cerah. Hal ini juga diungkapkan oleh Wiwik Suhartiningsih (2003), dengan potensi yang ada Indonesia mampu mengalahkan Malaysia dalam memproduksi minyak kelapa sawit. Selama ini Malaysia merupakan eksportir terbesar di dunia yang pangsa pasarnya mencapai 48,26 %. Untuk mewujudkan hal tersebut ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. *Pertama*, memperluas areal perkebunan; *Kedua*, membangun infrastruktur yang memadai dan harus terkait dengan unit pengolahannya; *Ketiga*, mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan yang selama ini kurang terfokus; *Keempat*, menemukan teknologi baru untuk diversifikasi produk; dan *kelima*, harus ada deregulasi dalam industri kelapa sawit. Selama ini proses perizinan investasi industri kelapa sawit di Indonesia harus melewati 17 lembaga di pusat dan 25 lembaga di daerah. Sementara di Malaysia, investor cuma bertemu dengan *Malaysian Palm Oil Board* (MPOB).

BAB XI
MODEL PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI KARET ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERDESAAN

A. Potensi Pengembangan Karet Alam

Komoditas karet merupakan salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia. Demikian juga halnya di Provinsi Riau, pengusahaan komoditas karet merupakan salah satu matapencaharian pokok andalan masyarakat. Secara umum, komoditas ini berkontribusi penting sebagai sumber devisa negara, bahan baku industri, dan pendapatan masyarakat.

Sampai saat ini, komoditas karet masih merupakan salah satu komoditas yang potensial untuk terus dikembangkan. Namun demikian dalam perkembangannya dihadapkan pada tiga permasalahan utama, yaitu: *Pertama*, produktivitas karet yang rendah dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan tanaman karet unggul yang dikembangkan melalui berbagai proyek pemerintah di Provinsi Riau sudah memasuki usia tua atau tidak produktif lagi. Disisi lain peremajaan yang dilakukan petani secara mandiri pada umumnya menggunakan bibit tidak unggul. *Kedua*, harga karet yang relatif rendah dan berfluktuasi. Harga karet yang berfluktuasi dan cenderung rendah menyebabkan motivasi petani untuk secara konsisten menekuni usahatani karet cenderung melemah. Struktur pasar karet yang cenderung oligopsoni, menyebabkan petani karet senantiasa berada pada *bargaining position* yang lemah. *Ketiga*, alih fungsi lahan karet ke kelapa sawit terjadi cukup massif baik pada lahan karet milik petani maupun perusahaan besar. Ketiga kondisi tersebut menyebabkan produksi karet di Provinsi Riau terus menurun.

Jika diamati perkembangan luas lahan komoditas karet selama periode 2005-2013 terjadi pertumbuhan yang cukup pesat. Yakni di Propinsi Riau perkembangan luas lahan kebun karet terlihat dari pertumbuhan sebesar 20,62% pertahun. Perkembangan ini terjadi di beberapa daerah kabupaten terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dibeberapa daerah antara lain

Kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Bengkalis, Rokan Hilir dan Siak justru mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan terjadinya alih fungsi lahan dari kebun karet ke kebun kelapa sawit. Walaupun terjadi perluasan perkebunan karet di Riau, namun dari sisi produksi mengalmi penurunan, hal tersebut disebabkan masih banyaknya tanaman yang belum menghasilkan. Perkembangan perkebunan karet dan produski disajikan pada Tabel 11.1.

Dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi perkebunan karet di Provinsi Riau sebagai sumber devisa dan peningkatan kesejahteraan rakyat maka berbagai upaya dari aspek sistem produksi perlu dilakukan. Di Provinsi Riau, ada dua pola pengembangan sistem produksi karet alam, yaitu: pola peremajaan, dan pola perluasan tanaman. Peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman karet yang sudah tidak produktif (tua/rusak) dengan tanaman karet baru secara keseluruhan dan menerapkan inovasi teknologi. Sementara itu, pola perluasan yang dimaksudkan adalah upaya pengembangan areal tanaman perkebunan karet pada wilayah bukaan baru atau pengukuhan areal di sekitar perkebunan yang sudah ada dengan menggunakan inovasi teknologi.

Berdasarkan pengamatan lapangan, perkebunan karet di Riau masih di kelola secara tradisional. Pengelolaannya dilakukan secara sederhana. Setelah bibit karet ditanam kemudian dibiarkan begitu saja tanpa perawatan yang memadai, sehingga tingkat produktivitasnya rendah, yaitu hanya sekitar 738 kg/ha/tahun. Kurangnya perawatan menyebabkan kualitas hasil bahan olah karet (Bokar) juga tergolong rendah. Budaya bokar kotor masih mendominasi perilaku petani karet dalam memproduksi bokar.

Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya mutu bokar petani, antara lain: 1) jumlah produksi yang rendah karena lahan sempit; 2) bibit karet tidak unggul; 3) pemeliharaan kebun yang asal-asalan; dan 4) teknik penyadapan yang tidak tepat. Faktor lain yang ikut mempengaruhi buruknya mutu bokar adalah panjangnya rantai pemasaran dari petani karet hingga pabrik pengolahan. Konsekuensinya petani karet cenderung memperberat timbang bokarnya dengan cara memasukkan bahan pengotor kedalam bokarnya seperti kayu, dedaunan, tanah dan bahan pemberat lainnya dengan

harapan petani memperoleh hasil penimbangan yang lebih, sekalipun harganya rendah. Di sisi lain tingkat pengetahuan petani karet yang rendah tentang teknik penyadapan yang benar, penggunaan bahan penggumpal atau pembeku yang sesuai serta penanganan pasca panen bokar ikut mempengaruhi rendahnyanya mutu bokar yang dihasilkan petani karet.

Rendahnya posisi tawar (*bargaining position*) petani karet dengan pedagang ikut membantu rendahnya harga karet yang diterima oleh petani. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh lemahnya kelembagaan petani karet. Bukti empiris dari lemahnya kelembagaan petani tersebut dapat dilihat masih sedikitnya petani karet yang tergabung dalam kelompok tani atau kelompok usaha bersama (KUB). Jumlah petani karet pada tahun 2011 sebanyak 244.317 KK mengalami peningkatan sebesar 0,06% pada tahun 2013 menjadi 245.460 KK. Kondisi tersebut lebih disebabkan sebagian masyarakat tertarik mengembangkan komoditas kelapa sawit. Bahkan di daerah yang tingkat kemiringan lahan di atas 15% masyarakat tetap mengusahan tanaman kelapa sawit.

Tabel 11.1. Perkembangan Luas Areal dan Produksi Karet Alam di Propinsi Riau

	Kabupaten	2005		2013		Pertumbuhan	
		Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi
1	Kampar	83.868	39.111	92.537	60.714	1,24	5,65
2	Rokan Hulu	55.798	40.675	56.039	54.394	0,05	3,70
3	Pelalawan	23.048	18.100	25.856	34.137	1,45	8,25
4	Indragiri Hulu	71.989	38.571	58.627	40.468	-2,53	0,60
5	Kuantan Singingi	158.774	137.809	146.474	71.149	-1,00	-7,93
6	Bengkalis	51.304	52.678	35.000	16.934	-4,67	-13,23
7	Rokan Hilir	36.678	11.135	26.390	24.714	-4,03	10,48
8	Dumai	1.463	845	2.355	1.524	6,13	7,65
9	Siak	16.191	9.276	16.129	7.039	-0,05	-3,39
10	Indragiri Hilir	2.752	1.069	5.369	3.552	8,71	16,19
11	Pekanbaru	-	-	2.926	588	0,00	0,00
12	Kepulauan Meranti	-	-	19.110	9.438	0,00	0,00
	Rakyat	112.782	349.269	486.812	324.651	20,06	-0,91
	PBN	-	24.975	10.901	16.949	0,00	0,00
	PBS	-	22.047	7.551	12.657	0,00	0,00
	Jumlah	112.782	396.291	505.264	354.257	20,62	-1,39

Perkebunan karet masih dikelola secara tradisional dengan tingkat keahlian yang masih bersifat turun temurun. Belum memanfaatkan teknologi dan bibit unggul, akibatnya produktivitas lahan jadi rendah. Berdasarkan pengamatan di lapangan terkait dengan kelembagaan petani karet di pedesaan, belum ada satu kelompokpun yang sudah teregistrasi sebagai Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Kementerian Pertanian No. 38 Tahun 2008. Pembentukan UPPB oleh petani karet memberikan peluang kepada petani karet untuk memasarkan bokar secara langsung ke pabrik pengolahan karet (industri crumb rubber) tanpa melalui pedagang pengunmpul, sehingga petani dapat menikmati harga karet minimal 75% dari harga penjualan karet di atas pelabuhan ekspor atau *Free on Board* (FOB).

Sebagai konsekuensi dari belum terbentuknya kelompok tani atau UPPB, maka petani karet terpaksa berjuang secara sendiri-sendiri dalam memasarkan bokarnya, sehingga mau tak mau harus berhubungan dengan pedagang pengumpul yang lazim dikenal dengan sebutan tauke. Hubungan jual beli bokar antara petani karet dengan pedagang pengumpul, tidak hanya sebatas hubungan ekonomi semata, melainkan membentuk hubungan sosial budaya yang menjelma menjadi hubungan patronase (*patron klien*) antara pedagang pengumpul sebagai patron dan petani karet sebagai klien. Kelembagaan patronase tersebut pada dasarnya merupakan hubungan eksploitatif antara pedagang dengan petani karet, tetapi petani karet tidak punya pilihan lain akibatnya taraf hidup petani karet cenderung menurun apalagi dengan harga karet alam yang makin merosot.

Permentan No. 38 tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (bokar) yang telah diberlakukan sejak tujuh tahun lalu belum diberlakukan sepenuhnya. Seharusnya menjadi pedoman dalam membangun kelembagaan petani karet. Belum berlakunya Perment an tersebut menyebabkan petani karet tidak mempunyai kekuatan tawar menawar di level pedesaan. Usahatani karet belum mampu melahirkan kelembagaan petani karet yang dapat mensejahterakan petani karet. Kenyataan ini membuktikan bahwa kelembagaan pedagang karet baik berbentuk pelaku usaha maupun pedagang informal belum tertata dengan

baik. Hal tersebut tentunya menyulitkan dalam melakukan pembinaan terhadap pedagang karet tersebut.

Tabel 11.2. Jumlah Industri Crumb Rubber Dirinci Menurut Kapasitas Pabrik Di Riau

No	Nama Pabrik	Kapasitas Produksi (Ton/Th)	Jenis Produk
1.	PT. Andalas Agro Lestari	40,000	SIR 10, SIR 20
2.	PT. P&P Bangkinang (P)	24,000	SIR 10, SIR 20
3.	PT. P&P Bangkinang (S)	24,000	
4.	PT. Hervenia Kampar Lestari	60,000	SIR 10, SIR 20
5.	PT. Perkebunan Nusantara V	25,000	RSS 1, SIR 3L, SIR 10, SIR 20
6.	PT. Riau Crumb Rubber Factory (P)	24,000	SIR 10, SIR 20
7.	PT. Riau Crumb Rubber Factory (S)	30,000	
8.	PT. Tirta Sari Surya	45,000	SIR 10, SIR 20
9.	PT. Mardec Nusa Riau	10,000	Stop operasi
	Jumlah	**282,000**	

Sumber: List of Member Gapkindo, 2013

Perkembangan usahatani karet alam di Riau tidak sepesat perkembangan komoditi kelapa sawit. Luas lahan 505.264 ha menghasilkan 354.257 ton per tahun dengan jumlah petani sebanyak 245.460 KK. Produksi karet tersebut didukung oleh 9 buah pabrik pengolah yang tersebar di beberapa kabupaten dengan kapasitas olah 282.000 to per tahun. Perusahaan yang melakukan pengolahan karet alam dan kapasitas olah disajikan pada Tabel 11.2. Dari tabel tersebut, jika dibandingkan dengan kemampuan produksi dari sisi petani terdapat kesenjangan, yakni produksi petani mencapai 354.257 ton per tahun, sedangkan kapasitas olah pabrik yang ada hanya 282.000 to per tahun.

Terjadinya kelebihan produksi dari sisi petani dibandingkan dengan kemampuan olah pabrik (industri) karet terpasang di Daerah Riau merupakan salah satu faktor penyebab berfluktuasinya harga karet di tingkat peatni. Pada tingkat petani terjadi kelebihan penawaran bokar yang dapat menyebabkan turannya harga dari sisi permintaan. Untuk itu diperlukan analisis daya dukung wilayah (DDW) dalam penyediaan bahan baku industri karet. Hasil perhitungan perkembangan DDW disajikan pada Tabel 11.3.

Tabel 11.3. Indikator dan Proyeksi Kekurangan Industri Karet Alam di Riau

Indikator	Kuantitas
Luas Areal (ha), tahun 2014	505.264,00
Produksi (ton), tahun 2014	354.256,63
Industri pengolah sudah ada (unit)	14
Kapasitas terpasang (ton/tahun)	282.000
Kemampuan mesin (ton/tahun)	232.000
Kelebihan bahan baku (ton/tahun)	122.256,63
Daya dukung wilayah (DDW)	1,53
Kekurangan Industri (20.000 ton/tahun)	6

Sumber: Almasdi Syahza, 2015

Hasil perhitungan DDW diketahui indeknya 1,53. Artinya kemampuan wilayah menyediakan bahan baku industri lebih besar dari 1. Bahan baku yang tersedia melebihi kapasitas olah industri. Dari sisi bahan baku besarnya DDW tidak ada masalah, karena komoditi karet bukan bahan yang cepat rusak, berbeda dengan kelapa sawit harus diolah sebelum 8 jam setelah panen. Namun untuk komoditi karet besarnya DDW memberikan informasi kelebihan penawaran dari sisi petani. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap penekakan harga dari sisi permintaan (industri). Guna meningkatkan harga dari sisi petani, maka perlu ditambah industri pengolah, sehingga kekuatan tawar petani di pedesaan bisa meningkat.

Rendahnya harga karet di tingkat petani menyebabkan rendahnya pendapatan petani itu sendiri. Tentu saja akan berdampak terhadap jumlah uang beredar di pedesaan dan melemahkan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap aktivitas ekonomi di pedesaan. Hasil analisis *multiplier effect* ekonomi di daerah pengembangan karet pada tahun 2014 menunjukkan sebesar 0,65. Setiap investasi Rp1 di pedesaan akan menimbulkan jumlah uang beredar pada periode berikut hanya Rp 0,65. Pada hal pada tahun 2010 indek *multiplier effect* ekonomi di daerah sentra produksi karet 1,83. Menurunnya indek *multiplier effect* ekonomi memberikan gambaran bahwa usahatani karet menunjukkan perlambatan dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut lebih disebabkan masyarakat pedesaan

mulai bergeser usahataninya kekomoditi lain yakni kelapa sawit. Pada tahun yang indek *multiplier effect* ekonomi di daerah pengembangan kelapa sawit mencapai 3,43 yang berarti setiap investasi Rp1 akan menyebabkan jumlah uang beredar pada periode berikutnya sebesar Rp 3.43. Di daerah pengembangan kelapa sawit petaninya lebih sejahtera karena meningkatnya jumlah uang beredar di pedesaan. Sementara di daerah pengembangan karet jumlah uang beredar relatih sedikit.

Hasil analisis DDW dan potensi pengembangan industri karet alam, maka indek *multiplier effect* ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan industri karet. Pembangunan tersebut akan berdampak terhadap peningkatan daya saing petani karet. Dari sisi lain diperlukan penyuluhan kepada masyarakat pedesaan, bahwa tanaman karet perlu dipertahankan terutama untuk daerah yang kemiringan lahannya di atas 15%. Jika terjadi alih fungsi lahan dari kebun karet ke kelapa sawit terutama di daerah Riau bagian barat (tingkat kemiringan diatas 15%) akan berdampak terhadap bahaya erosi di bagian hulu.

B. Model Pengembangan Kelembagaan Karet Alam Di Perdesaan

Mencermati kondisi perkembangan industri karet alam di Provinsi Riau dari hulu sampai hilir, maka studi ini merekomendasikan untuk melakukan pengembangan kelembagaan ekonomi karet alam untuk kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui pembentukan perusahaan patungan. Melalui pengembangan perusahaan patungan diyakini dapat meningkatkan kinerja industri karet alam, khususnya meningkatkan kesejahteraan petani. Pada bagian ini akan dijelaskan *main idea* dari dasar pembentukan perusahaan patungan dan beberapa model pengembangan industri karet alam yang potensial untuk dikembangkan.

1. Dasar Pembentukan Perusahaan Patungan

Terdapat tiga landasan yang mendorong akan dibentuknya perusahaan patungan (*joint venture*) perkebunan karet alam di Provinsi Riau. *Pertama*, mengacu pada visi dan misi Provinsi Riau yang menyiratkan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan yang diiringi dengan pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, yang pada

akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. *Kedua*, dari aspek teknis maupun dari aspek finansial pengelolaan kebun dan PKA alam layak dilakukan di Provinsi Riau. Hal ini didasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan. Di samping itu, pengelolaan usaha perkebunan dan PKA alam telah dikenal masyarakat Provinsi Riau sebagai usaha yang memiliki nilai ekonomis. *Ketiga*, adanya komitmen Pemerintah Provinsi (Pemerintah Provinsi) Riau untuk menumbuhkembangkan usaha perkebunan karet alam sebagai salah satu komoditas unggulan di Provinsi Riau.

Sebagai salah satu komoditas potensial, karet alam dan produk turunannya diyakini dapat memacu pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, sekaligus mampu meningkatkan pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja. Pengembangan usaha perkebunan karet alam melalui pembentukan perusahaan patungan memberikan dua efek, yaitu *Pertama*, efek langsung *(direct effect*), yaitu perusahaan patungan perkebunan karet alam memberikan manfaat langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam usaha tersebut. Para petani pemilik lahan misalnya akan memperoleh pendapatan yang lebih baik dengan berpartisipasi aktif sebagai petani plasma dan atau pemilik saham pada perusahaan patungan. Pemerintah Provinsi Riau dan perusahaan-perusahaan yang turut serta sebagai investor/kreditur akan memperoleh dividen dari perusahaan patungan yang didirikan. Manfaat langsung lainnya yang sangat penting adalah perusahaan patungan akan membutuhkan banyak tenaga kerja, yang berarti mampu mengurangi angka pengangguran.

Kedua, efek tidak langsung *(indirect effect*), yaitu perusahaan patungan perkebunan karet alam memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam perusahaan patungan. Beroperasinya perusahaan patungan akan memberikan efek keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkages*). Berbagai usaha penyediaan sarana dan prasarana perkebunan karet alam akan berkembang, seperti usaha penyediaan bahan serta alat dan mesin pertanian. Begitu juga usaha-usaha yang berada di sektor hilir akan berkembang seperti jasa transportasi darat dan air bagi pemasaran produk-produk karet alam yang dihasilkan oleh perusahaan patungan. Dalam perkembangan selanjutnya diharapkan di

Provinsi Riau akan didirikan perusahaan yang menghasilkan produk hilir karet alam. Efek tidak langsung yang juga sangat berarti dari beroperasinya perusahaan patungan perkebunan karet alam tersebut adalah akan menumbuhkembangkan usaha-usaha sektor informal seperti bengkel mesin, warung-warung, ojek dan usaha-usaha informal lainnya. Dengan kata lain, dengan beroperasinya perusahaan patungan perkebunan karet alam akan memberikan *multiplier effect*s (efek pengganda) yang besar bagi perekonomian Provinsi Riau khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

Untuk mencapai hasil yang optimal, pembentukan usaha perusahaan patungan perkebunan karet alam yang profesional perlu dirancang dengan baik dan tepat. Keterlibatan berbagai pihak dalam perusahaan patungan perkebunan karet alam di Provinsi Riau berkaitan dengan peranan, hak dan kewajibannya perlu diatur dengan seksama. Oleh karena itu perlu dibangun suatu model perusahaan patungan yang dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Hal ini tidak hanya terkait dengan aspek keadilan dari manfaat yang diperoleh berbagi pihak yang terlibat langsung dalam perusahaan tersebut, namun manfaat yang diperoleh bagi masyarakat Provinsi Riau secara keseluruhan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

2. Alternatif Model Perusahaan Patungan

Seperti kelembagaan perkebunan pada umumnya, model pembentukan perusahaan patungan dikembangkan dan diberdayakan sesuai kondisi sosial, ekonomi dan budaya setempat. Model perusahaan patungan yang akan dibentuk tersebut diupayakan untuk tumbuh dan berkembang menjadi kelembagaan yang mandiri dan mampu menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan pihak yang terlibat. Pada akhirnya, perusahaan patungan tersebut dapat bersaing, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Pada dasarnya model-model pengembangan usaha perkebunan sangat beragam dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Berdasarkan pelaku-pelaku utama yang terlibat dalam pengembangan kebun karet alam dan produk turunannya di Provinsi Riau, yakni petani plasma, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi Riau, pada kajian ini diusulkan tiga alternatif model

pembentukan perusahaan patungan (*joint venture*). Ketiga model tersebut dijelaskan di bawah ini.

a. Model Perusahaan Patungan I

Model Perusahaan Patungan I merupakan pengembangan dan modifikasi dari restrukturisasi usaha pembentukan perusahaan patungan dalam pengelolaan kebun dan fasilitas pengolahan pabrik karet alam (PKA). Pihak-pihak yang terlibat pada model tersebut terdiri atas petani plasma dan investor (Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti) (Gambar 11.1). Dengan kerjasama melalui perusahaan patungan dalam pengelolaan kebun dan PKA secara terpadu diharapkan dapat terjalin koordinasi dalam pengelolaan kebun yang sinergis sehingga menghasilkan kuantitas, kontinuitas, dan kualitas karet alam sesuai yang diharapkan. Disamping itu, pasokan bahan olahan karet (bokar) bagi PKA dari aspek kuantitas dan kualitasnya juga dapat terjaga dengan baik.

Proses pendirian perusahaan patungan diawali dengan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara investor (Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti) dengan petani plasma/koperasi. Dilanjutkan dengan langkah nyata, yakni membuat adendum akte pendirian yang diikuti dengan penyampaian modal disetor sesuai dengan kesepakatan awal.

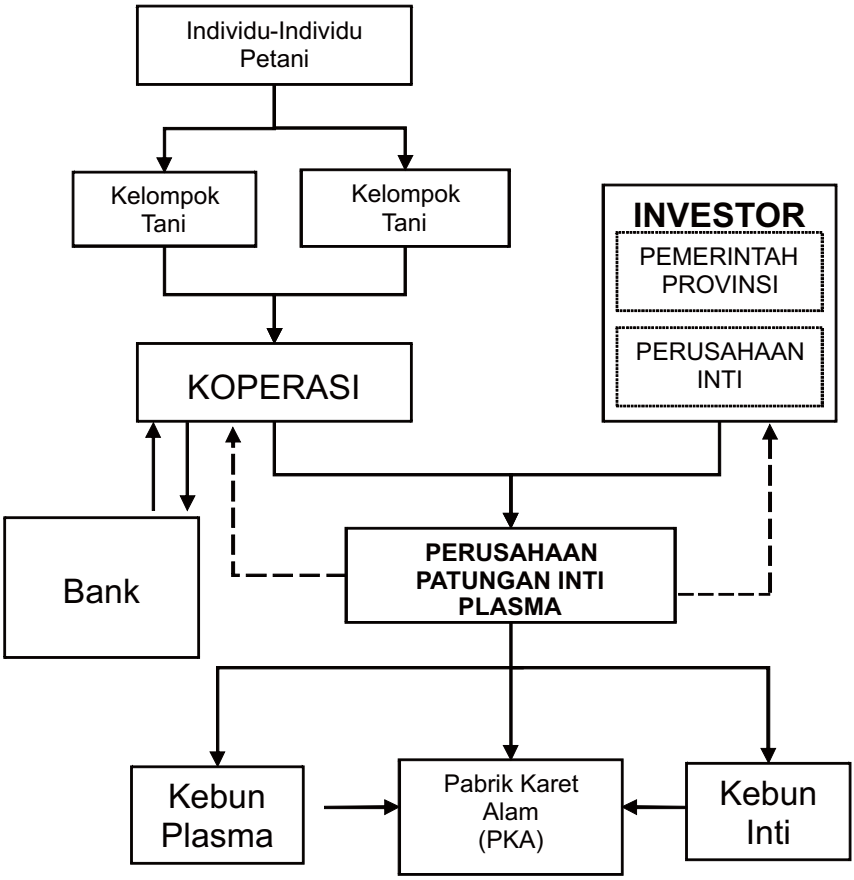

Gambar 11.1 Model Perusahaan Patungan I Kebun Karet Alam dan Produk Turunannya di Provinsi Riau

Pada Model Perusahaan Patungan I tersebut, petani-petani plasma membentuk sejumlah kelompok tani produktif, dan selanjutnya membentuk koperasi. Selanjutnya, koperasi bersama-sama dengan investor (Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti), membentuk perusahaan patungan dalam pengelolaan kebun dan PKA. Selain investor Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti, kepemilikan saham perusahaan patungan juga dimiliki oleh koperasi, yang dalam hal ini mewadahi para petani. Pemilikan saham oleh koperasi dapat dilakukan dengan pembelian saham. Pembelian saham oleh

koperasi dapat dilakukan dengan cara memimjam modal dari perbankan atau hasil dari penilaian asset kebun plasma. Secara tidak langsung, dengan masuknya koperasi sebagai pemegang saham tersebut memungkinkan masuknya perwakilan petani dalam susunan keanggotaan manajemen perusahaan patungan.

Perusahaan patungan dalam model di atas bergerak di bidang pengelolaan kebun karet, baik kebun plasma maupun kebun inti, dan pengelolaan PKA. Meskipun demikian, pengelolaan kebun secara teknis masih dilakukan oleh plasma maupun inti, yakni pengelolaan kebun plasma dilakukan oleh para petani, sedangkan pengelolaan kebun inti dilakukan oleh perusahaan inti. Hal ini menegaskan bahwa para petani plasma masih tetap memiliki lahan kebunnya. Baik kebun inti maupun kebun plasma harus menjual karet alam yang mereka hasilkan ke PKA perusahaan patungan.

Selain akan memperoleh penghasilan dari penjualan karet alam ke perusahaan patungan melalui koperasi, para petani plasma juga memperoleh penghasilan dari deviden atas keuntungan perusahaan patungan berdasarkan besarnya nilai saham yang mereka miliki. Apabila asumsi pembelian saham oleh koperasi dilakukan dengan peminjaman modal dari kredit perbankan, maka para petani plasma akan mengembalikan kredit tersebut melalui koperasi.

Peran dan Tanggung Jawab Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam Model Perusahaan Patungan I

Dalam pengembangan kebun karet alam dan produk turunannya oleh perusahaan patungan, terdapat keterkaitan antara masing-masing pihak yang terlibat dalam pembentukan perusahaan patungan. Selain itu, pengembangan perkebunan karet alam dengan model perusahaan patungan juga memerlukan koordinasi yang baik diantara lembaga yang terkait. Dalam operasionalnya, pelaksanaan kegiatan Model Perusahaan Patungan I, baik penyelenggaraan kebun karet alam maupun pengelolaan PKA, dilakukan secara terpadu di bawah manajemen perusahan patungan. Secara garis besar, peran dan tanggung jawab pihak yang terlibat, yakni petani plasma/kelompok tani/ koperasi, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi Riau, pada Model Perusahaan Patungan I dijelaskan di bawah ini.

Petani Plasma/Kelompok Tani

Para petani plasma diharuskan menjadi anggota kelompok tani. Selain harus memenuhi seluruh kewajiban yang ada di perusahaan patungan, petani/ kelompok tani juga berkewajiban melakukan beberapa hal berikut ini:

- Menggunakan lahan yang mereka miliki sesuai dengan tujuan penggunaan lahan yang telah disepakati di dalam kontrak pembentukan perusahaan patungan.
- Memperbaiki kondisi infrastruktur internal lahan budidaya (misalnya jalan dan pola pengairan di dalam lahan).
- Menjual seluruh hasil panennya ke perusahaan patungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di dalam kontrak.
- Membayar kembali pinjaman modal dalam berbagai bentuk yang telah diberikan oleh perbankan melalui koperasi.

Koperasi

Dalam perusahaan patungan, koperasi sangat diperlukan sebagai wadah organisasi ekonomi petani plasma yang mengatur hubungan kerjasama antara petani plasma dan kelompok tani dengan pihak lain (perusahaan inti, Pemerintah Provinsi, investor lainnya dan perbankan). Petani-petani plasma yang begabung dalam kelompok tani dapat membentuk kelembagaan koperasi tersebut guna meningkatkan posisi tawar petani, sehingga pada setiap kegiatan proses produksi sampai dengan pengolahan dan pemasaran dapat melakukan peran dan fungsinya dengan baik. Selain mewakili para petani plasma dalam berinteraksi dengan pihak investor, dalam pembentukan dan keanggotaaan manajemen perusahaan patungan, koperasi juga berfungsi sebagai mitra kerja perusahaan patungan. Berkaitan dengan kepentingan para petani tugas dan kewajiban koperasi dijelaskan di bawah ini.

- Bersama-sama dengan investor melakukan penyusunan rencana usaha untuk disepakati.
- Semua bentuk kerjasama antara koperasi dengan mitra kerja harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama secara tertulis.
- Mengkoordinasikan hubungan kerjasama antara petani plasma, kelompok tani dan perusahaan patungan.
- Menyalurkan dan mengelola kredit dan input pada para petani plasma

- Bersama-sama dengan perusahaan patungan menetapkan kesepakatan tentang kualitas produk dan rendemen.
- Bersama-sama dengan perbankan daerah (apabila dibutuhkan), menyelenggarakan pemotongan cicilan kredit petani plasma, dan menyampaikan pendapatan hasil bersih kepada para petani plasma sebagai anggota koperasi
- Memupuk sumber dana sebagai tabungan petani dari petani plasma untuk menambah modal koperasi
- Mengadministrasikan seluruh transaksi keuangan petani plasma dan secara periodik melaporkannya ke petani plasma.
- Bersama-sama dengan perusahaan patungan dan instansi terkait lainnya melaksanakan penyelesaian sertifikat tanah kepada petani plasma.

Perusahaan Inti

Perusahaan inti termasuk salah satu pihak yang juga sangat menentukan keberhasilan atas pengembangan perkebunan karet alam melalui pola perusahaan patungan. Adapun kewajiban perusahaan inti dalam Model Perusahaan Patungan I adalah melakukan beberapa hal berikut ini:

- Mengelola usaha kebun inti dan mengkoordinasikan proses produksi di kebun inti dengan tingkat kebutuhan perusahaan patungan dengan baik
- Memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur kebun inti
- Mengawasi kualitas dan produktivitas di lokasi budidaya kebun inti
- Berperan penuh dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Menjual hasil produksi kebun inti ke perusahaan patungan sesuai kesepakatan

Pemerintah Provinsi Riau

Peranan Pemerintah Provinsi sangat menentukan keberhasilan atas pembentukan perusahaan patungan. Adapun peran Pemerintah Provinsi Riau dalam Model Perusahaan Patungan I adalah melakukan hal-hal berikut ini:

- *Sharing* dalam kebijakan, perencanaan, penyediaan lahan dan pendanaan.
- Menyertakan modal dalam pendirian perusahaan patungan.

Perusahaan Patungan

Adapun peran Perusahaan Patungan dalam Model Perusahaan Patungan I adalah melakukan hal-hal berikut ini:

- Menyediakan dukungan teknis dan manajerial, mulai dari pemeliharaan kebun, perkiraan jumlah produksi, penentuan kualitas produksi, pemanenan hingga perhitungan harga pokok produksi dan rendemennya.
- Mengkoordinasikan proses produksi, baik di kebun inti maupun di kebun plasma, dan tingkat kebutuhan perusahaan patungan dengan baik
- Membantu petani plasma dan perusahaan inti dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi budidaya dan merealisasikan kredit usaha apabila diperlukan.
- Membuat catatan perhitungan atas jumlah produksi kebun plasma serta membuat taksasi produksi dalam kurun waktu tertentu guna menangkal penjualan karet alam di luar perusahaan patungan.
- Mengorganisikan dan mengkoordinasikan semua kegiatan pemeliharaan dan perawatan tanaman karet alam serta jalan kebun di seluruh wilayah kebun plasma dan kebun inti
- Mengawasi produktivitas dan kualitas di kebun, baik kebun inti maupun kebun plasma.
- Menerima semua hasil jual karet alam petani plasma dan hasil jual karet alam perusahaan inti
- Membayar seluruh nilai penjualan hasil kebun plasma kepada petani melaui koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Berperan penuh dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan kebun plasma dan kebun inti.
- Mengelola keuangan untuk mitra dengan baik dan transparan, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman antara pihak perusahaan patungan dengan para petani plasma, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi.

Keunggulan Model Perusahaan Patungan I

Usaha perkebunan karet alam merupakan salah satu jenis usaha yang membutuhkan modal yang cukup besar. Disamping itu, usaha tersebut juga memiliki resiko kegagalan yang cukup tinggi. Dengan adanya model kerjasama perusahaan patungan, resiko kegagalan usaha dapat ditanggung

bersama (*risk sharing).* Selain memerlukan kondisi prayarat tertentu (*pre-requisite)*, model Perusahaan Patungan I memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan Model Perusahaan Patungan I, adalah pengelolaan kebun dan fasilitas pengolahan PKA terlihat seperti dalam Gambar 6.1, yaitu (1) adanya koordinasi yang terpadu dalam pengelolaan kebun, baik kebun inti maupun kebun plasma, dan (2) adanya kepemilkan saham melalui koperasi, sehingga petani plasma dapat memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang cukup baik dalam perusahaan patungan tersebut.

b. Model Perusahaan Patungan II

Model Perusahaan Patungan II merupakan pengembangan dan modifikasi dari restrukturisasi usaha pembentukan perusahaan patungan dalam pengelolaan fasilitas pengolahan PKA. Pihak-pihak yang terlibat pada model tersebut terdiri atas petani plasma, Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti (Gambar 11.2). Dengan kerjasama membentuk perusahaan patungan dalam pembangunan dan pengelolaan PKA diharapkan dapat terjamin pemasaran karet alam dari kebun inti dan kebun plasma.

Pada Model Perusahaan Patungan II tersebut, petani-petani plasma membentuk sejumlah kelompok tani produktif dan selanjutnya membentuk koperasi. Bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti, koperasi membentuk perusahaan patungan dalam pengelolaan PKA. Proses pendirian perusahaan patungan diawali dengan dengan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Provinsi, perusahaan inti dan petani plasma/koperasi. Dilanjutkan dengan langkah nyata dengan membuat adendum akte pendirian yang diikuti dengan penyampaian modal disetor sesuai dengan kesepakatan awal. Pada mulanya, modal awal 100 persen berasal dari Pemerintah Provinsi dan Perusahaan Inti, yang kemudian sebagian modal tersebut (besarnya persentase sesuai kesepakatan) dijual/diisi/diganti oleh petani. Modal petani dibayar dengan mencicil, dan dipotong dari sebagian hasil penjualan produksinya. Secara tidak langsung, dengan masuknya koperasi sebagai pemegang saham tersebut memungkinkan masuknya perwakilan petani dalam susunan keanggotaan manajemen perusahaan patungan.

Sejak dari awal, petani plasma masih tetap memiliki lahan kebunnya. Hal tersebut dikarenakan perusahaan patungan dalam model tersebut hanya bergerak di bidang pengelolaan PKA. Dalam arti, baik petani plasma maupun perusahaan inti, mengelola kebunnya dengan produktif dan efisien. Selanjutnya, baik kebun inti maupun kebun plasma, harus menjual karet alam masing-masing ke PKA perusahaan patungan. Selain akan memperoleh penghasilan hasil penjualan karet alam ke perusahaan patungan melalui koperasi, para petani plasma juga memperoleh penghasilan dari deviden hasil keuntungan perusahaan patungan. Sebagian hasil penjualan dan penghasilan dari deviden dapat digunakan petani plasma untuk membayar modal ke perusahaan patungan.

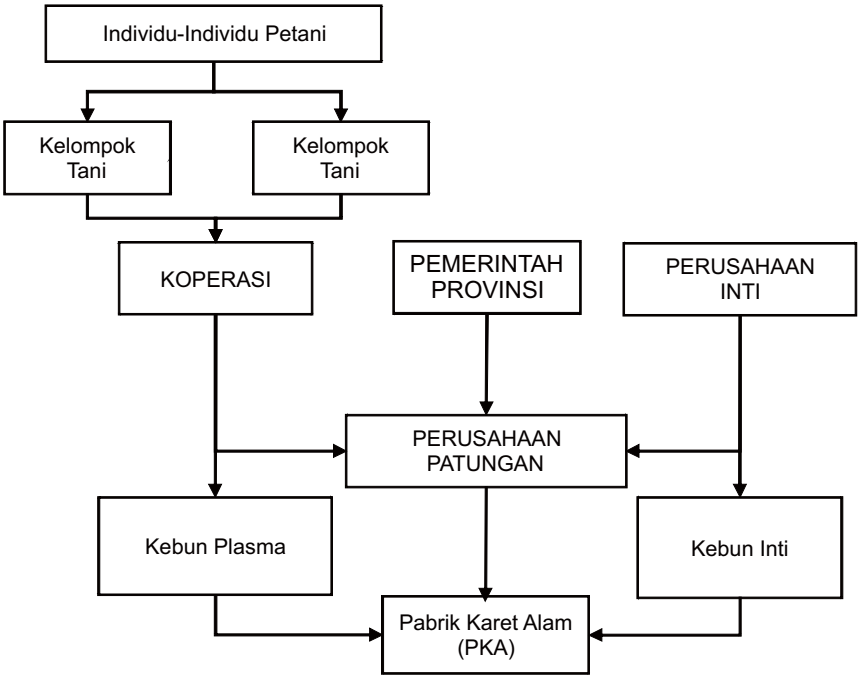

Gambar 11.2 Model Perusahaan Patungan II Kebun Karet Alam dan Produk Turunannya di Provinsi Riau

Peran dan Tanggung Jawab Pihak-pihak yang Terlibat dalam Perusahaan Patungan Model II

Keterkaitan antara masing-masing pihak yang terlibat dalam pembentukan perusahaan patungan sangat menentukan keberhasilan pada pengembangan kebun karet alam dan produk turunannya. Dalam operasionalnya, pelaksanaan kegiatan *on-farm* pada Model Perusahaan Patungan II dilakukan masing-masing oleh petani plasma (kebun plasma) dan perusahan inti (kebun inti). Secara garis besar, peran dan tanggung jawab pihak yang terlibat, yakni petani plasma/kelompok tani/koperasi, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi Riau, pada Model Perusahaan Patungan II dijelaskan di bawah ini.

Petani/Kelompok tani

Peranan petani plasma sangat menentukan keberhasilan pengembangan perkebunan karet alam melalui pola perusahaan patungan. Sebagai pelaksana subsistem usaha kebun plasma, petani plasma harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dan menjadi kelompok tani dan koperasi. Untuk kelancaran kegiatan, para petani diharapkan dapat tergabung dalam kelompok-kelompok tani. Selain harus memenuhi seluruh kewajiban yang ada di perusahaan patungan, petani/kelompok tani juga berkewajiban melakukan beberapa hal berikut ini.

- Mengelola usaha kebun plasma sesuai dengan tujuan yang telah disepakati di dalam kontrak pembentukan perusahaan patungan..
- Memperbaiki kondisi infrastruktur internal lahan budidaya (misalnya jalan dan pola pengairan di kebun plasma).
- Menjual seluruh hasil produksi karet alam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di dalam kontrak.
- Membayar kembali pinjaman modal dalam berbagai bentuk yang telah diberikan oleh perusahaan patungan/perbankan.

Koperasi

Dalam perusahaan patungan, koperasi sangat diperlukan sebagai wadah organisasi ekonomi petani plasma yang mengatur hubungan kerjasama antara petani plasma dan kelompok tani dengan pihak lain (perusahaan inti

dan Pemerintah Provinsi). Koperasi juga berfungsi sebagai mitra kerja perusahaan patungan dalam aspek yang menyangkut kepentingan para petani dengan tugas dan kaitannya dengan kebun plasma, sebagai berikut:

- Bersama-sama dengan investor (Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti) melakukan penyusunan rencana usaha untuk disepakati.
- Mengawasi dan bertanggung jawab terhadap kualitas sumberdaya petani plasma
- Semua bentuk kerjasama antara koperasi dengan mitra kerja harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama secara tertulis
- Mengkoordinasikan hubungan kerjasama dengan petani plasma, kelompok tani dan perusahaan patungan.
- Mengorganisikan dan mengkoordinasikan semua kegiatan pemeliharaan dan perawatan tanaman karet alam serta jalan kebun di seluruh wilayah kebun plasma.
- Bersama-sama dengan perusahaan patungan menetapkan kualitas dan rendemen produksi yang dihasilkan.
- Membuat catatan perhitungan atas jumlah produksi kebun plasma serta membuat taksasi produksi dalam kurun waktu tertentu, guna menangkal penjualan karet alam di luar perusahaan patungan.
- Bersama-sama dengan perbankan daerah (apabila dibutuhkan), menyelenggarakan pemotongan cicilan kredit petani plasma dan menyampaikan pendapatan hasil bersih kepada para petani plasma sebagai anggota koperasi
- Memupuk sumber dana sebagai tabungan petani dari petani plasma untuk menambah modal koperasi
- Mengadministrasikan seluruh transaksi keuangan petani plasma dengan pihak terkait dan secara periodik melaporkannya ke petani plasma.
- Bersama-sama dengan perusahaan patungan dan instansi terkait lainnya dalam menyelesaikan sertifikat tanah kepada petani plasma.

Perusahaan Inti

Selain petani plasma, peranan perusahaan inti juga sangat menentukan keberhasilan pengembangan perkebunan karet alam melalui pola perusahaan patungan. Sebagai pelaksana subsistem usaha kebun inti, perusahaan inti

harus memenuhi persyaratan yang ditentukan perusahaan patungan. Adapun peran dan tanggung jawab perusahaan inti adalah:

- Mengelola usaha kebun inti dan mengkoordinasikan proses produksi di kebun inti dengan tingkat kebutuhan perusahaan patungan dengan baik.
- Memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur kebun inti
- Mengawasi kualitas dan produktivitas di lokasi budidaya kebun inti
- Berperan penuh dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Menjual hasil produksi kebun inti ke perusahaan patungan sesuai kesepakatan.

Perusahaan Patungan

Peranan Perusahaan Patungan dalam Model Perusahaan Patungan II adalah melakukan hal-hal berikut ini:

- Menyediakan dukungan teknis dan manajerial, mulai dari pemeliharaan kebun, perkiraan jumlah produksi, penentuan kualitas produksi, pemanenan hingga perhitungan harga pokok produksi dan rendemennya.
- Mengkoordinasikan proses produksi, baik di kebun inti maupun di kebun plasma, dan tingkat kebutuhan perusahaan patungan dengan baik
- Membantu petani plasma dan perusahaan inti dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi budidaya dan merealisasikan kredit usaha apabila diperlukan
- Mengawasi kualitas dan produktivitas di lokasi kebun, baik kebun inti maupun kebun plasma.
- Menerima semua hasil jual karet alam petani plasma dan hasil jual karet alam perusahaan inti
- Membayar seluruh nilai penjualan hasil kebun plasma kepada petani melalui koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Berperan penuh dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan kebun plasma dan kebun inti.
- Mengelola keuangan untuk mitra secara transparan dan mudah dimengerti, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman antara pihak perusahaan patungan dengan para petani plasma, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi.

Pemerintah Provinsi Riau

Peran dan tanggng jawab Pemerintah Provinsi dalam pembentukan Model Perusahaan Patungan II adalah sebagai berikut:

- *Sharing* dalam kebijakan, perencanaan, penyediaan lahan dan pendanaan.
- Menyertakan modal ke perusahan patungan

Keunggulan Model Perusahaan Patungan II

Keunggulan Model Perusahaan Patungan II, dimana perusahaan patungan hanya bergerak dalam pengelolaan fasilitas pengolahan (PKA) seperti terlihat pada Gambar 6.2, diantaranya: (1) manajemen perusahaan patungan lebih sederhana karena hanya fokus pada pengelolaan PKA, (2) petani plasma dan perusahaan inti lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan kebunnya, (3) kepemilikan lahan pabrik oleh petani dapat menghindari petani menjual produksinya ke pihak lain dan petani memperoleh *deviden* dari sahamnya.

c. Model Perusahaan Patungan III

Model Perusahaan Patungan III merupakan pengembangan dan modifikasi dari usaha perkebunan dengan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Secara tidak langsung, model tersebut merupakan usaha patungan antara petani plasma/koperasi, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan fasilitas pengolahan (PKA). Model di atas bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada petani plasma/koperasi dan Pemerintah Provinsi untuk memiliki saham PKA yang telah dimiliki oleh perusahaan inti (Gambar 11.3).

Proses pendirian perusahaan patungan diawali dengan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara perusahaan inti, Pemerintah Provinsi dengan petani plasma/koperasi. Dilanjutkan dengan langkah nyata dengan membuat adendum akte pendirian yang diikuti dengan penyampaian modal disetor sesuai dengan kesepakatan awal. Pada tahap awal, perusahaan inti melepaskan pabrik sebagai asset perusahaan inti dan dijadikan sebagai modal/saham bersama pendirian perusahaan patungan yang bergerak dalam pengolahan karet alam. Dalam hal ini perusahaan

patungan berperan sebagai anak perusahaan inti. Selanjutnya, sebagian modal/saham perusahaan patungan tersebut di jual kepada Pemerintah Provinsi dan petani plasma/koperasi (persentase pembagian saham didasarkan atas kesepakatan bersama).

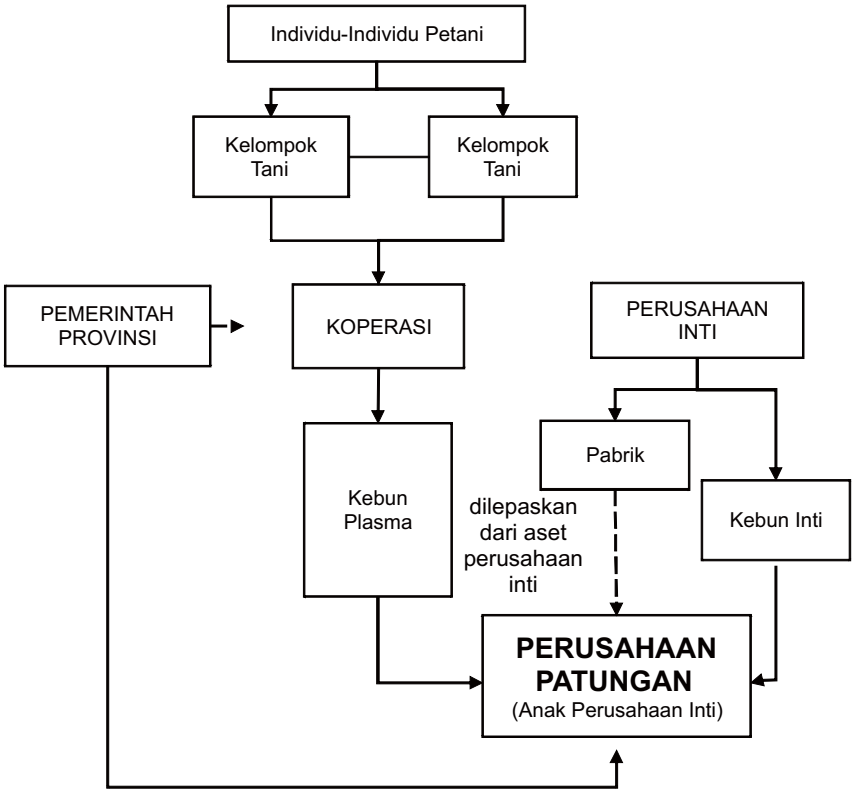

Gambar 11.3 Model Perusahaan Patungan III Kebun Karet alam dan Produk Turunannya di Provinsi Riau

Pembelian saham oleh petani dilakukan dengan cara mencicil dan dipotong dari sebagian hasil penjualan produksi kebun plasma. Dilain pihak, selain menyertakan modal dalam pendirian perusahaan patungan, Pemerintah Provinsi juga memberikan bantuan kredit kepada petani plasma/koperasi dalam pengembangan dan pengelolaan kebun plasmanya.

Pada Model Perusahaan Patungan III, petani-petani plasma membentuk kelompok-kelompok tani produktif dan selanjutnya membentuk koperasi. Para petani plasma masih tetap memiliki lahan kebunnya. Petani plasma menjual produksi hasil kebun plasma ke perusahaan patungan tersebut. Sebagian dari hasil penjualan produksinya dipotong untuk mencicil pembelian saham dan pengembalian kredit dari Pemerintah Provinsi. Petani juga akan menerima tambahan penghasilan berupa deviden atau pembagian sebagian dari hasil keuntungan/laba perusahaan patungan.

Peran dan Tanggung Jawab Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam Perusahaan Patungan Model III

Dalam kerjasama perusahaan patungan, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat sangat menentukan keberhasilan dalam pembentukan perusahaan patungan tersebut. Peran dan tanggung jawab tersebut harus jelas diantara masing-masing pihak. Seperti halnya dalam Model Perusahaan Patungan II, pelaksanaan kegiatan *on-farm* pada Model Perusahaan Patungan III juga dilakukan masing-masing oleh petani plasma (kebun plasma) dan perusahan inti (kebun inti). Secara garis besar, peran dan tanggung jawab pihak yang terlibat, yakni petani plasma/kelompok tani/ koperasi, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi Riau, pada Model Perusahaan Patungan III adalah sebagai berikut.

Petani/Kelompok tani

Peranan petani plasma sangat menentukan keberhasilan pengembangan perkebunan karet alam melalui pola perusahaan patungan. Sebagai pelaksana subsistem usaha kebun plasma, petani plasma harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dan menjadi kelompok tani dan koperasi. Untuk kelancaran kegiatan, para petani diharapkan dapat bergabung dalam kelompok-kelompok tani. Selain harus memenuhi seluruh kewajiban yang ada di perusahaan patungan, petani/kelompok tani juga berkewajiban melakukan beberapa hal berikut ini.

- Mengelola usaha kebun plasma sesuai dengan tujuan yang telah disepakati di dalam kontrak pembentukan perusahaan patungan.

- Memperbaiki kondisi infrastruktur internal lahan budidaya (misalnya jalan dan pola pengairan di kebun plasma).
- Menjual seluruh hasil produksi karet alam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di dalam kontrak.
- Membayar kembali pinjaman modal dalam berbagai bentuk yang telah diberikan oleh perusahaan patungan/perbankan.

Koperasi

Dalam perusahaan patungan, koperasi sangat diperlukan sebagai wadah organisasi ekonomi petani plasma yang mengatur hubungan kerjasama antara petani plasma dan kelompok tani dengan pihak lain (perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi). Koperasi juga berfungsi sebagai mitra kerja perusahaan patungan dalam aspek yang menyangkut kepentingan para petani dengan tugas dan kaitannya dengan kebun plasma, yaitu:

- Bersama-sama dengan investor (Pemerintah Provinsi dan perusahaan inti) melakukan penyusunan rencana usaha untuk disepakati.
- Mengawasi dan bertanggung jawab terhadap kualitas sumberdaya petani plasma
- Semua bentuk kerjasama antara koperasi dengan mitra kerja harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama secara tertulis
- Mengatur hubungan kerjasama dengan petani plasma, kelompok tani dan perusahaan patungan.
- Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan semua kegiatan pemeliharaan dan perawatan tanaman karet alam serta jalan kebun di seluruh wilayah kebun plasma.
- Mengumpulkan dan mengangkut hasil kebun para petani plasma dengan cara kerjasama kelompok tani dari kebun plasma sampai ke lokasi PKA perusahaan patungan.
- Bersama-sama dengan perusahaan patungan menetapkan kesepakatan tentang kualitas dan rendemen.
- Membuat catatan perhitungan atas jumlah produksi kebun plasma serta membuat taksasi produksi dalam kurun waktu tertentu guna menangkal penjualan karet alam di luar perusahaan patungan.

- Bersama-sama dengan perbankan daerah (apabila dibutuhkan), menyelenggarakan pemotongan cicilan kredit petani plasma dan seterusnya serta menyampaikan pendapatan hasil bersih kepada para petani plasma sebagai anggota koperasi
- Memupuk sumber dana sebagai tabungan petani dari petani plasma untuk menambah modal koperasi
- Mengadministrasikan seluruh transaksi keuangan petani plasma dengan pihak terkait, dan secara periodik melaporkannya ke petani plasma dan pihak terkait tersebut.
- Bersama-sama dengan perusahaan patungan dan instansi terkait lainnya dalam menyelesaikan sertifikat tanah kepada petani plasma.

Perusahaan Inti

Selain petani plasma, peranan perusahaan inti juga sangat menentukan keberhasilan pengembangan perkebunan karet alam melalui pola perusahaan patungan. Sebagai pelaksana subsistem usaha kebun inti, perusahaan inti harus memenuhi persyaratan yang ditentukan perusahaan patungan. Adapun peran dan tanggung jawab perusahaan inti adalah:

- Mengelola usaha kebun inti dan mengkoordinasikan proses produksi di kebun inti dengan tingkat kebutuhan perusahaan patungan dengan baik
- Memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur kebun inti
- Mengawasi kualitas dan produktivitas di lokasi budidaya kebun inti
- Berperan penuh dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Menjual hasil produksi kebun inti ke perusahaan patungan sesuai kesepakatan
- Mengkoordinasi perusahaan patungan sebagai bagian dari anak perusahaan.

Perusahaan Patungan

Peranan Perusahaan Patungan dalam Model Perusahaan Patungan III adalah melakukan hal-hal berikut ini:

- Menyediakan dukungan teknis dan manajerial, mulai dari pemeliharaan kebun, perkiraan jumlah produksi, penentuan kualitas produksi,

pemupukan, pemanenan hingga perhitungan harga pokok produksi dan rendemennya.

- Mengkoordinasikan proses produksi, baik di kebun inti maupun di kebun plasma, dan tingkat kebutuhan perusahaan patungan dengan baik
- Membantu petani plasma dan perusahaan inti dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi budidaya dan merealisir kredit kredit usahatani apabila diperlukan
- Mengawasi kualitas dan produktivitas di lokasi kebun, baik kebun inti maupun kebun plasma.
- Menerima semua hasil jual karet alam petani plasma dari koeprasi melalui kelompok tani dan hasil jual karet alam perusahaan inti
- Membayar seluruh nilai penjualan hasil kebun plasma kepada petani melaui koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Berperan penuh dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan kebun plasma dan kebun inti.
- Mengelola keuangan untuk mitra secara transparan dan mudah dimengerti, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman antara pihak perusahaan patungan dengan para petani plasma, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi.

Pemerintah Provinsi Riau

Peran dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam pembentukan Model Perusahaan Patungan III adalah sebagai berikut.

- Sharing dalam kebijakan, perencanaan, penyediaan lahan dan pendanaan.
- Memberikan bantuan kredit kepada petani plasma/koperasi dalam pengembangan dan pengelolaan kebun plasmanya
- Menyertakan modal dalam pendirian perusahaan patungan.

Keunggulan Model Perusahaan Patungan III

Adapun keunggulan Model Perusahaan Patungan III dimana perusahaan patungan hanya bergerak dalam pengelolaan fasilitas pengolahan (PKA) seperti terlihat pada Gambar 6.3 dengan perusahaan patungan sebagai anak perusahaan inti yaitu (1) pengelolaan perusahaan patungan dapat

dilaksanakan lebih baik karena pada dasarnya merupakan lanjutan dari PKA milik perusahaan inti sebelumnya yang dilepaskan sebagai asset perusahaan patungan, (2) memberi kesempatan kepada petani plasma/koperasi dan Pemerintah Provinsi untuk memiliki andil dalam kepemilikan saham PKA.

C. Aspek-Aspek Institusional dalam Pembentukan Perusahaan Patungan

Sama halnya dengan bentuk kontrak atau pembentukan usaha bersama lainnya, pembentukan perusahaan patungan juga perlu memperhatikan dan mencantumkan berbagai hal yang berpengaruh penting terhadap kelancaran mekanisme implementasi pembentukan perusahaan patungan selama proses budidaya di kebun karet alam hingga pengolahan karet alam di PKA. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan seperti dijelaskan di bawah ini.

Kerangka Kerja Legal

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kerangka kerja legal.

- Kontrak harus sesuai dengan persyaratan yang ditetaPKAan oleh pemerintah.
- Di dalam kontrak harus dijelaskan mengenai pola arbitrasi yang mungkin terjadi.
- Di dalam kontrak harus diterangkan mengenai aktivitas praktis lokal yang akan dijalankan oleh perusahaan patungan, bekerja sama dengan para petani plasma/koperasi, perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi.

Formula Kontrak

Dalam melakukan kontrak untuk pembentukan perusahaan patungan, sangat perlu diperhatikan aspek-aspek, antara lain: 1) Di dalam spesifikasi pasar harus dijelaskan mengenai standar kualitas yang diinginkan pengusaha/ industri, yang disesuaikan dengan permintaan pasar; 2) Di dalam spesifikasi sumberdaya harus dijelaskan mengenai karakteristik produksi secara lengkap dan spesifik; dan 3) Spesifikasi manajemen dan pendapatan merupakan hal yang harus diperhatikan secara lebih intensif, karena melibatkan penentuan

struktur harga, pembaharuan input produksi, serta dukungan teknis dan pengawasan aspek manajerial.

Didalam persetujuan formal harus diperlihatkan adanya legalitas kontrak antara petani plasma/koperasi, perusahaan inti dan pemerintah provinsi serta pihak lain yang mungkin akan terlibat secara lengkap dan jelas. Dari sisilain bentuk registrasi yang sederhana perlu digunakan untuk memudahkan petani plasma memahami bentuk persetujuan yang dilakukan dengan perusahaan inti dan Pemerintah Provinsi.

Perlu menjadi bahan pertimbangan bagi pihat yang terlibat dalam kegiatan kontrak. Beberapa spesifikasi kontrak yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kontrak antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan perusahaan patungan, antara lain: waktu kontrak, standar kualitas produk yang diinginkan perusahaan patungan, kuota produksi petani plasma dan perusahaan inti, praktek kultivasi yang diinginkan oleh perusahaan patungan, pola distribusi karet alam yang dibudidayakan, cara mengkalkulasikan harga jual komoditas, prosedur pembayaran petani plasma dan perusahaan inti dan pembaharuan klaim kredit, danp perencanaan asuransi proses budidaya karet alam di lahan.

BAB XII
STRATEGI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KARET ALAM DI PERDESAAN

A. Analisis SWOT Kelembagaan Karet Alam

Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi peniaian terhadap faktor kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*ThreathS*).

Analisa SWOT merupakan sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau rencana proyek. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dalam mencapai tujuan tersebut.

Sementara masing-masing faktor dijelaskan sebagai berikut: (1) Strength; faktor internal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor pendukung dapat berupa sumber daya, keahlian, atau kelebihan lain yang mungkin diperoleh berkat sumber keuangan, citra, keunggulan di pasar, serta hubungan baik antara buyer dengan supplier. (2) Weakness; faktor internal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor penghambat dapat berupa fasilitas yang tidak lengkap, kurangnya sumber keuangan, kemampuan mengelola, keahlian pemasaran dan citra perusahaan. (3) Opportunity; faktor eksternal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang mendukung dalam pencapaian tujuan dapat berupa perubahan kebijakan, perubahan persaingan, perubahan teknologi dan perkembangan hubungan supplier dan buyer. (4) Threat; faktor eksternal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang menghambat perusahaan dapat berupa masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat,

meningkatnya bargaining power daripada supplier dan buyer utama, perubahan teknologi serta kebijakan baru. Bentuk analisis SWOT tersebut disajikan pada Tabel 12.1.

Tabel 12.1. Analisis Matriks SWOT

EKSTERNAL / INTERNAL	OPPORTUNITY	TREATHS
STRENGTH	*Comparative Advantage*	*Mobilization*
WEAKNESS	*Divestment/Investment*	*Damage Control*

Keterangan :

- Sel A: *Comparative Advantages*. Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat.
- Sel B: *Mobilization*. Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumberdaya yang merupakan kekuatan organisasi untuk meminimalkan ancaman dari luar, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang.
- Sel C: *Divestment/Investment*. Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi).
- Sel D: *Damage Control*. Sel ini merupaka kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah *damage control* (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.

1. Strategi Pemberdayaan Petani Karet Alam di Pedesaan Provinsi Riau

Berdasarkan hasil analisis diketahui terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi petani karet alam di pedesaan Provinsi Riau dalam rangka pengembangan komoditi karet alan, antara lain:

- Tersedianya luas lahan, nomor dua setelah luas lahan sawit
- Daya dukung lahan sangat memadai
- Keadaan iklim sesuai untuk karet
- Ketersediaan tenaga kerja petani karet yang relatif besar di 10 Kabupaten
- Pengalaman petani karet sudah sejak zaman penjajahan
- Rata-rata luas kebun karet milik petani kurang dari 2 ha
- Pemeliharaan kebun karet masih tradisional
- Penyadapan karet masih tradisional
- Banyaknya umur pohon karet yang sudah tua
- Masih banyak petani karet berstatus penyadap bukan sebagai pemilik
- Jumlah modal yang dimiliki petani karet masih terbatas
- Pencegahan dan pengendalian penyakit tanaman karet belum efektif terutama JAP
- Prilaku petani karet cenderung menambah berat karet dengan bahan lain untuk mendapatkan penghasilan lebih
- Pengendalian gulma pada kebun karet tidak maksimal
- Pemasaran terbatas
- Kelompok petani karet belum berkembang
- Koperasi petani karet tidak berkelanjutan
- Kuatnya ketergantungan petani dengan tauke (pedagang) karet
- Petani karet tidak memiliki akses kepada industri pengolahan karet.
- Regulasi Petani Karet sudah diatur dalam Permentan No. 38 Tahun 2008
- Terdapatnya industri karet di Propinsi Riau
- Permintaan getah karet dunia semakin meningkat
- Bibit karet klon unggul makin tinggi produksinya
- Peningkatan penampung hasil produksi karet
- Peran pemerintah dalam membantu petani karet masih minim
- Sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi

- Kuatnya peranan tauke dalam tata niaga karet
- Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan lahan perkebunan karet makin berkurang (terjepit)
- Tingginya persaingan produksi karet dan kualitas.
- Asosiasi petani karet Indonesia (Apkrindo) Cabang Riau belum eksis.
- Harga penjualan getah karet dunia cenderung turun

Berdasarkan internal dan eksternal, dapat disusun matrik internal–eksternal petani karet di pedesaan yang disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 12.2 Matriks Internal–Eksternal Petani Karet Alam di Pedesaan

Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Kekuatan	**Kelemahan**	**Peluang**	**Tantangan**
• Tersedianya luas lahan, No. 2 setelah sawit • Daya dukung lahan • Keadaan iklim sesuai untuk karet • Ketersediaan tenaga kerja petani karet yang relatif besar di 10 Kabupaten • Pengalaman petani karet sudah sejak zaman penjajahan • Regulasi Petani Karet sudah diatur dalam Permentan No. 38 Tahun 2008	• Rata-rata luas kebun karet milik petani kurang dari 2 ha • Pemeliharaan kebun karet masih tradisional • Penyadapan karet masih tradisional • Banyaknya umur pohon karet yang sudah tua • Produksi karet belum maksimal dan rendah kualitas • Pemasaran terbatas • Jumlah modal yang dimiliki petani karet masih terbatas • Pencegahan dan pengendalian penyakit tanaman karet belum efektif terutama JAP • Prilaku petani karet cenderung menambah berat karet dengan bahan lain untuk mendapatkan penghasilan lebih • Kelompok petani karet belum berkembang • Koperasi petani karet tidak berkelanjutan	• Regulasi Petani Karet sudah diatur dalam Permentan No. 38 Tahun 2008 • Terdapatnya industri karet di Propinsi Riau • Permintaan getah karet dunia semakin meningkat • Bibit karet klon unggul makin tinggi produksinya • Peningkatan penampung hasil produksi karet	• Peran pemerintah dalam membantu petani karet masih minim • Sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi • Tingginya persaingan produksi karet dan kualitas • Kuatnya peranan tauke dalam tata niaga karet • Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan lahan perkebunan karet makin berkurang (terjepit) • Asosiasi petani karet Indonesia (Apkrindo) Cabang Riau belum eksis. • Harga penjualan getah karet dunia cendrung turun

Informasi yang disajikan pada Tabel 12.2, selanjutnya dianalisis berdasarkan kebutuhan untuk pengambilan keputusan. Hasil analisis SWOT disajikan pada Tabel 12.3. Dari Tabel tersebut dapat ditentukan beberapa alternatif strategi pemberdayaan petani karet alam dalam rangka pengembangan komoditi karet alam di pedesaan Provinsi Riau, yaitu:

1) Strategi S–O

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi atau lembaga untuk bisa berkembang lebih cepat. Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka pemberdayaan petani karet di pedesaan terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan petani karet alam tersebut yang pada akhirnya akan dapat mengembangkan komoditi karet alam di Provinsi Riau sebagai berikut:

a. Membangun kemitraan dalam pengelolaan karet, maknanya petani karet akan dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan apabila dapat membangun kemitraan dengan cara mengintensifkan peran dan fungsi kelembagaan sesama petani karet baik dalam bentuk kelompok petani karet maupun melalui koperasi karet, kemudian dari kelembagaan yang ada tersebut dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait langsung (*stake holders)* baik dengan lembaga pedagang pengumpul, industri karet, perbankan maupun instansi pemerintahan. Hal ini perlu dilakukan karena petani memiliki lahan yang memadai dan sudah sangat berpengalaman dalam bertani karet, disisi lain permintaan karet dunia semakin meningkat dan juga tersedianya industri karet di Provinsi Riau.
b. Pendampingan SDM Petani karet, untuk dapat memanfaatkan peluang permintaan karet yang cendrung meningkat dan juga agar hasil karet alam yang dihasilkan oleh petani karet dapat diterima dengan harga yang layak atau harga pasar, diperlukan persyaratan terutama kualitas dan kesinambungan hasil. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh petani apabila dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti dari Dinas Perkebunan atau melalui program CSR Industri karet, untuk melakukan kegiatan dalam bentuk *technical assistency* atau dalam bentuk kegiatan lain yang lebih bersifat membantu petani tapi bukan dalam bentuk

penyuluhan, mulai dari proses pemilihan bibit, penanaman, pemeliharaan sampai kepada sistem penyadapan dan pasca penyadapan.

2) Strategi W–O

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi). Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemberdayaan petani karet alam di pedesaan terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu:

a. Melaksanakan pendidikan dan latihan SDM Petani, serta pembinaan kepada kelompok tani, seperti halnya pada strategi S – O point b yaitu diharapkan kepada Dinas Perkebunan atau melalui program CSR Industri karet, untuk melakukan kegiatan dalam bentuk ***technical assistency*** atau dalam bentuk kegiatan lain yang lebih bersifat membantu petani tapi bukan dalam bentuk penyuluhan, mulai dari proses pemilihan bibit, penanaman, pemeliharaan sampai kepada sistem penyadapan dan pasca penyadapan. Hal ini sangat perlu dilakukan karena sebahagian besar petani karet dalam melakukan pemeliharaan dan penyadapan kebun karet masih bersifat tradisional, banyaknya umur pohon karet yang sudah tua, produksi karet belum maksimal dan rendah kualitas, pemasaran terbatas, jumlah modal yang dimiliki petani karet masih terbatas, pencegahan dan pengendalian penyakit tanaman karet belum efektif terutama **JAP**, prilaku petani karet cenderung menambah berat karet dengan bahan lain untuk mendapatkan penghasilan lebih, ditambah lagi dengan tantangan yang dihadapi cukup berat yaitu sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, tingginya persaingan produksi karet dan kualitas, kuatnya peranan tauke dalam tata niaga karet dan ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan lahan perkebunan karet makin berkurang (terjepit).
b. Pemberian bantuan bibit karet unggul dan permodalan bagi petani, strategi berikutnya adalah adanya uapaya terutama dari pemerintah daerah untuk melaksanakan program pemberian bantuan bibit karet unggul kepada petani dikarenakan saat ini banyaknya umur pohon karet

petani yang sudah tua, diamping itu diharapkan juga bantuan permodalan untuk melaksanakan kegiatan peremajaan tanaman karet dengan klon unggul oleh petani termasuk pemeliharaannya dalam bentuk bantuan kredik lunak dari perbankan. Selain itu diperlukan adanya penyediaan dan pemanfaatan teknologi dan sarana prasarana pertanian yang memadai.

3) Strategi S –T

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang. Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemberdayaan petani karet alam di pedesaan terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas kelembagaan petani karet baik dalam bentuk kelompok tani maupun juga dalam bentuk koperasi petani karet. Hal ini sangat penting dilakukan dalam rangka memperkuat *bargaining position* petani karet itu sendiri baik yang berkaitan dengan posisi tawar harga jual hasil petani, maupun juga dalam memperluas akses pasar sehingga pada akhirnya akan memotivasi petani untuk meningkatkan produktivitasnya serta menjaga kualitas produknya. Strategi lain yang bisa dilakukan adalah melaksanakan intensifikasi tanaman karet pada lahan yang dimiliki petani karet alam tersebut.

4) Strategi W -T

Sel ini merupakan kondisi yang paling lemahdari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah *Damage Control* (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemberdayaan petani karet alam di pedesaan terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah memberdayakan kelompok tani untuk memantau perkembangan produk, harga dan tingkat persaingan, membentuk kembali Koperasi Petani Karet yang dikelola secara profesional, dan pemerintah diharapkan membuat regulasi dalam rangka cegah alih fungsi lahan dari lahan karet menjadi lahan sawit.

Tabel 12.3. Analisis SWOT Pemberdayaan Petani Karet Alam Propinsi Riau

INTERNAL / EKSTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	• Tersedianya luas lahan, No. 2 setelah sawit • Daya dukung lahan • Keadaan iklim sesuai untuk karet • Ketersediaan tenaga kerja petani karet yang relatif besar di 10 Kabupaten • Pengalaman petani karet sudah sejak zaman penjajahan • Regulasi Petani Karet sudah diatur dalam Permentan No. 38 Tahun 2008	• Rata-rata luas kebun karet milik petani kurang dari 2 ha • Pemeliharaan kebun karet masih tradisional • Penyadapan karet masih tradisional • Banyaknya umur pohon karet yang sudah tua • Produksi karet belum maksimal dan rendah kualitas • Pemasaran terbatas • Jumlah modal yang dimiliki petani karet masih terbatas • Pencegahan dan pengendalian penyakit tanaman karet belum efektif terutama JAP • Prilaku petani karet cenderung menambah berat karet dengan bahan lain untuk mendapatkan penghasilan lebih • Kelompok petani karet belum berkembang • Koperasi petani karet tidak berkelanjutan
PELUANG (O)	**STRATEGI S - O**	**STRATEGI W - O**
	• Membangun kemitraan dalam pengelolaan karet • Pendampingan SDM Petani karet	• Melaksanakan diklat SDM Petani, serta pembinaan kepada kelompok tani • Pemberian bantuan bibit karet unggul dan permodalan bagi petani • Peremajaan tanaman yang sudah tua • Penyediaan dan pemanfaatan teknologi dan sarana prasarana pertanian
TANTANGAN (T)	**STRATEGI S - T**	**STRATEGI W - T**
• Peran pemerintah dalam membantu petani karet masih minim • Sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi • Tingginya persaingan produksi karet dan kualitas • Kuatnya peranan tauke dalam tata niaga karet • Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan lahan perkebunan karet makin berkurang (terjepit) • Asosiasi petani karet Indonesia (Apkrindo) Cabang Riau belum eksis. • Harga penjualan getah karet dunia cendrung turun	• Peningkatan kapasitas kelembagaan petani karet • Pengembangan akses pemasaran • Intensifikasi	• Memberdayakan kelompok tani untuk memantau perkembangan produk, harga dan tingkat persaiangan • Membentuk kembali Koperasi Petani Karet yang dikelola secara Profesional • Regulasi cegah alih fungsi lahan • Peremajaan dengan klon unggul

Berdasarkan analisis SWOT tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan karet alam di pedesaan khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan petani karet alam dapat dilakukan dengan cara, antara lain: 1) Pendampingan petani karet dalam bentuk *technical assistency* oleh Pemerintah atau Industri melalui program ***CSR,*** dalam rangka meningkatkan kualitas SDM petani dalam hal pemeliharaan, sistem penyadapan, pencegahan dan pengendalian penyakit tanaman karet prilaku petani karet cenderung menambah berat karet dengan bahan lain untuk mendapatkan penghasilan lebih; 2) Pemberian bantuan bibit karet unggul dan bantuan permodalan bagi petani; 3) Bantuan peremajaan kebun karet dengan bibit unggul serta subsidi biaya pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (TBM); 4) Peningkatan kapasitas kelembagaan petani karet yaitu kelompok petani karet dan Koperasi Petani Karet; 5) Regulasi dalam rangka cegah alih fungsi lahan dari lahan karet menjadi lahan sawit oleh Pemerintah; 6) Bantuan sertifikasi lahan perkebunan petani agar petani memiliki akses ke lembagan keuangan; 7) Membangun kelembagaan petani karet di Riau (Apkarindo) yang berfungsi menyalurkan aspirasi petani karet ke pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah dan pusat.

2. Strategi Pemberdayaan Pedagang Karet Alam di Pedesaan Provinsi Riau

Berdasarkan hasil analisis diketahui terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pedagang karet alam dalam rangka pengembangan komoditi karet di pedesaan, antara lain:

- Pedagang karet memiliki modal usaha yang memadai
- Pedagang karet memiliki akses ke lembaga keuangan (bank)
- Pedagang karet memiliki akses ke industri pengolahan karet
- Pedagang karet mendominasi petani karet dalam hubungan patronase
- Jumlah pedagang karet lebih sedikit dibandingkan dengan petani karet
- Pedagang karet cenderung membeli bokar basah dan bokar kotor
- Pedagang karet taat membayar pajak kepada pemerintah
- Pedagang karet cenderung memiliki tingkat pendidikan yang sedang hingga tinggi

- Pedagang karet cenderung mengeruk keuntungan maksimal dari pembelian bokar petani
- Pedagang karet cenderung terlibat hutang piutang dengan petani karet
- Sebagian besar pedagang karet merupakan pedagang informal belum memiliki SIUP dan tidak memiliki Surat Tanda Registrasi sebagai pedagang
- Pedagang karet terlibat hutang piutang dengan industri pengolahan karet
- Belum ada asosiasi pedagang karet yang melindungi pedagang karet
- Regulasi Pedagang karet Sudah Diatur Dalam Permendag No. 53 Tahun 2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor *Standard Indonesian Rubber* Yang diperdagangkan
- Permintaan getah karet dunia semakin meningkat
- Perhatian pemerintah daerah kepada pedagang karet belum memadai
- Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan produksi perkebunan karet makin berkurang.
- Harga penjualan getah karet dunia cenderung turun

Berdasarkan faktor-faktor strategi Strategi Pemberdayaan Pedagang Karet Alam di Pedesaan dapat disusun matrik internal–eksternal pedagang karet di pedesaan Provinsi Riau seperti pada Tabel 12.4.

Tabel 12.4 Matriks Internal – Eksternal Pedagang Karet Alam di Pedesaan

Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Kekuatan	**Kelemahan**	**Peluang**	**Tantangan**
• Pedagang karet memiliki modal usaha yang memadai • Pedagang karet memiliki akses ke lembaga keuangan (bank) • Pedagang karet memiliki akses ke industri pengolahan karet • Pedagang karet mendominasi petani karet dalam hubungan patronase • Jumlah pedagang karet lebih sedikit dibandingkan dengan petani karet • Pedagang karet cenderung membeli bokar basah dan bokar kotor • Pedagang karet taat membayar pajak kepada pemerintah • Pedagang karet cenderung memiliki tingkat pendidikan yang sedang hingga tinggi • Pedagang karet cenderung mengeruk keuntungan maksimal dari pembelian bokar petani • Pedagang karet cenderung terlibat hutang piutang dengan petani karet	• Sebagian besar pedagang karet merupakan pedagang informal belum memiliki SIUP dan tidak memiliki Surat Tanda Registrasi sebagai pedagang • Pedagang karet terlibat hutang piutang dengan industri pengolahan karet • Belum ada asosiasi pedagang karet yang melindungi pedagang karet	• Regulasi Pedagang karet Sudah Diatur Dalam Permendag No. 53 Tahun 2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor *Standard Indonesian Rubber* Yang Diperdagangkan • Permintaan getah karet dunia semakin meningkat	• Perhatian pemerintah daerah kepada pedagang karet belum memadai • Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan produksi perkebunan karet makin berkurang. • Harga penjualan getah karet dunia cenderung turun

Data yang disajikan pada Tabel 12.4 selanjutnya dilakukan analisis SWOT. Dari hasil analisis selanjutnya ditabulasi kedalam tabel SWOT yang disajikan pada Tabel 12.5. Analisis SWOT menghasilkan beberapa alternatif strategi pemberdayaan pedagang karet alam dalam rangka pengembangan komoditi karet alam di pedesaan Provinsi Riau, antara lain:

1) Strategi S–O

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi atau lembaga untuk bisa berkembang lebih cepat. Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka pemberdayaan pedagang karet di pedesaan terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan pedagang karet alam tersebut yang pada akhirnya akan dapat mengembangkan komoditi karet alam di Provinsi Riau sebagai berikut:

a. Menjalin hubungan harmonisasi dengan industri karet dalam menjamin pasokan produk yang berkualitas demi keberlangsungan proses produksi pada industri karet. Keberlangsungan usaha pedagang karet juga sangat tergantung kepada industri karet, artinya karet yang dibeli oleh pedagang kepada petani akan di jual kepada industri karet, industri karet akan membeli dari pada pedagang apabila karet yang dijualnya tersebut memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh insustri, dan industri akan merasa lebih nyaman apabila pedagang juga dapat menjamin keberlangsungan pasokan karet dari pedagang sebagai in put dalam proses produksi industri karet secara terus menerus. Oleh karena itu diperlukan adanya kemitraan dengan industri karet dengan prinsip saling menguntungkan, sehingga bagi pedagang karet produk yang dibeli dari petani mempunyai pasar yang jelas untuk dijualnya berdasarkan harga pasar. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila pedagang karet sebagai salah satu institusi kelembagaan karet dapat memelihara hubungan yang harmonis dengan industri karet.
b. Meningkatkan kemitraan dengan petani karet dengan prinsip saling menguntungkan, selain mememlihara hubungan yang harmonis dengan industri karet, pedagang karet juga meningkatkan kemitraan dengan petani karet agar pasokan dari petani tetap terjamin. Hanya saja kesan

selama ini bahwa petani karet tidak mempunyai posisi tawar dalam hal penentuan harga jual dan terkesan selalu pihak yang dirugikan mesti dihilangkan, mestinya pedagang karet mempunyai prinsip bila kita ingin sukses, sukseskan dulu orang lain (petani karet) apalagi dalam sistem pasar terbuka, semua orang bisa melakukan transaksi dengan siapa saja. Petani karet tidak akan selamanya dia bisa menerima keterbatasannya dan apabila petani menyadari dan berusaha untuk bangkit dengan memperkuat kelompok petani karet serta membentuk koperasi karet dengan menggunakan manajemen yang profesional maka tidak tertutup kemungkinan pedagang karet akan kehilangan pasar.

c. Meningkatkan SDM Petani agar hasil getah karet memenuhi standar kualitas, adanya kecendrungan prilaku petani karet yang mengabaikan kualitas produksinya serta adanya sebahagian petani karet yang memiliki prilaku cenderung menambah berat karet dengan bahan lain untuk mendapatkan penghasilan lebih, kemudian ditambah lagi produksi karet oleh petani yang juga masih rendah, hal ini tentu saja tidak hanya merugikan petani itu sendiri akan tetapi juga sangat berpengaruh kepada pedagang sewaktu menjual produk tersebut kepada industri. Oleh karena itu pedagang karet juga mesti memiliki strategi untuk meningkatkan kualitas SDM petani karet melalui usaha bersama yang dilakukan antara pedagang, industri, pemerintah secara bersama-sama mensuport program peningkatan kualitas SDM petani melalui program *technical assistency* atau dalam bentuk program kegiatan lainnya.

2) Strategi W–O

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi). Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemberdayaan pedagang karet alam di pedesaan terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu:

a. Menjadikan status pedagang informal menjadi formal dengan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Berdasarkan data yang ada ternyata masih banyak pedagang karet yang belum memiliki Surat Tanda Registrasi, hal bermakna bahwa status pedagang karet masih bersifat informal atau belum memilki legalitas, pada hal dalam regulasi yang ada semua pedagang karet mesti memiliki STR. Apabila strategi ini diabaikan oleh pedagang karet tidak tertutup kemungkinan pad suatu waktu pedagang tersebut tidak dibolehkan lagi melakukan transaksi jual beli karet.
b. Membentuk Asosiasi Pedagang Karet, strategi lain adalah memperkuat posisinya agar juga mempunyai posisi tawar yang lebih kuat terutama terhadap industri karet, maka perlu dibentuk asosiasi yang dikenal dengan Asosiasi Pedagang karet.

3) Strategi S–T

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang. Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemberdayaan pedagang karet alam di pedesaan maka strategi yang dapat dilakukan adalah membangun kemitraan dengan petani dan industri karet.

4) Strategi W-T

Sel ini merupakan kondisi yang paling lemahdari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah *Damage Control* (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemberdayaan pedagang karet alam di pedesaan adalah melakukan strategi mendorong pemerintah untuk membuat regulasi cegah alih fungsi lahan, strategi ini memiliki kesamaan dengan strategi yang dilakukan oleh petani karet dan industri karet. Hal ini dilakukan salah satu tantangan yang dihadapi adalah adanya ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan produksi perkebunan

karet makin berkurang, di satu sisi lahan karet yang ada sekarang sudah memiliki umur yang tua, akibatnya apabila tidak dilakukan regulasi cegah alih fungsi lahan dan pola peremajaan tanaman karet juga tidak terlaksana secara optimal sudah pasti keberlangsungan usaha pedagang karet otomatis juga terancam.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan karet alam di pedesaan khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan pedagang karet alam dapat dilakukan dengan cara, antara lain: 1) Membangun kelembagaan pedagang karet dalam bentuk asosiasi yang berfungsi menyalurkan aspirasi pedagang karet ke berbagai pihak pemangku kepentingan terutama pemerintah; 2) Meningkatkan status pedagang karet menjadi formal dengan memiliki Surat Tanda Registrasi Pedagang; 3) Membangun kemitraan dengan petani karet dan industri karet dengan prinsip saling menguntungkan; 4) Secara bersama-sama dengan industri dan pemerintah meningkatkan kualitas SDM petani karet

Tabel 12.5. Analisis SWOT Pemberdayaan Pedagang Karet Alam Propinsi Riau

INTERNAL / EKSTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	• Pedagang karet memiliki modal usaha yang memadai • Pedagang karet memiliki akses ke lembaga keuangan (bank) • Pedagang karet memiliki akses ke industri pengolahan karet • Pedagang karet mendominasi petani karet dalam hubungan patronase • Jumlah pedagang karet lebih sedikit dibandingkan dengan petani karet • Pedagang karet cenderung membeli bokar basah dan bokar kotor • Pedagang karet taat membayar pajak kepada pemerintah • Pedagang karet cenderung memiliki tingkat pendidikan yang sedang hingga tinggi • Pedagang karet cenderung mengeruk keuntungan maksimal dari pembelian bokar petani • Pedagang karet cenderung terlibat hutang piutang dengan petani karet	• Sebagian besar pedagang karet merupakan pedagang informal belum memiliki SIUP dan tidak memiliki Surat Tanda Registrasi sebagai pedagang • Pedagang karet terlibat hutang piutang dengan industri pengolahan karet • Belum ada asosiasi pedagang karet yang melindungi pedagang karet
PELUANG (O)	**STRATEGI S - O**	**STRATEGI W - O**
• Regulasi Pedagang karet Sudah Diatur Dalam Permendag No. 53 Tahun 2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor *Standard Indonesian Rubber* Yang Diperdagangkan • Permintaan getah karet dunia semakin meningkat	• Menjalin hubungan harmonisasi dengan industri karet dalam menjamin pasokan produk yang berkualitas demi keberlangsungan proses produksi pada industri karet. • Meningkatkan kemitraan dengan petani karet dengan prinsip saling menguntungkan • Meningkatkan SDM Petani agar hasil getah karet memenuhi standar kualitas	• Menjadikan status pedagang informal menjadi formal dengan memiliki Surat Tanda Registrasi • Membentuk Asosiasi Pedagang Karet
TANTANGAN (T)	**STRATEGI S - T**	**STRATEGI W - T**
• Perhatian pemerintah daerah kepada pedagang karet belum memadai • Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan produksi perkebunan karet makin berkurang. • Harga penjualan getah karet dunia cenderung turun	• Membangun kemitraan dengan petani dan industri karet	• Mendorong Pemerintah untuk membuat regulasi cegah alih fungsi lahan

3. Strategi Pemberdayaan Industri Karet Alam di Provinsi Riau

Hasil pengamatan di lapangan dan pembuat kebijakan diperoleh informasi yang terkait dengan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi industri karet alam di Provinsi Riau dalam rangka pengembangan komoditi karet, antara lain:

- Terdapat 6 perusahaan industri pengolahan karet di Riau dengan tenaga buruh mencapai 2500 orang buruh
- Indutri pengolahan karet di Riau memiliki pasar ekspor ke mancanegara
- Kapasitas terpasang pabrik karet saat ini melebihi sediaan bahan baku karet
- Industri pengolahan karet terutama industri hilir merupakan industri padat modal dan teknologi canggih
- Industri pengolahan karet sudah tergabung dalam asosiasi yakni Gapkindo Cabang Riau
- Perusahaan industri pengolahan karet di Riau memiliki hubungan emosional dan trust yang baik dengan para importir manca negara
- Perusahaan industri pengolahan karet di Riau memiliki hubungan baik dengan para produsen dan trader karet manca negara (Malaysia, Singapura, Thailand)
- Perusahaan industri pengolahan karet memiliki program CSR untuk petani karet
- Perusahaan industri pengolahan karet memiliki hubungan yang kuat dengan pedagang karet
- Biaya produksi per ton SIR yang ada saat ini masih tinggi karena inefisiensi
- Biaya transportasi SIR ke pelabuhan ekspor masih tinggi karena harus diekspor melalui pelabuhan Belawan Medan
- Perusahaan industri pengolahan karet kurang memiliki akses ke petani karet
- Ada banyak regulasi yang mengatur industri pengolahan karet
- Adanya permintan kebutuhan karet dunia yang makin meningkat
- Adanya penurunan harga karet dunia karena kelebihan pasokan
- Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan produksi perkebunan karet makin berkurang.
- Harga penjualan getah karet dunia cenderung turun

Dari faktor yang sudah teridentifikasi tentang faktor internal–eksternal industri karet alam, maka indikator tersebut dikelompokkan berdasarkan empat kriteria. Keempat kriteria tersebut disajikan pada Tabel 12.6.

Tabel 12.6 Matriks Internal–Eksternal Industri Karet Alam

Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Kekuatan	**Kelemahan**	**Peluang**	**Tantangan**
• Terdapat 6 perusahaan industri pengolahan karet di Riau dengan tenaga buruh mencapai 2500 orang buruh • Indutri pengolahan karet di Riau memiliki pasar ekspor ke mancanegara • Kapasitas terpasang pabrik karet saat ini melebihi sediaan bahan baku karet • Industri pengolahan karet terutama industri hilir merupakan industri padat modal dan teknologi canggih • Industri pengolahan karet sudah tergabung dalam asosiasi yakni Gapkindo Cabang Riau • Perusahaan industri pengolahan karet di Riau memiliki hubungan emosional dan trust yang baik dengan para importir manca negara • Perusahaan industri pengolahan karet di Riau memiliki hubungan baik dengan para produsen dan trader karet manca negara (Malaysia, S ingapura, Thailand) • Perusahaan industri pengolahan karet memiliki program CSR untuk petani karet • Perusahaan industri pengolahan karet memiliki hubungan yang kuat dengan pedagang karet	• Biaya produksi per ton SIR yang ada saat ini masih tinggi karena inefisiensi • Biaya transportasi SIR ke pelabuhan ekspor masih tinggi karena harus diekspor melalui pelabuhan Belawan Medan • Perusahaan industri pengolahan karet kurang memiliki akses ke petani karet	• Ada banyak regulasi yang mengatur industri pengolahan karet • Adanya permintan kebutuhan karet dunia yang makin meningkat	• Adanya penurunan harga karet dunia karena kelebihan pasokan • Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan produksi perkebunan karet makin berkurang. • Harga penjualan getah karet dunia cenderung turun

Tabel 12.7. Analisis SWOT Pemberdayaan Industri Karet Alam Propinsi Riau

INTERNAL / EKSTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	• Terdapat 6 perusahaan industri pengolahan karet di Riau dengan tenaga buruh mencapai 2500 orang buruh • Indutri pengolahan karet di Riau memiliki pasar ekspor ke mancanegara • Kapasitas terpasang pabrik karet saat ini melebihi sediaan bahan baku karet • Industri pengolahan karet terutama industri hilir merupakan industri padat modal dan teknologi canggih • Industri pengolahan karet sudah tergabung dalam asosiasi yakni Gapkindo Cabang Riau • Perusahaan industri pengolahan karet di Riau memiliki hubungan emosional dan trust yang baik dengan para importir manca negara • Perusahaan industri pengolahan karet di Riau memiliki hubungan baik dengan para produsen dan trader karet manca negara (Malaysia, Singapura, Thailand) • Perusahaan industri pengolahan karet memiliki program CSR untuk petani karet • Perusahaan industri pengolahan karet memiliki hubungan yang kuat dengan pedagang karet	• Biaya produksi per ton SIR yang ada saat ini masih tinggi karena inefisiensi • Biaya transportasi SIR ke pelabuhan ekspor masih tinggi karena harus diekspor melalui pelabuhan Belawan Medan • Perusahaan industri pengolahan karet kurang memiliki akses ke petani karet
PELUANG (O)	**STRATEGI S - O**	**STRATEGI W - O**
• Pasar karet alam terus bertumbuh • Permintaan kebutuhan karet dunia yang makin meningkat • Industri hilir berbahan baku karet alam makin banyak • Ada banyak regulasi yang mengatur industri pengolahan karet	• Peningkatan produksi karet alam • Penyerapan untuk industri hilir	• Perbaikan proses untuk peningkatan mutu • Penerapan teknologi untuk industri hilir
TANTANGAN (T)	**STRATEGI S - T**	**STRATEGI W - T**
• Adanya penurunan harga karet dunia karena kelebihan pasokan • Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan produksi perkebunan karet makin berkurang. • Harga penjualan getah karet dunia cenderung turun	• Membangun kemitraan dengan pedagang dan petani karet • Diversifikasi produk dengan harga yang lebih stabil	• Peningkatan kompetensi SDM Industri untuk pengolahan dalam rangka peningkatan mutu

Analisis SWOT Pemberdayaan Industri Karet Alam Propinsi Riau yang disajikan pada Tabel 12.7, selanjutkan dijelaskan hasil bentuk kolaborasi strategi. Hasil analisis menentukan beberapa alternatif strategi pemberdayaan industri karet alam dalam rangka pengembangan komoditi karet alam di pedesaan.

1) Strategi S – O

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi atau lembaga untuk bisa berkembang lebih cepat. Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka pemberdayaan industri karet alam terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan industri karet alam tersebut yang pada akhirnya akan dapat mengembangkan komoditi karet alam di Provinsi Riau sebagai berikut:

a. Peningkatan produksi karet alam, strategi ini sangat perlu dilakukan mengingat saat ini sebahagian besar umur tanaman karet sudah tua, adanya ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan produksi perkebunan karet makin berkurang, SDM petani karet masih rendah sekalipun dia sudah mempunyai pengalaman yang lama. Sementara di sisi lain terdapat peluang adanya tumbuh dan berkembangnya pasar karet alam. Oleh karena itu industri karet yang ada perlu merumuskan strategi untuk melakukan peningkatan produksi karet alam.
b. Penyerapan untuk industri hilir, selain peningkatan produksi karet alam, Industri karet yang ada sekarang juga perlu merumuskan strategi untuk melakukan penyerapan untuk industri hilir.

2) Strategi W – O

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi). Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemberdayaan industrii

karet alam terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu: (a) Perbaikan proses untuk peningkatan mutu, dan (b) penerapan teknologi untuk industri hilir. Strategi ini berkaitan dengan strategi S –O yaitu peningkatan produksi karet alam dan penyerapan untuk industri hilir.

3) Strategi S – T

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang. Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemberdayaan industri karet alam terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah

a. Membangun kemitraan dengan pedagang dan petani karet, seperti hal dalam mata rantai bisnis, bahwa antara satu dengan pihak lainnya tidak dapat dipisahkan. Petani karet sangat tergantung kepada pedagang karet untuk membeli produknya, sebaliknya pedagang karet juga memerlukan petani, tanpat petani karet mustahil pedagang melakukan usahanya, begitu juga antara pedagang karet dengan industri karet. Oleh karena itu demi keberlangsungan usaha agar lebih terjamin diperlukan adanya kemitraan baik dengan pedagang maupun dengan petani karet dengan prinsip saling menguntungkan. Salah satu bentuk realisasi kemitraan tersebut adalah industri bersama pedagang karet dan pemerintah secara bersama-sama meningkatkan kualitas SDM petani karet.
b. Diversifikasi produk dengan harga yang lebih stabil, sesuai dengan perkembangan pasar dan keanekaragaman kebutuhan industri dan manusia sejalan dengan perkembangan zaman, maka industri karet juga mesti menyusun strategi untuk melakukan diversifikasi produk.

4) Strategi W -T

Sel ini merupakan kondisi yang paling lemahdari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah *Damage Control* (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang

diperkirakan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemberdayaan industri karet alam terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah peningkatan kompetensi SDM Industri untuk pengolahan dalam rangka peningkatan mutu. Strategi ini sangat perlu untuk dilakukan karena dalam konsep penjaminan mutu apabila in putnya berkualitas dan diproses secara berkualitas (didukung oleh SDM yang berkualitas) maka dapat dipastikan bahwa hasilnya juga akan berkualitas. Oleh karena itu diperlukan adanya SDM yang berkualitas pada industri karet alam. Berbagai program untuk meningkatkan kualitas SDM ini dapat dilakukan salah satu diantaranya adalah melalui *in service training.*

Berdasarkan analisis SWOT Pemberdayaan Industri Karet Alam Propinsi Riau tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan karet alam di pedesaan khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan industri karet alam dapat dilakukan dengan cara: 1) Peningkatan produksi karet alam dan diversifikasi produk; 2) Penyerapan untuk industri hilir; 3) Membangun kemitraan dengan pedagang dan petani karet; 4) Peningkatan kompetensi SDM Industri karet; 5) Melakukan deregulasi peraturan dan kebijakan yang dapat menghambat iklim investasi diindustri karet dan industri hilir karet; 6) Meningkatkan efisiensi di industri karet agar memiliki daya saing dipasar internasional

B. Model Tataniaga Karat Alam di Perdesaan dan Pasar Internasional

Pada bagian ini dipaparkan tentang kondisi terkini mengenai tataniaga karet alam di pedesaan Provinsi Riau dan Model Penawaran dan Permintaan Karet Alam Indonesia di Pasar Internasional. Analisis tataniga karet alam di pedesaan Provinsi Riau meliputi analisis saluran tataniaga, margin dan efisiensi pemasaran. Sementara itu analisis model penawaran dan permintaan karet alam Indonesia di pasar internasional dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar respon penawaran dan permintaan karet alam Indonesia terhadap perubahan-perubahan instrumen pasar seperti harga karet alam dan harga karet sintetis dunia.

1. Tataniaga Karet Alam di Pedesaan

Analisis tataniaga karet alam di pedesaan dilakukan berdasarkan data primer yang dikumpulkan pada dua kabupaten sentra produksi karet alam di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Kampar. Baik di Kabupaten Kuantan Singingi maupun di Kabupaten Kampar terdapat 2 (dua) saluran tataniaga yang berlaku. Saluran I, petani menjual produksi karet alamnya berupa bahan olah karet (bokar) kepada pedagang pengumpul, kemudian pedagang pengumpul menjual ke pedagang besar, dan selanjutnya pedagang besar menjual ke pabrik pengolahan karet. Saluran II, petani menjual produksi karet alamnya berupa bahan olah karet (bokar) kepada pedagang besar, dan selanjutnya pedagang besar menjual ke pabrik pengolahan karet.

Hasil pengamatan di lapangan, tidak ada petani maupun pedagang pengumpul yang langsung menjual bokar langsung ke pabrik pengolahan karet, hanya pedagang besar yang bisa menjual bokar ke pabrik pengolahan karet. Hal tersebut terjadi karena pabrik pengolahan karet hanya akan membeli bokar dari pedagang yang memiliki *delivery order* (DO), yakni para pedagang besar. Tabel 12.8 menyajikan data jumlah petani menurut saluran tataniaga karet alam di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 12.8. Jumlah Petani Menurut Saluran Tataniaga Karet Alam di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Saluran	Petani (jiwa)	Persentase (%)
1	Saluran 1	84	77,5
2	Saluran 2	24	22,5
Jumlah		108	100

Dari tabel dapat dilihat bahwa 77,5% petani memasarkan bokar melalui Saluran I, sedangkan 22,5% sisanya menjual bokar melalui Saluran II. Banyaknya petani yang menjual bokarnya melalui Saluran I dengan pertimbangan kemudahan dalam penjualan karena pedagang pengumpul langsung mendatangi petani untuk membeli bokar. Sementara itu, untuk menjual bokar melalui Saluran II, pedagang bersifat menunggu atau petani yang mendatangi pedagang besar.

Hasil analisis saluran tataniaga karet alam di Kabupaten Kuantan Singingi disajikan pada Gambar 12.1 dan Tabel 12.9. Dari Gambar 12.1 dan Tabel 12.9 dapat dinyatakan bahwa melalui Saluran I, petani menerima harga Rp 6.300 per kg dari pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul menerima harga Rp 8,100 per kg dari pedagang besar, dan selanjutnya pedagang besar menerima harga Rp 10,000 per kg dari pabrik pengolahan karet. Dengan demikian total margin pemasaran karet alam melalui Saluran I sebesar Rp 3,700 per kg, yang terdiri dari margin pemasaran pedagang pengumpul Rp 1,800 per kg dan margin pemasaran pedagang besar Rp 1,900 per kg. Melalui Saluran II, petani menerima harga Rp 6.400 per kg dari pedagang besar, dan selanjutnya pedagang besar menerima harga Rp 10,000 per kg dari pabrik pengolahan karet. Dengan demikian total margin pemasaran karet alam melalui Saluran II sebesar Rp 3,600 per kg.

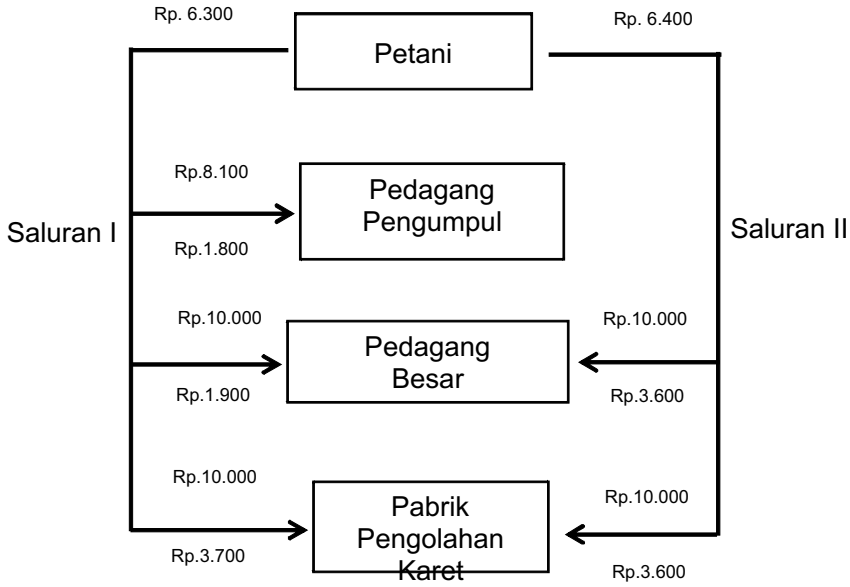

Gambar 12.1. Saluran Tataniaga Karet Alam di Kabupaten Kuantan Singingi

Tabel 12.9. Analisis Tataniaga Karet Alam Menurut Saluran Tataniaga di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Uraian	Saluran Satu			Saluran Dua		
		Harga (Rp/Kg)	Biaya (Rp/Kg)	Persentase (%)	Harga (Rp/Kg)	Biaya (Rp/kg)	Persentase (%)
1.	Petani						
	a. Harga Jual	6.300,00			6.400,00		
	b. Biaya						
	-Transportasi		332,26	56,87		389	60,31
	-Penyusutan 4%		252	43,13		256	39,69
	Total biaya		584,26	100,00		645	100,00
	c. Keuntungan	5.715,74			5.755,00		
2.	Pedagang Pengumpul						
	a. Harga Beli	6.300,00			6.400,00		
	b. Biaya						
	-Bongkar		100	14,49		100	12,58
	-Muat		41,67	6,04		37,5	4,72
	-Transportasi		233,33	33,82		337,5	42,45
	-Penyusutan 5 %		315	45,65		320	40,25
	Total Biaya		690	100,00		795	100,00
	c. Harga Jual	8.100			10.000		
	d. Margin	1.800,00			3.600,00		
	e. Keuntungan	1.110,00			2.805,00		
3.	Pedagang Pengumpul Besar						
	a. Harga Beli	8.100					
	b. Biaya						
	-Bongkar Muat		110	13,56			
	-Transportasi		48	5,92			
	-Penyusutan 8%		648	79,90			
	- Retribusi		5				
	Total Biaya		811	100,00			
	c. Harga Jual	10.000					
	d. Margin	1.900					
	e. Keuntungan	1.089					
4	Harga Pembelian Pabrik	10.000			10.000		
5	Total Margin Pemasaran	3.700,00			3.600,00		
6	Total Biaya Pemasaran		2.085,26			1.440,00	
7	Bagian yg diterima Petani	0,63			0,64		
8	Efisiensi Pemasaran			20,85			14,40

Lebih lanjut dari Tabel 12.9 dapat dilihat bahwa total biaya pemasaran Saluran I lebih besar dari total biaya pemasaran Saluran 2, yakni sebesar Rp 2.085,26 per kg untuk Saluran I dan sebesar Rp 1.440,00 per kg untuk Saluran II. Sementara itu bagian yang diterima petani dan nilai efisiensi pemasaran untuk Saluran I lebih kecil daripada Saluran II. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih menguntungkan bagi petani menjual bokar miliknya melalui Saluran II daripada melalui Saluran I. Tataniaga karet alam

juga lebih efisien melalui Saluran II daripada Saluran I. Hal ini sesuai dengan teori tataniaga yang menyatakan bahwa semakin pendek saluran tataniaga maka pemasaran semakin efisien, sebaliknya semakin panjang saluran tataniaga maka pemasaran semakin tidak efisien.

Tabel 12.10 menyajikan data jumlah petani menurut saluran tataniaga karet alam di Kabupaten Kampar. Dari tabel dapat dilihat bahwa 66,67% petani memasarkan bokar melalui Saluran I, sedangkan 33,33% sisanya menjual bokar melalui Saluran II. Sama dengan di Kabupaten Kuantan Singingi, banyaknya petani di Kabupaten Kampar yang menjual bokarnya melalui Saluran I dengan pertimbangan kemudahan dalam penjualan karena pedagang pengumpul langsung mendatangi petani untuk membeli bokar. Sementara itu, untuk menjual bokar melalui Saluran II, pedagang bersifat menunggu atau petani yang mendatangi pedagang besar.

Tabel 12.10. Jumlah Petani Menurut Saluran tataniaga Karet Alam di Kabupaten Kampar

No	Saluran	Petani (jiwa)	Persentase (%)
1	Saluran 1	40	66,67
2	Saluran 2	20	33,33
Jumlah		60	100

Hasil analisis saluran tataniaga karet alam di Kabupaten Kuantan Singingi disajikan pada Gambar 4.2 dan Tabel 12.11. Dari Gambar 12.2 dan Tabel 12.11 dapat dinyatakan bahwa melalui Saluran I, petani menerima harga Rp 7.671 per kg dari pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul menerima harga Rp 9,766 per kg dari pedagang besar, dan selanjutnya pedagang besar menerima harga Rp 13,254 per kg dari pabrik pengolahan karet. Dengan demikian total margin pemasaran karet alam melalui Saluran I sebesar Rp 5,583 per kg, yang terdiri dari margin pemasaran pedagang pengumpul Rp 2,095 per kg dan margin pemasaran pedagang besar Rp 3,455 per kg. Melalui Saluran II, petani menerima harga Rp 7.683 per kg dari pedagang besar, dan selanjutnya pedagang besar menerima harga Rp 13,254 per kg dari pabrik pengolahan karet. Dengan demikian total margin pemasaran karet alam melalui Saluran II sebesar Rp 5,571 per kg.

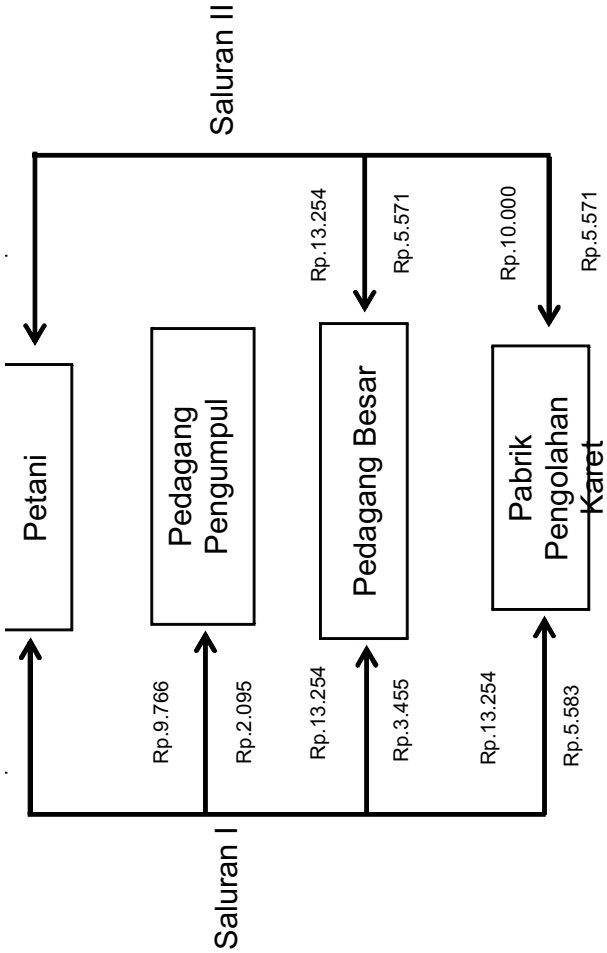

Gambar 12.2. Saluran tataniaga Karet Alam di Kabupaten Kampar

Tabel 12.11. Analisis Pemasaran Karet Saluran tataniaga Satu dan Dua di Kabupaten Kampar

No	Uraian	Saluran Satu			Saluran Dua		
		Harga (Rp/Kg)	Biaya (Rp/Kg)	Persentase (%)	Harga (Rp/Kg)	Biaya (Rp/kg)	Persentase (%)
1.	Petani						
	a. Harga Jual	7.671,00			7.683,00		
	b. Biaya						
	-Transportasi		100,00	24,58		120,00	28,08
	-Penyusutan 4%		306,84	75,42		307,32	71,92
	Total biaya		406,84	100,00		427,32	100,00
	c. Keuntungan	7.264,16			7.255,68		
2.	Pedagang Pengumpul						
	a. Harga Beli	7.671,00			7.683,00		
	b. Biaya						
	-Bongkar		100,00	`		30,00	5,14
	-Muat		41,67	6,51		70,00	11,98
	-Transportasi		115,00	17,96		100,00	17,12
	-Penyusutan 5 %		383,55	59,91		384,15	65,76
	Total Biaya		640,22	100,00		584,15	100,00
	c. Harga Jual	9.766,00			13.254,00		
	d. Margin	2.095,00			5.571,00		
	e. Keuntungan	1.454,78			4.986,85		
3.	Pedagang Pengumpul Besar						
	a. Harga Beli	9.766,00					
	b. Biaya						
	-Bongkar Muat		35,00	3,22			
	-Transportasi		75,00	6,89			
	-Penyusutan 10%		976,60	89,71			
	- Retribusi		2,00				
	Total Biaya		1.088,60	100,00			
	c. Harga Jual	13.254,00					
	d. Margin	3.488,00					
	e. Keuntungan	2.399,40					
4.	Harga Pembelian Pabrik	13.254,00			13.254,00		
5.	Total Margin Pemasaran	5.583,00			5.571,00		
6.	Total Biaya Pemasaran		2.135,66			1.011,47	
7.	Bagian yg diterima Petani	0,58			0,58		
8.	Efisiensi Pemasaran			16,11			7,63

Selanjutnya dari Tabel 12.11 dapat dilihat bahwa total biaya pemasaran Saluran I lebih besar dari total biaya pemasaran Saluran 2, yakni sebesar Rp 2.135,66 per kg untuk Saluran I dan sebesar Rp 1.011,47 per kg untuk Saluran II. Bagian yang diterima petani sama dengan Saluran II. Sementara itu nilai efisiensi pemsaran Saluran I lebih besar daripada Saluran II. Hal ini mengindikasikan bahwa tataniaga karet alam lebih efisien melalui Saluran II daripada Saluran I.

2. Model Penawaran dan Permintaan Karet Alam Indonesia di Pasar Internasional

Model penawaran dan permintaan karet alam Indonesia dibangun dengan tujuan untuk menganalisis respon penawaran dan permintaan karet alam Indonesia di pasar internaisonal. Dalam membangun dan menganalisis model memasukkan Thailand dan Malaysia sebagai negara yang juga termasuk sebagai produsen karet alam yang besar di dunia.

Pada studi ini digunakan data sekunder berupa data *time series* tahun 1980-2014. Data sekunder yang dikumpulkan untuk penelitian ini meliputi data produksi karet alam Indonesia, Malaysia dan Thailand, luas lahan karet alam Indonesia, Malaysia dan Thailand, ekspor karet alam ke negara tujuan yaitu Amerika Serikat, Cina dan Jepang, harga karet alam Indonesia, Malaysia dan Thailand, indeks harga produsen Indonesia, Malaysia dan Thailand, indeks harga konsumen Indonesia, Malaysia, Thailand, Amerika Serikat, Cina dan Jepang, harga karet alam dunia, harga karet sintetis dunia, nilai tukar rupiah terhadap US Dolar, nilai tukar Bath terhadap US Dolar, nilai tukar ringgit terhadap US Dolar, nilai tukar Yuan terhadap US Dolar, nilai tukar Yen terhadap US Dolar. Data diperoleh dari berbagai sumber meliputi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, *Food and Agriculture Organization* (FAO), Bank Indonesia (BI), *Index Mundi Rubber*, dan Bank Dunia.

Tahapan pertama penelitian dengan menggunakan pendekatan ekonometrika adalah spesifikasi model. Pada tahapan ini digambarkan hubungan antara peubah-peubah yang dimasukkan ke dalam model, kemudian diformulasikan dalam sejumlah persamaan struktural dan persamaan identitas (Koutsoyiannis, 2001). Persaman struktural diformasikan yaitu persamaan penawaran karet alam Indonesia, permintaan karet alam Indonesia, ekspor

karet alam Indonesia, harga karet alam Indonesia, penawaran karet alam Thailand, permintaan karet alam Thailand, ekspor karet alam Thailand, harga karet alam Thailand, penawaran karet alam Malaysia, permintaan karet alam Malaysia, ekspor karet alam Malaysia, harga karet alam Malaysia, impor karet alam Amerika Serikat, Cina, Jepang dan harga karet alam dunia.

Penawaran karet alam Indonesia dipengaruhi oleh harga karet alam Indonesia, pertumbuhan luas areal karet alam Indonesia, penambahan luas kelapa sawit Indonesia dan penawaran karet alam Indonesia tahun sebelumnya. Persamaan penawaran karet alam Indonesia dirumuskan sebagai berikut:

$$SIR_t = a_0 + a_1 PIR_t + a_2 GARI_t + a_3 PAPI_t + a_4 SIR_{t-1} + U_{1t} \ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $a_1, a_2 > 0$; $a_3 < 0$ dan $0 < a_4 < 1$.

Permintaan karet alam Indonesia dipengaruhi oleh variabel penambahan harga karet alam Indonesia, harga karet sintetis dunia, dan permintaan karet alam Indonesia tahun sebelumnya. Persamaan permintaan karet alam Indonesia dirumuskan sebagai berikut:

$$DIR_t = bo + b_1 PPIR_t + b_2 PSWR_t + b_3 DIR_{t-1} + U_{2t} \ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $b_1 < 0$; $b_2 > 0$; dan $0 < b_3 < 1$.

Ekspor karet alam Indonesia dipengaruhi oleh variabel nilai tukar Rupiah terhadap US Dolar, penambahan harga karet alam dunia, permintaan karet alam Indonesia dan ekspor karet alam Indonesia tahun sebelumnya. Persamaan ekspor karet alam Indonesia dirumuskan sebagai berikut:

$$XIRt = c_0 + c_1 ERIR_t + c_2 PPWR_t + c_3 DIR_t + c_4 XIAR_{t-1} + U_{3t} \ldots\ldots\ldots (3)$$

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah, $c_2 > 0$; $c_1, c_3 < 0$ dan $0 < c_4 < 1$.

Harga karet alam Indonesia dipengaruhi harga karet alam dunia, rasio penawaran dan permintaan karet alam Indonesia dan harga karet alam Indonesia peubah tahun sebelumnya. Persamaan harga karet alam Indonesia

tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$PIR_t = d_0 + d_1 PPWR_t + d_2 XIR_{t+} d_3 PIR_{t-1} + U_{4t}$ .....(4)
Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $d_{1,\ d2} > 0$ dan $0 < d_3 < 1$.

Penawaran karet alam Thailand dipengaruhi oleh penambahan harga karet alam Thailand, luas areal karet alam Thailand, penambahan luas areal kelapa sawit Indonesia dan penawaran karet alam Thailand tahun sebelumnya. Persamaan penawaran karet alam Thailand dirumuskan sebagai berikut:

$STR_t = e_0 + e_1 PPTR_t + e_2 ART_t + e_3 PAPT_t + e_4 STR_{t-1} + U_{6t}$ .....(5)
Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $e_1, e_2 > 0$; $e_3 <$ dan $0 < e_4 < 1$.

Permintaan karet alam Thailand dipengaruhi oleh variabel harga karet alam dunia, penambahan harga karet alam Thailand, kendaraan bermotor Thailand dan permintaan karet alam Thailand tahun sebelumnya. Persamaan permintaan karet alam Thailand dirumuskan sebagai berikut:

$DTR_t = fo + f_1 PWR_t + f_2 PPTR_t + f_3 VT_t + f_4 DTR_{t-1} + U_{7t}$ .....(6)
Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $f_{1,} f_2 < 0$; $f_3 > 0$ dan $0 < f_4 < 1$.

Ekspor karet alam Thailand dipengaruhi oleh variabel nilai tukar Bath terhadap US Dolar, harga karet alam Thailand, harga sintetis dunia, permintaan karet alam Thailand dan ekspor karet alam Thailand tahun sebelumnya. Persamaan ekspor karet alam Thailand dirumuskan sebagai berikut:

$XTRt = g_0 + g_1 ERTR_t + g_2 RPWSR_t + g_3 DTR + g_4 XTR_{t-1} + U_{8t}$ .....(7)
Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $g_{1,}\ g_3 < 0$; $g_2 > 0$ dan $0 < g_4 < 1$.

Harga karet alam Thailand dipengaruhi pertumbuhan harga karet alam dunia, penawaran karet alam Thailand, permintaan karet alam Thailand dan harga karet alam Thailand tahun sebelumnya. Persamaan harga karet alam Thailand dirumuskan sebagai berikut:

$PTR_t = h_0 + h_1 GPWR_t + h_2 STR_{t+} h_3 DTR_t + h_4 PTR_{t-1} + U_{21t}$ .....(8)

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $h_{1, h2,} h_3 > 0$ dan $0<h_4< 1$.

Penawaran karet alam Malaysia dipengaruhi oleh harga karet alam Malaysia, penambahan luas areal karet alam Malaysia, harga pupuk Malaysia dan penawaran karet alam Malaysia tahun sebelumnya. Persamaan penawaran karet alam Malaysia dirumuskan sebagai berikut:

$SMR_t = i_0 + i_1 GPMR_t + i_2 GARM_t + i_3 APM_t + i_4 SMR_{t-1} + U_{11t}$.....(9)

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $i_1,i_2>0$; $i_3<0$ dan $0<i_4<1$.

Permintaan karet alam Malaysia dipengaruhi oleh variabel penambahan harga karet alam Malaysia, rasio harga karet alam dunia dan harga karet sintetis dunia, pertumbuhan pendapatan perkapita Malaysia, pertumbuhan penduduk Malaysia dan permintaan karet alam Malaysia tahun sebelumnya. Persamaan permintaan karet alam Malaysia dirumuskan sebagai berikut:

$DMR_t = jo + j_1 RPMWR + j_2 DTR_{t-1} + U_{12t}$ .....(10)

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $j_1 > 0$; dan $0 < j_2 < 1$.

Ekspor karet alam Malaysia dipengaruhi oleh variabel penambahan nilai tukar Ringgit terhadap US Dolar, harga karet alam dunia, pertumbuhan harga karet sintetis dunia, permintaan karet alam Malaysia dan ekspor karet alam tahun sebelumnya. Persamaan ekspor karet alam Malaysia dirumuskan sebagai berikut:

$XMRt=k_0+k_1PERMR_t+k_2PWR_t+k_3GPSWR_t+k_4DMR_t+k_5XMR_{t-1}+U_{13t}$... (11)

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $k_2,k_3>0$; k1, $k_4<0$ dan $0<k_5<1$.

Harga karet alam Malaysia dipengaruhi harga karet alam dunia, penawaran karet alam Malaysia, permintaan karet alam Malaysia dan harga karet alam Malaysia tahun sebelumnya. Persamaan harga karet alam Malaysia dirumuskan sebagai berikut:

$PMR_t = l_0 + l_1 PWR_t + l_2 PXMR_t + l_3 PMR_{t-1} + U_{22t}$ .....(12)

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $l_2 < 0$; $l_1 > 0$ dan $0 < l_3 < 1$.

Impor karet alam Amerika Serikat dipengaruhi oleh variable penambahan harga karet alam dunia, pendapatan per kapita Amerika Serikat dan impor karet alam Amerika Serikat tahun sebelumnya. Persamaan impor karet alam Amerika Serikat dirumuskan sebagai berikut:

$MAR_t = m_0 + m_1 PPWR_t + m_2 GDPAR_t + m_3 MAR_{t-1} + U_{16}$ .....(13)

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $m_2>0$; $m_1<0$ dan $0<m_3<1$.

Impor karet alam Cina dipengaruhi oleh variable pertumbuhan nilai tukar Yuan terhadap US Dolar, harga karet alam dunia, kendaraan bermotor Cina dan impor karet alam Cina tahun sebelumnya. Persamaan impor karet alam Cina dirumuskan sebagai berikut:

$MCR_t = n_0 + n_1 ERCR_t + n_2 RPWSR_t + n_3 MCR_{t-1} + U_{17}$ .....(14)

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $n_{1,}$ $n_2 > 0$ dan $0 < n3 < 1$.

Impor karet alam Jepang dipengaruhi oleh variable nilai tukar Yen terhadap US Dolar, rasio harga karet alam dunia dan harga karet sintetis dunia, dan impor karet alam Jepang tahun sebelumnya. Persamaan impor karet alam Jepang dirumuskan sebagai berikut:

$MJR_t = o_0 + o_1 ERJR_t + o_2 PWR_t + o_3 GDPJR_t + o_4 MJR_{t-1} + U_{18}$ .....(15)

Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $o_2 < 0$; $o_1 < 0$ dan $0 < o_4 < 1$.

Harga karet alam dunia dipengaruhi rasio ekspor karet alam dunia dan impor karet alam dunia, pendapatan per kapita dunia dan harga karet alam dunia tahun sebelumnya. Persamaan harga karet alam dunia dirumuskan sebagai berikut:

$PWR_t = p_0 + p_1 RSDWR_t + p_2 GDPWR_t + p_3 PWR_{t-1} + U_{19t}$ ……..…(16)
Tanda parameter dugaan yang diharapkan adalah $p_{1,} p_2 > 0$ dan $0 < p_3 < 1$.

Tahapan kedua adalah identifikasi model. Wooldridge, Kennedy (2008) mengemukakan bahwa untuk dapat diduga paramaternya, suatu model persamaan simultan harus teridentifikasi. Rumus identifikasi model berdasarkan *order condition* sebagai berikut:

$(K-M) \geq G-1$ ……...……..(17)

dimana: K= total variabel dalam model yaitu *endogenous variables* dan *predetermine variables*; M = jumlah variabel endogen dan eksogen yang termasuk dalam satu persamaan tertentu dalam model; G= Total persamaan dalam model, yaitu jumlah variabel endogen dalam model. Jika (K-M) > (G-1), maka persamaan teridentifikasi berlebih (*overidentifikasi)*; jika (K-M) = (G-1), maka persamaan teridentifikasi berlebih (*exactly identified)*; Jika (K-M) < (G-1), maka persamaan tidak teriidentifikasi (*unidentified*). Dilihat dari persamaan ekspor karet alam Malaysia, K= 18, M = 5, G = 5, maka persamaannya teridentifikasi berlebih.

Berdasarkan hasil identifikasi model, seluruh persamaan struktural dalam model penawaran dan permintaan karet alam Indonesia di pasar dunia teridentifikasi berlebih (*overidentifikasi*), oleh karena itu metode estimasi yang sesuai digunakan adalah *Two Stage Least Square*. Untuk menguji apakah masing-masing peubah penjelas secara individual berpengaruh nyata atau tidak terhadap peubah endogen pada masing-masing persamaan digunakan uji statistik t dengan taraf nyata yang digunakan sampai pada batas toleransi 20 persen.

Tahapan selanjutnya adalah menghitung nilai elastisitas. Nilai elastisitas digunakan untuk mendapatkan nilai kuantitatif dari respon suatu fungsi

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendugaan model yang diperoleh, maka dihitung elastisitas peubah-peubah yang memiliki nilai dugaan yang berbeda nyata sama dengan nol pada taraf sampai dengan 20 persen. Hal ini untuk melihat apakah peubah-peubah yang mempengaruhi pada model berpengaruh secara positif atau negatif dan apakah peubah-peubah yang mempengaruhi pada model bersifat responsif atau tidak terhadap peubah yang dipengaruhinya. Jika nilai elastisitas yang diperoleh besar dari satu maka peubah yang dipengaruhi bersifat responsif terhadap perubahan peubah yang mempengaruhinya, tetapi jika nilai elastisitas yang diperoleh kecil dari satu maka peubah yang dipengaruhi bersifat tidak responsif terhadap perubahan peubah yang mempengaruhinya, untuk menghitung nilai elastisitas dapat dirumuskan sebagai berikut (Pindyck, Hayashi, Stock 2012):

$$E_{SR} = \frac{\partial Y_t}{\partial X_t} * \frac{\bar{X}}{\bar{Y}} = b\,\frac{\bar{X}}{\bar{Y}} \quad \text{.....(18)}$$

$$E_{LR} = \frac{E_{SR}}{1-b_{lag}} \quad \text{.....(19)}$$

dimana : E_{SR} = elastisitas jangka pendek peubah endogen Yt terhadap peubah penjelas Xt; E_{LR} = elastisitas jangka panjang peubah endogen Yt terhadap peubah penjelas Xt; a= koefisien dugaan dari peubah eksogen; b = koefisien dugaan dari peubah lag; Xt = nilai rata-rata peubah eksogen; Yt= nilai rata-rata peubah endogen.

Hasil pendugaan model penawaran dan permintaan karet alam Indonesia di pasar internasional pada penelitian ini cukup baik sebagaimana terlihat dari koefisien determinasi (R^2) dari setiap model persamaan. Nilai koefisien determinasi pada model penawaran dan permintaan karet alam Indonesia di pasar internasional berkisar antara 0,43 sampai 0,98 dengan nilai statistik uji F berkisar antara 7,62 sampai 370,18 dan berbeda nyata dengan nol pada taraf 1 persen. Secara umum peubah-peubah eksogen yang dimasukkan pada setiap persamaan model penawaran dan permintaan karet alam Indonesia mampu menjelaskan dengan baik peubah endogennya.

Besaran nilai statistik R^2 pada persamaan penawaran karet alam Indonesia adalah 0,9807 artinya 98,07 persen peubah harga karet alam Indonesia, pertumbuhan luas lahan karet alam Indonesia, penambahan kelapa

sawit Indonesia dan penawaran karet alam Indonesia tahun sebelumnya menjelaskan variasi peubah penawaran karet alam Indonesia sedangkan 1,93 persen sisanya dijelaskan oleh peubah lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Variasi ini signifikan pada taraf nyata 1 persen yang dilihat dari F hitung sebesar 370,18 dan probabilitas kecil 0,0001.

Hasil pendugaan model yang meliputi empat persamaan struktural yang dibangun dapat dilihat Lampiran 1. Hasil pendugaan persamaan penawaran karet alam Indonesia menunjukkan bahwa harga karet alam Indonesia berpengaruh positif terhadap penawaran karet alam Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa apabila harga karet alam Indonesia meningkat maka penawaran karet alam Indonesia cenderung meningkat. Perhitungan elastisitas harga karet alam Indonesia terhadap penawaran karet alam Indonesia tidak responsif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan nilai masing-masing 0,0885 dan 0,3613. Nilai elastisitas tersebut memiliki arti apabila harga karet alam Indonesia meningkat sebesar 1 persen maka produksi karet alam Indonesia meningkat sebesar 0,91 persen dalam jangka pendek dan meningkat sebesar 0,7363 persen dalam jangka panjang.

Hasil dugaan persamaan permintaan karet alam Indonesia berhubungan negatif dengan penambahan harga karet alam Indonesia dengan berbeda nyata pada taraf 10 persen. Permintaan karet alam Indonesia tidak responsif terhadap penambahan harga karet alam Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan nilai masing-masing 0,0895 dan 0,1782. Nilai elastisitas tersebut memiliki arti penambahan harga karet alam Indonesia meningkat 1 persen maka permintaan karet alam Indonesia sebesar 0,0895 persen dalam jangka pendek dan meningkat 0,1782 persen dalam jangka panjang.

Penawaraan karet alam Thailand berhubungan negatif dan tidak responsif terhadap penambahan luas lahan kelapa sawit Thailand sedangkan hasil dugaan permintaan karet alam Thailand berhubungan positif dan tidak responsif dengan jumlah kendaraan Thailand. Hasil dugaan ekspor karet alam Thailand berhubungan negatif dengan harga karet alam Thailand dan berhubungan positif dengan harga sintetis dunia dan harga karet alam dunia.

Hasil dugaan penawaran karet alam Malaysia berhubungan positif dan tidak responsif terhadap penambahan luas lahan karet alam Malaysia

sedangkan harga pupuk Malaysia berhubungan negatif dan tidak responsif terhadap penawaran karet alam Malaysia. Hasil permintaan karet alam Malaysia berhubungan positif dengan rasio harga karet alam dunia dan harga karet sintetis dunia, dalam jangka panjang responsif. Pertumbuhan jumlah penduduk Malaysia berhubungan positif dan responsif terhadap permintaan karet alam Malaysia. Hasil dugaan ekspor karet alam Malaysia berhubungan negatif terhadap permintaan karet alam Malaysia

Hasil dugaan impor karet alam Amerika Serikat berhubungan positif dan responsif terhadap kendaraan bermotor Amerika dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dugaan impor karet alam Cina berhubungan negatif dan responsif dalam jangka panjang terhadap harga karet alam dunia tetapi berhubungan positif dengan kendaraan bermotor Cina dan responsif dalam jangka panjang. Hasil dugaan impor Jepang tidak responsif terhadap nilai tukar Yen terhadap US Dolar maupun rasio harga karet alam dunia dan harga karet sintetis dunia.

Hasil dugaan persamaan harga karet alam dunia berhubungan positif dan responsif dalam jangka panjang terhadap rasio ekspor karet alam dunia dan impor karet alam dunia serta pendapatan perkapita dunia. Hasil dugaan persamaan harga karet alam Indonesia berhubungan positif dengan harga karet alam Indonesia dan responsif dalam jangka panjang. Hasil dugaan persamaan harga karet alam Thailand berhubungan positif dan tidak responsif terhadap pertumbuhan harga karet alam dunia sedangkan hasil dugaan harga karet alam Malaysia berhubungan positif dan responsif dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap harga karet alam dunia sedangkan penawaran karet alam Indonesia berhubungan negatif dan tidak responsif dalam jangka pendek maupun jangka panajang.

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi penawaran dan permintaan karet alam Indonesia di pasar internasional adalah harga karet alam Indonesia, penambahan luas lahan kelapa sawit Indonesia, kendaraan bermotor Thailand, rasio harga karet alam dunia terhadap harga karet sintetis dunia, penambahan ekspor karet alam Thailand, harga karet alam Malaysia, permintaan domestik karet alam Malaysia, pendapatan per kapita Amerika Serikat dan Jepang, nilai tukar Yuan terhadap US Dolar, nilai tukar Yen terhadap US Dolar,

pendapatan perkapita dunia. Faktor yang paling besar pengaruh terhadap penawaran dan permintaan karet alam Indonesia di pasar internasional adalah harga karet alam dunia.

Dalam rangka pengembangan karet alam di Indonesia perlu menerapkan kebijakan peningkatan harga. Indonesia harus berupaya meningkatkan kualitas produksi karet alam dan pengembangan industri hilir. Perlu adanya kebijakan pemerintah terkait nilai tukar rupiah terhadap US Dolar yang stabil. Adanya upaya untuk mendirikan industri hilir karet alam Indonesia untuk meningkatkan daya saing dalam negeri.

C. Prospek dan Potensi Pengembangan Karet Alam

1. Perkembangan Komoditi Karet Alam di Riau

Komoditas karet merupakan salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia. Demikian juga halnya di Provinsi Riau, pengusahaan komoditas karet merupakan salah satu matapencaharian pokok andalan masyarakat. Secara umum, komoditas ini berkontribusi penting sebagai sumber devisa negara, bahan baku industri, dan pendapatan masyarakat.

Sampai saat ini, komoditas karet masih merupakan salah satu komoditas yang potensial untuk terus dikembangkan. Namun demikian dalam perkembangannya dihadapkan pada tiga permasalahan utama, yaitu: *Pertama*, produktivitas karet yang rendah dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan tanaman karet unggul yang dikembangkan melalui berbagai proyek pemerintah di Provinsi Riau sudah memasuki usia tua atau tidak produktif lagi. Disisi lain peremajaan yang dilakukan petani secara mandiri pada umumnya menggunakan bibit tidak unggul. *Kedua*, harga karet yang relatif rendah dan berfluktuasi. Harga karet yang berfluktuasi dan cenderung rendah menyebabkan motivasi petani untuk secara konsisten menekuni usahatani karet cenderung melemah. Struktur pasar karet yang cenderung oligopsoni, menyebabkan petani karet senantiasa berada pada *bargaining position* yang lemah. *Ketiga*, alih fungsi lahan karet ke kelapa sawit terjadi cukup massif baik pada lahan karet milik petani maupun perusahaan besar. Ketiga kondisi tersebut menyebabkan produksi karet di Provinsi Riau terus menurun.

Jika diamati perkembangan luas lahan komoditas karet selama periode 2005-2013 terjadi pertumbuhan yang cukup pesat. Yakni di Propinsi Riau perkembangan luas lahan kebun karet terlihat dari pertumbuhan sebesar 20,62% pertahun. Perkembangan ini terjadi di beberapa daerah kabupaten terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dibeberapa daerah antara lain Kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Bengkalis, Rokan Hilir dan Siak justru mengalami penurunan (Dinas Perkebunan Propinsi Riau Tahun 2014). Hal tersebut disebabkan terjadinya alih fungsi lahan dari kebun karet ke kebun kelapa sawit. Walaupun terjadi perluasan perkebunan karet di Riau, namun dari sisi produksi mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan masih banyaknya tanaman yang belum menghasilkan.

Dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi perkebunan karet di Provinsi Riau sebagai sumber devisa dan peningkatan kesejahteraan rakyat maka berbagai upaya dari aspek sistem produksi perlu dilakukan. Di Provinsi Riau, ada dua pola pengembangan sistem produksi karet alam, yaitu: pola peremajaan, dan pola perluasan tanaman. Peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman karet yang sudah tidak produktif (tua/rusak) dengan tanaman karet baru secara keseluruhan dan menerapkan inovasi teknologi. Sementara itu, pola perluasan yang dimaksudkan adalah upaya pengembangan areal tanaman perkebunan karet pada wilayah bukaan baru atau pengukuhan areal di sekitar perkebunan yang sudah ada dengan menggunakan inovasi teknologi.

Berdasarkan pengamatan lapangan, perkebunan karet di Riau masih di kelola secara tradisional. Pengelolaannya dilakukan secara sederhana. Setelah bibit karet ditanam kemudian dibiarkan begitu saja tanpa perawatan yang memadai, sehingga tingkat produktivitasnya rendah, yaitu hanya sekitar 738 kg/ha/tahun. Kurangnya perawatan menyebabkan kualitas hasil bahan olah karet (Bokar) juga tergolong rendah. Budaya bokar kotor masih mendominasi perilaku petani karet dalam memproduksi bokar.

Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya mutu bokar petani, antara lain: 1) jumlah produksi yang rendah karena lahan sempit; 2) bibit karet tidak unggul; 3) pemeliharaan kebun yang asal-asalan; dan 4) teknik penyadapan yang tidak tepat. Faktor lain yang ikut mempengaruhi buruknya

mutu bokar adalah panjangnya rantai pemasaran dari petani karet hingga pabrik pengolahan. Konsekuensinya petani karet cenderung memperberat timbang bokarnya dengan cara memasukkan bahan pengotor kedalam bokarnya seperti kayu, dedaunan, tanah dan bahan pemberat lainnya dengan harapan petani memperoleh hasil penimbangan yang lebih, sekalipun harganya rendah. Di sisi lain tingkat pengetahuan petani karet yang rendah tentang teknik penyadapan yang benar, penggunaan bahan penggumpal atau pembeku yang sesuai serta penanganan pasca panen bokar ikut mempengaruhi rendahnyanya mutu bokar yang dihasilkan petani karet (Bakce, 2014)

Rendahnya posisi tawar (*bargaining position*) petani karet dengan pedagang ikut membantu rendahnya harga karet yang diterima oleh petani. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh lemahnya kelembagaan petani karet. Bukti empiris dari lemahnya kelembagaan petani tersebut dapat dilihat masih sedikitnya petani karet yang tergabung dalam kelompok tani atau kelompok usaha bersama (KUB). Jumlah petani karet pada tahun 2011 sebanyak 244.317 KK mengalami peningkatan sebesar 0,06% pada tahun 2013 menjadi 245.460 KK. Kondisi tersebut lebih disebabkan sebagian masyarakat tertarik mengembangkan komoditas kelapa sawit. Bahkan di daerah yang tingkat kemiringan lahan di atas 15% masyarakat tetap mengusahan tanaman kelapa sawit.

Perkebunan karet masih dikelola secara tradisional dengan tingkat keahlian yang masih bersifat turun temurun. Belum memanfaatkan teknologi dan bibit unggul, akibatnya produktivitas lahan jadi rendah. Berdasarkan pengamatan di lapangan terkait dengan kelembagaan petani karet di pedesaan, belum ada satu kelompokpun yang sudah teregistrasi sebagai Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Kementerian Pertanian No. 38 Tahun 2008. Pembentukan UPPB oleh petani karet memberikan peluang kepada petani karet untuk memasarkan bokar secara langsung ke pabrik pengolahan karet (industri crumb rubber) tanpa melalui pedagang pengunmpul, sehingga petani dapat menikmati harga karet minimal 75% dari harga penjualan karet di atas pelabuhan ekspor atau *Free on Board* (FOB).

Sebagai konsekuensi dari belum terbentuknya kelompok tani atau UPPB, maka petani karet terpaksa berjuang secara sendiri-sendiri dalam memasarkan bokarnya, sehingga mau tak mau harus berhubungan dengan pedagang pengumpul yang lazim dikenal dengan sebutan tauke. Hubungan jual beli bokar antara petani karet dengan pedagang pengumpul, tidak hanya sebatas hubungan ekonomi semata, melainkan membentuk hubungan sosial budaya yang menjelma menjadi hubungan patronase (*patron klien*) antara pedagang pengumpul sebagai patron dan petani karet sebagai klien. Kelembagaan patronase tersebut pada dasarnya merupakan hubungan eksploitatif antara pedagang dengan petani karet, tetapi petani karet tidak punya pilihan lain akibatnya taraf hidup petani karet cenderung menurun apalagi dengan harga karet alam yang makin merosot.

Permentan No. 38 tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (bokar) yang telah diberlakukan sejak tujuh tahun lalu belum diberlakukan sepenuhnya. Seharusnya menjadi pedoman dalam membangun kelembagaan petani karet. Belum berlakunya Perment an tersebut menyebabkan petani karet tidak mempunyai kekuatan tawar menawar di level pedesaan. Usahatani karet belum mampu melahirkan kelembagaan petani karet yang dapat mensejahterakan petani karet. Kenyataan ini membuktikan bahwa kelembagaan pedagang karet baik berbentuk pelaku usaha maupun pedagang informal belum tertata dengan baik. Hal tersebut tentunya menyulitkan dalam melakukan pembinaan terhadap pedagang karet tersebut.

2. Potensi Pengembangan Industri Karet

Perkembangan usahatani karet alam di Riau tidak sepesat perkembangan komoditi kelapa sawit. Luas lahan 484.551 ha menghasilkan 337.185 ton per tahun dengan jumlah petani sebanyak 245.460 KK. Produksi karet tersebut didukung oleh 9 buah pabrik pengolah yang tersebar di beberapa kabupaten dengan kapasitas olah 265.000 ton per tahun (Gapkindo, 2016). Jika dibandingkan dengan kemampuan produksi dari sisi petani terdapat kesenjangan, yakni produksi petani mencapai 337.185 ton per tahun, sedangkan kapasitas olah pabrik yang ada hanya 265.000 to per tahun.

Terjadinya kelebihan produksi dari sisi petani dibandingkan dengan kemampuan olah pabrik (industri) karet terpasang di Daerah Riau merupakan salah satu faktor penyebab berfluktuasinya harga karet di tingkat peatni. Pada tingkat petani terjadi kelebihan penawaran bokar yang dapat menyebabkan turannya harga dari sisi permintaan. Untuk itu diperlukan analisis daya dukung wilayah (DDW) dalam penyediaan bahan baku industri karet. Hasil perhitungan perkembangan DDW disajikan pada Tabel 12.12.

Tabel 12.12. Indikator dan Proyeksi Kekurangan Industri Karet Alam di Riau

Indikator	Kuantitas
Luas Areal (ha), tahun 2016	484.551,00
Produksi (ton), tahun 2016	337.185,00
Industri pengolah sudah ada (unit)	9
Kapasitas terpasang (ton/tahun)	265.000
Kemampuan mesin (ton/tahun)	232.000
Kelebihan bahan baku (ton/tahun)	105.185,00
Daya dukung wilayah (DDW)	1,45
Kekurangan Industri (20.000 ton/tahun)	5

Sumber: Data olahan dari Gapkindo Riau, 2016

Hasil perhitungan DDW diketahui indeknya 1,45. Artinya kemampuan wilayah menyediakan bahan baku industri lebih besar dari 1. Bahan baku yang tersedia melebihi kapasitas olah industri. Dari sisi bahan baku besarnya DDW tidak ada masalah, karena komoditi karet bukan bahan yang cepat rusak, berbeda dengan kelapa sawit harus diolah sebelum 8 jam setelah panen. Namun untuk komoditi karet besarnya DDW memberikan informasi kelebihan penawaran dari sisi petani. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap penekakan harga dari sisi permintaan (industri). Guna meningkatkan harga dari sisi petani, maka perlu ditambah industri pengolah, sehingga kekuatan tawar petani di pedesaan bisa meningkat.

Rendahnya harga karet di tingkat petani menyebabkan rendahnya pendapatan petani itu sendiri. Tentu saja akan berdampak terhadap jumlah uang beredar di pedesaan dan melemahkan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap aktivitas ekonomi di pedesaan. Hasil

analisis *multiplier effect* ekonomi di daerah pengembangan karet pada tahun 2014 menunjukkan sebesar 0,65. Setiap investasi Rp1 di pedesaan akan menimbulkan jumlah uang beredar pada periode berikut hanya Rp 0,65. Pada hal pada tahun 2010 indek *multiplier effect* ekonomi di daerah sentra produksi karet 1,83. Menurunnya indek *multiplier effect* ekonomi memberikan gambaran bahwa usahatani karet menunjukkan perlambatan dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut lebih disebabkan masyarakat pedesaan mulai bergeser usahataninya kekomoditi lain yakni kelapa sawit. Pada tahun yang sama indek *multiplier effect* ekonomi di daerah pengembangan kelapa sawit mencapai 3,43 yang berarti setiap investasi Rp1 akan menyebabkan jumlah uang beredar pada periode berikutnya sebesar Rp 3.43. Di daerah pengembangan kelapa sawit petaninya lebih sejahtera karena meningkatnya jumlah uang beredar di pedesaan. Sementara di daerah pengembangan karet jumlah uang beredar relatih sedikit.

Hasil analisis DDW dan potensi pengembangan industri karet alam, maka indek *multiplier effect* ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan industri karet. Pembangunan tersebut akan berdampak terhadap peningkatan daya saing petani karet. Dari sisi lain diperlukan penyuluhan kepada masyarakat pedesaan, bahwa tanaman karet perlu dipertahankan terutama untuk daerah yang kemiringan lahannya di atas 15%. Jika terjadi alih fungsi lahan dari kebun karet ke kelapa sawit terutama di daerah Riau bagian barat (tingkat kemiringan diatas 15%) akan berdampak terhadap bahaya erosi di bagian hulu.

D. Pola Pengembangan Industri Karet Alam di Perdesaan

Perkembangan karet alam masih mempunyai harapan untuk tetap bertahan di pasar Internasional. Industri pabrik ban mobil tidak selamanya memihak pada karet sintetis, karena sebagian sifat karet alam tidak dimiliki oleh karet sintetis. Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan semakin banyaknya industri ban radial yang harus memakai karet alam sebagai bahan bakunya. Sejak dekade 1980 hingga saat ini permasalahan karet Indonesia adalah rendahnya produktivitas dan kualitas karet yang dihasilkan, khususnya karet rakyat. Sebagai gambaran produksi karet rakyat hanya 600-650 kg KK/ha/tahun. Walaupun demikian , peranan Indonesia sebagai produsen

karet alam dunia masih dapat diraih kembali dengan memperbaiki teknik budidaya dan pasca panen/pengolahan, sehingga produktivitas dan mutu hasil akan dapat ditingkatkan secara optimal.

Perkembangan cara penyajian karet alam ternyata sangat menarik. Timbulnya industri karet dengan spesifikasi teknis merupakan perkembangan yang sangat positif sebagai jawaban yang sangat nyata. Demikian pula adanya cara pengepakan yang baik akan membuka era baru penyajian karet alam. Kondisi kemajuan seperti ini menyebabkan para konsumen mulai berpaling lagi ke karet alam.

Selain hal tersebut di atas, kemajuan lain yang terjadi pada industri karet alam di antaranya: 1) Pembuatan karet secara kimia yang menghasilkan karet tahan minyak pelumas; 2) Penemuan karet termo-plastik yang berasal dari campuran karet alam dan polipropilen; 3) Perluasan penggunaan karet alam untuk pembuatan barang bukan ban; 4) Penemuan teknik pencangkokan dari lateks; 5) Perbaikan teknik eksploitasi seperti penggunaan stimulan dan penyempurnaan alat sadap.

Melalui inovasi teknologi tersebut secara sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin usaha ini akan memberikan dampak pada kenaikan harga jual dan menurunkan biaya produksi. Oleh karena terdapat kecenderungan konsumen akan kembali pada karet alam maka diperkirakan akan terjadi kekurangan penawaran karet alam. Jika berpijak pada asumsi ini maka dapat disimpulkan masa depan karet alam memiliki prospek yang cukup baik.

Masa lalu tanaman karet lebih dikenal sebagai penghasil lateks. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, kayu karet pun sudah mulai dimanfaatkan. Kayu karet yang sudah berumur 20—30 tahun dapat ditebang kemudian dimanfaatkan dalam pembuatan *rubber smoked sheet. (RSS).* Alur pembuatan RSS sebagai berikut: 1) lateks dimasukkan ke tangki penampungan dan dicampur dengan asam formic; 2) kemudian lembaran karet dikeringkan di ruang asap dengan suhu sekitar 120- 140 derajat selsius; dan 3) Kayu karet yang sudah tua dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengasapan tersebut.

Ditinjau dari sifat alaminya, kayu karet ini dapat dijadikan sebagai barang substitusi dengan kayu rami, agathis, meranti putih, dan pinus sebagai bahan baku kayu olahan. Berdasarkan asas manfaat dan kegunaan kayu karet,

maka prospek tanaman karet sebagai penghasil kayu pada masa mendatang cukup baik. Peluang pengembangan industri karet alam dan industri turunnannya dapat dilihat pada Gambar 12.3.

Selanjutnya bibit atau klon unggul dipilih yang benar-benar menghasilkan kayu berkualitas dan berproduktivitas tinggi. Sedikitnya ada lima kriteria yang harus dipenuhi oleh klon unggul, baik dalam bentuk benih, kayu okulasi, stum mata tidur, maupun bibit dalam polybag. Kriteria tersebut adalah: 1) Mempunyai pertumbuhan awal yang cepat sehingga mampu berkompetisi dengan gulma dan tanaman lain; 2)Mampu beradaptasi dengan keadaan lahan terutama padang alang-alang dan lahan gundul; 3) Mempunyai pertumbuhan batang yang besar, lurus, dan mutu kayu baik; 4) Mampu memproduksi lateks yang tinggi; dan 5) Tidak sensitif terhadap penyadapan dan perubahan lingkungan fisik atau biologis.

Produksi puncak dicapai pada umur tahun sadap antara 8 - 9 tahun. Setelah itu produksi lateks menunjukkan kecenderungan menurun. Bila di rata-rata produksi karet kering pada lima tahun pertama antara 1.200 - 1.500 kg per hektar per tahun. Produksi karet kering rata-rata pada umur 10 tahun antara 1.600 - 1.800 kg per hektar per tahun.

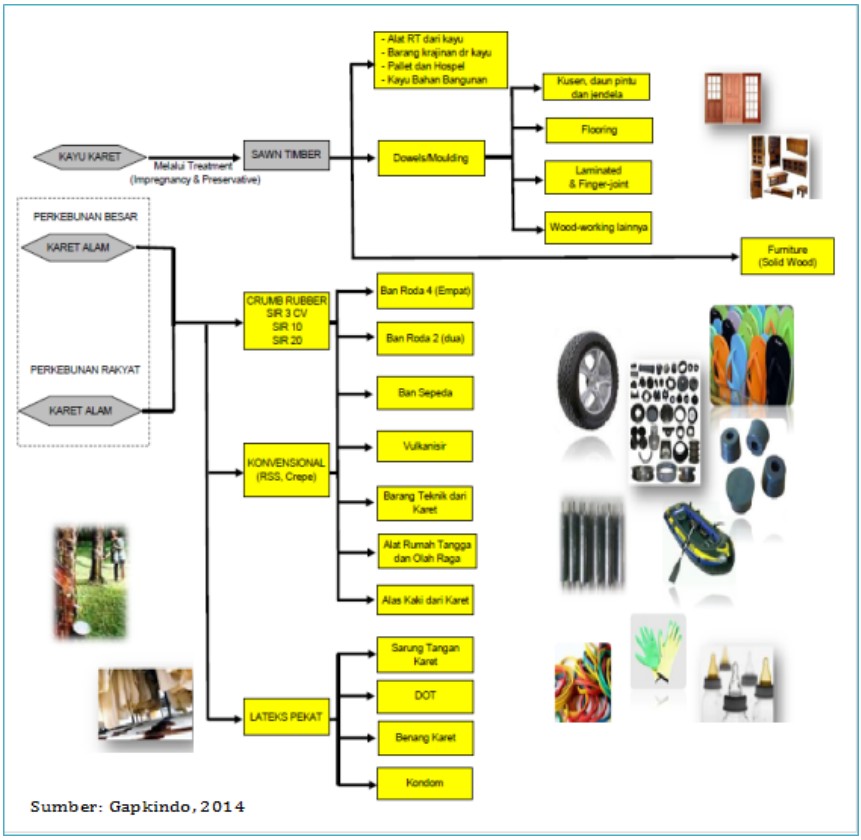

Gambar 12.3. Pohon Industri Karat Alam

Dalam kebijakan pengembangan tanaman karet ditetapkan empat pola pengembangan yang dikenal dengan program Hutan Tanaman Industri (HTI), yaitu pola PIR, pola UPP, pola swadaya, dan pola perkebunan besar. Menerapkan keempat pola ini diharapkan produktivitas karet, khususnya perkebunan karet rakyat yang masih berada pada tingkat yang rendah, dapat ditingkatkan. Pengembanganditentukan banyakketersediaan bahan tanam,tenaga pembina dan dukungan perbankan.

Menurut Hardjoamidjojo (2002), melalui analisis prospektif ada beberapa tahap kegiatan yang harus dilakukan, yaitu : 1) Menentukan faktor-faktor kunci untuk masa depan sistem yang dikaji; 2) Menentukan tujuan strategis

dan kepentingan pelaku utama; 3) Mendefinisikan/mendeskripsikan hasil evaluasi kemungkinan masa depan; 4) Menentukan nilai faktor yang mempengaruhi.

Kebutuhan karet alam terus meningkat sejalan dengan meningkatnya standar hidup manusia dan mobilitas manusia serta barang yang memerlukan komponen yang terbuat dari karet seperti ban kendraan, *conveyor belt*, sabuk transmisi, sepatu dan sandal karet. Secara fundamental harga karet alam dipengaruhi oleh permintaan (konsumsi) dan penawaran (produksi) serta stock/cadangan dan masing- masing faktor. Menurut *International Rubber Study Group* (IRSG) diperkirakan akan terjadi kekurangan pasokan karet alam pada priode dua dekade ke depan. Kondisi ini akan mempengaruhi pihak konsumen, terutama pabrik-pabrik ban mobil seperti Bridgestone, Goodyear dan Michelin.

Asosiasi negara-negara produsen karet alam atau the Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) telah merevisi perkiraan pasokan karet alam dunia tahun 2016 dan memperkirakan harga kemungkinan tidak akan mengalami kenaikan untuk beberapa waktu kedepan. ANRPC membuat laporan itu berdasarkan produksi bulanan di sejumlah negara produsen utama dalam lima bulan terakhir hingga Mai 2016. Revisi prediksi itu menyatakan bahwa total pasokan kemungkinan tumbuh lebih lambat pada tingkat 0,3% selama 2016 ketimbang 0,8% pada tahun 2015 dan 5% pada tahun 2014. Asosiasi yang negara-negara anggotanya memproduksi 90% dari total pasokan karet alam dunia itu menyebutkan pasokan karet alam tahun 2016 kemungkinan mencapai 11,075 juta ton, sedikit lebih tinggi dari 11,042 juta ton pada tahun sebelumnya. Sebelumnya, pada bulan Mei 2015 ANRPC memprediksikan pasokan karet alam dunia tahun 2016 akan menyentuh 11,166 juta ton, 1,1% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Perkiraan produksi yang lebih rendah itu didasarkan pada realisasi produksi karet alam di negara-negara anggota yang sampai akhir Mei 2016 mencapai 4,080 juta ton, hanya 0,3% lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya. Walaupun ada sentiment negatif yang muncul dari kemungkinan lemahnya permintaan, namun diperkirakan hal itu mampu diredam dengan pertumbuhan pasokan yang nyaris 0%, prospek minyak bumi yang tidak menentu, dan melemahnya nilai mata uang negara-negara eksportir karet

alam utama. Kondisi tersebut mengakibatkan sentiment negatif itu terus tertekan. "Kesimpulannya, harga karet alam akan kekurangan sentiment pendukung yang solid dari faktor fundamental permintaan-pasokan ataupun faktor non fundamental setidaknya dalam kurun waktu kedepan. Selain itu tren yang menggembirakan di tengah semua ketidakpastian itu diantaranya adalah terjadinya peningkatan konsumsi domestik di negara- negara eksportir karet utama dunia. Thailand adalah negara penghasil karet terbesar di dunia dengan pangsa produksi 36% dari produksi dunia, sedangkan Indonesia dengan 26% pangsa produksi menjadi negara produsen terbesar kedua. India saat ini berada di urutan keenam produsen karet alam dunia setelah Vietnam, China dan Malaysia.

Oleh karena itu pada tahun 2004, IRSG melakukan studi tentang permintaan dan penawaran karet alam dan sintetik dunia. Hasil studi menyatakan bahwa permintaan karet alam dan sintetik adalah sebesar 31,3 juta ton pada tahun 2035 untuk industri ban dan non ban dimana 15 juta diantaranya adalah karet alam. Produksi karet alam pada tahun 2005 sebesar 8,5 juta ton . Berdasarkan studi ini diproyeksikan pertumbuhan produksi karet Indonesia akan mencapai 3 % pertahun, sedangkan Thailand hanya 1 % dan Malaysia 2% (IRSG, 2004). Pertumbuhan produksi Indonesia ini dapat dicapai melalui peremajaan atau penanaman baru karet yang cukup luas dengan perkiraan produksi pada tahun 2020 sebesar 3,5 juta ton dan tahun 2035 sebesar 5,1 juta ton (Anwar Chairil, 2006).

Penawaran karet dunia meningkat lebih dari tiga persen per tahun dalam dua dekade terakhir, dimana mencapai 8,81 juta ton pada tahun 2005 (Chairil Anwar, 2006). Pertumbuhan tersebut berasal dari negara produsen Thailand, Indonesia, Malaysia, India, China dan lainnya. Sejak tahun 1991 Malaysia tidak lagi menjadi produsen utama karet alam dunia tetapi digeser oleh Thailand, sementara Indonesia tetap sebagai negara produsen kedua. Thailand memproduksi lebih dari 33% karet alam dunia pada tahun 2005. ementara Indonesia dengan pangsa produksi 26% dan Malaysia tinggal 13%. Menurut Susila, W,R (2010) proyeksi yang berkaitan dengan karet alam Indonesia dibagi menjadi tiga skenario yaitu skenario optimis (SO), skenario pasimis (SP dan skenario moderat (SM) dengan pertumbuhan produksi untuk SO,SP dan SM adalah masing-masing 3,5 % , 2,0% dan 2,2 % per tahun.

Secara teoritis menunjukkan bahwa ketidakseimbangan *(imbalance*) penawaran dan permintaan akan bereaksi terhadap harga. Dimana kenaikan harga terjadi karena defisit penawaran dan turunnya harga karena surplus penawaran. Berdasarkan data IRSG (2004), ketidakseimbangan penawaran dan permintaan karet alam mulai terlihat sejak tahun 1990 an dan berpengaruh terhadap cadangan (stock) karet alam dunia.

Target pengembangan karet harus didukung dengan berbagai factor, antara lain: 1) Seluruh sentra produksi mempunyai komitmen untuk pengembangan karet pada wilayahnya masing-masing; 2) Penyediaan benih/ bibit karet sesuai permintaan setiap wilayah pengembangan; 3) Petugas penyuluh perkebunan yang menangani karet; 3) Sumber daya manusia dan sarana petani untuk pemelihaaraan kebun dan penanganan pasca panen; 4) Dukungan perbankan berupa dana untuk pemeliharan dan pengelolaan kebun.

Pengembangan perkebunan karet dilakukan secara tradisional dan masih memegang kuat ketentuan-ketentuan adat khususnya terkait dengan konservasi sumberdaya alam. Hal ini mereka lakukan karena mereka hidup di lingkungan alam pegunungan dengan kemiringan yang cukup tajam dan membutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi bencana. Karena itu penentuan lokasi kebun karet dan cara pengelolaan oleh petani dilakukan dengan sangat hati-hati, sehingga pengembangan perkebunan karet dapat dikatakan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan yang berarti. Lebih lanjut, pengembangan perkebunan karet di Indonesia hampir seluruhnya diusahakan oleh petani (PR) seluas 2.935.081 ha (84,75 %), kemudian perkebunan besar nasional seluas 239.132 ha(6,97 %), dan 275.931 ha (8,28 %) yang dikelola oleh perkebunan besar swasta (Statistik Perkebunan, Karet 2015), sehingga permasalahan sosial khususnya yang terkait dengan lahan tidak pernah terjadi. Kehadiran tanaman karet sebagai tanaman perkebunan telah memberikan manfaat sosial yang positif khususnya dalam menyediakan kesempatan kerja dan berusaha. Oleh karena itu biaya dan manfaat lingkungan maupun biaya dan manfaat sosial dalam pengembangan perkebunan karet bernilai positif.

Berdasarkan analisis di atas, dapat dikatakan bahwa kebutuhan karet alam walaupun agak melambat tapi pasti masih tetap dibutuhkan dalam pengembangan industri karet. Di Provinsi Riau terdapat 6 perusahaan industry

karet dengan total produksi crumb rubber pada tahun 2015 mencapai 165,962,046 kg seperti terlihat pada Tabel 12.13.

Tabel 12.13. Jumlah Produksi Crumb Rubber Provinsi Riau Tahun 2015 (dalam kg SIR)

No	Bulan	Jumlah Produksi (kg)
1	Januari	11,806,105
2	Februari	11,951,815
3	Maret	15,008,775
4	April	14,871,534
5	Mai	14,518,735
6	Juni	15,478,625
7	Juli	13,298,810
8	Agustus	14,762,125
9	September	14,272,200
10	Oktober	14,080,080
11	November	13,079,330
12	Desember	12,833,912
	Jumlah	165,962,046

Sumber: Gapkindo Riau, 2016

Tabel 12.13 memperlihatkan bahwa produksi industry crumb rubber Riau tahun 2015 memperlihatkan kecenderungan penurunan secara fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain, harga karet yang cenderung turun sehingga tidak menarik minat petani karet untuk menyadap kebunnya sehingga industry karet mengalami kelangkaan bahan baku. Selain itu banyaknya alih fungsi lahan kebun karet menjadi kebun kelapa sawit juga mempengaruhi menurunnya pasokan bahan baku ke industry karet yang pada akhirnya menyebabkan produksi crumb rubber makin turun. Dilihat dari sisi ini pengembangan industry karet alam sangat ditentukan oleh pasokan bahan baku karet. Pasokan bahan baku sangat dipengaruhi oleh musim, produktivitas tanaman, dan kinerja petani karet. Dengan demikian pengembangan industry karet sangat berkaitan erat dengan upaya peningkatan produktivitas tanaman karet dan peningkatan kinerja petani karet. Peningkatan kinerja petani karet dipengaruhi oleh harga karet. Semakin rendah harga karet ditingkat petani, maka makin banyak petani karet yang

meninggalkan kebunnya dan beralih profesi ke mata pencaharian lain. Oleh karena itu perlu ada strategi untuk meningkatkan harga karet ditingkat petani sehingga memotivasi petani untuk meningkatkan produksi sadapannya.

Untuk meningkatkan harga karet ditingkat petani dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: 1) Membentuk unit pengolah dan pemasaran bokar (UPPB) di tingkat desa yang berbasis kelompok petani yang dapat menjual bahan baku karet langsung ke pabrik karet, sehingga rantai pemasaran karet melalui pedagang pengumpul (tauke) dapat dikurangi; 2) Mengembangkan pasar lelang karet di tingkat desa; 3) Dalam jangka panjang melakukan peremajaan karet yang tidak produktif dengan tanaman karet unggul agar di masa yang akan datang produktivitas petani makin meningkat; 4) Perlu ada upaya meningkatkan pemasaran crumb rubber dalam negeri dengan melaksanakan hilirisasi industry karet, sehingga ketergantungan pemasaran crumb rubber ke pasar internasional dapat dikurangi.

Pengembangan industri hilir karet di perdesaan pada dasarnya tidak hanya industri ban kendaraan saja melainkan sangat banyak produk barang jadi karet yang dapat diproduksi di perdesaan yang tidak memerlukan padat modal dan padat teknologi seperti industry sarung tangan karet, benang karet, alas kaki karet, alat teknik karet, alat rumah tangga dan alat olah raga dan banyak lagi yang lainnya. Selain itu untuk pembangunan inprastruktur hasil karet alam dapat pula dipergunakan sebagai campuran aspal untuk pembangunan jalan, pintu-pintu air pada saluran irigasi, bantalan rel kereta api dan vendor kapal.

Pengembangan hilirisasi industri karet selama ini tidak berkembang karena beberapa hal antara lain: 1) Kualitas bahan baku karet alam yang rendah; 2) Kompon sebagai bahan baku industry barang jadi karet masih harus dibeli dari luar Riau bahkan dari luar negeri misalnya karet sintetis; 3) Pengetahuan tentan industry barang jadi karet masih rendah; 4) Kurangnya pengetahuan mengenai pasar barang jadi karet; 5) Ketidaksiapan infrastruktur pendukung industri; 6) Jaminan ketersediaan bahan baku karet dari pabrik karet di Riau, karena sebagian besar industry karet telah terikat kontrak dengan pemasaran dalam bentuk SIR. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dikembangkan kluster dengan pola sebagaimana terlihat pada Gambar 12.4.

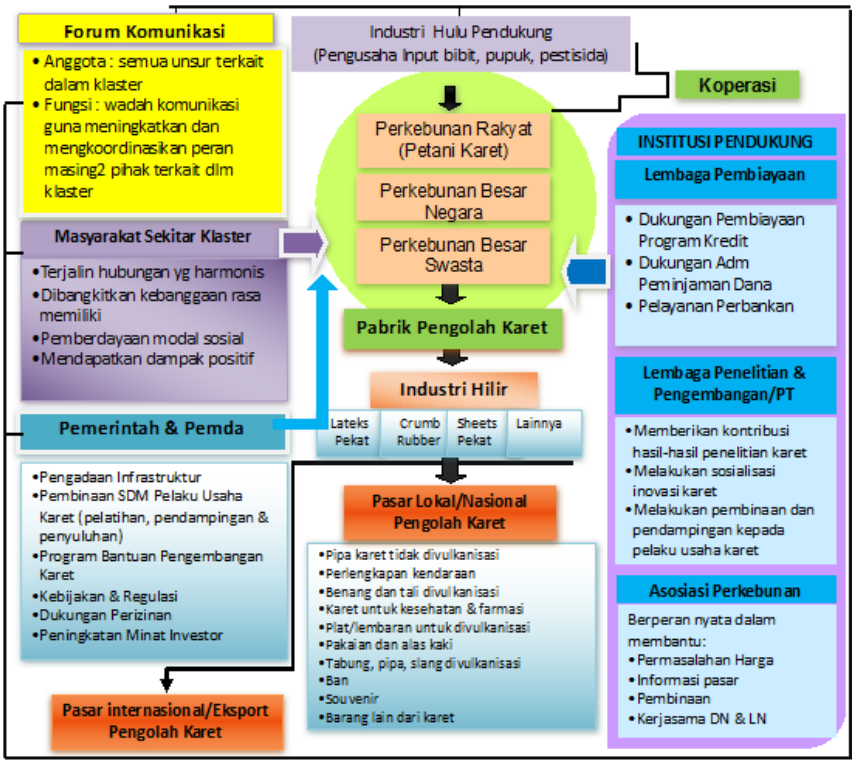

Gambar 12.4. Pola Pengembangan Kluster Karet di Riau

Kluster Karet Riau perlu diawali dengan mendirikan Pusat Inovasi Barang Jadi Karet (PIBJK). PIBJK merupakan tempat/wadah untuk melakukan kegiatan perekayasaan dan transfer IPTEK yang dihasilkan oleh lembaga litbang, universitas, dinas dan instansi terkait. Tujuannya untuk meningkatkan penguasaan IPTEK dan keterampilan SDM, UKM, calon wirausaha dan masyarakat untuk mengembangkan dan membangun industri hilir barang jadi karet berdaya saing tinggi. Untuk itu fungsi PIBJK dapat diilustrasikan sebagaimana terlihat pada Gambar 12.5.

Gambar 12.5. Fungsi Pusat Inovasi Barang Jadi Karet (PIBJK)

Penyebab rendahnya peran pergurun tinggi dalam penelitian hilirisasi karet, antara lain: 1) Pentingnya industri pengolahan barang jadi karet belum menjadi isu/fokus utama peneliti teknis dan kelembagaan PT (lebih banyak dibidang kelapa sawit); 2) Sumberdaya operasional untuk mendukung penelitian teknis/teknologi hilirisasi produk karet belum memadai; 3) Permintaan penembangan industri hilir oleh para investor dan orientasi komersialnya masih rendah; 4) Terdapat kendala birokrasi dan komitmen politik pembangunan di Riau yang lebih menitik beratkan kepada kelapa sawit.

Dalan upaya pengembangan industri hilir karet di perdesaan sangat diperlukan komitmen antara lembaga pemerintah maupun perguruan tinggi. Komitmen tersebut disesuaikan dengan peran masing-masing institusi, antara lain: 1) Perguruan Tinggi mulai memperhatikan penelitian terapan pengembangan industri hilir karet (produk perkebunan lainnya); 2) Kerjasama dalam Pusat Unggulan Inovasi (PUI) Karet Kementerian Perindustrian melalui PIBJK Riau memulai kegiatan operasional bekerjasama dengan intansi/ institusi terkait lainnya; 3) Pemerintah menggerakkan kelompok kecil investor

yang berminat tinggi dalam hilirisasi karet dengan menerapkan prinsip Akademisi (A) Bisnis Society (B) Govermen (G).

E. Model Pengembangan Kelembagaan dan Tataniaga Karet Alam di Pedesaan

Berdasarkan pengamatan di lapangan ditemukan bahwa terjadi pergeseran usahatani karet ke kelapa sawit. Hal tersebut disebabkan karena potensi dan peluang pasar kelapa sawit lebih terjamin dibandingkan pasar karet. Petani karet di pedesaan cenderung menghadapi pasar monopsoni seentara petani kelapa sawit pasarnya lebih kompetitif. Dari sisi lain harga penghasilan kelapa sawit lebih memberikan peluang kesejahteraan yang tinggi dibandingkan karet. Dampak kondisi ini terjadinya alih fungsi lahan dati tanaman karet ke kelapa sawit. Bagi industri karet alam juga merasakan dampak tersebut melalui kekurangan bahan baku untuk industi.

Berdasarkan diskusi dengan pelaku bisnis karet alam di Kabupaten Kuantan Singingi yakni pihak industi dan pedagang perantantara maupun pedagang besar memberikan informasi bahwa industri karet alan didaerah mengalami kekurangan bahan baku. Slah satu industi tersebut justru mendatangkan bahan baku dari luar daerah seperti dari Sumatera Selatan dan Lampung. Dari sisi lain petani karet dan pedagang besar disekitar industri justru menjual karetnya ke pedagang dari luar daerah (Jambi). Hal tersebut lebih disebabkan harga jual ke tingkat pedagang pengumpul lebih tinggi, bahkan selisih harganya mencapai Rp 2.000 per kg karet mentah.

Beberapa informasi yang diperoleh dari pelaku bisnis karet alam di daerah survei yaitu PT Andalas Agro Lestari (PT AAL), antara lain: 1) Kapasitas produksi terpasang sebeasar 4.000 ton per bulan, karena kekurangan bahan baku kegiatan hanya bisa dipenuhi sebesar 62,5 % yaitu 2.500 Ton / bulan; 2) Sebagain besar petani pemasok bahan baku sudah bergeser ke komoditi kelapa sawit; 3) Kompetitor mampu membeli bahan baku dengan harga yang lebih tinggi, sehingga masuk pedagang-pedagang dari luar daerah (Medan dan Jambi), bahkan memerka mampu membuat gudang penampungan di lokasi Kuantan Singngi; 4) Fluktuasi harga yang sangat cepat dan cenderung selalu menurun; 5) Penentuan harga berdasarkan pasar internasional SGX.com yaitu harga 100% karet yang nantinya harga notering baku karet

mentah ke petaninya menjadi 50-60% (contoh pada tgl 14 Nov 2016; harga di SGX.com Rp. 17.500/ kg namun harga Notering bahan karet mentah ke petani hanya menjadi Rp. 8.000 sd 9.000 / kg); 6) PT AAL tidak mempunyai kebun karet sendiri, akibatnya ketergantungan bahan baku sepenuhnya dari petani atau pemasok; 7) untuk mempertahankan aktivitas industri PT AAL menerima karet alam yang berasal dari Lampung; 8) Biaya perizinan yang bersifat rutin dari pemerintah daerah dirasakan tinggi (contohnya HO sampai mencapai ratusan juta rupiah).

Permasalahan yang dihadapi pedagang pengumpul di pedesaan (yang dikenal Toke) maupun pedangan besar, antara lain: 1) Harga jual standar kepada pabrik karet alam (PKA) berkisar sebesar Rp. 10.000 per kg, dengan mempertahan keuntungan sebesar Rp. 1.000 per kg maka harga ditingkat petani menjadi sekitar Rp 8.000-Rp 9.000; 2) Pedagang pengumpul sering tidak dapat bahan karet alam dikarenakan kalah bersaing dengan pengumpul lainnya terutama dari luar daerah dikarenakan selisih harga sampai mencapai Rp. 2.000/Kg; 3) Masih adanya pungutan liar walaupun masih dalam batas kewajaran.

Dari sisi petani karet alam di pedesaan, kegairahan berusaha tani sangat ditentukan oleh harga bahan baku. Bahkan saat harga karet alam tidak pada kewajaran menurut mereka, maka petani tidak melakukan panen (sadap). Hal tersebut disebabkan biaya bagi hasil tidak menguntungkan pemilik kebun. Kendala yang dihadapi oleg petani di pedesaan, antara lain: 1) Harga yang tidak memadai sehingga petani lebih memilih menjadi buruh; 2) Sortiran yang terlalu ketat oleh PKA dibebankan kepada petani oleh pedagang; 3) Banyak petani memilih tidak di deres karena harga rendah sehingga tidak dapat hasil karena dana bagi hasil dengan pemanen habis untuk perawatan kebun karetnya; 4) Banyak petani yang belum menjadi anggota Gapoktan (gabungan kelompok tani) bahkan ada yang tidak tahu tentang adanya Gapoktan tersebut; 5) Gapoktan yang ada juga belum dapat memberi solusi yang dibutuhkan oleh petani; 6) Petani karet tertarik untuk beralih kepada usahatani kelapa sawit yang lebih menjanjikan peningkatan ekonominya, karena terjamin harga dan pasarnya; 7) Tidak adanya kelembagaan yang dapat berperan aktif menangani permasalahan di lapangan, seharusnya kelembagaan tersebut berprinsip ” dari petani untuk petani” agar efisiensi

tercipta; 8) Ketidak aktifan Gapoktan-Gapoktan yang sudah ada untuk menjadi leader menggantikan fungsi para pemodal perantara (toke); 9) Belum adanya kebijakan pemerintah daerah yang mengatur produksi lokal mesti wajib jual kepada PKA lokal atau kebijakan yang melarang/membatasi penjualan karet lokal keluar dari kabupaten.

Berbagai pendapat untuk menyimpulkan alasan-alasan mengapa sampai terjadi kondisi tersebut, tentunya aktivitas ekonomi karet alam tidak ingin terjebak dengan hal-hal yang tidak terkait dengan substansi penelitian. Pada penelitian tahun pertama sudah ditawarkan tiga model bentuk mitra usaha karet alam melalui model perusahaan patungan guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat petani karet yang akan berpengaruh pada tingkat ekonomi keluarga, percepatan ekonomi pedesaan, maupun ditingkat kabupaten dan propinsi.

Dalam upaya memacu percepatan ekonomi pedesaan melalu pengembangan usahatani karet alam, maka dirancang model yang memberikan nilai tambah terhadap aktivitas usahatani karet alam. Dari alasan-alasan tersebut seharusnya terjadi suatu ikatan kerja dari tiga unsur yang terlibat yaitu petani, investor dan pembuat kebijakan. Ikatan kerja bersama ini memberikan daya guna atau keuntungan yang diperlukan oleh masing masing unsur. Ikatan kerja bersama (mitra kerja) dimaksud adalah suatu kelembagaan dalam bentuk Perusahaan Patungan, masing-masing unsur memiliki saham dalam PKA-nya. Secara sederhana dayaguna ataupun keuntungannya bila terjadi mitrakerja berupa perusahaan patungan dapat memberikan keuntungan pada masing-masing anggota mitra, antara lain:

1. Keuntungan Petani antara lain adalah :
   a. Pasar terjamin;
   b. Harga akan bersaing karena fungsi toke dapat tidak peranan penting;
   c. Akan mendapatkan keuntungan dari hasil PKA;
   d. Mendapat tambahan ilmu pengetahuan baik dalam hal keorganisasian maupun management perusahaan;
   e. Tingkat kemampuan ekonomi petani dan keluarga serta masyarakat akan meningkat.
2. Keuntungan Investor antara lain adalah :
   a. Pasokan terjamin sehingga taraf produktifitas PKA bisa optimal,

maka akan terjadi efisiensi dan margin keuntungan yang besar;

b. Kenyamanan berusaha di peroleh karena seluruh rakyat sekitar merasa memiliki;

c. Mampu memenuhi kewajiban terhadap negara dengan baik dan benar;

d. Mendapat kemudahan dari pemerintah daerah karena sama sama bertujuan mensejahterakan masyarakat dalam hal ini petani karet.

e. Dapat memgembangkan kapasitas PKA karena masih tersedia supply karet alam

3. Keuntungan Pemerintah Daerah adalah

a. Berpeluang menarik investor baru, yang berakibat akan meningkatnya pendapatan daerah, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan terciptanya stabilitas keamanan daerah;

b. Menurunnya penjarahan hutan akibat dijadikan kebun kelapa sawit yang selama ini menjadi penyebab carut marutnya tata ruang kabupaten serta terjadinya bencana kebakaran hutan.

c. Dapat memiliki saham di PKA yang diwakili oleh badan usaha milik daerah (BUMD) atau badan usaha milik desa (BUMDES).

Sinergi usaha antara tiga unsur ini akan berjalan dengan baik apabila semua unsur menjalankan perannya masing–masing dengan baik. Berikut dapat dijelaskan langkah–langkah terkait peran masing-masing unsur terkait peran yang diperlukan sebagai berikut:

Petani Karet

Petani melalui Gapoktan mempunyai visi medapatkan keuntungan bersama yang dikelola secara kelembagaan, maka petani karet mesti memulai langkah–langkah persiapannya, antara lain:

1. Membuat kelompok–kelompok tani yaitu, 1 (satu) kelompok tani per desa atau kelurahan, dengan organ organisasinya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota;
2. Diarahkan oleh camat dibentuk 1 (satu) buah koperasi per kecamatan dengan anggotanya adalah kelompok tani–kelompok tani per desa

tersebut, dengan organ organisasi standar sebuah koperasi dibawa binaan Dinas Koperasi Kabupaten;

3. Petani–petani karet membuat surat kuasa khusus kepada ketua kelompok tani untuk mewakili petani dalam partisipasi pembentukan koperasi di kecamatan, penanda tanganan pinjaman dana perbankan bila diperlukan;
4. Ketua kelompok–kelompok tani juga membuat surat kuasa khusus kepada ketua koperasi kecamatan untuk mewakili kelompok tani dalam melakukan perundingan ataupun membuat perjanjian dengan pihak investor, pemerintah daerah dan perbankan dan lain sebagainya.
5. Setiap kelompok tani wajib membuat anggaran rumah tangga yang berisikan kesepakatan kesepakatan bersama antara para petani anggota dengan pengurus yang akan menjadi pedoman kerja selanjutnya. Demikian juga dengan koperasi perkecamatan.
6. Setiap kelompok tani mesti mempunyai tempat pengumpul karet alam beserta prasarana dan sarana.

Investor PKA

1. Terhadap PKA yang sudah ada membuat surat pernyataan kesediaan menjual saham perusahaannya kepada koperasi atas nama petani-petani karet dan atau pemerintah daerah berikut prosentase saham yang bersedia akan dijual;
2. Terhadap investor yang belum memiliki PKA maka kewajiban pertamanya tentu membuat proposal pembangunan PKA dengan pola perusahaan patungan, artinya ada proses sebelum membangun PKA baru yang melibatkan koperasi tani karet dan pemerintah daerah, antara lain :
   a. Presentasi awal kepada para ketua kelompok dan ketua koperasi tentang prospek pembangunan PKA dengan pola perusahaan patungan, yang dilanjutkan dengan MoU kerjasamanya yang menjamin kepastian investasi;
   b. Memastikan keikutsertaan pemerintah daerah sebagai pemegang saham atau hanya fungsi kebijakan saja;
   c. Kesepakatan bersama pemegang saham tentang nama perusahaan yang akan dibuat, komposisi saham, komposisi dewan direksi dan

komisaris perusahaan dan lainnya;

d. Menyusun program kerja pembangunan PKA, dimulai dari pendirian perusahaan.

3. Membuat surat pernyataan akan menjalankan perusahaan secara professional dengan azas kejujuran dan keterbukaan demi mencapai tujuan bersama.
4. Membantu biaya pengurusan kelembagaan koperasi (asumsinya petani/ koperasi tidak memiliki dana awal).

Pemerintah Daerah

1. Menyiapkan tim khusus untuk mediasi dan fasilitator terciptanya perusahaan patungan;
2. Menandatangani MoU tentang komitmen pemerintah daerah untuk melayani perijinan dengan asas cepat dan biaya murah sejauh tidak melanggar perundangan yang berlaku, serta MoU tentang konsistensi pemda sebagai pengawas dan pembina perusahaan patungan;
3. Menunjuk BUMD/BUMDES representative pemerintah daerah sebagai pemegang saham apabila pemerintah daerah berkeputusan untuk memiliki saham pada perusahaan patungan;
4. Membantu biaya pengurusan kelembagaan koperasi (asumsinya petani/ koperasi tidak memiliki dana awal).

Percepatan ekonomi pedesaan melalui pengembangan komoditi karet alam di pedesaan dilakukan dengan cara pembentukan kemitraan usaha antara petani (melalui kelompok tani), koperasi petani, pemerintah daerah, dan investor. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani melalui kelompok tani, antara lain: 1) Setiap kelompok tani (KT) memiliki organ pengurus ketua, sekretaris dan bendahara; 2) Kelompok tani sudah terekam jumlah luasan kebun anggota dan total luasan per kelompok taninya; 3) Petani harus membuat surat pernyataan tentang status kepemilikan lahan yang akan dikuasainya; 5) Petani harus membuat surat kuasa kepada ketua KT atas nama pengurus KT dalam hal mewakilinya untuk perundingan– perundingan terkait pembangunan perusahaan patungan; 6) Setiap koperasi yang terbentuk wajib dilegalkan sebagai badan hokum resmi; 7) Setiap koperasi wajib memiliki

organisasi koperasi yang sesuai perundangan; dan 8) Koperasi kecamatan adalah representative dari semua kelompok tani untuk mengadakan perjanjian–perjanjian dengan investor dan pemda.

Apa yang diungkapkan merupakan kesimpulan sederhana langkah–langkah agar realisasi percepatan pembangunan ekonomi masyarakat petani karet melalui penataan kelembagaan model perusahaan patungan. Rencana program tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Secara garis besar bagan alur langkah–langkah pembangunan perusahaan patungan (mitra kerja) usahatani karet alam di pedesaan disajikan pada Gambar 12.6.

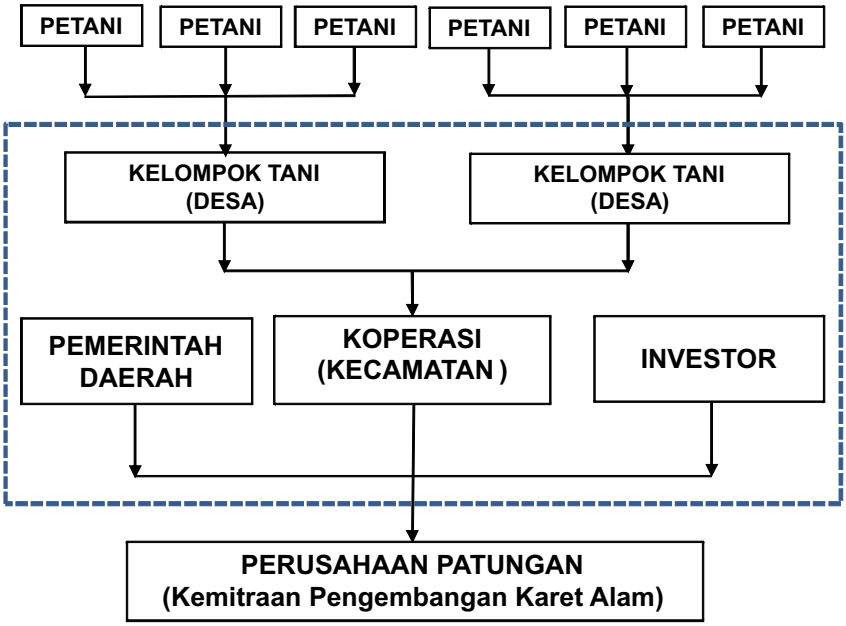

Gambar 12.6. Bagan Alur Pembangunan Perusahaan Patungan di Pedesaan

Cara Kepemilikan Saham Petani dalam Perusahaan Patungan

Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menjadikan petani sebagai pemegang saham dalam perusahaan patungan, yaitu: Pertama: Melalui pemotongan hasil jual karet alam. Cara ini tidak dianjurkan karena memiliki

kelemahan yang tidak sebanding dengan tingkat kesabaran petani dalam hal menyaksikan hasil keuntungan bila memiliki saham dalam sebuah perusahaan patungan tersebut. Karena prinsip investor sebelum dananya cukup untuk memenuhi kewajiban setor sejumlah saham maka investor belum dapat membagi devidennya. Sementara petani pendapatannya akan menurun karena hasil jual karetnya dipotong untuk pemenuhan setor saham. Hal ini akan menjadi masalah di tingkat petani dengan menurunnya tingkat kepercayaan bahwa model ini akan berhasil meningkatkan ekonomi mereka oleh karena waktunya yang lama. Keunggulannya, bahwa petani tidak mempunyai beban hutang yang memaksa diluar kemampuannya. Kendala ini dapat dicari solusinya dengan suatu presentasi yang menerangkan estimasi perhitungan oleh investor yang kesimpulan akhirnya adalah tentang perkiraan waktu dimulainya pembagian deviden kepada petani. Artinya dari awal sudah dipersiapkan mental petani dengan menggunakan cara ini memerlukan waktu yang cukup lama sehingga secara tidak langsung kesabaran petani terbina.

Kedua, melalui kredit bank. Cara ini perlu MoU antara petani dengan pemerintah daerah (Pemda) karena Pemda akan berperan sebagai penjamin disamping investor, namun keuntungannya adalah dengan setor saham sekaligus dari dana kredit perbankan tersebut. Petani serta merta langsung berhak menerima pembagian deviden PKA, sedangkan kemampuan bayarnya dapat disesuaikan dengan pengaturan jangka waktu kredit.

Untuk melaksanakan rencana tersebut, maka surat–surat hukum yang akan terjadi adalah, antara lain: 1) Surat pernyataan petani tentang kepemilikan lahan; 2) Surat kuasa petani kepada kelompok tani yang diwakili oleh ketuanya; 3) Surat kuasa kelompok tani kepada koperasi tentang perwakilan koperasi sebagai pemegang saham pada perusahaan patungan (Notaril); 4) MoU koperasi dengan investor; dan 5) MoU perusahaan patungan dengan Pemda.

BAGIAN KETIGA

KOPERASI PERANNYA DALAM MEMACU PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN

BAB XIII
PEMBERDAYAAN KOPERASI BERBASIS AGRIBISNIS DI PEDESAAN

A. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan wadah untuk mengembangkan demokrasi yang menghimpun potensi pembangunan dan melaksanakan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya. Koperasi berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi yang mampu mengelola perekonomian rakyat untuk memperkokoh kehidupan ekonomi nasional berdasarkan azas kekeluargaan.

Pengembangan usaha kecil yang telah terbukti mempunyai nilai tambah yang cukup tinggi, diharapkan berkaitan sangat erat dengan kegiatan koperasi, agar nilai tambah tersebut dapat dinikmati oleh anggota dan masyarakat lainnya, sebagai anggota koperasi.

Koperasi sangat berperan dalam perekonomian di pedesaan. Dalam strategi pengembangannya, koperasi masih harus memantapkan bidang usaha sendiri. Keberhasilannya dapat dirasakan secara nyata oleh para anggotanya. Para anggota dapat mengukur seberapa jauh pengembangan itu telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perhatian pemerintah yang besar dalam membantu pemasaran hasil usaha ditunjukkan oleh dukungannya mengaitkan kegiatan koperasi dalam setiap usaha yang mengarah pada pengembangan koperasi. Walaupun hambatan banyak ditemui, namun dalam proses pelaksanaannya harus dilalui dan ditanggulangi untuk mewujudkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh semua pihak.

Dengan berlakunya otonomi daerah, dunia usaha khususnya koperasi di daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha atau persaingan di daerah. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis di daerah dituntut dapat beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Di suatu sisi perubahan itu akan memberikan kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan-kegiatan yang produktif dan dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi sehingga dapat

memberikan sumbangan terhadap masukan pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya adalah industri-industri dengan bahan baku berasal dari sumberdaya alam daerah tersebut. Diharapkan industri-industri di daerah dapat berkembang dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sehingga mempunyai daya saing tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Bagi pengusaha setempat, pembangunan dan pengembangan industri-industri tersebut merupakan peluang bisnis besar, baik dalam arti membangun perusahaan di industri tersebut atau perusahaan di sektor-sektor lain yang terkait dengan industri tersebut. Kondisi ini sangat memberikan peluang pengembangan koperasi sebagai mitra kerja bagi usaha kecil dan menengah di daerah.

Dari sisi lain, jika tidak ada kesiapan yang matang dari pelaku-pelaku bisnis daerah, maka pemberlakuan otonomi daerah akan menimbulkan ancaman besar bagi mereka untuk dapat bertahan menghadapi persaingan dari luar daerah atau bahkan dari luar negeri. Dengan arti, tantangan yang pasti dihadapi setiap pelaku bisnis di daerah pada masa mendatang adalah bagaimana pelaku bisnis di daerah dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya.

Keuntungan dengan diberlakukannya otonomi daerah bagi pelaku-pelaku bisnis di daerah, antara lain: *Pertama, b*ekerja dengan biaya lebih murah dan mudah karena tidak lagi berurusan dengan birokrasi di pusat. Ini merupakan salah satu dampak positif otonomi daerah untuk peningkatan efisiensi usaha di daerah. Begitu juga dapat menekan biaya pengurusan izin; *Kedua*, tataniaga nasional pasti tidak ada lagi, dengan syarat pemerintah daerah tidak membuat aturan-aturan tataniaga lokal yang menimbulkan sekat-sekat baru. Ini berarti distorsi dalam distribusi yang selama ini dialami pengusaha-pengusaha daerah akan hilang, yang selanjutnya akan meningkatkan *price competitiveness* dari produk-produk mereka. Ini juga menjadi tantangan bagi setiap pengusaha daerah; bagaimana mereka dapat meningkatkan daya saing mereka dengan hialngnya distorsi tersebut; *Ketiga*, mengurangi persaingan dengan perusahaan dengan lobi pusat. Ini artinya pengusaha-pengusaha daerah dapat bersaing di pasar secara langsung, bebas (tanpa campur tangan pemerintah pusat), dan fair dengan pengusaha-pengusaha dari luar. Dalam hal ini tantangan bagi pengusaha daerah adalah,

bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja usaha mereka, paling tidak setara dengan kinerja pengusaha dari luar daerah, agar *competition capability* antara pengusaha daerah dan pengusaha dari luar daerah sama; *Keempat*, mencegah adanya proyek yang datang sekaligus dengan kontraktor. Tantangan bagi setiap pengusaha daerah adalah kemampuan mereka untuk menjadi kontraktor bagi proyek-proyek besar, baik dari pemerintah pusat atau pengusaha dari pusat (Jakarta); dan *kelima,* kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kelebihan daerah masing-masing dapat diambil oleh pemerintah daerah dan pengusaha-pengusaha setempat untuk pertumbuhan yang lebih baik. Tantangan bagi setiap pengusaha daerah adalah bagaimana mereka dapat memanfaatkan lingkungan berusaha yang kondusif yang diciptakan oleh kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Untuk melakukan kegiatan bisnis dan mengembangkan skala usaha di daerah bagi pelaku bisnis daerah sangat ditentukan juga oleh dua hal, yaitu: kemampuan berproduksi dan kemampuan meningkatkan daya saing produknya secara relatif terhadap produk-produk serupa dari pesaingnya. Prasarat ini berlaku tidak hanya bagi pengusaha yang melayani pasar nasional atau yang melakukan ekspor, tetapi juga bagi mereka yang melalyani pasar lokal. Jadi, tantangan yang pasti akan dihadapi setiap pelaku bisnis di daerah baik dalam perdagangan antar daerah maupun dalam era perdagngan bebas. Strategi yang harus ditempuh adalah bagaimana pelaku bisnis daerah dapat bersaing atau unggul terhadap pesaing-pesaing mereka. Untuk itu pengusaha terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) harus siap untuk menghadang masa depan usahanya dengan berbagai strategi, antara lain: 1) meningkatkan kualitas dan mutu produk daerah menjadi lebih unggul dari pada produk serupa dari luar daerah; 2) menembus pasar baru atau meningkatkan pangsa pasar atau paling tidak mempertahankannya (strategi jangka pendek); 3) menciptakan kegiatan baru yang produkstif dengan daya saing tinggi; dan 4) mengembangkan usaha tanpa merugikan efisiensi usaha.

B. Peran Koperasi di Pedesaan

Secara kuantitatif pelaksanaan pembangunan di daerah Riau telah mencapai hasil yang cukup baik seperti yang terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2002-2007 pertumbuhan ekonomi Riau sebesar

8,40%, pertumbuhan yang tinggi ini ditopang oleh sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan. Pada tahun 1996 sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi rakyat pedesaan Riau hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2 % sementara sektor industri melaju sebesar 14 persen. Namun pada tahun 2002 sektor pertanian sudah mulai membaik dengan angka pertumbuhan sebesar 6,06 persen, sedangkan sektor industri 12,47 persen. Selama periode 2002-2007 perumbuhan sektor pertanian cukup baik yaitu sebesar 6,79. Tingginya pertumbuhan sektor pertanian karena ditunjang oleh tanaman perkebunan yang berorientasi ekspor seperti kelapa sawit, karet, kelapa dan sebagainya (Almasdi Syahza, 2007a).

Pemerintah Daerah Riau dalam memacu pertumbuhan ekonomi ke depan, mencanangkan pembangunan melalui program pemberantasan kemiskinan, kebodohan dan pembangunan infrastruktur (lebih dikenal dengan program K2I). Program K2I ini dilakukan untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh daerah dan pengelolaannya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Setiap pembangunan yang dilaksanakan di Daerah Riau harus mengacu kepada Program K2I. Karena pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan, khususnya sektor pertanian. Potensi tersebut antara lain: 1) pengembangan tanaman hortikultura; 2) pengembangan tanaman perkebunan; 3) pengembangan usaha perikanan; 4) pengembangan usaha peternakan; 5) pengembangan usaha pertambangan; 6) pengembangan sektor industri; dan 7) potensi keparawisataan. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, yang pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah. Oleh karena itu, dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, keberpihakan pada pembangunan sektor agribisnis secara nasional perlu disertai dengan suatu mekanisme yang menjamin bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat.

Ketertinggalan pada sektor pertanian khususnya di pedesaan disebabkan kebijakan masa lalu yang melupakan sektor pertanian sebagai

dasar keunggulan komparatif maupun kompetitif. Sesungguhnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat pedesaan itu sendiri, tetapi juga membangun kekuatan ekonomi Indonesia berdasarkan kepada keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki (Yuswar Zainal Basri, 2003).

Ke depan pembangunan ekonomi harus memulainya dari ekonomi pedesaan, karena di pedesaan itu sebagian besar penduduk mencari nafkah dari sektor pertanian. Untuk memajukan ekonomi di daerah sebagai percepatan pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan, maka perlu dikembangkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian masyarakat. Berkembangnya koperasi di daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerah dan sekaligus meningkatkan ekonomi di daerah pedesaan. Untuk itu perlu dilakukan suatu kajian yang dapat memberikan masukan untuk kebijakan pengembangan koperasi di daerah Riau.

Di daerah pedesaan bentuk usaha masyarakat pada umumnya pengolahan dari hasil pertanian mereka dalam bentuk usaha kecil atau industri rumah tangga. Dari sisi proses produksi mereka sangat terbatas dalam penguasaan teknologi dan kekurangan modal untuk pengembangan skala usahanya. Begitu juga kekuatan tawar menawar dari hasil produknya sangat rendah. Slah satu untuk meningkatkan kekuatan tawar menawar masyarakat pedesaan adalah melalui lembaga ekonomi pedesaan yaitu koperasi.

Pemberdayaan masyarakat pedesaan juga harus mampu memberikan perlindungan yang jelas terhadap masyarakat. Upaya perlindungan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang akibat berlakunya mekanisme pasar dan eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Dalam hal ini, tampaknya sulit diterapkan mekanisme pasar. Masyarakat desa jelas akan kalah bersaing. Mereka tidak punya apa-apa selain tenaga-tenaga yang pada umumnya kurang terlatih. Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, sektor pertanian harus menjadi sasaran utama. Sektor ini harus dijadikan pijakan yang kokoh sehingga di pedesaan bisa tercapai swasembada berbagai produk pertanian, terutama pangan, sebelum memasuki era industrialisasi. Lebih spesifik, ketahanan pangan lokal harus tercapai lebih dahulu (Muhammad Basri, 2007).

Untuk mengembangkan usaha agribisnis skala kecil perlu dibentuk koperasi. Tanpa koperasi tidak mungkin agribisnis kecil dapat berkembang. Koperasi inilah yang akan berhubungan dengan pengusaha besar. Dari sisi lain Setiadi Wijaya, N.H (2002) mengungkapkan, manfaat berkoperasi: 1) membantu meningkatkan standar sosial ekonomi di daerah dengan memanfaatkan potensi dan penyerapan tenaga kerja; 2) bermanfaat langsung, karena sesuai dengan kehidupan masyarakat pedesaan; dan 3) ekonomi pedesan bisa tumbuh karena koperasi berakar kuat di pedesaan.

C. Permasalahan Koperasi di Pedesaan

Dari hasil pengamatan di lapangan ditemukan permasalahan pengembangan koperasi, antara lain: 1) lemahnya kualitas sumberdaya manusia khususnya kualitas manajemen; 2) kegiatan koperasi tidak sesuai dengan kebutuhan anggota sehingga koperasi berjalan atas kehendak pengurus semata, ini berakibat kepada rendahnya partisipasi anggota karena anggota tidak merasakan manfaat sebagai anggota koperasi; 3) masih ditemukan koperasi tidak melibatkan anggota dalam aktifitasnya (koperasi dikendalikan oleh pemilik modal); 4) koperasi masih sebatas penghubung antara anggota dengan mitra kerja (khusus untuk kopersi petani perkebunan kelapa sawit); 5) adanya kegiatan koperasi yang memanfaatkan dukungan pemerintah terhadap keberadaan koperasi bagi kepentingan pribadi (sebagai usaha pribadi); dan 6) koperasi di pedesaan lebih banyak bergerak pada bidang usaha simpan pinjam bukan pada usaha produktif;

Secara khusus kelemahan koperasi di pedesaan antara lain: 1) pada penentuan kepengurusan dan manajemen koperasi masih dipengaruhi oleh rasa tenggang rasa sesama masyarakat bukan didasarkan pada kualitas kepemimpinan dan kewirausahaan; 2) budaya manajemen masih bersifat feodalistik paternalistik (pengawasan belum berfungsi). Ini disebabkan karena terbatasnya kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki (khususnya untuk level manajemen). Masih lemahnya jiwa kewirausahaan dan rendahnya tingkat pendidikan pengurus; 3) anggota koperasi di pedesaan pada umumnya sangat heterogen, baik dari sisi budaya, pendidikan, maupun lingkungan sosial ekonominya; 4) usaha yang dilakukan tidak fokus, sehingga tingkat profitabilitas koperasi masih rendah. Akibatnya pengembangan aset koperasi

sangat lambat dan koperasi sulit untuk berkembang; 5) masih rendahnya kualitas pelayanan koperasi terhadap anggota maupun non anggota. Ini berakibat rendahnya partisipasi anggota terhadap usaha koperasi; 6) masih lemahnya sistem informasi di tingkat koperasi, terutama informasi harga terhadap komoditas pertanian sehingga akses pasar produk pertanian dan produklainnya masih relatif sempit; 7) belum berperannya koperasi sebagai penyalur sarana produksi pertanian di pedesaan dan sebagai penampung hasil produksi pertanian.

Usaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di pedesaan terutama memacu peningkatan pendapatan masyarakat, koperasi merupakan salah satu alternatif untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Supaya koperasi bisa tumbuh dan berkembang, maka faktor pendukung juga harus dikembangkan. Hasil pengamatan di lapangan ditemukan beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi, antara lain: 1) potensi masyarakat; 2) pengusaha; 3) lembaga perkreditan; 4) instansi terkait; dan 5) koperasi sebagai badan usaha.

D. Kebijakan Pembangunan Koperasi dan UKM

Koperasi dan usaha kecil-menengah merupakan bentuk dan jenis usaha yang digolongkan dalam ekonomi kerakyatan karena sifatnya mandiri dan merupakan usaha bersama. Ketahanan ekonomi daerah tergantung pada pelaku-pelaku ekonomi, termasuk kinerja koperasi dan usaha kecil-menengah. Untuk itu, kekuatan ekonomi akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila kekuatan sinergi kolektif yang dinaungi oleh koperasi berjalan sebagaimana mestinya.

Koperasi di Provinsi Riau pada tahun 2006 berjumlah 4008 unit dan pada tahun 2007 meningkat menjadi berjumlah 4.176 unit. Dari jumlah koperasi tersebut yang dapat digolongkan aktif pada tahun 2006 sebanyak 2.779 unit, sementara pada tahun 2007 meningkat menjadi menjadi 2.791 unit koperasi. Kehidupan koperasi/ usaha kecil dan menengah diupayakan untuk terus dikembangan oleh pemerintah pada masa mendatang melalui penguatan permodalan, pembenahan sistem manajemen, dan perluasan akses pasar (Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Riau, 2007).

Guna memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kerakyatan di masa datang, maka pemerintah Daerah Riau melalui Dinas Koperasi dan UKM memetapkan arah kebijakan pembangunan bidang Koperasi dan UKM, antara lain: 1) Mengembangkan koperasi dan usaha kecil-menengah melalui pembinaan pengembangan koperasi dan UKM secara umum dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta kegiatan-kegiatan produktif yang mempunyai nilai tambah; 2) Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi produktif dan efisien dalam bentuk koperasi dan UKM melalui perluasan wawasan pengetahuan, organisasi, manajemen usaha, dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota masyarakat sehingga dapat meningkatkan keyakinan masyarakat dan dunia usaha lainnya untuk menanamkan investasi pada koperasi dan UKM.

D. Koperasi dan Usaha Kecil

Koperasi merupakan wadah untuk mengembangkan demokrasi yang menghimpun potensi pembangunan dan melaksanakan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya. Koperasi berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi yang mampu mengelola perekonomian rakyat untuk memperkokoh kehidupan ekonomi nasional berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi mampu menjalin kerjasama dalam peningkatan kesjahteraan ekonomi masyarakat melalui aktivitas anggotanya.

Pengembangan usaha kecil yang telah terbukti mempunyai nilai tambah yang cukup tinggi, diharapkan berkaitan sangat erat dengan kegiatan koperasi, agar nilai tambah tersebut dapat dinikmati oleh anggota dan masyarakat lainnya, sebagai anggota koperasi.

Koperasi sangat berperan dalam perekonomian di pedesaan. Dalam strategi pengembangannya, koperasi masih harus memantapkan bidang usaha sendiri. Keberhasilannya dapat dirasakan secara nyata oleh para anggotanya. Para anggota dapat mengukur seberapa jauh pengembangan itu telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perhatian pemerintah yang besar dalam membantu pemasaran hasil usaha ditunjukkan oleh dukungannya mengaitkan kegiatan koperasi dalam setiap usaha yang mengarah pada pengembangan koperasi. Walaupun hambatan banyak

ditemui, namun dalam proses pelaksanaannya harus dilalui dan ditanggulangi untuk mewujudkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh semua pihak.

Dengan berlakunya otonomi daerah, dunia usaha khususnya koperasi di daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha atau persaingan di daerah. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis di daerah dituntut dapat beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Di suatu sisi perubahan itu akan memberikan kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan-kegiatan yang produktif dan dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap masukan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya adalah industri-industri dengan bahan baku berasal dari sumberdaya alam daerah tersebut. Diharapkan industri-industri di daerah dapat berkembang dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sehingga mempunyai daya saing tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Bagi pengusaha setempat, pembangunan dan pengembangan industri-industri tersebut merupakan peluang bisnis besar, baik dalam arti membangun perusahaan di industri tersebut atau perusahaan di sektor-sektor lain yang terkait dengan industri tersebut. Kondisi ini sangat memberikan peluang pengembangan koperasi sebagai mitra kerja bagi usaha kecil dan menengah di daerah.

Dari sisi lain, jika tidak ada kesiapan yang matang dari pelaku-pelaku bisnis daerah, maka pemberlakuan otonomi daerah akan menimbulkan ancaman besar bagi mereka untuk dapat bertahan menghadapi persaingan dari luar daerah atau bahkan dari luar negeri. Dengan arti, tantangan yang pasti dihadapi setiap pelaku bisnis di daerah pada masa mendatang adalah bagaimana pelaku bisnis di daerah dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya.

Keuntungan dengan diberlakukannya otonomi daerah bagi pelaku-pelaku bisnis di daerah, antara lain: *Pertama,* bekerja dengan biaya lebih murah dan mudah karena tidak lagi berurusan dengan birokrasi di pusat. Ini merupakan salah satu dampak positif otonomi daerah untuk peningkatan efisiensi usaha di daerah. Begitu juga dapat menekan biaya pengurusan izin; *Kedua*, tataniaga nasional pasti tidak ada lagi, dengan syarat pemerintah daerah tidak membuat aturan-aturan tataniaga lokal yang menimbulkan sekat-

sekat baru. Ini berarti distorsi dalam distribusi yang selama ini dialami pengusaha-pengusaha daerah akan hilang, yang selanjutnya akan meningkatkan *price competitiveness* dari produk-produk mereka. Ini juga menjadi tantangan bagi setiap pengusaha daerah, bagaimana mereka dapat meningkatkan daya saing mereka dengan hilangnya distorsi tersebut; *Ketiga*, mengurangi persaingan dengan perusahaan dengan lobi pusat. Ini artinya pengusaha-pengusaha daerah dapat bersaing di pasar secara langsung, bebas (tanpa campur tangan pemerintah pusat), dan fair dengan pengusaha-pengusaha dari luar. Dalam hal ini tantangan bagi pengusaha daerah adalah, bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja usaha mereka. Paling tidak setara dengan kinerja pengusaha dari luar daerah, agar *competition capability* antara pengusaha daerah dan pengusaha dari luar daerah sama; *Keempat*, mencegah adanya proyek yang datang sekaligus dengan kontraktor. Tantangan bagi setiap pengusaha daerah adalah kemampuan mereka untuk menjadi kontraktor bagi proyek-proyek besar, baik dari pemerintah pusat atau pengusaha dari pusat (Jakarta); dan *kelima,* kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kelebihan daerah masing-masing dapat diambil oleh pemerintah daerah dan pengusaha-pengusaha setempat untuk pertumbuhan yang lebih baik. Tantangan bagi setiap pengusaha daerah adalah bagaimana mereka dapat memanfaatkan lingkungan berusaha yang kondusif yang diciptakan oleh kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Untuk melakukan kegiatan bisnis dan mengembangkan skala usaha di daerah bagi pelaku bisnis daerah sangat ditentukan juga oleh dua hal, yaitu: kemampuan berproduksi dan kemampuan meningkatkan daya saing produknya secara relatif terhadap produk-produk serupa dari pesaingnya. Prasarat ini berlaku tidak hanya bagi pengusaha yang melayani pasar nasional atau yang melakukan ekspor, tetapi juga bagi mereka yang melalyani pasar lokal. Jadi, tantangan yang pasti akan dihadapi setiap pelaku bisnis di daerah baik dalam perdagangan antar daerah maupun dalam era perdagngan bebas. Strategi yang harus ditempuh adalah bagaimana pelaku bisnis daerah dapat bersaing atau unggul terhadap pesaing-pesaing mereka. Untuk itu pengusaha terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) harus siap untuk menghadang masa depan usahanya dengan berbagai strategi, antara lain: 1) meningkatkan kualitas dan mutu produk daerah menjadi lebih unggul

dari pada produk serupa dari luar daerah; 2) menembus pasar baru atau meningkatkan pangsa pasar atau paling tidak mempertahankannya (strategi jangka pendek); 3) menciptakan kegiatan baru yang produkstif dengan daya saing tinggi; dan 4) mengembangkan usaha tanpa merugikan efisiensi usaha (Almasdi Syahza, 2008)

F. Pengembangan Koperasi Melalui Kemitraan

Konsep kemitraan merupakan bagian tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya sesuai dengan konsep manajemen berdasarkan sasaran atau partisipatif. Perusahaan besar harus bertanggungjawab mengembangkan usaha kecil dan masyarakat pelanggannya, karena pada akhirnya konsep kemitraan yang dapat menjamin eksistensi perusahaan besar terutama untuk jangka panjang. Setiap pihak yang bermitra dengan koperasi, tidak hanya dilakukan sebagai belas kasihan oleh yang kuat terhadap yang lemah, tetapi kemitraan seyogyanya terjalin kinerja karena kehendak bisnis yang dibarengi dengan rasa tanggung jawab sosial yang kuat.

Dalam suasana persaingan yang semakin kompetitif, keberadaan usaha koperasi dituntut untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya, karena lembaga ini dianggap cukup repsentatif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Langkah kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha merupakan suatu strategi untuk dapat mengembangkan usaha koperasi dan secara moril kerjasama ini sangat diperlukan adanya dukungan yang maksimal dari pihak pengusaha besar melalui paket pembinaan. Harus diakui usaha koperasi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan, baik dari segi permodalan, sumberdaya manusia, manajemen, minimnya penguasaan teknologi informasi, iklim berusaha, dan distribusi jasa/produk yang dihasilkan.

Dalam pembangunan koperasi untuk percepatan ekonomi daerah, sangat perlu adanya kemitraan. Kemitraan yang dimaksud adalah dalam bentuk partisipasi dari semua unsur yang terkait untuk pengembangan koperasi. Pembangunan koperasi didasari oleh adanya potensi di daerah yang dapat mendukung berjalannya koperasi, antara lain: masyarakat, pengusaha (kecil dan menengah), industri rumah tangga, dan untuk daerah pedesaan adanya masyarakat petani.

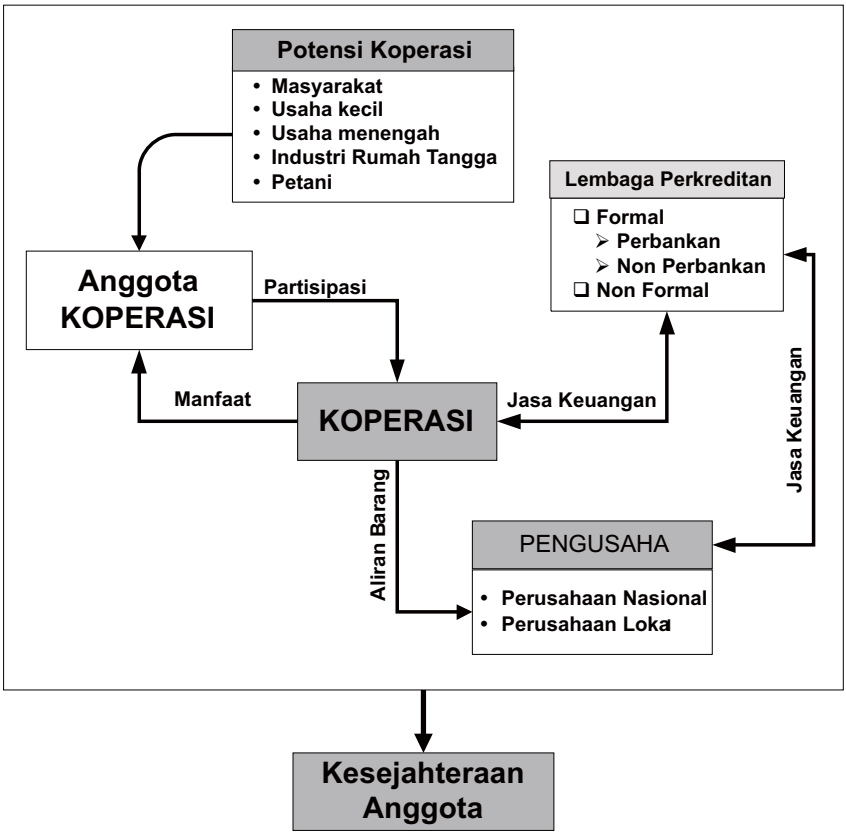

Gambar 11.1. Rancangan Mitra Kerja Koperasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Pedesaan

Dari dasar kebutuhan bersama, potensi ini harus dikembangkan melalui koperasi dan menjadi anggota koperasi pada masing-masing jenis usaha atau kegiatannya. Koperasi dengan manajemen yang baik menjalin kerjasama dalam bentuk mitra kerja dengan lembaga keuangan dan perusahaan. Dari ketiga komponen mitra (koperasi, perusahaan, dan lembaga keuangan) perlu dukungan dari pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Pemerintah sifatnya disini hanya sebagai pemberian jasa berupa pembinaan dan penyuluhan. Untuk lebih jelasnya bentuk mitra kerja koperasi disajikan pada Gambar 11.1.

G. Strategi Pengembangan Koperasi

Pengembangan koperasi tidak terlepas dari perkembangan usaha masyarakat terutama bagi masyarakat ekonomi lemah. Sebagian besar koperasi yang ada baik di kota maupun di daerah pedesaan jenis usahanya lebih dominan berupa simpan pinjam dan usaha pertanian (perkebunan). Khusus untuk jenis industri di pedesaan, pada umumnya jenis usaha yang dilakukan bersifat sederhana dalam bentuk industri rumah tangga. Pembangunan ekonomi pedesaan di masa datang tidak terlepas dari pengembangan usaha yang berbasis ekonomi pedesaan, dalam hal ini akan dikembangkan usaha kecil dan menengah (UKM). Karakteristik yang melekat pada UKM (termasuk mikro) bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang potensial, di sisi lain pada kekuatan tersebut implisit terkandung kekurangan atau kelemahan yang justru menjadi penghambat perkembangannya. Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta intereaksi keduanya dengan situasi ekternal akan menentukan prospek perkembangan UKM.

Dengan adanya kriris ekonomi, menyebabkan pemerintah dan para pengambil kebijaksanaan kembali berpikir ulang tentang arah perekonomian yang selama ini ditempuh. Kini timbul kemauan politik yang kuat untuk membenahi inefisiensi dan mis-alokasi sumberdaya (*misallocation of resources*) yang terjadi di sektor ril yang selama ini dibiarkan saja terjadi karena kuatnya *vested interest* para pemburu *rente* yang menguasai birokrasi pemerintahan. Akibat dari mis-alokasi sumberdaya adalah terabaikannya pembangunan koperasi dan industri kecil menengah (UKM) yang berbasis sumberdaya alam serta sumberdaya pertanian (*resource based industries*). Banyak industri yang dibangun yang membutuhkan bahan baku dan komponen yang harus diimpor atau industri-industri yang tidak banyak terkait dengan perekonomian lokal sehingga industri ini sangat rentan terhadap gejolak mata nilai uang. Industri-industri jenis ini pada umumnya adalah industri yang berpihak kepada golongan ekonomi kuat (Almasdi Syahza, 2007b).

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor industri kecil maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor industri kecil, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui

koperasi. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan koperasi yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya terutama di pedesaan.

H. Paradigma Baru Pemasaran Produk UKM melalui Koperasi

Untuk mengatasi masalah pemasaran produk UKM yang dialami oleh pengusaha, maka perlu dipikirkan paradigma baru dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu alternatif pemecahannya adalah memberdayakan lembaga ekonomi pedesaan yaitu koperasi.

Untuk mengembangkan UKM perlu dibentuk koperasi. Tanpa koperasi tidak mungkin usaha kecil dapat berkembang. Koperasi inilah yang akan berhubungan dengan pengusaha besar (Almasdi Syahza, 2003). Melalui koperasi masalah yang dihadapi oleh pengusaha di daerah dapat teratasi. Paradigma baru pemasaran produk UKM dapat dilihat pada gambar peraga yang disajikan (Gambar 11.2).

Koperasi merupakan badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh sistem pemasaran produk yang dihasilkan oleh UKM. Dari sisi lain koperasi juga merupakan pedagang perantara dari produk yang dihasilkan oleh anggotanya (industri kecil dan industri rumah tangga). Koperasi berfungsi sebagai lembaga pemasaran dari produk UKM. Dalam koperasi dilakukan pengendalian mutu (sortiran, pengolahan, pengepakan, pemberian label, dan penyimpanan) sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar. Koperasi juga berperan sebagai media informasi pasar, apakah menyangkut dengan peluang pasar, perkembangan harga, dan daya beli pasar. Melalui informasi pasar koperasi harus dapat menciptakan peluang pasar produk-produk UKM, sehingga pengusaha kecil tidak ragu untuk melakukan kegiatan usahanya karena ada jaminan dari koperasi bahwa produk mereka akan ditampung. Kegiatan ini akan merangsang partisipasi anggota terhadap koperasi, yang pada hakikatnya terjadi kesinambungan usaha koperasi.

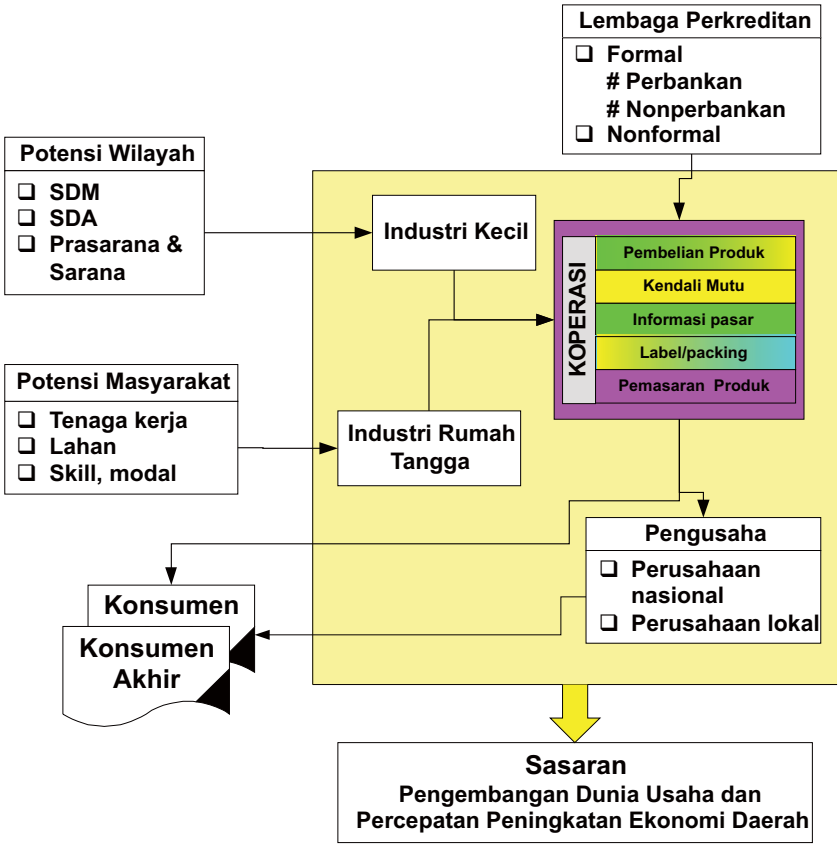

Gambar 11.2. Rancangan Model Pemasaran Produk UKM melalui Koperasi

Investasi yang dilakukan oleh koperasi berupa transportasi, mesin pengolah produk (apakah itu agroindustri) di pedesaan, mesin dan alat pengolah harus berupa penanaman modal atas nama anggota. Artinya setiap anggota mempunyai saham kepemilikan aset koperasi. Dengan demikian konsep ekonomi kerakyatan di pedesaan dapat berkembang (Almasdi Syahza, 2002).

Koperasi juga berperan sebagai penyedia kredit yang diperoleh dari lembaga perkreditan dan pengusaha. Pemberian kredit ini didasarkan kepada bentuk usaha yang mengembangkan komoditi potensial dan punya peluang

pasar. Tingkat pengembalian kredit oleh pengusaha dapat dilakukan melalui pemotongan penjualan hasil kepada koperasi.

Kegiatan unit usaha ini akan menimbulkan *multiplier effect* ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya industri kecil dan industri rumah tangga sebagai unit usaha di pedesaan dapat menciptakan peluang usaha dalam kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan naiknya pendapatan mayarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Selain yang diungkapkan di atas, koperasi juga berfungsi sebagai: *Pertama*, mencarikan alternatif pemecahan masalah pengusaha kecil seperti penyediaan kredit, pembentukan modal bersama melalui tabungan, penyediaan sarana produksi, pelaku agroindustri, memasarkan produk dan sebagainya; *Kedua*, memberikan kemudahan berupa pelatihan dan pembinaan kepada pengusaha dalam usaha-usaha yang dilakukannya; dan *ketiga*, pengusaha di pedesaan perlu diorganisir untuk memperkuat posisi tawar-menawarnya dalam menghadapi persaingan dan melakukan kemitraan dengan pihak lain.

Dalam era globalisasi pada saat ini dan masa-masa mendatang untuk menyongsong liberalisasi perdagangan peranan pemerintah makin kecil, bahkan kebijaksanaan pajak impor dan subsidi akan dihapuskan bila sampai waktunya. Dengan demikian peranserta pihak swasta, yaitu perusahaan-perusahaan besar sangat diperlukan untuk mengisi dan melengkapi berbagai program pemerintah. Pihak pengusaha yang berada pada posisi yang kuat dapat membantu pengusaha kecil pada posisi yang lemah dalam bentuk jaringan kemitraan.

Hubungan ini dapat memberikan keuntungan kepada pengusaha kecil, yaitu: *Pertama*, transfer teknologi dan penyediaan masukan sehingga pengusaha di pedesaan mampu bersaing dengan produk lain yang dihasilkan dengan menggunakan masukan dan teknologi yang lebih unggul; *Kedua*, dapat memperoleh informasi dan peluang pasar secara cepat; *Ketiga*, dapat membuka akses terhadap modal dan pasar; dan *keempat,* adanya jaminan dan kepastian pasar bagi produk industri kecil dan industri rumah tangga.

BAB XIV
PENGEMBANGAN KOPERASI BERBASIS AGRIBISNIS DI PEDESAAN

Koperasi di Indonesia merupakan sokoguru ekonomi masyarakat, untuk itu koperasi itu harus bisa menjadi salah satu faktor yang dapat menciptakan nilai tambah di daerah, terutama daerah pedesaan. Di daerah pedesaan sumber mata pencaharian pokok masyarakatnya adalah pertanian. Supaya hasil pertanian itu memberikan nilai tambah yang tinggi, maka pertnian itu harus dikelola secara agriisnis. Salah satu lembaga yang mendukung agribisnis itu di pedesaan adalah dengan pemberdayaan koperasi.

A. Profil Koperasi di Pedesaan

Berdasarkan informasi dan data yang ada pada Dinas Koperasi Propinsi Riau, rataan umur koperasi sekitar 10,2 tahun dengan rentangan 5,21 tahun sampai 16,4 tahun. Apabila dibandingkan dengan perusahaan bisnis lainnya, maka koperasi di Propinsi Riau cukup matang dalam perkembangannya dan tentu akan memperlihatkan dampak terhadap kesejahteraan anggotanya. Secara sinerji kemajuan koperasi itu seharusnya sudah memperlihatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian terutama di daerah pedesaan. Hal ini disebebakan sebagian besar koperasi itu berada di daerah pedesaan, khususnya di daerah-daerah sentra produksi pertanian. Penyebaran koperasi disajikan pada Tabel 12.1.

Tabel 7. Rekapitulasi Koperasi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Propinsi Riau Tahun 2009

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi (Unit)			Modal Kerja (juta)		Volume Usaha (juta)	SHU (juta)
		Aktif	Tidak Aktif	Jum-lah	Modal Sendiri	Modal Luar		
1	Pelalawan	134	40	174	15.124	29.055	132.621	4.408
2	Indragiri Hilir	202	302	504	53.924	35.335	105.099	5.445
3	Kampar	243	42	285	48.101	113.928	164.300	3.835
4	Rokan Hilir	185	183	368	31.826	62.345	42.475	2.280
5	Siak	169	54	223	32.739	60.234	170.591	41.381
6	Bengkalis	609	157	766	14.945	29.890	57.421	12.641
7	Pekanbaru	601	213	814	137.779	251.415	547.603	22.916
8	Kuantan Singingi	141	63	204	7.221	5.314	44.620	3.304
9	Dumai	189	172	361	13.197	5.721	44.888	6.821
10	Indragiri Hulu	218	65	283	10.063	130.000	27.685	4.686
11	Rokan Hulu	100	94	194	15.098	33.509	39.514	3.865
	Jumlah	2.791	1.385	4.176	380.017	756.746	1.376.817	111.582

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Riau, 2009

Pada Tabel 12.1 disajikan penyebaran koperasi di Propinsi Riau berdasarkan kabupaten/kota. Jumlah koperasi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota sebanyak 4.176 unit. Dari semua itu hanya sebanyak 2.791 unit yang aktif atau sebanyak 66,83%, sisanya sebanyak 33,17% kopersai yang tidak aktif. Banyaknya koperasi yang tidak aktif ini lebih banyak disebabkan oleh lemahnya sistem manajemen koperasi di pedesaan sehingga koperasi tersebut tidak mampu memberikan pelayanan kepada anggota. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi anggota terhadap koperasi trutama di daerah pedesaan. Faktor lain disebabkan koperasi belum mampu menjadikan dirinya sebagai badan usaha yang mengembangkan ekonomi masyarakat di pedesaan. Seharusnya koperasi di pedesaan mampu sebagai badan usaha ekonomi masyarakat terutama sebagai penampung hasil produksi di pedesaan dan sebagai pemasar (pengecer) kebutuhan masyarakat pedesaan. Apabila hal ini dapat dipenuhi oleh kopersai dan sistem menajemennya yang baik maka koperasi akan dibesarkan oleh mesyarakat itu sendiri (anggotanya).

Apabila dilihat dari jumlah anggota koperasi di Riau tercatat sebanyak 687.701 orang, artinya rata-rata masing-masing koperasi mempunyai anggota sebanyak165 orang. Jumlah anggota ini apabila dibina akan dapat menghidupkan koperasi dengan baik di pedesaan. Ini merupakan potensi pasar yang cukup bagus terutama untuk komoditas barang harian (sembako) di pedesaan. Dari sisi lain produksi yang dihasilkan oleh masyarakat juga dipasarkan melalui koperasi. Tentu saja koperasi harus dipimpin oleh seorang manajer yang mengerti terhadap kebutuhan anggotanya.

Dari sisi modal koperasi memiliki Rp 380.017 juta (33,43%) dari total modal yang dimiliki. Namun dapat menghasilkan volume usaha sebanyak Rp 1.376.817 juta pada tahun 2007 dan menghasilkan sisa usaha sebesar Rp 111.582 juta.

Koperasi merupakan wadah untuk mengembangkan demokrasi yang menghimpun potensi pembangunan dan melaksanakan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya. Koperasi berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi yang mampu mengelola perekonomian rakyat untuk memperkokoh kehidupan ekonomi nasional berdasarkan azas kekeluargaan.

Pengembangan usaha kecil yang telah terbukti mempunyai nilai tambah yang cukup tinggi, diharapkan berkaitan sangat erat dengan kegiatan

koperasi, agar nilai tambah tersebut dapat dinikmati oleh anggota dan masyarakat lainnya, sebagai anggota koperasi.

Koperasi sangat berperan dalam perekonomian di pedesaan. Dalam strategi pengembangannya, koperasi masih harus memantapkan bidang usaha sendiri. Keberhasilannya dapat dirasakan secara nyata oleh para anggotanya. Para anggota dapat mengukur seberapa jauh pengembangan itu telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perhatian pemerintah yang besar dalam membantu pemasaran hasil usaha ditunjukkan oleh dukungannya mengaitkan kegiatan koperasi dalam setiap usaha yang mengarah pada pengembangan koperasi. Walaupun hambatan banyak ditemui, namun dalam proses pelaksanaannya harus dilalui dan ditanggulangi untuk mewujudkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh semua pihak.

B. Potensi Pengembangan Koperasi

Kemitraan dalam Koperasi

Dalam suasana persaingan yang semakin kompetitif, keberadaan usaha koperasi dituntut untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya, karena lembaga ini dianggap cukup repsentatif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Langkah kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha merupakan suatu strategi untuk dapat mengembangkan usaha koperasi dan secara moril kerjasama ini sangat diperlukan adanya dukungan yang maksimal dari pihak pengusaha besar melalui paket pembinaan. Harus diakui usaha koperasi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan, baik dari segi permodalan, sumberdaya manusia, manajemen, minimnya penguasaan teknologi informasi, iklim berusaha, dan distribusi jasa/produk yang dihasilkan.

Alternatif pemberdayaan koperasi di daerah adalah melalui konsep mekanisme kerjasama atau keterkaitan dengan perusahaan besar dalam bentuk kemitraan usaha. Konsep ini telah mulai ditawarkan sejak tahun 1980 dan dicanangkan melalui gerakan kemitraan usaha nasional (GKUN) pada tahun 1996. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan yang terjadi antara usaha kecil menengah yang sebagian besar memayungi masyarakat miskin dengan BUMN dan BUMS.

Konsep kemitraan merupakan bagian tanggungjawab social perusahaan terhadap lingkungannya sesuai dengan konsep manajemen berdasarkan sasaran atau partisipatif. Perusahaan besar harus bertanggungjawab mengembangkan usaha kecil dan masyarakat pelanggannya, karena pada

akhirnya konsep kemitraan yang dapat menjamin eksistensi perusahaan besar terutama untuk jangka panjang.

Setiap pihak yang bermitra dengan koperasi, baik sebagai pionir maupun sebagai mitra, tidak hanya dilakukan sebagai belas kasihan oleh yang kuat terhadap yang lemah, tetapi kemitraan seyogyanya terjalin kinerja karena kehendak bisnis yang dibarengi dengan rasa tanggung jawab sosial yang kuat.

Dalam pembangunan koperasi untuk percepatan ekonomi daerah, sangat perlu adanya kemitraan. Kemitraan yang dimaksud adalah dalam bentuk partisipasi dari semua unsur yang terkait untuk pengembangan koperasi. Pembangunan koperasi didasari oleh adanya potensi di daerah yang dapat mendukung berjalannya koperasi, antara lain: masyarakat, pengusaha (kecil dan menengah), industri rumah tangga, dan untuk daerah pedesaan adanya masyarakat petani. Dengan dasar kebutuhan bersama, potensi ini harus dikembangkan melalui koperasi dan menjadi anggota koperasi pada masing-masing jenis usaha atau kegiatannya. Koperasi dengan manajemen yang baik menjalin kerjasama dalam bentuk mitra kerja dengan lembaga keuangan dan perusahaan. Dari ketiga komponen mitra (koperasi, perusahaan, dan lembaga keuangan) perlu dukungan dari pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Pemerintah sifatnya disini hanya sebagai pemberian jasa berupa pembinaan dan penyuluhan. Untuk lebih jelasnya bentuk mitra kerja koperasi disajikan pada Gambar 12 Bab IX.

Partisipasi dan Manfaat Koperasi

Tujuan utama mendirikan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat daerah sekitar pada umumnya. Namun tujuan tersebut sangatlah abstrak, oleh sebab itu, tujuan yang lebih kongkrit adalah promosi ekonomi anggota. Promosi ekonomi anggota dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan manfaat atau pelayanan secara optimal pada anggota dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

Koperasi dibentuk oleh kelompok-kelompok orang yang mengelola perusahaan koperasi secara bersama-sama, dan diberi tugas untuk menungjang kegiatan ekonomi para anggotanya. Setiap kelompok orang dapat merumuskan dan mewujudkan tujuan-tujuan secara bebas melalui kegiatan-kegiatan ekonomi secara bersama.

Dengan demikian keberhasilan koperasi tidak hanya cukup dengan partisipasi kontributif, tetapi lebih penting adalah partisipasi insentif dari

koperasi bagi anggotanya. Peningkatan partisipasi dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) para anggota. Hal ini merupakan ciri utama koperasi yang membedakannya dengan organisasi lain (non koperasi).

Disamping pengaruh faktor di atas, keberhasilan usaha koperasi juga tampaknya berhubungan erat dengan manfaat yang dirasakan oleh para anggota koperasi. Manfaat yang dirasakan akan dinilai secara subjektif oleh anggota dan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam menumbuhkan loyalitas dan partisipasi anggota koperasi untuk melibatkan diri dalam setiap aktivitas koperasi.

Bila diamati bentuk partisipasi anggota dapat dibedakan menjadi tiga jenis (Roepke, 2000), yaitu: 1) Partisipasi anggota dalam mengkontribusi atau menggerakkan sumber-sumberdayanya; 2) Partisipasi anggota dalam mengambil keputusan (perencanaan, implementasi pelaksanaan, dan evaluasi); 3) Partisipasi anggota dalam menikmati manfaat.

Ketiga aspek partisipasi ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Anggota yang tidak menikmati manfaat tidak akan mengkombinasikan sumber-sumberdaya yang dimilikinya. Manfaat koperasi tidak akan diberikan kepada anggota jika mereka tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada koperasinya.

Untuk mendorong tingkat partisipasi anggota yang tinggi dalam suatu koperasi, perlu dilakukan: 1) mengadopsi suatu kegiatan fungsi tunggal koperasi; 2) keanggotaan yang homogen; dan 3) membatasi jumlah keanggotaan. Koperasi harus memberikan motivasi kepada anggotanya agar partisipasi itu efektif. Hal itu diperlukan agar pertumbuhan koperasi selalu meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan partisipasi anggota menimbulkan rasa ikut memiliki. Bagi anggota yang tidak memperoleh manfaat atau tidak terpenuhi kebutuhannya, partisipasi tidak akan efektif dan biaya yang ditanggung bila mereka ikut berpartisipasi akan semakin besar karena adanya *oportunity cost*. Sebaliknya bila manfaat atau kebutuhan anggota terpenuhi, maka partisipasi kontribusi anggota akan efektif dan biaya yang ditimbulkan relatif lebih rendah.

Manajemen partisipatif memiliki kesesuaian dengan karakteriatik koperasi yang menekankan partisipasi anggota dalam pembiayaan, transaksi, dan penyampaian penda-pat. Perbedaannya adalah bahwa anggota koperasi berperan sebagai pemilik perusahaan koperasi, sehingga memiliki otoritas penuh dalam menentukan keputusan tanpa adanya hierakhi bawahan

(anggota) dengan atasan (manajemen). Manajemen menjalankan perusahaan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anggota sesuai dengan tingkat partisipasinya. Pengendalian manajemen oleh anggota secara teoritis mungkin terjadi sebagaimana pendapat Roepke (2000) dalam model kesesuaian partisipasi, seperti disajikan pada Gambar 12.3.

Bila variabel anggota, manajemen, dan program menemui kesesuaian maka akan tercapai keefektifan pertisipasi anggota. Kesesuaian tersebut adalah: a) antara pelayanan yang dibutuhkan (*needs*) anggota dengan output pelayanan dari program, b) antara tugas-tugas (*task*) program dengan kemampuan (*ablity*) manajemen; dan c) antara apa-apa yang diminta (*demands*) anggota dengan keputusan (*decisions*) manajemen. Alat yang digunakan untuk mengendalikan mekanisme tercapainya kesesuaian ini adalah hak suara (*voice*), hak pilih (*vote*), dan hak keluar (*exit*).

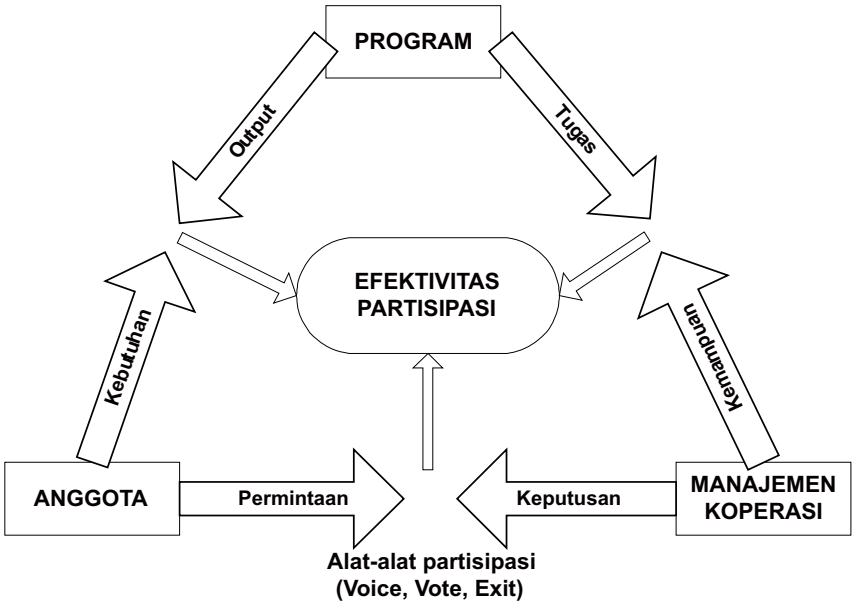

Gambar 12.3. Model Kesesuaian Partisipasi (Roepke, 2000)

Melalui model ini maka anggota akan berpartisipasi maksimal agar perusahaan koperasi bisa terwujud melalui pembiayaan (iuran anggota), memberikan pendapat, dan mengawasi jalannya perusahaan. Adanya

kesesuaian tersebut berimplikasi pada pemilihan manajemen yang mampu menjalankan tugas sesuai dengan permintaan dan kebutuhan anggota, melalui mekanisme hak suara (*one man one vote*). Jika manajemen dianggap menyimpang dan tidak mampu memenuhi kebutuhan usahatani anggota maka anggota akan rugi, sehingga mendorong ke luar dari keanggotaan koperasi. Mekanisme inilah yang perlu ditumbuhkembangkan oleh para promotor pada diri anggota koperasi yang mayoritas kondisi sosial ekonominya lemah, maupun pada manajemen koperasi agar difahami. Bantuan promotor yang andal harus didukung oleh anggota sehingga dapat menciptakan kekuatan anggota sebagai pemilik dan pelanggan koperasi.

Sasaran organisasi koperasi adalah mewujudkan peningkatan kepentingan anggota secara maksimal. Kepentingan anggota mendukung tercapainya keberhasilan koperasi sebagai badan usaha dan dapat memperoleh manfaat secara ekonomis dari koperasi. Keberhasilan usaha koperasi harus didasarkan pada landasar teori yang baik dan rasionalitas ekonomi.

Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tingkat partisipasi anggota, demikian pula keberhasilan usaha serta manfaat bagi anggota koperasi di daerah pedesaan belumlah maksimal. Hal itu disebabkan oleh beberapa fenomena yang dihadapi, antara lain:

1. Rendahnya partisipasi kontributif anggota karena manfaat yang diterima belum sesuai dengan keinginan para anggota.
2. Keterbatasan modal usaha yang dimiliki koperasi sehingga ruang lingkup usaha yang dapat dijangkau masih terbatas.
3. Program kerja yang dijalankan pengelola sering kali berdasarkan atas pengalaman dan keinginan mengelola sendiri, sehingga kebutuhan dan keinginan anggota terabaikan.
4. Tidak ada perbedaan manfaat yang diperoleh antara anggota dan non anggota karena pelayanan yang diberikan kepada anggota sama dengan pelayanan yang diterima oleh bukan anggota.

C. Strategi Pengembangan UMKM Melalui Koperasi

Hasil pengamatan di lapangan ditemukan beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi, antara lain:

1) potensi masyarakat; 2) pengusaha; 3) lembaga perkreditan; 4) instansi terkait; dan 5) koperasi sebagai badan usaha. Rangkaian kerja dari faktor pendukung UKM tersebut disajikan pada Gambar 12.4.

Pengusaha

Pengusaha yang dimaksud disini adalah pengusaha sebagai pemilik modal dan sebagai pedagang (perantara, penyalur, pengecer). Sebagai pemilik modal menjalin kerjasama dengan koperasi dalam penyediaan sarana produksi, alat dan mesin, dan termasuk penyedia teknologi yang mendukung kegiatan UKM di daerah. Fungsinya sebagai pedagang adalah penyalur produk UKM yang telah melalui proses pengolahan oleh koperasi sesuai standar yang ditentukan oleh pedagang. Target pasar disesuaikan dengan kriteria produk yang ada, bisa saja ekspor, dalam negeri/lokal, atau pasar tradisional. Dari sisi lain pengusaha juga memberikan informasi pasar melalui koperasi, apakah menyangkut daya beli pasar, peluang pasar, dan lain sebagainya. Termasuk juga menyediakan tenaga ahli yang ditempatkan di koperasi. Tenaga ahli ini disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, apakah tenaga ahli bidang produksi, pemasaran, atau pengendali mutu.

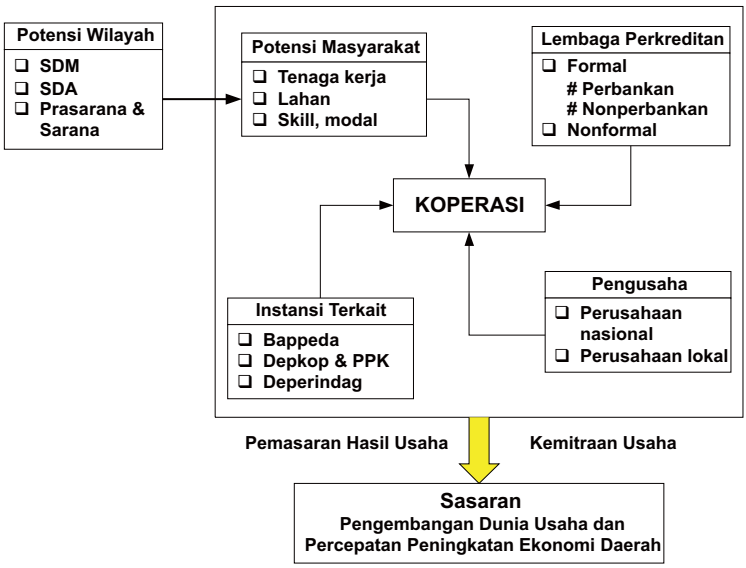

Gambar 12.4 Rancangan Strategi Pengembangan UKM Melalui Koperasi

Lembaga Perkreditan

Lembaga perkreditan pada kegiatan UKM cukup pegang peranan. Lembaga ini sebagai penyedia kredit kepada koperasi dan pengusaha. Pada model pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan UKM ini, lembaga perkreditan hanya berhubungan langsung dengan koperasi dan pengusaha. Kredit disalurkan melalui koperasi di daerah/pedesaan yang sudah mempunyai bentuk usaha apakah dalam bentuk agribisnis dan agroindustri atau usaha lainnya. Koperasi mengajukan kredit untuk modal kerja bagi anggota (UKM) dan modal kerja bagi koperasi itu sendiri (sebagai pelaku mitra kerja UKM). Sementara kredit kepada pengusaha bisa saja dalam bentuk pengembangan usaha (toko, ekspor, penyediaan teknologi, dan lain sebagainya).

Instansi terkait

Keterlibatan pihak pemerintah dalam model pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan melalui pengembangan UKM diharapkan hanya sebatas pembuat kebijakan dan pembinaan. Kebijakan menyangkut dengan ketentuan dan peraturan yang saling menguntungkan pelaku bisnis. Sedangkan pembinaan diberikan kepada koperasi dan pengusaha kecil. Instansi terkait dapat saja melakukan pembinaan kepada kedua kelompok ini dengan memakai tenaga profesional dari luar, baik dari perguruan tinggi maupun dari lembaga profesi lainnya.

Koperasi sebagai badan usaha

Koperasi memegang peranan sangat penting pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di pedesaan. Koperasi harus berfungsi sebagai badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh pemasaran produk UKM. Koperasi sebagai perantara penyalur sarana produksi dan alat/mesin kepada anggota (industri kecil). Dari sisi lain koperasi juga sebagai pedagang perantara dari produk yang dihasilkan oleh industri kecil sebagi anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Erani Yustika., 2002. *Pembangunan dan Krisis: Memetakan Perekonomian Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Alfian., 1997. Kemiskinan Struktural di Perdesaan, dalam *Lokakarya Program Penanggulangan Kemiskinan di Propinsi Riau*, Lembaga Penelitian Unri, Pekanbaru.

Almasdi Syahza., 1998a. Analisis Disparitas dan Aliran Investasi di Daerah Riau, *Jurnal Penelitian Unri Volume VII/1998*, Pekanbaru.

Almasdi Syahza., 1998b. *Peluang Pengembangan Agribisnis di Propinsi Riau*, P2TP2 Universitas Riau, Pekanbaru.

Almasdi Syahza., 1998c. *Evaluasi Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit dan Strategi Pengembangannya di Daerah Riau*, Lembaga Penelitian Unri, Pekanbaru

Almasdi Syahza., 1999a. *Kajian Tentang Pengalihan Kepemilikan Kebun Kelapa Sawit Plasma PIR-SUS PTPN V Sei. Tapung Riau*, Jurnal Penelitian-Volume VIII Nomor 2, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru.

Almasdi Syahza., 1999b. Dampak Pengembangan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Ekonomi Daerah Riau, *Jurnal Penelitian-Volume IX Nomor 1*, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru.

Almasdi Syahza., 1999c. *Studi Pengembangan Agro Estat Kelapa Sawit Skala Kecil di Kawasan Permukiman Transmigrasi Propinsi Riau*, Depatemen Transmigrasi dan PPH Propinsi Riau, Pekanbaru.

Almasdi Syahza., 2000a. *Prospek Pengembangan Industri Hilir Minyak Kelapa Sawit (CPO) di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau*, BPMD Kabupaten Pelalawan, Pekanbaru.

Almasdi Syahza., 2000b. *Informasi Ekonomi Masyarakat Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau*, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci.

Almasdi Syahza., 2000c. *Inventarisasi Kawasan Berpotensi Pengembangan Transmigrasi dan Mobilitas Penduduk di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau*, Proyek Pembinaan Transmigrasi dan Mobilitas Penduduk Propinsi Riau, Pekanbaru.

Almasdi Syahza., 2001a. *Studi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat di Propinsi Riau*, PPKPEM Unri, Pekanbaru.

Almasdi Syahza., 2001b. *Penelitian dan Pengembangan Agribisnis di Kabupaten Karimun*, BAPPEDA Kabupaten Karimun, Pekanbaru.

Almasdi Syahza., 2001c. *Kajian Sosial Ekonomi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Pelalawan*, BAPPEDA Kabupaten Pelalawan, Pekanbaru.

Almasdi Syahza., 2001d. Studi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan Industri di Kabupaten Bengkalis, dalam *Jurnal Mon Mata*, No. 43 September 2001, Lembaga Penelitian Syiah Kuala, Banda Aceh.

Almasdi Syahza., 2001e. Peluang Pengembangan Pabrik Kelapa Sawit Skala Kecil di Daerah Riau, dalam *"SOSIAL" Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Volume 1 Nomor 2 September 2001, Universitas Merdeka, Madium.

Almasdi Syahza., 2001f. Dampak Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Swasta Terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar di Kabupaten Kuantan Singingi, dalam *Pengelolaan Sumberdaya Alam Riau*, P2KP2 Unri, Pekanbaru.

Almasdi Syahza., 2002a. Potensi Pembangunan Industri Hilir Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam *Usahawan Indonesia*, No. 04/TH XXXI April 2002, Lembaga Manajemen FE UI, Jakarta.

Almasdi Syahza., 2002b. Studi Pengembangan Buah-buahan Sebagai Komoditi Unggulan Agribisnis di Kabupaten Kampar, dalam *Distribusi: Majalah Ilmian Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Edisi Ke XVII Tahun Xi Juni 2002, Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, Mataram.

Almasdi Syahza., 2002c. *Studi Kelayakan Hutan Tanaman Industri di Kecamatan Minas Kabupaten Siak*, PT Rokan Permai Timber, Pekanbaru.

Almasdi Syahza., 2002d. *Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Kecamatan Minas Kabupaten Siak*, PT Rokan Permai Timber, Pekanbaru.

Almasdi Syahza., 2002e. Potensi Pengembangan Desa Tertinggal dan Mobilitas Penduduk di Kabupaten Bengkalis Riau, dalam *Kependudukan*, Vol 4 No 2, Juli 2002, Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Penelitian Unpad, Bandung.

Almasdi Syahza., 2002f. Paradigma Baru Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis, dalam *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Universitas Riau*, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru.

Almasdi Syahza., 2003a. Potensi Pembangunan Industri Minyak Goreng di Daerah Riau, dalam *Sosiohumaniora*, Vol 5 No 1, Maret 2003, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.

Almasdi Syahza., 2003b. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan*, kerjasama WWF dengan PPKPEM Unri, Pekanbaru.

Almasdi Syahza., 2003c. Paradigma Baru Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis di Daerah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, TH. VIII/ 01/Juni/2003, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Almasdi Syahza., 2003d. Perkembangan Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Riau, dalam *Sosiohumaniora*, Vol 5 No 2, Juli 2003, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.

Almasdi Syahza., 2003e. Analisis Ekonomi Usahatani Hortikultura Sebagai Komoditi Unggulan Agribisnis Di Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, dalam *Perspektif*, Vol 8 No 1, Juni 2003, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Almasdi Syahza., 2003f. Rancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis di Daerah Riau, dalam *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, Volume 3 Nomor 2 November 2003, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Almasdi Syahza., 2003g. Rancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Agroestate Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th. VIII/02/November/2003, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Almasdi Syahza., 2004a. Analisis Disparitas Spasial dan Aliran Investasi Di Daerah Riau, dalam *Jurnal Indonesia Membangun*, STIE INABA, Vol 2 No 1 Maret-Juni 2004, Bandung.

Almasdi Syahza., 2004b. Distorsi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Di Pedesaan, dalam *Jurnal Pembangunan Pedesaan,* Universiras Jenderal Soedirman, Vol 4 No 1 April-Juli 2004, Purwokerto.

Almasdi Syahza., 2004c. Ekspor CPO (Crude Palm Oil) dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dearah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th IX/01/Juli/2004, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Almasdi Syahza., 2004d. Dampak Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar di Kabupaten Siak, dalam *Jurnal Pembangunan Pedesaan,* Universiras Jenderal Soedirman, Vol 4 No 2 Agustus-November 2004, Purwokerto.

Almasdi Syahza., 2004e. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Melalui Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam *Sosiohumaniora*, Vol 6 No 3, November 2004, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.

Almasdi Syahza., 2004f. Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Petani Di Pedesaan Daerah Riau, dalam *Perspektif*, Vol 9 No 2, Desember 2004, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Almasdi Syahza., 2005a. Analisis Daya Dukung Wilayah Terhadap Industri Hilir Kelapa Sawit Di Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th.X/01/Maret/2005, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Almasdi Syahza., 2005b. Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap *Multiplier Effect* Ekonomi Pedesaan, dalam *Jurnal Ekonomi*,

Th.X/03/November/2005, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Almasdi Syahza., 2007a. Analisis Nilai Tambah dan Peluang Pengembangan Bebuahan sebagai Komoditi Unggulan Agribisnis di Kabupaten Karimun Propinsi Riau, dalam *Jurnal Eksekutif*, Volume 4, Nomor 3, Desember 2007, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT, Surabaya.

Almasdi Syahza.,2007b. Percepatan Pemberdayaan Ekonmomi Masyarakat Pedesaan dengan Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th.XII/02/Juli/2007, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Almasdi Syahza.,2007c. *Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Agribisnis Di Daerah Riau*, Penelitian Fundamental DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. Tahun 2007.

Almasdi Syahza.,2008a. Model model Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis Sebagai Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th.XIII/01/Maret/2008, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Almasdi Syahza.,2008b. *Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Melalui Pemberdayaan Koperasi Berbasis Agribisnis Di Daerah Riau*, Penelitian Fundamental DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. Tahun 2008.

Almasdi Syahza., 2008c, *Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Petani di Pedesaan Daerah Riau*, http://www.bung-hatta.info/tulisan_213.ubh, diakses 12 Januari 2008.

Almasdi Syahza., 2008d, *Pengaruh Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Ekonomi Regional Daerah Riau*, http://www.bung-hatta.info/tulisan_253.ubh, diakses 20 Februari 2008.

Almasdi Syahza., 2008e, *PE CPO Jadi 2,5%, Pengusaha Diminta Jangan Rugikan Petani*, http://riaubisnis.com, diakses 20 Februari 2008.

Almasdi Syahza., 2009a, *Perumusan Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemetaan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Agribisnis Di Propinsi Riau*, Penelitian Unggulan Strategis Nasional DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Almasdi Syahza., 2009b, *Kelapa Sawit: Dampaknya Terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Daerah Riau*, Penelitian Hibah Kompetensi Tahun I, DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Almasdi Syahza.,2010a, *Kelapa Sawit: Dampaknya Terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Daerah Riau*, Penelitian Hibah Kompetensi Tahun II, DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Almasdi Syahza., 2010b, Aspek Ekonomi dan Sosial dalam Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam *Tabloid Inspirasi*, Vol 1 No 11 tanggal 10 Juli 2010, Jakarta.

Almasdi Syahza., 2010c, Model Kelembagaan Ekonomi Pada Perkebunan Kelapa Sawit di Propinsi Riau, makalah Seminar dalam *Seminar dan Lokakarya Pengelolaan Terpadu Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Propinsi Riau*, Pekanbaru, 28 Juli 2010.

Almasdi Syahza., 2011a, *Kelapa Sawit: Dampaknya Terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Daerah Riau*, Penelitian Hibah Kompetensi Tahun III, DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Almasdi Syahza., 2011b, *Model Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau*, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru.

Almasdi Syahza., 2011c, *Model Pengembangan Kredit Usaha Bagi Masyarakat Wilayah Pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau*, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru.

Almasdi Syahza., 2012. *Pemberdayaan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit*, Penelitian MP3EI Tahun I, DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Almasdi Syahza., 2013. *Pemberdayaan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit*, Penelitian MP3EI Tahun II, DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Almasdi Syahza., 2014. *Pemberdayaan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit*, Penelitian MP3EI Tahun III, DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Almasdi Syahza., 2015. Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Melalui Penataan Kelembagaan dan Industri Karet Alam di Propinsi Riau, Penelitian MP3EI Tahun I, DRPM Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti, Jakarta.

Almasdi Syahza., 2016. Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Melalui Penataan Kelembagaan dan Industri Karet Alam di Propinsi Riau, Penelitian MP3EI Tahun II, DRPM Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti, Jakarta.

Almasdi Syahza., 2017. Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Melalui Penataan Kelembagaan dan Industri Karet Alam di Propinsi Riau, Penelitian MP3EI Tahun III, DRPM Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti, Jakarta.

Almasdi Syahza dan Brilliant., 2016. Acceleration Strategies for Rural Economic Development Through the Development of Natural Rubber Industry in Riau Province, The theme of the ICST 2016 is *Science and technology for improving quality of life*, International Conference on Science and Technology 2016, Pekanbaru 9-10 November 2016

Almasdi Syahza, Djaimi Bakce, dan Nur Hamlim., 2015. Makalah disajikan pada Seminar Nasional dan Rapat Tahunan Dekan Bidang Ilmu Pertanian BKS PTN Barat dengan tema: *Pembangunan pertanian berkelanjutan berbasis kedaulatan pangan dan energi untuk meningkatan perekonomian nasional* yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya pada tanggal 20-21 Agustus 2015 di Palangkaraya.

Andrinof A. Chaniago., 2001. *Gagalnya Pembangunan,* LP3ES, Jakarta.

Bambang Yudoyono., 2001. *Otonomi Daerah,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Bungaran Saragih., 2001a. *Suara Dari Bogor: Membangun Sistem Agribisnis*, Yayasan USESE, Bogor.

Bungaran Saragih., 2001b. *Aggribisnis: Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian,* Yayasan USESE, Bogor.

Bustanul Arifin., 2001. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia,* Erlangga, Jakarta.

Departemen Pertanian., 2001, *Program Pembangunan Pertanian 2001-2004*, Deptan, Jakarta.

Didik J. Rachbini., 2002, *Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Djaimi Bakce, dan Andri Yama Putra., 2014a. Dampak kebijakan ekonomi terhadap keputusan ekonomi rumahtangga petani karet di Kabupaten Kuantan Singigi. Makalah disajikan pada Seminar Nasional dan Rapat Tahunan Dekan BKS-PTN Wilayah Barat dengan tema: *Penguatan pembangunan pertanian berkelanjutan untuk mencapai kemandirian pangan dan mengembangkan energi berbasis pertanian* yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada tanggal 19-21 Agustus 2014 di Bandar Lampung.

Djaimi Bakce., 2014b. Supply chain management industri karet di Indonesia. Makalah disajikan pada Seminar Nasional Ekonomi Pertanian dengan tema: *Mensiasati ancaman degradasi industri perkebunan di Provinsi Riau* yang diiselenggarakan oleh UIN SUSKA Riau bekerjasama dengan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Komisariat Daerah Pekanbaru pada tanggal 1 November 2014 di Pekanbaru.

Djaimi Bakce., 2015. Pertanian dan masyarakat ekonomi ASEAN. Makalah disajikan pada Seminar Ekonomi Petanian dengan tema: *Tantangan pertanian dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN* yang

diselenggarakan oleh Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Komisariat Daerah Pekanbaru bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau pada tanggal 7 Mei 2015 di Pekanbaru.

Faisal Basri., 2002, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia,* Erlangga, Jakarta.

Fields, Gary S., 1990, Income Distribution and Economic Growth, dalam Gustav Ranis dan T. Paul Schultz, *The State of Development Economics: Progress and Perspectives*, Basil Blackwell, Oxford.

Friedman. John and Mike Douglass., 1976, *Pengembangan Agropolitan Menuju Siasat Baru Perencanaan Regional di Asia*, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.

Ginandjar Kartasasmita., 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat,* CIDES, Jakarta.

Gumbira-Sa'id, E. dan L. Febriyanti. 2005. Prospek dan Tantangan Agribisnis Indonesia. *Economic Review Journal* 200. (On-line). http://209.85.135.104/search?q =cache:3-EDCELftAoJ:www.bni.co.id/, diakses pada 11 Mei 2010.

Hananto Sigit., 1996, Kemiskinan dan Ketimpangan Pembagian Pendapatan dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, dalam *Seminar Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia,* 13 Agustus 1996, CSIS dan Bank Dunia, Jakarta.

Haryono Suyono. 2007. *Gerakan Nasional Pemberdayaan Masyarakat*. (On-line). http://www.hupelita.com/baca. php?id=27511, diakses pada 31 Juli 2007.

Hill. Hall., 2002, *Ekonomi Indonesia*, Murai Kencana, Jakarta.

Hirschman. O. Albert., 1958, *The Strategi of Economic Development*, Yale University.

Iwan Jaya Aziz., 1993, *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia,* FE-UI, Jakarta.

Jhingan. M.L,, 2006. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Rajawali Pers, Jakarta.*

Lincolin Arsyad., 1999., *Ekonomi Pembangunan,* Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta.

Mellor, John W., 1976, The New Economics of Growth: A Strategy for India and the Developing Word, dalam Sadono Sukirno, 1985, *Ekonomi Pembangunan*, FE-UI, Jakarta.

Mellor, John W., 1984, Agriculture Development and Inter-Sectoral Transfer of Resources, dalam C.K Eicher dan J.M. Staatz, 1984, *Agriculture Development in the Third World*, John Hopkin University Press, Baltimore.

Muhibbullah Azfa Manik. 2005. *Strategi Pemberdayaan Industri Kecil Berbasis Agroindustri di Pedesaan*. (On-line). http://www.bung-hatta.info/content.php?article.91. Diakses 31 Juli 2012.

Muhammad Basri, 2007., *Desa dan Kemiskinannya,* http://www.kompas.com/kompas- , diakses 31 Juli 2011.

Mubyarto., 1992. *Riau Dalam Kancah Perubahan Ekonomi Global*, P3PK-UGM, Yogyakarta.

Mubyarto., 1993. *Riau Menatap Masa Depan*, Aditya Media, Yogyakarta.

Mudrajad Kuncoro., 2000. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Almasdi Syahza—., 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Reijntjes. Coen, Bertus Haverkort, Waters-Bayer., 1999. *Pertanian Masa Depan,* Terjemahan oleh Y. Sukoco. SS, Kanisius, Yogyakarta.

Roepke, Jochen., 2000. *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Philipps University Marburg Germany, Alih bahasa oleh Sri Djatmika S. Arifin, Salemba Empat, Jakarta.

Pemberdayaan Masyarakat, 2009, *Pembangunan Perkebunan Untuk Ekonomi Lokal*, http://www.pemberdayaan.com/ pembangunan/, diakses 6 Desember 2011

Riau Bisnis, 2009, *Pajak Ekspor CPO Jadi 2,5%, Pengusaha diminta jangan rugikan petani,* http://www.riaubisnis.com/ diakses 13 Maret 2011.

Riau Terkini, 2006, *Ke Depan Industri Sawit Menuju Industri Hilir*, http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=9077. diakses 2 Maret 2011.

Rusli Zainal, 2011, *Performa Ekonomi Riau Relatif Mengkilap* http://riaubisnis.com/index.php/business-mainmenu-29, diakses 7 Desember 2011

Sarwono Kusunaatmadja., 1994, *Kemitraan Nasional Dalam Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Kantor Meteri Negara dan Lingkungan Hidup, Jakarata.

Setiadi Wijaya, N.H., 2002, Membangun Koperasi dari Mimpi Buruknya, dalam *Usahawan Indonesia*, N0. 07/TH. XXXI Juli 2002, Lembaga Manajemen FE UI, Jakarta,

Siti Sutriah Nurzaman., 2002, *Perencanaan Wilayah di Indonesia pada Masa Sekitar Krisis*, ITB, Bandung.

Soemitro Djojohadikusumo., 1991. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Buku I Dasar Teori dalam Ekonomi Umum, Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta.

Soemitro Djojohadikusumo., 1992. Perspektif Perekonomian Nasional Dalam PJPT II, *Dinamika Pemikiran Tentang Pembangunan Pertanian*, dalam Prosiding Seminar Nasional Perhepi, Jakarta.

Soemitro Djojohadikusumo., 1994. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, LP3ES*, Jakarta.

Tjahya Supriatna., 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan,* Rineka Cipta, Jakarta.

Todaro, Michael P., 2000. *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga,* Terjemahan oleh Haris Munandar, Edisi ke tujuh, Erlangga, Jakarta.

Tulus T.H. Tambunan., 2001a. *Transformasi Ekonomi di Indonesia Teori dan Penemuan Empiris,* Salemba Empat, Jakarta.

Tulus T.H. Tambunan., 2001b. *Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wiwik Suhartiningsih., 2003, Membangun Agroindustri Berbasis Kelapa Sawit, dalam *Usahawan Indonesia* No 02/TH.XXXII Februari 2003, Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta.

Wordpress, 2009, *Koperasi Sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat*, http://tharra.wordpress.com, diakses 7 Desember 2011

Yuswar Zainal Basri., 2003, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, dalam *Usahawan Indonesia* No 03/TH.XXXII Maret 2003, Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta.

Tentang Penulis

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP, lahir di Tanjung Alam tanggal 22 Agustus 1960. Setelah tamat dari SMA Negeri 1 Bukit Tinggi tahun 1981, melanjutkan pendidikan pada Fakultas Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangungan Universitas Bung Hatta Padang dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Tahun 1986. Dikurnia tiga orang putra dan putri yaitu: Brilliant A.Smit; Honest H. A.Smit; dan Putri Fadhillah A,Smit.

Tahun 1993-1995 melanjutkan pendidikannya ke Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (PPS Unpad) pada bidang studi Ekonomi Pembangunan Pertanian, memperoleh gelar Magister Pertanian (MP). Tahun 2001-2004, kembali melanjutkan studi di PPS Unpad bidang bidang Ilmu Pertanian dengan kosentrasi kajian utama Ekonomi Pedesaan, dan berhasil memperoleh gelar Doktor.

Sejak tahun 1997 telah aktif melakukan penelitian, mengikuti seminar, dan menulis artikel pada jurnal penelitian. Selama periode 1997-2017, telah melakukan 74 buah kegiatan penelitian. Telah menghasilkan tulisan sebanyak 29 buah yang dimuat di jurnal Internasional dan terakreditasi, dan 21 buah yang dimuat pada prosiding dan jurnal non terakreditasi. Berkat keyakinannya sebagai peneliti, pada tahun 2000 terpilih sebagai peneliti terbaik universitas Riau, tahun 2001 terpilih sebagai peneliti terbaik Dosen Muda oleh DP2M Dikti Jakarta. Tahun 2002 kembali memperoleh peneliti terbaik bidang Sosial yang diadakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Riau. Prestasi kerja diperolehnya lagi pada tahun 2005, yaitu dia terpilih sebagai dosen berprestasi di tingkat Universitas Riau.

Pada tahun 2007 oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Riau menetapkan Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP sebagai dosen bermutu di bidang pembelajaran tingkat universitas. Pada tahun 2008 kembali terpilih sebagai peneliti terbaik melalui penelitian Fundamental oleh DP2M Dikti Jakarta dan penulis artikel nasional terbaik tingkat Universitas Riau. Tahun 2012 terpilih sebagai dosen berprestasi di tingkat Universitas Riau, juga pada tahun yang sama terpilih sebagai peneliti terbaik di Universitas Riau. Penulis juga penerima dana Hibah Penelitian DRPM (dulu DP2M) Dikti yakni Penelitian Fundamental (2007-2008), penelitian Strategis Nasional (2009), Penelitian Hibah Kompetensi (2009-2011), Penelitian MP3EI (2012-2014; 2015-2017).

Tepatnya tanggal 14 Januari 2005, diberikan kepercayaan oleh Rektor Universitas Riau menjabat Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Riau sampai tahun 2006. Sejak Mei 2006 menjadi Ketua Badan Penjaminan Mutu di FKIP Universitas Riau. Kepadanya juga diberikan kepercayaan sebagai Kepala Badan Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (BPKPEM) Universitas Riau. Pada Januari 2015 diangkat menjadi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau.

Dengan penuh keyakinan melaksanakan tridarma perguruan tinggi, aktif dalam proses pembelajaran, tekun dalam penelitian, rajin mengikuti seminar dan melaksanakan pengabdian pada masyarakat, akhirnya Menteri Pendidikan Nasional sejak 1 Mei 2005 memberikan jabatan akademik tertinggi yakni Guru Besar Tetap (Profesor) dalam bidang ilmu Ekonomi Pembangunan Pedesaan pada Universitas Riau.

Dalam seharian aktif mengajar di program S1 dan Pascasarjana Universitas Riau. Periode tahun 2007-2013 menjadi anggota Dewan Riset Daerah Propinsi Riau, sebagai asesor sertifikasi guru dan dosen di Universitas Riau. Sering diundang sebagai reviewer penelitian hibah baik sentralisasi maupun desentralisasi.

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP telah memiliki 3 buah Hak Cipta dari hasil karyanya, antara lain:

1. Buku EKONOMI SUMBERDAYA MANUSIA DAN ALAM dalam Daftar Umum Ciptaan nomor C00201502607 tanggal 31 Agustus 2015 dengan nomor pencatatan 074980.
2. Buku METODOLOGI PENELITIAN dalam Daftar Umum Ciptaan nomor C00201502608 tanggal 31 Agustus 2015 dengan nomor pencatatan 075572
3. Buku EKONOMI PEMBANGUNAN, TEORI DAN KAJIAN EMPIRIK PEMBANGUNAN PEDESAAN dalam Daftar Umum Ciptaan nomor C00201502609 tanggal 31 Agustus 2015 dengan nomor pencatatan 075640

Email: almasdi.syahza@lecturer.unri.ac.id: syahza.almasdi@gmail.com
Website: http://almasdi.staff.unri.ac.id

Penerbit
Universitas Riau Press

ISBN 978-979-792-299-3
9 789797 922993